



# Kebijakan dan Kerja Sama Internasional

di Era Kontemporer: Konsep dan Studi Kasus

Nur Luthfi Hidayatullah  
Rif'ati Khoridatin Nabila | Dewinta Zahwa Nabila  
Arfiansyah Putra Pradana Hadi | Rizka Indah Setyohadi  
Dwi Indah Puspitasari | Rizki Rahmadini Nurika  
Wingga Dwi Setia | A'yunilah Dea Ananda Hidayat  
Ahmad Syakir | Aura Putri Oktasafea | Dhanisa Putri Maharani

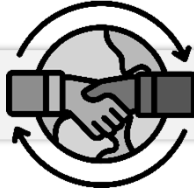
Editor:  
M. ROEHMAN ZAINUR RIEDHO  
AMANCA PAMALINA LAPASA



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 113  
KETENTUAN PIDANA  
SANKSI PELANGGARAN**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500. 000. 000, 00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1. 000. 000. 000, 00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4. 000. 000. 000, 00 (empat miliar rupiah).



# **KEBIJAKAN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL**

**DI ERA KONTEMPORER: KONSEP DAN STUDI KASUS**

**Nur Luthfi Hidayatullah**

**Rif'ati Khoridatin Nabila | Dewinta Zahwa Nabila**

**Arfiansyah Putra Pradana Hadi | Rizka Indah Setyohadi**

**Dwi indah Puspitasari | Rizki Rahmadini Nurika**

**Wingga Dwi Setia | A'yunilah Dea Ananda Hidayat**

**Ahmad Syakir | Aura Putri Oktasafea**

**Dhanisa Putri Maharani**

**Editor:**

**M. Roehman Zainur Riedho**

**Amanca Pamalina Lapasa**



# **KEBIJAKAN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DI ERA KONTEMPORER: KONSEP DAN STUDI KASUS**

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia  
oleh Penerbit Global Aksara Pers*

**ISBN : 62-403-4397-573**

xii+ 322 hal. ; Ukuran A5 (14, 8 x 21 cm)

Cetakan Pertama, Mei 2026

**Copyright © 2026 Global Aksara Pers**

- Penulis : Nur Luthfi Hidayatullah, Rif'ati Khoridatin Nabila  
Dewinta Zahwa Nabila, Arfiansyah Putra Pradana  
Hadi, Rizka Indah Setyohadi, Dwi indah  
Puspitasari, Rizki Rahmadini Nurika, Wingga Dwi  
Setia, A'yunilah Dea Ananda Hidayat, Ahmad  
Syakir, Aura Putri Oktasafea, Dhanisa Putri  
Maharani
- Penyunting : M. Roehman Zainur Riedho  
Amanca Pamalina Lapasa
- Desain cover : Tito Nanda Ramadhan
- Layouter : Mutia Rizki

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penulis  
dan penerbit.

**Diterbitkan oleh:**



**CV. Global Aksara Pers**

**Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,**

**No. 282/JTI/2021**

Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya

+628977416123/+628573269334

globalaksarapers.com

# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul "*Kebijakan dan Kerja Sama Internasional di Era Kontemporer: Konsep dan Studi Kasus*" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan kontribusi akademik yang substansial dari Program Studi Hubungan Internasional FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya dalam memperkaya khazanah keilmuan pada bidang kajian hubungan internasional.

Dalam konteks transformasi global yang semakin kompleks dan dinamis, pemahaman mendalam terhadap kebijakan dan kerja sama internasional menjadi hal yang penting untuk dilakukan yang tidak dapat diabaikan. Era kontemporer ditandai dengan fenomena interdependensi yang semakin menguat, penyebaran sangat cepat aktor-aktor non-state, serta munculnya tantangan-tantangan transnasional yang memerlukan respons kolektif dan koordinatif dari komunitas internasional. Kompleksitas ini menuntut pendekatan analitis yang komprehensif dan multidimensional dalam memahami dinamika politik internasional.

Buku ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan literatur akademik yang mampu menjembatani kesenjangan

antara teori dan praktik dalam studi hubungan internasional. Karya tulis ini berupaya memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan pemahaman teoretis sekaligus aplikatif mengenai fenomena kebijakan dan kerja sama internasional di era kontemporer. Pendekatan yang diambil dalam buku ini mencerminkan komitmen terhadap perlunya menyusun tulisan yang dibutuhkan keilmuan hubungan internasional. Analisis yang disajikan tidak hanya pada dimensi politik dan diplomatik, tetapi juga mengakomodasi aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan yang inheren dalam dinamika hubungan internasional kontemporer.

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen akademik oleh civitas akademika Program Studi Hubungan Internasional FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya dalam menyusun karya ilmiah ini. Upaya kolaboratif yang melibatkan dosen dan mahasiswa dalam proses penulisan buku ini mencerminkan semangat partisipatif seluruh sivitas akademik Prodi Hubungan Internasional FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya yang sejalan dengan visi institusional UIN Sunan Ampel Surabaya untuk mengembangkan tradisi akademik yang berkualitas dan berkelanjutan.

Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa yang sedang mendalami studi hubungan internasional, akademisi yang mengkaji fenomena politik global, hingga praktisi yang berkecimpung dalam bidang diplomasi dan kebijakan luar negeri. Lebih dari itu, karya ini dapat menjadi referensi yang

relevan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi dan pendekatan yang tepat dalam menghadapi tantangan-tantangan global kontemporer.

Kami menyadari bahwa tidak ada karya akademik yang sempurna, dan buku ini tentu memiliki keterbatasan-keterbatasan yang perlu terus disempurnakan melalui diskusi akademik yang konstruktif dan penelitian lanjutan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan untuk pengembangan karya-karya akademik selanjutnya.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi hubungan internasional, serta dapat menjadi bagian dari upaya kolektif dalam membangun pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika politik global di era kontemporer.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, M.Si**  
**Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan**  
**FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I KEBIJAKAN LUAR NEGERI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL</b> .....	<b>13</b>
A. Kebijakan Luar Negeri dalam Perspektif Hubungan Internasional.....	13
B. Analisis Politik Luar Negeri.....	15
C. Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri.....	17
D. Perubahan Kebijakan Luar Negeri .....	20
E. Isu-isu Kebijakan Luar Negeri.....	21
F. Kesimpulan.....	24
<b>BAB II KRISIS KEAMANAN DI MEKSIKO: TANTANGAN UNODC DALAM MENGHADAPI MASALAH KARTEL NARKOBA TAHUN 2020-2024</b> .....	<b>27</b>
A. Pendahuluan .....	27
B. Pembahasan .....	38
C. Kesimpulan.....	63
<b>BAB III PERAN UNI EROPA DALAM <i>THE GREAT GREEN WALL INITIATIVE</i> DI AFRIKA TAHUN 2021-2025</b> .....	<b>73</b>
A. Latar Belakang <i>The Great Green Wall Initiative</i> .....	74
B. Program Investasi <i>Global Gateway</i> Uni Eropa .....	77

C. Global Gateway Investment Package Uni Eropa – Afrika .....	80
D. Kesimpulan.....	84
<b>BAB IV ENERGY SECURITY: INISIATIF PENGHAPUSAN BATUBARA, SINGAPURA DORONG AKSELERASI ENERGI HIJAU .....</b>	<b>87</b>
A. Pembahasan .....	89
B. Kondisi Singapura dan Target Nasional.....	92
C. Urgensi Reformasi Peran Pemerintah terhadap Kebijakan Keamanan Energi .....	94
D. Potensi MAS (Monetary Authority of Singapore) Dorong Dekarbonisasi .....	97
E. Rencana Akselerasi Singapura Dorong Energi Hijau: <i>Konsep Keamanan Energi</i> .....	98
F. Penutup.....	100
<b>BAB V STRATEGI GASTRODIPLOMASI INDONESIA DALAM MEMPROMOSIKAN KOPI KHAS INDONESIA DI MESIR TAHUN 2021-2023.....</b>	<b>105</b>
A. Pendahuluan .....	105
B. Konsep.....	114
C. Pembahasan.....	116
D. Kesimpulan.....	124

<b>BAB VI KOLABORASI BUDAYA ANTARA KOREA SELATAN DAN INDONESIA MELALUI PAMERAN BUSANA BATIK-JINJU SILK DI JAKARTA TAHUN 2023.....</b>	<b>131</b>
A. Pendahuluan .....	131
B. Sejarah Batik dan Jinju Silk Sebagai Warisan Budaya.....	137
C. Kolaborasi Budaya Indonesia Dan Korea Selatan ....	140
D. Dampak Pameran Busana Batik-Jinjusilk Bagi Indonesia Dan Korea Selatan.....	144
E. Kesimpulan.....	148
<b>BAB VII KERJA SAMA INTERNASIONAL .....</b>	<b>153</b>
A. Definisi .....	154
B. Kriteria.....	156
C. Mekanisme Kerja Sama Internasional .....	157
D. Efektivitas Kerja Sama Internasional .....	163
<b>BAB VIII TERBENTUKNYA FORMASI QUAD AKIBAT PENGARUH CHINA DI INDO-PASIFIK.....</b>	<b>171</b>
A. Dominasi Kekuatan China di Indo Pasifik.....	173
B. Formasi terbentuknya QUAD karena pengaruh China di Indo Pasifik.....	175
C. Kesimpulan.....	178

<b>BAB IX KONTRIBUSI <i>CENTRAL COMMITTEE FOR DRUG ABUSE CONTROL (CCDAC)</i> MYANMAR DALAM KASUS PENYELUNDUPAN SABU BENTUK TEH CHINA TAHUN 2021-2023 DI INDONESIA.....</b>	<b>183</b>
A. Produksi Opium di Myanmar .....	184
B. Central Committee for Drug Abuse Control (CCDAC) .....	192
C. Kasus Penyelundupan Sabu Bentuk Teh China di Indonesia.....	196
D. Kontribusi CCDAC Myanmar dalam Kasus Penyelundupan Sabu Bentuk Teh China Tahun 2021-2023 di Indonesia .....	200
E. Kesimpulan.....	206
<b>BAB X INDONESIA DALAM KERJASAMA SELATAN-SELATAN DI ERA KONTEMPORER.....</b>	<b>211</b>
A. Pendahuluan.....	211
B. Hasil dan Pembahasan.....	217
<b>BAB XI INDONESIA DALAM GEOPOLITIK GLOBAL: TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA BRICS DAN OECD</b>	<b>235</b>
A. Posisi Indonesia dalam Geopolitik Global .....	235
B. Hubungan Indonesia dengan Negara-negara BRICS dan OECD .....	240
C. Tantangan yang Dihadapi Indonesia dalam Pusaran Geopolitik.....	249
D. Peluang bagi Indonesia dalam Pusaran Geopolitik ...	254

E. Peran Indonesia dalam BRICS dan OECD .....	261
F. Kesimpulan.....	265
<b>KERJA SAMA INTERNASIONAL INDONESIA DAN ASEAN DALAM MENGATASI <i>TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION</i>: STUDI KASUS KEBAKARAN HUTAN DI RIAU 1997 .....</b>	<b>279</b>
A. Permasalahan Kabut Asap Lintas Batas .....	279
B. Dinamika Kerja Sama Internasional dalam Mengatasi <i>Transboundary Haze Pollution</i> karena Kebakaran Hutan di Indonesia .....	286
C. Kesimpulan.....	310
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>313</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# **BAB I**

## **Kebijakan Luar Negeri dalam Hubungan Internasional**

---

Mengapa perlu mengkaji kebijakan luar negeri dalam hubungan internasional? Akademisi maupun praktisi perlu mempelajari kebijakan luar negeri untuk memahami bagaimana pemimpin negara membuat keputusan, interaksi antar negara dalam hubungan internasional, serta bagaimana negara merespon dinamika isu dan peristiwa yang terjadi di sistem internasional. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri meliputi seluruh kebijakan negara dalam interaksinya dengan negara-negara lain di luar negeri. Bab ini membahas tentang kebijakan luar negeri dalam perspektif Hubungan Internasional, analisis politik luar negeri, proses pembuatan kebijakan luar negeri, perubahan kebijakan luar negeri, serta isu-isu kebijakan luar negeri.

### **A. Kebijakan Luar Negeri dalam Perspektif Hubungan Internasional**

Dalam studi hubungan internasional, terdapat berbagai perspektif dalam memandang analisis kebijakan luar negeri. Pertama, perspektif Realisme menganggap negara sebagai aktor utama hubungan internasional (*statism*) di tengah sistem internasional yang tidak memiliki aturan absolut

(*anarchy*). Sehingga, negara mengeluarkan kebijakan luar negeri dengan tujuan mencapai kepentingan nasional, terutama untuk menjaga keberlangsungan dan eksistensi negara (*survival*) dan memenuhi kebutuhannya tanpa bergantung ke negara lain (*self-help*).<sup>1</sup> Konsekuensinya, negara dapat mendeklarasikan perang sebagai kebijakan luar negeri terhadap negara lain jika diplomasi tidak berhasil, dalam rangka menjaga keberlangsungan negara dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kedua, perspektif Liberalisme memandang bahwa negara perlu bekerja sama, dalam rangka mencapai kepentingan bersama, sehingga terhindar dari memerangi satu sama lain. Kerja sama jangka panjang dapat difasilitasi dengan mendirikan institusi, seperti organisasi kawasan maupun internasional. Organisasi internasional dapat berfungsi sebagai instrumen pembuatan aturan internasional, arena bagi negara-negara anggotanya untuk berdiplomasi, maupun aktor supra negara dalam hubungan internasional.<sup>2</sup> Sehingga, negara-negara anggota organisasi internasional dapat mengeluarkan kebijakan luar negeri dalam forum-forum multilateral untuk mencapai kepentingan nasional maupun kepentingan bersama negara-negara anggota lainnya.

Ketiga, perspektif Konstruktivisme memandang bahwa negara-negara dapat bersepakat dalam membuat kebijakan

---

<sup>1</sup> Baylis, John, Steve Smith, and Patricia Owens. *Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. 8th ed. S.L.: Oxford University Press, 2023.

<sup>2</sup> Archer, Clive. *International Organizations*. 3rd ed. London: Routledge, 2001.

luar negeri untuk merespon dinamika internasional. Hal ini memungkinkan terjadi, karena didasari nilai dan pemahaman yang sama terhadap isu yang menjadi perhatian bersama. Sehingga, tidak jarang negara-negara membuat aturan bersama dalam rangka menjembatani perbedaan kepentingan dalam forum-forum multilateral.

## **B. Analisis Politik Luar Negeri**

Menurut Breuning, kebijakan luar negeri didasari rasionalitas. Sehingga, pilihan dan cara pembuatan kebijakan luar negeri harus logis dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>3</sup> Keputusan yang baik adalah yang berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, bukan justru menghasilkan dampak buruk bagi kepentingan nasional. Ada kalanya negara perlu membuat kebijakan luar negeri agar menarik perhatian masyarakat negara lain. Kebijakan luar negeri ini disebut dengan diplomasi publik, yang merupakan upaya negara dalam mempromosikan citra baiknya kepada masyarakat negara lain, media, maupun instansi lain di luar negeri. Ada kalanya masyarakat suatu negara membantu pemerintah dalam mempromosikan citra positif negaranya di luar negeri, sehingga disebut *citizen diplomacy*.

Dalam menganalisis kebijakan luar negeri, terdapat tiga tingkatan (*levels of analysis*), yaitu individu, negara dan sistem internasional<sup>4</sup>. Pertama, tingkatan individu menganalisis keputusan yang dipilih oleh pembuat kebijakan,

---

<sup>3</sup> Breuning, Marijke. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York, N.Y.: Palgrave Macmillan, 2016.

<sup>4</sup> *Ibid.*

misalnya Presiden, Perdana Menteri, atau Menteri Luar Negeri dalam merespon permasalahan internasional. Terdapat juga *framing*, yaitu pembuat keputusan cenderung menilai resiko kebijakan berdasarkan bagaimana mereka menilai situasi yang dihadapi. Kedua, tingkatan negara menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara berdasarkan tingkah laku politik luar negeri negara tersebut. Tingkah laku politik luar negeri negara cenderung konsisten, walaupun terjadi pergantian kepemimpinan, selama sistem atau bentuk pemerintahan tidak berubah. Sebagai contoh, Indonesia memiliki tingkah laku politik luar negeri bebas dan aktif, sedangkan negara-negara Skandinavia memiliki tingkah laku politik luar negeri netral. Ketiga, tingkatan sistem internasional menganalisis kebijakan luar negeri ditentukan oleh luaran (*outcome*) yang dihasilkan dari pertemuan internasional. Sebagai contoh, luaran dapat berupa perjanjian internasional yang ditandatangani pada konferensi tingkat tinggi, pertemuan tingkat menteri, maupun pertemuan bilateral.

Dalam praktiknya, semua kerja sama dan hubungan antar negara tergantung dari sikap hubungan antar aktor individu yang mewakili negara tersebut<sup>5</sup>. Dalam menjalin hubungan dengan delegasi negara lain, tingkah laku seorang delegasi pemerintah dalam pertemuan internasional dapat disebut sebagai aktor rasional, sehingga setara dengan kebijakan luar negeri negara. Implikasinya, seorang pembuat kebijakan perlu berperan di dua ranah publik, yaitu merespon

---

<sup>5</sup> Hudson, Valerie M. *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 2007.

permasalahan di dalam negeri dan mewakili negara dalam urusan internasional.

Walaupun demikian, seorang pembuat kebijakan membuat keputusan atas pertimbangan para ahli, baik itu menteri maupun penasihat. Terkadang pembuatan kebijakan membutuhkan proses musyawarah, sehingga dinamika kelompok yang bermusyawarah dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Tidak jarang pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh preferensi, latar belakang, dan isu yang menjadi prioritas oleh para pembuat kebijakan. Terlepas dari dinamika pertemuan bilateral maupun multilateral, kelompok pembuat kebijakan yang menjadi delegasi negara tidak boleh membuat keputusan yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

### **C. Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri**

Aktor dan kondisi politik dalam negeri mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri. Proses ini diawali dari kondisi lingkungan internasional (*international environment*) yang menjadi pertimbangan bagi pihak yang mempengaruhi kebijakan (*policy influencers*) dan pembuat kebijakan (*decision makers*), sehingga menentukan interaksi di area isu tertentu (*issue-area interaction*), dan menghasilkan kebijakan luar negeri (*foreign policy*).<sup>6</sup> Pihak yang mempengaruhi kebijakan (*policy influencers*) adalah aktor-aktor politik dalam negeri yang berusaha

---

<sup>6</sup> Coplin, William D. *Introduction to International Politics: A Theoretical Overview*. Englewood Cliffs, Nj: Prentice-Hall, 1980.

mempengaruhi kebijakan luar negeri. Hubungan antara pihak yang mempengaruhi kebijakan dengan pembuat kebijakan disebut dengan sistem pengaruh kebijakan (*policy influence system*).

Terdapat hubungan yang rumit dalam sistem pengaruh kebijakan. Di satu sisi, pembuat kebijakan membutuhkan pihak yang mempengaruhi kebijakan untuk mendukung keberlangsungan kekuasaan politiknya, baik dari segi militer, ekonomi, maupun elektoral. Di sisi lain, pihak yang mempengaruhi kebijakan mengajukan permintaan kepada pembuat kebijakan, misalnya perbaikan fasilitas publik, dalam konteks kebijakan dalam negeri, maupun penghormatan dari negara lain, dalam konteks kebijakan luar negeri. Pembuat kebijakan dapat meyakinkan pihak yang mempengaruhi kebijakan, bahwa tidak semua permintaan perlu dipenuhi. Walaupun demikian, terdapat permintaan-permintaan pokok yang harus dipenuhi pembuat kebijakan untuk memastikan keberlangsungan dukungan dari pihak yang mempengaruhi kebijakan.

Menurut Gabriel Almond, terdapat empat macam pihak yang mempengaruhi kebijakan, yaitu birokratik, partisan, kelompok kepentingan, dan pemberi pengaruh massa. Pertama, badan birokratik adalah individu maupun organisasi dalam badan eksekutif pemerintah yang membantu pembuat kebijakan dalam menentukan keputusan. Kedua, pihak partisan adalah partai politik yang

berusaha mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri sebelum kebijakan tersebut diputuskan. Ketiga, kelompok kepentingan (*interest*) adalah kelompok individu yang tidak mampu membentuk partai politik, tetapi mampu memobilisasi sumber daya, terutama ekonomi, untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang mempengaruhi kebijakan dan pembuat kebijakan, agar mendapatkan keuntungan bersama. Keempat, pemberi pengaruh massa adalah opini publik dari masyarakat yang berusaha mempengaruhi proses pembuatan kebijakan melalui media.<sup>7</sup>

Hubungan antara pihak yang mempengaruhi kebijakan dengan pembuat kebijakan dapat dilihat dari sumber daya dan karakteristik pihak yang mempengaruhi kebijakan dalam memandang lingkungan internasional, dan isu-isu apa yang sedang dihadapi pembuat kebijakan. Di satu sisi, badan birokratis dan kelompok kepentingan memiliki pandangan yang terbatas terhadap lingkungan internasional, karena lebih berpengalaman di pemerintahan domestik. Di sisi lain, pihak partisan memiliki pandangan yang lebih luas terhadap lingkungan internasional, dalam konteks memberikan dukungan atau kritik kepada kebijakan pemerintah negara. Selain itu, pemberi pengaruh massa biasanya sudah memiliki posisi terhadap isu-isu tertentu yang dianggap penting dalam lingkungan internasional, walaupun tidak memiliki pemahaman yang mendalam terhadap urusan luar negeri. Sedangkan peran pembuat kebijakan adalah membangun konsensus untuk mendukung kebijakan luar negeri yang

---

<sup>7</sup> Ibid.

akan diterapkan, sekaligus memenuhi tuntutan berbagai pihak yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri.<sup>8</sup>

#### **D. Perubahan Kebijakan Luar Negeri**

Perubahan kebijakan luar negeri dapat didefinisikan melalui empat tingkatan perubahan. Pertama, perubahan penyesuaian (*adjustment changes*) dari segi upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan yang sama melalui metode yang sama. Kedua, perubahan program (*program changes*) dalam tindakan yang dilakukan, atau sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan tujuan kebijakan yang sama. Ketiga, perubahan masalah atau tujuan (*problem or goal changes*) dari kebijakan luar negeri tersebut. Keempat, perubahan orientasi internasional (*international orientation changes*) pada saat negara memutuskan untuk mengubah peran dan aktivitas internasionalnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan pendekatan pembelajaran (*learning approaches*) Hermann, ada empat faktor yang berkontribusi terhadap perubahan kebijakan luar negeri. Pertama, dipicu oleh pemimpin pemerintahan (*leader driven*). Pemimpin negara atau pemerintahan perlu meyakinkan kabinet bahwa kebijakan luar negeri perlu diubah, dengan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, karena ada tujuan yang lebih

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Hermann, Charles F. "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy", *International Studies Quarterly*. Vol. 34, No. 1 (1990): 3-21.

baik. Kedua, advokasi birokratik (*bureaucratic advocacy*) terjadi saat bagian dari institusi pemerintah menginisiasi atau mendukung perubahan kebijakan luar negeri negara. Ketiga, restrukturisasi domestik (*domestic restructuring*), yaitu kelompok dari masyarakat yang mampu mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri negara. Keempat, guncangan eksternal (*external shocks*) adalah dinamika internasional yang mempengaruhi negara, sehingga pemerintah negara harus memutuskan posisinya dalam hubungan internasional, dengan cara meresponnya melalui kebijakan luar negeri.<sup>10</sup>

## E. Isu-isu Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri dapat berbeda isunya, tergantung dari permasalahan yang dihadapi negara untuk direspon, maupun kepentingan nasional negara yang ingin dicapai. Dalam hubungan internasional, terdapat berbagai area kebijakan luar negeri, diantaranya untuk meningkatkan kapasitas negara, dari segi keamanan, ekonomi, lingkungan, pembangunan, hak asasi manusia, pertumbuhan penduduk, migrasi, keamanan pangan dan energi, serta bantuan luar negeri. Selain membahas analisis kebijakan luar negeri secara teoritis, buku ini juga akan membahas berbagai studi kasus kebijakan luar negeri di bidang keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya.

---

<sup>10</sup> Ibid.

Pertama, kebijakan luar negeri di isu keamanan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu keamanan tradisional dan non-tradisional. Keamanan tradisional terkait dengan pengamanan kedaulatan negara, dan keamanan militer. Sedangkan isu keamanan non-tradisional terkait keamanan manusiawi (*human security*), yaitu bagaimana kebijakan yang diambil oleh negara dapat menjamin keamanan manusia, baik keamanan pribadi maupun ekonomi. Ada kalanya kebijakan keamanan non-tradisional yang diambil oleh negara bersinggungan dengan kebijakan domestik negara lain, dan berkonsekuensi membatasi hak asasi warga negara lain, untuk kepentingan masyarakat negaranya.

Buku ini membahas studi kasus pembuatan kebijakan luar negeri di isu keamanan non-tradisional. Bab II dalam buku membahas krisis keamanan di Meksiko, yaitu tantangan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam menghadapi masalah kartel narkoba, oleh Rif'ati Khoridatin Nabila. Di tengah tantangan perdagangan narkoba yang dilakukan oleh kartel narkoba, UNODC berinisiatif membantu Pemerintah Meksiko dengan melakukan pelatihan staf pemerintah untuk meningkatkan kapasitas, serta bekerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat.

Kedua, kebijakan luar negeri di bidang ekonomi penting dalam mencapai kepentingan nasional, maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, diplomasi ekonomi dalam menarik minat investor asing

untuk menanamkan modal di negara kita di sektor energi terbarukan dan pengembangan ekonomi ramah lingkungan. Bab III dalam buku ini membahas peran Uni Eropa (EU) dalam *the Great Green Wall Initiative* di Afrika pada tahun 2021-2025, oleh Dewinta Zahwa Nabila. Uni Eropa memberikan bantuan luar negeri kepada beberapa negara di Afrika untuk mentransformasi lahan hijau, agar mendukung pembangunan ramah lingkungan di 18 negara dan meningkatkan ekonomi negara-negara tersebut. Tujuan kebijakan ini adalah menghijaukan kembali wilayah Sahel, dengan dana sebesar 700 Euro setiap tahun.

Di sisi lain, Bab IV dalam buku ini membahas keamanan energi (*energy security*), inisiatif penghapusan Batubara oleh Singapura untuk mendorong akselerasi energi hijau, oleh Arfiansyah Putra Pradana Hadi. Selain berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Singapura juga berkomitmen dalam berkontribusi terhadap isu lingkungan global dengan konversi sumber energi dari Batubara menjadi energi terbarukan. Selanjutnya, Bab V dalam buku ini membahas strategi gastrodiplomasi Indonesia dalam mempromosikan kopi khas Indonesia di Mesir tahun 2021-2023, oleh Rizka Indah Setyohadi. Penelitian ini penting dalam konteks kebijakan luar negeri di bidang ekonomi karena dapat menunjukkan bagaimana gastrodiplomasi berkontribusi pada pencapaian kepentingan nasional dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui promosi produk unggulan.

Ketiga, kebijakan luar negeri di bidang sosial-budaya dilakukan dalam rangka mempromosikan citra negara, menjaga identitas nasional dari masuknya budaya asing yang kurang sesuai dengan budaya nasional, serta kerja sama antara dua negara atau lebih untuk kolaborasi produk budaya, agar mempererat hubungan antara kedua negara. Bab VI dalam buku ini membahas kolaborasi budaya antara Korea Selatan dan Indonesia melalui Pameran Busana Batik-Jinju Silk di Jakarta tahun 2023, oleh Dwi Indah Puspitasari. Batik-Jinju Silk mengkolaborasikan motif batik Indonesia dengan kain sutera khas Korea Selatan, sehingga menjadi bab penghubung antara kajian kebijakan luar negeri dengan kerja sama internasional dalam buku ini.

## **F. Kesimpulan**

Dapat disimpulkan, bahwa kebijakan luar negeri dalam hubungan internasional dapat dilihat menggunakan berbagai perspektif, misalnya Realisme yang berfokus pada kepentingan keamanan dan kedaulatan, Liberalisme yang mementingkan kerja sama untuk mencapai kepentingan bersama, dan Konstruktivisme yang menekankan pada nilai dan aturan bersama untuk menjaga hubungan jangka panjang antar negara. Selain itu, dalam menganalisis kebijakan luar

negeri dapat dijelaskan dari segi keputusan pemimpin negara, tingkah laku luar negeri negara, maupun hasil dari pertemuan internasional. Proses pembuatan kebijakan luar negeri diawali dari kondisi lingkungan internasional, yang menjadi dasar pertimbangan bagi pihak yang mempengaruhi kebijakan dan pembuat kebijakan dalam menentukan interaksi pada isu spesifik, sehingga menghasilkan kebijakan luar negeri. Sedangkan perubahan kebijakan luar negeri dapat terjadi dari segi penyesuaian, program, permasalahan, tujuan, atau orientasi internasional, yang dipicu oleh pemimpin pemerintahan, advokasi birokratik, restrukturisasi domestik, maupun guncangan eksternal. Dalam praktiknya, kebijakan luar negeri meliputi berbagai isu, seperti keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi maupun praktisi Hubungan Internasional dalam memahami kebijakan luar negeri dan kerja sama internasional.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## Daftar Pustaka

Archer, Clive. *International Organizations*. 3rd ed. London: Routledge, 2001.

Baylis, John, Steve Smith, and Patricia Owens. *Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*.

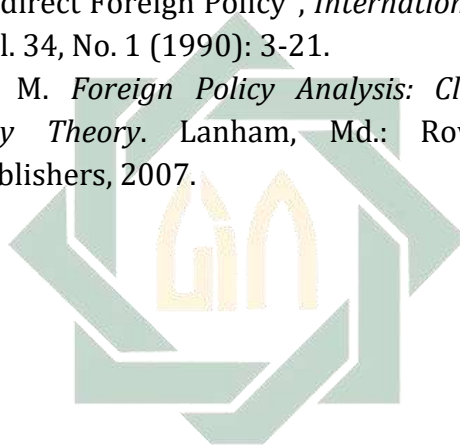
8th ed. S.L.: Oxford University Press, 2023.

Breuning, Marijke. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York, N.Y.: Palgrave Macmillan, 2016.

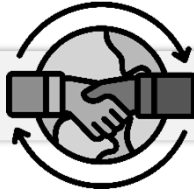
Coplin, William D. *Introduction to International Politics: A Theoretical Overview*. Englewood Cliffs, Nj: Prentice-Hall, 1980.

Hermann, Charles F. "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy", *International Studies Quarterly*. Vol. 34, No. 1 (1990): 3-21.

Hudson, Valerie M. *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 2007.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## **BAB II**

# **Krisis Keamanan di Meksiko: Tantangan UNODC Dalam Menghadapi Masalah Kartel Narkoba Tahun 2020-2024**

---

### **A. Pendahuluan**

Meksiko merupakan salah satu negara dengan krisis keamanan yang tinggi dan ditandai oleh aksi kekerasan seperti ledakan bom, perselisihan wilayah, dan konflik antar kartel narkoba. Sejak tahun 1980-an, industri narkoba di negara ini berkembang pesat yang dipicu oleh meningkatnya permintaan kokain dan zat psicotropika lainnya di Amerika Serikat pada 1970-an, serta kebijakan anti-narkoba yang semakin ketat di Kolombia dan Teluk Meksiko pada dekade berikutnya. Pada awalnya, kelompok-kelompok kriminal di Meksiko dapat beroperasi dengan mudah karena dukungan

jaringan korup dalam sistem politik yang tersentralisasi.<sup>1</sup> Namun, dalam beberapa tahun terakhir, persaingan antar kartel semakin tajam akibat perubahan politik domestik, peningkatan upaya pemberantasan narkoba, dan faktor-faktor lain yang telah mendorong munculnya lebih banyak kelompok dan memicu desentralisasi kekuasaan. Akibatnya, pola kekerasan di Meksiko menjadi semakin kompleks dan sulit dikendalikan. Pemerintah dan media Meksiko sering kali berbeda dalam menghitung jumlah korban pembunuhan. Akurasi pelaporan semakin rumit karena informasi yang terbatas dari pemerintah serta upaya kelompok kriminal menyembunyikan jumlah dan identitas korban. Pelaku kejahatan terkadang mempublikasikan kekerasan mereka secara terbuka untuk menakut-nakuti saingan, masyarakat, dan pihak berwenang, misalnya dengan meninggalkan tanda atau menyebarkan rekaman di internet. Di sisi lain, mereka juga bisa berusaha menyembunyikan jejak dengan menghapus bukti di tempat kejadian atau bahkan mengatur insiden agar tampak dilakukan oleh kartel saingan. Beberapa baku tembak tidak dilaporkan karena sensor atau ancaman kartel terhadap media setempat.

Guanajuato menjadi salah satu contoh wilayah di Meksiko dengan tingkat kekerasan yang tinggi, terutama terhadap aparat penegak hukum. Berdasarkan data yang

---

<sup>1</sup> David Shirk, "Transnational Crime, U.S. Border Security and the War on Drugs in Mexico," 2011, 1-12, <http://catcher.sandiego.edu/items/peacestudies/110331-Shirk-Testimony.pdf>.

tersedia pada tahun 2018 hingga pertengahan Mei 2021, sebanyak 262 personel polisi dilaporkan tewas akibat kekerasan terkait konflik kriminal dan sekitar 75 petugas kehilangan nyawa setiap tahunnya. Pada periode Desember 2024 juga terdapat insiden yang melibatkan pembunuhan tujuh petugas polisi dalam waktu sekitar enam minggu, termasuk kasus di mana tiga anggota keluarga yang bekerja sebagai polisi dieksekusi di kediaman mereka.<sup>2</sup> Per tahun 2022, total kasus orang hilang di Meksiko telah melebihi 100.000, dengan 90% kasus terjadi sejak 2007. Beberapa analis menilai bahwa penghilangan paksa telah menjadi taktik favorit kartel untuk menjaga kendali politik. Pada enam bulan pertama tahun 2019, kasus pembunuhan di Meksiko mencapai rekor tertinggi yang memperlihatkan besarnya tantangan yang dihadapi Presiden Andres Manuel Lopez Obrador dalam upaya mengurangi kekerasan di negara yang dikuasai kartel. Dari Januari hingga Juni 2019, tercatat 14.603 kasus pembunuhan, naik dari 13.985 kasus pada periode yang sama tahun sebelumnya, berdasarkan data Kantor Keamanan Publik Nasional Meksiko. Pada tahun 2018, jumlah pembunuhan hampir mencapai 29.111 kasus yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> BBC News Indonesia, "Dalam Seminggu 12 Polisi Meksiko Terbunuh Dalam Perang Melawan Kartel Narkoba, Satu Di Antaranya Dimutilasi," *Bbc.Com*, 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50837521>.

<sup>3</sup> ANTARA, "Pembunuhan Di Meksiko Meningkatkan Pada 2019," *Antara*, 2019, <https://www.antaranews.com/berita/969950/pembunuhan-di-meksiko-meningkat-pada-2019>.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak kejahatan terorganisasi, khususnya kartel narkoba terhadap keamanan negara Mexico serta tantangan yang dihadapi UNODC dalam mengatasi masalah ini. Kejahatan terorganisasi telah menjadi ancaman serius, dengan kelompok-kelompok ini mengambil alih kekuasaan di beberapa wilayah dan mempengaruhi aspek politik, bisnis, dan penegakan hukum. Situasi darurat kemanusiaan di Meksiko ditandai oleh tingginya angka pembunuhan, penghilangan paksa, dan serangan terhadap kebebasan pers. Oleh karena itu, UNODC berperan penting dalam memberikan dukungan teknis, meningkatkan kesadaran, dan membantu negara-negara dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti untuk memerangi kejahatan terorganisasi. Kekerasan yang meluas ini telah menciptakan rasa takut dan ketidakamanan di kalangan masyarakat.<sup>4</sup> Kartel narkoba Meksiko adalah pemasok utama narkoba ilegal ke AS, termasuk kokain, fentanyl, heroin, mariyuana, dan metamfetamin. Meskipun beberapa narkoba, seperti kokain, berasal dari Amerika Selatan, organisasi Meksiko mengendalikan transportasi dan distribusinya di AS. Saat ini, lanskap kejahatan di Meksiko didominasi oleh persaingan antara dua kartel besar: Kartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), yang fokus utamanya adalah perdagangan narkoba sintetis seperti metamfetamin

---

<sup>4</sup> DetikNews, "Ngeri! Ini 7 Akibat Kartel Narkoba Kuasai Meksiko," *News.Detik.Com*, 2012, <https://news.detik.com/berita/d-2057265/ngeri-ini-7-akibat-kartel-narkoba-kuasai-meksiko><https://news.detik.com/berita/d-2057265/ngeri-ini-7-akibat-kartel-narkoba-kuasai-meksiko>.

dan fentanil, serta Kartel Sinaloa, organisasi kejahatan terbesar dan paling lama berpengaruh di negara tersebut. Beberapa analis melihat persaingan ini sebagai "bipolaritas" yang mirip dengan situasi antara dua jaringan kejahatan besar di Meksiko pada awal abad ke-21. Ada lima kartel utama yang mendominasi wilayah tertentu di Meksiko: CJNG, Sinaloa, Juárez, Gulf, dan Los Zetas.<sup>5</sup>

Keadaan di Meksiko sangat berbeda, yakni kemakmuran serta keselamatan sosial dan ekonomi yang terancam serius akibat adanya kejahatan narkoba yang terorganisir. Aktivitas kejahatan tersebut telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak ada tempat yang benar-benar aman di seluruh negeri. Kartel narkoba kini menjadi pusat dari kejahatan terorganisir dan telah membangun struktur yang sangat kompleks, sehingga dampak kejahatan dapat dirasakan hampir di setiap aspek masyarakat, ekonomi, dan struktur pemerintahan. Kejahatan terorganisir sendiri memiliki arti sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh kelompok individu yang terorganisir dan terencana. Kejahatan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui aktivitas ilegal dan sering kali merespons permintaan publik akan layanan tertentu. Ciri khas dari kejahatan terorganisir mencakup adanya korupsi yang melindungi operasi kejahatan, serta penggunaan intimidasi, ancaman, atau

---

<sup>5</sup> Haseebullah Hayatzada, "Crime and Development The Direct and Indirect Impacts of Organized Crime Operated by Major Drug Cartels on Secondary Education and Formal Employment among Youth in Mexico," *LUP Student Papers*, 2019, 1-41, <http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8995200>.

kekerasan untuk menjaga kelangsungan operasi tersebut. Dengan demikian, kejahatan terorganisir dapat dipahami sebagai suatu usaha kriminal yang berkelanjutan yang melibatkan struktur dan organisasi yang kompleks.<sup>6</sup>

Kejahatan terorganisir sering kali diartikan dengan kekerasan, bahkan dalam bentuk yang mirip dengan perang. Dalam beberapa kasus operasi kriminal yang besar, seperti perdagangan narkoba transnasional dan pencurian minyak dalam skala industri, dapat berlangsung dengan tingkat kekerasan yang relatif rendah. Stabilitas semacam ini dalam lingkungan yang dipenuhi kejahatan mungkin disebabkan oleh adanya perlindungan yang diberikan oleh pihak berwenang atau elit yang korup, serta pengaturan dan perjanjian antara organisasi kriminal dan kelompok politik, ekonomi, dan sosial yang sah.<sup>7</sup> Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang melibatkan perdagangan ilegal lintas negara. Dalam hal ini yang dimaksud adalah komoditas yang banyak diperdagangkan adalah para migran. Salah satu jaringan penyelundupan manusia yang terkenal adalah Snakeheads yang berbasis di Cina. Jaringan ini memiliki operasi yang luas dan kompleks, mirip dengan kartel narkoba yang beroperasi di Meksiko. Kedua jenis kejahatan ini

---

<sup>6</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, "Definitions of Organized Crime," *Unodc.Org*, April 2018, <https://www.unodc.org/e4j/ru/organized-crime/module-1/key-issues/defining-organized-crime.html>.

<sup>7</sup> Markus Schultze-kraft, "Organised Crime, Violence and Development: Topic Guide," *Gsdrc.Org*, 2018, 2-15, <https://doi.org/10.131-40/RG.2.2.17782.40007>.

menunjukkan bagaimana organisasi kriminal dapat memanfaatkan kelemahan dalam sistem penegakan hukum dan korupsi untuk menjalankan aktivitas ilegal mereka. UNODC menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kedua bentuk kejahatan ini, karena mereka sering kali saling terkait dan memanfaatkan jalur yang sama untuk peredaran barang dan manusia.<sup>8</sup>

Contoh lain dapat dilihat pada kasus perdagangan perempuan dan anak. Kejahatan terorganisir dalam perdagangan perempuan dan anak yang bersifat transnasional merupakan masalah serius yang berdampak luas dan dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini telah ditegaskan dalam Statuta Roma pada tahun 1998 yang mengatur pengadilan tetap pidana internasional. Organisasi kejahatan yang terlibat dalam perdagangan ini memiliki struktur yang mirip dengan kartel narkoba, yaitu mereka menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk melindungi operasi mereka. Konvensi Palermo 2000 menekankan pentingnya kerja sama antara negara-negara untuk mencegah dan memberantas kejahatan ini.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, tantangan bagi UNODC adalah

---

<sup>8</sup> Angelica Putri Arindrayani and Sarah Anabarja, "Kejahatan Terorganisir Transnasional: Penyelundupan Manusia Dalam Jaringan Snakeheads Cina," *Intermestic: Journal of International Studies* No 8 (2), no. 2 (2024): 449-473. Diambil dari., <https://doi.org/10.24198/intermestic.v8n2.4>.

<sup>9</sup> Maria Efitu Ayu, "Perdagangan Perempuan Dan Anak Serta Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Parlemo," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018): 1-12, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.5>.

untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam menghadapi kartel narkoba yang juga terlibat dalam perdagangan manusia, serta untuk melindungi korban dari kejahatan ini. Tantangan lain di wilayah tengah dan barat Meksiko berasal dari pecahan kartel atau kelompok baru yang berhubungan dengan sembilan organisasi besar seperti La Familia Michoacana.<sup>10</sup> Untuk menggambarkan daerah yang dikuasai dan konflik yang terjadi antara kartel, perusahaan yang menganalisis risiko politik yaitu Stratfor Worldview, telah memetakan wilayah 12 kartel besar di Meksiko. Pemetaan ini menunjukkan perubahan yang terjadi sejak pemetaan sebelumnya. Pemetaan yang dilakukan oleh Stratfor Worldview bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai wilayah yang dikuasai oleh kartel-kartel besar di Meksiko. Pemetaan ini mencakup area yang menjadi pusat konflik antara kartel atau yang sering kali berubah seiring dengan dinamika kekuasaan dan persaingan di antara mereka.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>10</sup> Congressional Research Service, "Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations (CRS Report Number R41576)," *CRS Reports*, 2022, <https://crsreports.congress.gov>.



11

Kartel narkoba Meksiko memanfaatkan sumber daya keuangan mereka yang besar untuk terlibat dalam korupsi sistemik, mempengaruhi lembaga peradilan, penegakan hukum, dan politik. Melalui penyuaian dan intimidasi, mereka memaksa para pejabat untuk terlibat.<sup>12</sup> Penggunaan kekerasan oleh para kartel termasuk pembunuhan yang ditargetkan terhadap jurnalis dan pegawai negeri, semakin memperkuat kendali mereka. Pada akhir tahun 1980-an,

<sup>11</sup> Stratfor Worldview, "The Geography of Mexican Drug Cartels," 2016, <https://worldview.stratfor.com/article/geography-mexican-drug-cartels>.

<sup>12</sup> CNN Indonesia, "Kenapa Di Meksiko Banyak Kartel Narkoba?," *CNN Indonesia*, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/202410-09133715-134-1153336/kenapa-di-meksiko-banyak-kartel-narkoba>.

kartel narkoba Meksiko mulai mendapatkan pengaruh yang lebih besar di panggung internasional setelah pemerintah AS menghancurkan jaringan penyelundupan kokain di Karibia yang digunakan oleh kartel Kolombia. Geng-geng Meksiko yang sebelumnya hanya bertindak sebagai kurir kini bertransformasi menjadi pedagang besar, mengambil alih peran yang dulunya dipegang oleh kartel-kartel terkenal seperti Cali dan Medellin.<sup>13</sup> Pada tahun 2007, mereka telah menguasai sekitar 90 persen pasokan kokain yang masuk ke AS. Meskipun pemerintah AS telah menginvestasikan lebih dari \$1 triliun dalam upaya "War on Drugs" sejak tahun 1970-an, hasilnya tidak banyak dalam mengurangi permintaan narkoba.<sup>14</sup>

Di tahun 2017, warga AS menghabiskan sekitar \$153 miliar untuk obat-obatan terlarang, termasuk kokain, heroin, ganja, dan metamfetamin. Selain itu, peningkatan penggunaan opioid sintetis, seperti fentanil, semakin memperburuk masalah kesehatan masyarakat yang ada.<sup>15</sup> UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) adalah

---

<sup>13</sup> Ade S, "Sejarah Dunia: Bagaimana Kartel Meksiko Ambil Alih Kerajaan Narkoba Pablo Escobar?," *Nationalgeographic.Grid.Id*, 2024, <https://nationalgeographic.grid.id/read/134108548/sejarah-dunia-bagaimana-kartel-meksiko-ambil-alih-kerajaan-narkoba-pablo-escobar?page=all>.

<sup>14</sup> Salman Al Farisi Herdiana, "Pengaruh Perjanjian Amerika Serikat Dan Kolombia Mengenai Pemberantasan Peredaran Narkotika Dan Psikotropika Ilegal Melalui Jalur Laut Terhadap Penanggulangan Masalah Narkotika Ilegal Di Amerika Serikat" 19, no. 19 (2009): 19.

<sup>15</sup> CFR.org Editors, "Mexico's Long War: Drugs, Crime, and the Cartels," *Council on Foreign Relations*, 2024, <https://www.cfr.org/background-er/mexicos-long-war-drugs-crime-and-cartels>.

lembaga internasional yang beroperasi di bawah naungan Dewan Keamanan PBB dengan fokus untuk menangani isu-isu global terkait narkoba dan kejahatan. Didirikan pada tahun 1997, UNODC merupakan hasil penggabungan *The United Nations Drug Control Programme* dan *The Centre for International Crime Prevention*. Misi dari organisasi ini adalah untuk memberantas dan menekan peredaran serta perdagangan obat-obatan terlarang, serta menghadapi tantangan kejahatan transnasional. UNODC juga berkontribusi dalam merumuskan pengetahuan berbasis bukti dan meningkatkan kesadaran mengenai kejahatan lintas negara terorganisasi, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan korupsi.<sup>16</sup> UNODC memainkan peran penting di berbagai negara dengan membantu anggotanya dalam menghadapi masalah penjualan narkoba dan kejahatan lintas negara serta terorisme.

UNODC dan Meksiko telah bekerja sama untuk memerangi perdagangan obat-obatan terlarang yang krusial di seluruh penjuru bagian negara Meksiko. Krisis narkoba di Meksiko tidak hanya berdampak pada negara tersebut, tetapi juga memiliki konsekuensi luas bagi stabilitas regional dan keamanan global. Penyebaran narkoba dan kejahatan terorganisir dapat mengancam perdamaian di kawasan Amerika Latin serta berkontribusi pada meningkatnya migrasi dan ketidakstabilan di negara-negara tetangga. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai

---

<sup>16</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, "About the United Nations Office on Drugs and Crime," *United Nations Office on Drugs and Crime*, n.d., <https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html>.

tantangan yang dihadapi UNODC untuk memberikan wawasan bagi negara-negara lain yang berjuang melawan masalah serupa. Upaya untuk mengatasi kartel narkoba di Meksiko membutuhkan kerja sama lintas negara, baik dalam hal penegakan hukum, pertukaran informasi, maupun penyusunan kebijakan efektif. Dengan memahami tantangan yang dihadapi oleh UNODC, maka bermanfaat untuk memperoleh wawasan tentang cara meningkatkan kerja sama internasional dan merancang strategi yang lebih efektif untuk menangani kejahatan terorganisir yang lintas batas.

## **B. Pembahasan**

### **1. Krisis Keamanan di Meksiko**

Krisis keamanan yang terjadi di Meksiko terutama yang disebabkan oleh kartel narkoba, telah menjadi masalah serius yang mempengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik negara tersebut. Meksiko dikenal sebagai pusat perdagangan narkoba dengan banyaknya kartel besar seperti Sinaloa dan *Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)* yang mendominasi pasar. Kartel Sinaloa sendiri dipimpin oleh Joaquín "El Chapo" Guzmán sebelum penangkapannya, merupakan salah satu organisasi kriminal paling kuat di dunia, dengan pendapatan tahunan mencapai sekitar USD20 miliar. CJNG juga dianggap sebagai salah satu kartel paling berbahaya dan memiliki kehadiran di 28 dari 32 negara bagian Meksiko.<sup>17</sup> Kekerasan terkait kartel narkoba

---

<sup>17</sup> Muhaimin, "10 Kartel Narkoba Terbesar Di Dunia, Ada Yang Pendapatannya Rp311 Triliun," *Sindonews.Com*, 2024, <https://international.sindonews.com/read/1298947/45/10-kartel->

telah meningkat tajam. Pada September 2024, terjadi bentrokan hebat antara kelompok-kelompok dalam kartel Sinaloa yang menyebabkan 53 orang tewas dan 51 orang lainnya hilang di wilayah Sinaloa. Konflik ini terjadi setelah pemimpin kartel ditangkap, yang memicu perebutan kekuasaan antaranggota kartel. Akibatnya, wilayah yang terdampak menjadi tidak stabil. Aksi kekerasan ini tidak hanya mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga membuat sekolah dan bisnis terpaksa tutup.<sup>18</sup>

Ketika pemimpin kartel narkoba ditangkap maka terjadi kekosongan kekuasaan dalam organisasi tersebut. Kekosongan ini memicu persaingan internal di antara anggota kartel yang berusaha mengambil alih kekuasaan tersebut. Konflik ini dapat menjadi konflik yang serius dan merembet ke masyarakat sekitar, akibat kartel seringkali menggunakan kekerasan untuk menunjukkan kekuatan atau untuk menguasai wilayah tertentu. Hal ini berdampak pada masyarakat umum ikut merasakan bahaya dan ketakutan dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang disebabkan oleh aksi mereka. Sekolah-sekolah dan bisnis juga terpaksa tutup untuk melindungi keamanan, sehingga hal ini semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

---

narkoba-terbesar-di-dunia-ada-yang-pendapatannya-rp311-triliun-1705294905.

<sup>18</sup> Tempo, "Konflik Kartel Narkoba Di Meksiko Menewaskan 53 Orang Dan 51 Hilang," *Tempo.Com*, 2024, <https://www.tempo.co/internasional/konflik-kartel-narkoba-di-meksiko-menewaskan-53-orang-dan-51-hilang--7369>.

Salah satu alasan utama mengapa krisis ini semakin parah adalah karena adanya korupsi di antara pejabat pemerintah dan penegak hukum. Banyak pejabat menerima suap dari kartel untuk melindungi kegiatan mereka. Kartel narkoba juga memiliki hubungan dekat dengan partai politik sehingga membuat mereka bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Akibatnya, upaya pemerintah untuk memberantas kartel sering kali terhambat oleh praktik korupsi ini.<sup>19</sup> Korupsi yang terjadi di kalangan pejabat dan penegak hukum membuat kartel semakin sulit diberantas. Ketika pejabat atau aparat keamanan menerima suap, maka mereka menutup mata terhadap kegiatan ilegal kartel dan bahkan terkadang membantu melindungi operasi mereka. Selain itu, karena kartel memiliki pengaruh di dalam politik, pada akhirnya mereka bisa memanfaatkan kekuatan politik ini untuk menyesuaikan kebijakan agar menguntungkan operasi mereka atau untuk melemahkan kebijakan yang mengancam keberadaan mereka. Kondisi ini menyebabkan pemerintah tidak bisa sepenuhnya menegakkan hukum, sehingga memberantas kartel menjadi jauh lebih sulit. Korupsi yang dilakukan akhirnya memperburuk kekacauan dan ketidakamanan di masyarakat.

Kekerasan ekstrem akibat persaingan antar kartel dan tindakan pemerintah telah menciptakan rasa tidak aman di banyak wilayah. Banyak warga sipil yang menjadi korban termasuk kasus penculikan dan pembunuhan yang menargetkan pejabat publik dan jurnalis yang menentang kartel. Ketidakamanan ini menghambat akses masyarakat ke

---

<sup>19</sup> Indonesia, "Kenapa Di Meksiko Banyak Kartel Narkoba?"

pendidikan dan layanan kesehatan. Sekolah sering ditutup atau beroperasi dengan pengamanan ketat, sementara fasilitas kesehatan harus mengurangi layanan karena ancaman dari kartel. Anak-anak di daerah rawan kekerasan seringkali terpaksa putus sekolah untuk membantu penghasilan keluarga. Kehidupan sehari-hari warga Meksiko sangat dipengaruhi oleh keberadaan kartel. Banyak orang terpaksa bekerja untuk kartel demi mencari nafkah karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sah. Kondisi tersebut menciptakan lingkaran kemiskinan dan ketergantungan pada kegiatan ilegal. Aktivitas kartel menyebabkan kerugian besar bagi bisnis lokal. Sebuah studi menunjukkan bahwa lebih dari 60% perusahaan di Meksiko terdampak oleh kekerasan dan pemerasan dari kartel. Banyak bisnis kecil terpaksa tutup karena ancaman kekerasan, dan industri pariwisata turun drastis akibat reputasi buruk wilayah yang dikuasai kartel. Salah satu contohnya adalah di wilayah Acapulco. Wilayah ini menjadi tempat yang menguntungkan karena bisa menjual narkoba langsung kepada wisatawan tanpa harus menyelundupkannya ke AS. Hal ini menyebabkan sering terjadinya perang wilayah dan berakhir dengan penutupan sekitar 2.000 bisnis lokal dan kematian 150 pemilik toko antara tahun 2016 dan 2017. Reputasi buruk wilayah ini membuat wisatawan enggan berkunjung sehingga mengancam perekonomian lokal yang sangat bergantung pada sektor pariwisata.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Humam Shafar Al Falah, "Implementasi Smart Oleh United Nations of on Drug and Crime (UNODC) Dalam Mengatasi Permasalahan Narkotika Di

Kekerasan dan ketidakstabilan ini membuat investor asing ragu untuk menanamkan modal di Meksiko, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kartel juga mempengaruhi sektor penting seperti pertanian dan manufaktur, di mana ancaman kekerasan sering kali mengganggu operasi bisnis.<sup>21</sup> Masyarakat umum telah menyadari dampak negatif dari situasi ini. Media sering melaporkan jumlah korban bahkan organisasi non-pemerintah (NGO) baik di dalam maupun luar negeri mengancam tindakan militer yang melanggar hak asasi manusia, serta mengaitkan peningkatan kekerasan dengan penggunaan kekuatan militer. Meskipun begitu, survei menunjukkan bahwa sebagian besar orang di Amerika Latin justru mendukung peran yang lebih besar bagi militer dalam memerangi kejahatan terorganisir dan menjaga keamanan publik. Hal ini terjadi baik di negara-negara yang sangat terkena dampak kejahatan, seperti Meksiko dan El Salvador, maupun di negara yang lebih aman seperti Uruguay dan Argentina.<sup>22</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

Meksiko Tahun 2018-2020” (Universitas Islam Indonesia, 2024), [dspace.uin.ac.id/123456789/51131](https://dspace.uin.ac.id/123456789/51131).

<sup>21</sup> Almira Farah Jelita, “Analisis Kerja Sama Merida Initiative Antara Meksiko Dan Amerika Serikat Dalam Mengurangi Drug Trafficking Organizations Di Meksiko,” *Indonesian Journal of Global Discourse* 2, no. 2 (2020): 52–73, <https://doi.org/10.29303/ijgd.v2i2.23>.

<sup>22</sup> Juan Masullo and Davide Morisi, “The Human Costs of the War on Drugs. Attitudes Towards Militarization of Security in Mexico,” *Comparative Political Studies* 57, no. 6 (2024): 887–920, <https://doi.org/10.1177/001-04140231192056>.

## 2. Peran UNODC dalam Mengatasi Masalah Kartel Narkoba terbaru

Pada tahun 2015, Majelis Umum PBB telah mengesahkan lima resolusi untuk menegaskan komitmen yang semakin kuat dalam menangani masalah global. Melalui resolusi-resolusi tersebut, UNODC diberikan wewenang untuk membantu negara-negara dalam menangani kejahatan serius yang terorganisasi secara transnasional.<sup>23</sup> UNODC berupaya mengedukasi masyarakat global tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan memperkuat aksi internasional melawan produksi, perdagangan, serta kejahatan yang terkait dengan narkoba. Untuk mencapai tujuan ini, maka UNODC telah meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk menawarkan alternatif untuk budidaya tanaman narkotika ilegal, pemantauan tanaman terlarang, dan pelaksanaan proyek anti pencucian uang.<sup>24</sup>

Salah satu upaya internasional untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membentuk Merida Initiative. Merida Initiative merupakan sebuah program kerjasama antara Meksiko dan Amerika Serikat yang dimulai sejak 2008. Program ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan penegakan hukum di Meksiko dan mengurangi perdagangan narkoba melalui bantuan dana dan pelatihan untuk aparat keamanan. Namun meskipun ada dukungan finansial dan teknis, penyelundupan senjata dari AS ke Meksiko tetap

---

<sup>23</sup> UNODC, "Our Mandate," *UNODC*, 2002, <https://www.unodc.org/unodc/en/environment-climate/our-mandate.html>.

<sup>24</sup> The United Nations Office on Drugs and Crime, "About UNOV," *United Nations Office at Vienna*, 2017, <https://www.unov.org/unov/en/unodc.html>.

menjadi tantangan besar. Merida Initiative adalah bentuk kerja sama penting antara AS dan Meksiko untuk melawan kartel narkoba.<sup>25</sup> Melalui inisiatif ini, AS memberikan bantuan berupa dana, teknologi, dan pelatihan bagi aparat penegak hukum di Meksiko. Dengan bantuan ini, pemerintah Meksiko diharapkan bisa lebih efektif dalam memerangi kartel narkoba. Namun, masalah besar masih tersisa, yaitu aliran senjata dari AS yang terus masuk ke Meksiko. Banyak senjata yang dijual di AS secara ilegal diselundupkan ke Meksiko dan digunakan oleh kartel.<sup>26</sup> Hal ini memperkuat kekuatan kartel dan membuat mereka lebih sulit ditangani oleh aparat setempat, sehingga kerja sama internasional ini belum sepenuhnya berhasil.

UNODC juga memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum di Meksiko guna memperkuat kemampuan mereka dalam memberantas kejahatan narkotika. Melalui pelatihan tersebut, aparat diperkenalkan pada berbagai teknik investigasi, metode pengumpulan bukti, serta prosedur penanganan kasus terkait narkoba. Tidak hanya itu, UNODC mendukung upaya penegakan hukum dengan menyediakan dana, peralatan canggih, dan dukungan teknis untuk meningkatkan efektivitas operasi yang menargetkan

---

<sup>25</sup> Faisyal Rani Efragil Samosir, "Efektivitas Kerjasama Penanggulangan Peredaran Narkoba Ilegal (Merida Initiative) Antara Pemerintah Meksiko Dan Amerika Serikat (2007-2012)," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau* 1, no. 2 (2012).

<sup>26</sup> VOA, "Meksiko Gugat Produsen Senjata AS Atas Perdagangan Senjata Ilegal," *Voaindonesia.Com*, 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/meksiko-gugat-produsen-senjata-as-atas-perdagangan-senjata-illegal/5991-587.html>.

kartel narkoba. Dalam rangka menyusun strategi pemberantasan yang berbasis bukti, UNODC menggunakan analisis intelijen untuk memahami pola jaringan perdagangan narkoba dan mengidentifikasi aktor-aktor kunci dalam kartel.<sup>27</sup> Sebagai badan PBB yang fokus pada isu kejahatan dan narkoba, UNODC menjalankan mandat global untuk membantu negara-negara anggota menangani berbagai bentuk kejahatan transnasional termasuk peredaran narkoba. Di Meksiko, masalah kartel narkoba bukan hanya tantangan domestik, tetapi juga masalah internasional yang melibatkan jaringan lintas negara. Kerjasama UNODC dengan aparat hukum lokal sangat penting karena kejahatan terorganisir seperti ini membutuhkan pendekatan yang canggih dan berbasis data. Dengan menyediakan dukungan peralatan dan analisis intelijen, UNODC membantu negara-negara seperti Meksiko tidak hanya menindak kejahatan narkoba, tetapi juga membangun kapasitas institusi hukum mereka dalam jangka panjang.

Dalam artikel berjudul *Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean*, UNODC mengusulkan berbagai kebijakan untuk mengurangi perdagangan narkoba dan kekerasan terkait, meliputi *capacity building*, *direct supplementation*, *demand reduction*, dan *peacebuilding*. Pada aspek *capacity building*, UNODC menekankan pentingnya peningkatan kemampuan negara-negara anggota untuk

---

<sup>27</sup> Jelita, "Analisis Kerja Sama Merida Initiative Antara Meksiko Dan Amerika Serikat Dalam Mengurangi Drug Trafficking Organizations Di Meksiko."

memperkuat penegakan hukum, agar pelaku kejahatan narkoba dan kekerasan dapat dihukum secara adil. Ini juga termasuk perbaikan fasilitas penahanan yang lebih memadai untuk menampung narapidana. Sedangkan *Direct supplementation* mengacu pada dukungan langsung dari komunitas internasional, yang bertujuan membantu negara-negara memperkuat sistem politik yang rentan dieksploitasi oleh jaringan kriminal. Masyarakat juga didorong untuk berperan aktif dalam melawan kejahatan, sehingga tidak hanya mengandalkan peran polisi dan pengadilan. Pada kebijakan *demand reduction*, UNODC menganjurkan penurunan permintaan narkoba sebagai salah satu cara untuk membatasi produksi. Walaupun menutup pasar gelap sulit dilakukan karena tingginya permintaan, langkah ini dipandang penting dalam jangka panjang. Terakhir, aspek *peacebuilding* menitikberatkan pada penguatan perdamaian sosial sebagai bagian dari agenda PBB. Tujuannya adalah untuk memperbaiki ikatan sosial dalam masyarakat, termasuk melalui kolaborasi global dalam mengatasi tantangan terkait hukum dan kejahatan terorganisir.<sup>28</sup>

Kerjasama antara UNODC dan Meksiko juga terlihat pada 23-24 Juni 2009 dalam konferensi tingkat Menteri di Nikaragua yang disebut *para el reforzamiento del plan de accion de la estrategia de seguridad en centroamerica Mexico*. Konferensi ini melibatkan UNODC dalam memberikan konsultasi dan dukungan teknis untuk program keamanan

---

<sup>28</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean A Threat Assessment*, UNODC, 2012, <https://doi.org/10.18356/493ae18b-en>.

regional. Hasilnya adalah peluncuran program keamanan *The Santo Domingo Pact and SICA-UNODC Mechanism* yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan di Meksiko dan negara-negara Amerika Tengah terkait perdagangan narkoba. Pada Juni 2019, UNODC juga meluncurkan *Global Monitoring Program: SMART* di Amerika Latin untuk mengamati tren narkoba sintetis. Laporan ini mencatat penggunaan obat penenang non-medis di wilayah tersebut, termasuk Meksiko. Program ini membantu mendeteksi narkoba sintetis secara efektif dan mengoordinasikan laboratorium forensik, lembaga penegak hukum, serta layanan kesehatan melalui pertukaran informasi.<sup>29</sup> Dengan diluncurkannya *The Santo Domingo Pact and SICA-UNODC Mechanism* serta *Global Monitoring Program: SMART*, UNODC menunjukkan komitmen untuk memperkuat keamanan dan stabilitas di Meksiko dan kawasan Amerika Tengah dalam menghadapi tantangan kompleks perdagangan narkoba.

Program-program ini berfokus tidak hanya pada pemantauan peredaran narkoba sintetis, tetapi juga pada peningkatan kerja sama antara berbagai institusi yakni termasuk laboratorium forensik, penegak hukum, dan layanan kesehatan untuk menciptakan alur informasi yang cepat dan akurat. Melalui pemantauan yang cermat terhadap tren narkoba serta pelatihan bagi aparat terkait, UNODC membantu negara-negara di kawasan tersebut untuk mengantisipasi dan merespons ancaman baru yang mungkin

---

<sup>29</sup> Al Falah, "Implementasi Smart Oleh United Nations of on Drug and Crime (UNODC) Dalam Mengatasi Permasalahan Narkotika Di Meksiko Tahun 2018-2020."

muncul. Berbagai inisiatif tersebut menjadi langkah penting dalam menanggulangi dampak narkoba di masyarakat, mengurangi kekerasan terkait kartel, dan memperbaiki efektivitas sistem penegakan hukum. Pendekatan berbasis data dan keterlibatan lintas sektor juga memperkuat kapasitas negara-negara Amerika Latin untuk menghadapi tantangan yang terkait dengan produksi dan distribusi narkoba. UNODC berharap agar melalui kolaborasi yang berkesinambungan, kawasan ini akan lebih mampu mengatasi ancaman narkoba, melindungi kelompok rentan, dan membangun masyarakat yang lebih aman dan stabil dalam jangka panjang. Dengan dukungan internasional yang terus diperkuat, UNODC menargetkan tercapainya keamanan regional yang lebih kokoh dan lingkungan sosial yang lebih kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan.

### **3. Tantangan yang Dihadapi UNODC**

Pemberantasan kartel narkoba di Meksiko merupakan salah satu prioritas utama bagi UNODC, yang berupaya menciptakan stabilitas dan keamanan di kawasan yang terdampak parah oleh perdagangan narkoba. Sebagai salah satu pusat jaringan perdagangan narkoba internasional, Meksiko menghadapi tantangan yang kompleks dan terus berkembang, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Dengan mendukung pemerintah Meksiko serta bekerja sama dengan berbagai pihak, UNODC berkomitmen untuk mengurangi dampak buruk kartel

narkoba terhadap masyarakat. Namun, upaya UNODC dalam memerangi kartel narkoba di Meksiko bukan tanpa hambatan. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas jaringan kriminal dan luasnya pengaruh kartel, berbagai tantangan terus muncul yang menghambat efektivitas program pemberantasan.

Kehidupan masyarakat di daerah yang dikuasai kartel penuh dengan tantangan. Ketika kekerasan antara kartel dan respons aparat semakin parah, masyarakat sering menjadi korban langsung atau terdampak. Ancaman dari kartel membuat anak-anak kehilangan akses ke pendidikan yang aman, sementara akses kesehatan pun menjadi terbatas. Banyak warga yang tinggal di daerah konflik terpaksa berhenti sekolah atau bekerja dalam kondisi yang berbahaya. Selain itu, sulitnya mencari pekerjaan yang legal di wilayah-wilayah tersebut membuat banyak orang akhirnya bekerja untuk kartel agar bisa bertahan hidup. Situasi ini menyebabkan semakin banyak warga yang terperangkap dalam kegiatan ilegal dan kemiskinan, memperkuat siklus ketergantungan pada kartel di wilayah tersebut. Kartel tidak hanya berdampak pada keamanan masyarakat, tetapi juga melemahkan ekonomi lokal. Banyak bisnis yang tidak mampu bertahan dari pemerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan kartel. Selain itu, ketidakamanan di wilayah-wilayah tertentu membuat turis enggan berkunjung, merugikan sektor pariwisata dan menghilangkan pendapatan bagi banyak orang yang bergantung pada industri ini.

Investor asing yang biasanya membantu menciptakan lapangan kerja baru pun cenderung menghindari Meksiko karena risiko tinggi yang ditimbulkan oleh kartel. Bahkan sektor-sektor seperti pertanian dan manufaktur yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal, harus menghadapi kesulitan dalam beroperasi karena ancaman dari kartel. Hal ini berdampak buruk bagi ekonomi Meksiko secara keseluruhan, menciptakan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.<sup>30</sup> UNODC menghadapi tantangan besar dalam memberantas kartel narkoba di Meksiko. Kartel-kartel ini merupakan organisasi kriminal yang sangat kuat, korup, dan memiliki jaringan luas. Tantangan-tantangan ini mencerminkan kerumitan masalah yang harus dihadapi, dari aspek kelembagaan hingga keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan akan kerja sama yang lebih erat di tingkat nasional dan internasional. Berdasarkan hasil analisis pada laporan tahunan UNODC tahun 2022, adapun tantangan utama yang dihadapi oleh UNODC dalam upayanya untuk menghentikan kartel narkoba yaitu:

a. Kekuatan dan Jangkauan Kartel

Kartel narkoba di Meksiko bukan sekadar geng biasa, melainkan organisasi kriminal transnasional yang sangat terstruktur. Mereka memiliki sumber daya finansial yang besar, persenjataan canggih, dan

---

<sup>30</sup> Nikko Nathanael, "Narkoba Di Meksiko: Kartel Menyebabkan Kesenjangan Sosial Di Masyarakat," *Kumparan.Com*, 2023, <https://kumparan.com/nikko-nathanael/narkoba-di-meksiko-kartel-menyebabkan-kesenjangan-sosial-di-masyarakat-21So3WjJEbS/1>.

jaringan intelijen yang luas. Akibatnya, mereka dapat beroperasi secara efektif di berbagai wilayah dan negara, serta menghindari penangkapan. Empat kartel utama yang mendominasi perdagangan narkoba di negara ini adalah Kartel Sinaloa, Kartel Jalisco Generasi Baru (CJNG), Kartel Teluk, dan Los Zetas. Kartel Sinaloa pernah dipimpin oleh Joaquín "El Chapo" Guzmán, dikenal sebagai salah satu organisasi kriminal paling berpengaruh di dunia. Meskipun El Chapo kini berada di penjara, kartel ini tetap beroperasi dengan jaringan luas yang mencakup Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Mereka terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal, termasuk perdagangan narkoba, pencucian uang, dan kekerasan ekstrem. Sementara itu, Kartel Jalisco Generasi Baru (CJNG) telah muncul sebagai kekuatan baru yang menakutkan. Dikenal karena kebrutalannya, CJNG berkembang pesat dan menjadi salah satu kartel paling ditakuti di Meksiko. Mereka terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal, termasuk perdagangan narkoba dan kekerasan ekstrem. Kartel Teluk berbasis di wilayah timur laut Meksiko, memiliki sejarah panjang dalam perdagangan narkoba. Mereka dikenal karena metode kekerasan yang brutal dan sering terlibat dalam bentrokan dengan kartel lain serta aparat keamanan. Los Zetas, awalnya merupakan sayap militer dari Kartel Teluk,

kemudian memisahkan diri dan menjadi kartel independen. Mereka terkenal karena kekejaman dan taktik militer yang canggih, termasuk penggunaan senjata berat dan strategi perang gerilya.<sup>31</sup> Keempat kartel ini tidak hanya bersaing satu sama lain untuk menguasai jalur perdagangan narkoba, tetapi juga menimbulkan ancaman signifikan bagi stabilitas dan keamanan di Meksiko. Kekerasan yang mereka timbulkan sering kali melibatkan penyiksaan, eksekusi di depan umum, dan metode brutal lainnya yang menebar ketakutan di kalangan masyarakat. Mereka juga memiliki departemen-departemen khusus yang bertanggung jawab atas produksi narkoba, distribusi, keuangan, keamanan, hingga operasi intelijen, sehingga memungkinkan kartel untuk memiliki sumber daya finansial yang melimpah. Alhasil, dana ini digunakan untuk membeli senjata api canggih, menyuap pejabat pemerintah, dan bahkan membiayai kampanye politik.<sup>32</sup> Hubungan antara kartel narkoba di Meksiko dan pemerintahnya sangat kompleks. Di satu sisi,

---

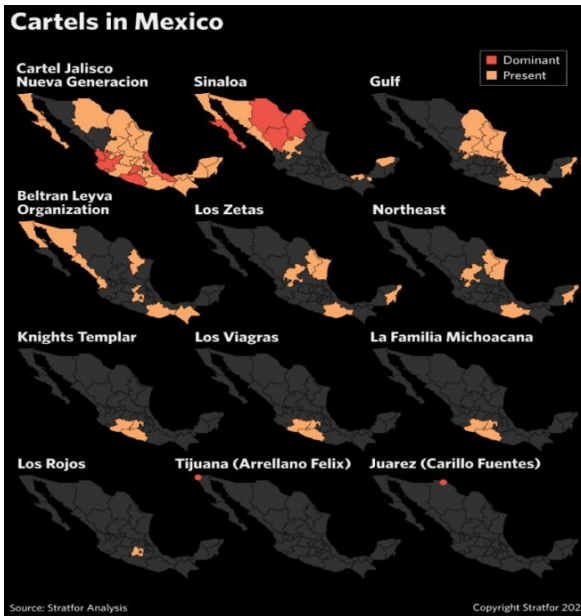
<sup>31</sup> Danur Lambang Pristiandaru, "Kejam Dan Brutal: Berikut Profil 4 Kartel Narkoba Terkuat Di Meksiko," *Kompas.Com*, 2020, [https://www.kompas.com/global/read/2020/12/16/124737270/kejam-dan-brutal-berikut-profil-4-kartel-narkoba-terkuat-di-meksiko?page=all&utm\\_source=chatgpt.com](https://www.kompas.com/global/read/2020/12/16/124737270/kejam-dan-brutal-berikut-profil-4-kartel-narkoba-terkuat-di-meksiko?page=all&utm_source=chatgpt.com).

<sup>32</sup> Tempo, "Bos Kartel Narkoba El Chapo Pernah Bunuh Polisi Untuk Wali Kota," *Tempo.Co*, 2019, <https://www.tempo.co/internasional/bos-kartel-narkoba-el-chapo-pernah-bunuh-polisi-untuk-wali-kota-777319>.

pemerintah berupaya memberantas kartel melalui berbagai kebijakan dan operasi militer. Namun di sisi lain, ada indikasi bahwa beberapa pejabat pemerintah justru bekerja sama dengan kartel tersebut. Salah satu contohnya adalah penangkapan Jenderal Salvador Cienfuegos, mantan Menteri Pertahanan Meksiko oleh otoritas Amerika Serikat pada 15 Oktober 2020 di Bandara Los Angeles. Cienfuegos yang menjabat pada tahun 2012 hingga 2018, dituduh melindungi dan mendukung operasi sebuah kartel yang berbasis di Nayarit dan Sinaloa. Ia diduga menerima suap sebagai imbalan atas perlindungan terhadap aktivitas ilegal kartel tersebut. Selain itu, penangkapan Cienfuegos juga menimbulkan ketegangan diplomatik antara Meksiko dan Amerika Serikat, terutama karena kurangnya koordinasi sebelum penangkapan dilakukan. Pemerintah Meksiko mengancam akan meninjau ulang kerja sama keamanan dengan AS akibat tindakan tersebut.<sup>33</sup> Berikut peta persebaran kartel narkoba yang ada di Mexico pada tahun 2020.

---

<sup>33</sup> ANTARA, "Badan Narkotika AS Tangkap Eks Menteri Pertahanan Meksiko," *Antaraneews.Com*, 2020, <https://www.antaranews.com/berita/1787569/badan-narkotika-as-tangkap-eks-menteri-pertahanan-meksiko>.



- **Korupsi**  
 Korupsi merupakan masalah yang sangat serius di Meksiko. Kartel telah berhasil menyusup ke dalam berbagai lembaga pemerintahan, termasuk kepolisian dan militer. Mereka melakukan ini dengan cara menyuap pejabat, mengancam keluarga mereka, atau bahkan merekrut mereka sebagai anggota kartel. Dengan adanya anggota kartel di dalam sistem peradilan, maka sangat sulit untuk menjatuhkan hukuman kepada anggota kartel lainnya. Hal ini membuat sulit untuk menjatuhkan hukuman kepada anggota kartel dan melemahkan upaya penegakan hukum. Dua kasus menonjol yang mengilustrasikan

<sup>34</sup> Stratfor Worldview, "Tracking Mexico's Cartels in 2021," 2021, <https://worldview.stratfor.com/article/tracking-mexicos-cartels-2021>.

masalah ini adalah penangkapan 18 pejabat polisi pada tahun 2011 dan tuduhan suap terhadap mantan Presiden Enrique Peña Nieto. Pada tahun 2011, otoritas Meksiko menangkap 18 pejabat kepolisian yang diduga menerima suap bulanan sebesar 2.000 hingga 10.000 peso dari kartel narkoba Los Zetas. Suap ini diberikan sebagai imbalan atas perlindungan terhadap operasi ilegal kartel tersebut. Kasus ini mengungkap tingkat korupsi di kalangan aparat penegak hukum, yang berkontribusi pada sulitnya memberantas aktivitas kartel di Meksiko.<sup>35</sup> Selama persidangan Joaquín "El Chapo" Guzmán di Amerika Serikat, seorang saksi bernama Alex Cifuentes, yang mengaku sebagai mantan tangan kanan Guzmán, bersaksi bahwa mantan Presiden Meksiko, Enrique Peña Nieto, menerima suap sebesar \$100 juta dari Guzmán. Tuduhan ini, meskipun dibantah oleh Peña Nieto, menyoroti dugaan keterlibatan pejabat tinggi dalam aktivitas kartel narkoba, yang dapat menghambat upaya pemberantasan kejahatan terorganisir di Meksiko.<sup>36</sup> Kedua kasus ini menunjukkan betapa dalamnya infiltrasi kartel narkoba ke dalam struktur pemerintahan Meksiko. Kolusi antara pejabat pemerintah dan kartel narkoba menciptakan

---

<sup>35</sup> Emerson Yuntho, "Narkotika Dan Korupsi," *Indonesia Corruption Watch*, 2016, <https://antikorupsi.org/id/article/narkotika-dan-korupsi>.

<sup>36</sup> VOA, "Kartel Narkoba Suap Para Pejabat Meksiko," *Voaindonesia.Com*, 2012, <https://www.voaindonesia.com/a/kartel-narkoba-suap-para-pejabat-meksiko-139164434/104769.html>.

hambatan signifikan dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan terorganisir. Selain itu, hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam tubuh pemerintah dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan narkoba berjalan efektif dan bebas dari korupsi.

b. Permintaan Global

Permintaan akan narkoba di seluruh dunia terus meningkat, mendorong kartel untuk terus memproduksi dan mengedarkan narkoba. Kartel memiliki berbagai rute perdagangan yang kompleks untuk mengedarkan narkoba. Mereka menggunakan berbagai moda transportasi, seperti pesawat terbang, kapal laut, dan kendaraan darat untuk mengangkut narkoba dari tempat produksi ke negara tujuan. Dalam satu dekade terakhir, terjadi perubahan besar dalam pola perdagangan dan penggunaan narkoba di Asia Tengah, Transkaukasia, dan Eropa Timur. Wilayah yang sebelumnya didominasi oleh perdagangan opiat kini beralih ke penggunaan stimulan sintetis. Produksi stimulan sintetis di wilayah ini menggunakan banyak bahan baku yang tidak diatur secara internasional, sehingga memudahkan proses pembuatannya. Peningkatan penggunaannya dalam beberapa tahun terakhir juga didukung oleh pasar gelap online berbahasa Rusia bernama Hydra. Sebelum ditutup pada April 2022,

Hydra menguasai 80-90% penjualan narkoba di dark web. Berbeda dengan pasar gelap lainnya, Hydra lebih banyak menjual stimulan dibandingkan narkoba jenis lain. Selain itu, dampak meningkatnya perdagangan kokain sangat terasa di Ekuador, yakni mengalami gelombang kekerasan mematikan dalam beberapa tahun terakhir akibat aktivitas kelompok kriminal lokal dan transnasional, terutama dari Meksiko dan negara-negara Balkan.<sup>37</sup>

c. Faktor Sosial

Kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kurangnya peluang kerja di Meksiko menciptakan kondisi yang kondusif bagi berkembangnya kejahatan terorganisasi. Kartel seringkali merekrut anggota dari kalangan masyarakat miskin dengan iming-iming uang dan kekuasaan. Kurangnya peluang pendidikan dan pekerjaan yang layak membuat banyak orang merasa putus asa dan mudah terpengaruh oleh iming-iming uang cepat yang ditawarkan oleh kartel. Banyak anak di Meksiko yang terlibat penggunaan narkoba dan sering kali berhenti atau dikeluarkan dari sekolah sebelum akhirnya direkrut oleh kartel narkoba. Peran geng jalanan lokal dalam perekrutan anak-anak tampaknya semakin berkurang, karena kartel kini lebih sering merekrut mereka langsung setelah mereka putus

---

<sup>37</sup> United Nations Report, *World Drug Report 2024*, ed. Jonathan Gibbons, *United Nations* (United Nations publication, 2024), [https://doi.org/10.1049/pbpo124e\\_ch20](https://doi.org/10.1049/pbpo124e_ch20).

sekolah. Data dari Hak Anak di Meksiko menunjukkan bahwa antara tahun 2000 hingga 2019, sebanyak 21.000 anak di bawah usia 18 tahun menjadi korban pembunuhan, sementara 7.000 lainnya dilaporkan hilang. Pada tahun 2019, sekitar 30.000 anak diperkirakan telah direkrut oleh jaringan kartel narkoba. Proses perekrutan ini sering kali dilakukan oleh anak-anak lain seusia mereka. Selain itu, kartel menggunakan berbagai strategi seperti pemberian narkoba, manipulasi keyakinan agama, dan menciptakan rasa kebersamaan yang sulit didapatkan anak-anak tersebut di tempat lain.<sup>38</sup>

d. Kerjasama Internasional

Memberantas kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba membutuhkan kerjasama yang kuat antara berbagai negara. Namun, perbedaan kebijakan narkoba di berbagai negara dan kurangnya koordinasi seringkali menjadi hambatan. Setiap negara memiliki prioritas yang berbeda-beda dalam kebijakan luar negerinya. Hal ini dapat menghambat kerjasama internasional dalam memberantas kartel narkoba dan menyulitkan koordinasi antara berbagai negara dalam memberantas kejahatan transnasional. Salah satu contoh dari perbedaan kebijakan ini yaitu Amerika Serikat yang memiliki kebijakan "War on

---

<sup>38</sup> VOA Indonesia, "Tragis, Kartel Narkoba Meksiko Kerap Rekrut Anak-Anak Berusia 10 Tahun," *Voaindonesia.Com*, 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/tragis-kartel-narkoba-meksiko-kerap-rekrut-anak-anak-berusia-10-tahun-/6273916.html>.

Drugs" yang cenderung fokus pada pendekatan represif, termasuk hukuman berat untuk pelaku kejahatan narkoba. Sebaliknya, negara-negara seperti Portugal memilih pendekatan dekriminalisasi dengan fokus pada rehabilitasi pengguna narkoba. Perbedaan ini sering menyebabkan ketegangan dalam koordinasi, terutama ketika negara-negara dengan pendekatan berbeda mencoba bekerja sama dalam operasi lintas batas. Perbedaan ini terlihat dalam upaya penanganan perdagangan kokain dari Amerika Latin ke Eropa dan Amerika Utara.<sup>39</sup>

e. Adaptasi Kartel

Kartel narkoba sangat adaptif dan terus mengembangkan strategi baru untuk menghindari penangkapan. Mereka juga melakukan strategi untuk meningkatkan keuntungan kartel, seperti pencucian uang, perdagangan manusia, dan pemalsuan dokumen. Hal lain yang membuat mereka semakin sulit dilacak dan ditangkap adalah karena mereka menggunakan teknologi terbaru, seperti enkripsi dan komunikasi yang aman, untuk melakukan komunikasi dan transaksi.<sup>40</sup> Contoh kasus yang

---

<sup>39</sup> Ricky Gunawan et al., *Mendorong Kebijakan Non-Pemidanaan Bagi Penggunaan Narkotika: Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia*, *Icjr.or.Id*, 2021, <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/05/Final-Tata-Kelola-Narkotika-ICJR-16032021.pdf>.

<sup>40</sup> UNODC, "UNODC Supported Pilot Initiative for Mexico UNTOC Review Process Begins Its Activities," *United Nations Office on Drugs and Crime*, 2023.

menggambarkan adaptasi kartel narkoba dalam menghindari penangkapan dan meningkatkan keuntungan mereka adalah penggunaan teknologi enkripsi oleh Phantom Secure, sebuah perusahaan yang bermarkas di Kanada. Phantom Secure menghasilkan dan menjual ponsel pintar yang dimodifikasi khusus untuk digunakan oleh kelompok penjahat, termasuk Kartel Sinaloa asal Meksiko. Ponsel tersebut dilengkapi dengan teknologi enkripsi canggih yang memungkinkan komunikasi yang aman dan sulit dipantau oleh pihak berwenang. Vincent Ramos selaku bos Phantom Secure, didakwa oleh pihak berwenang Amerika Serikat atas perannya dalam menyediakan teknologi ini untuk penyelundup narkoba. Perusahaan tersebut beroperasi untuk memfasilitasi penyelundupan narkoba global, dengan memungkinkan para anggota kartel untuk berkomunikasi dengan aman dan melanjutkan kegiatan ilegal mereka tanpa terdeteksi. Kasus ini menunjukkan bagaimana kartel narkoba memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah operasi mereka dan menghindari upaya penegakan hukum yang semakin canggih.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Tribun News, "Blackberry Dimodifikasi Untuk 'Membantu Kartel Penyelundup Narkoba,'" *Tribunnews.Com*, 2018, <https://m.tribunnews.com/internasional/2018/03/19/blackberry-dimodifikasi-untuk-membantu-kartel-penyelundup-narkoba?page=1>.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi masyarakat adalah kekuasaan kartel narkoba yang begitu kuat dan telah berdampak pada banyak aspek. Hal ini menciptakan suasana ketakutan dan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Meksiko. Kartel-kartel ini bukan hanya mengandalkan kekerasan fisik, tetapi juga pemerasan yang menekan secara ekonomi dan psikologis yang membuat warga merasa tidak aman, bahkan di tempat tinggal mereka sendiri. Ancaman dan intimidasi menjadi bagian dari kehidupan mereka, sehingga ruang gerak warga seolah-olah terbatas oleh kendali kartel. Namun, di tengah kondisi yang menakutkan ini, masyarakat mulai menunjukkan keberanian untuk bangkit. Berbagai upaya perlahan muncul dari dalam komunitas, karena mereka menyadari bahwa hanya dengan bersatu mereka bisa melawan dominasi kartel. Dukungan dan solidaritas antarwarga pun semakin kuat, dengan tujuan untuk melindungi satu sama lain. Masyarakat sipil di Meksiko mulai mengambil tindakan dengan membentuk kelompok perlindungan mandiri untuk menghadapi kartel narkoba.<sup>42</sup>

Kelompok mandiri tersebut dikenal dengan sebutan *autodefensa*. Peran dalam gerakan *autodefensa* sangat terbagi berdasarkan jenis kelamin, dengan pria yang berjaga di barikade, sementara wanita memberikan dukungan berupa layanan tambahan seperti menyiapkan makanan. Pembagian

---

<sup>42</sup> BBC News Indonesia, "Warga Sipil Meksiko Lawan Kartel Narkoba," *BBC News Indonesia*, n.d., [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/01/140113\\_meksiko\\_mafia](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/01/140113_meksiko_mafia).

peran ini tidak selalu berlaku di seluruh Michoacán, di mana beberapa wanita juga ikut berperan sebagai pejuang bersenjata. Gerakan *autodefensa* ini bisa dilihat sebagai cara untuk mengukuhkan kembali peran dan identitas gender melalui tindakan. Masalah peran gender ini tidak hanya terjadi di Tancítaro, namun juga terlihat secara lebih luas di gerakan *autodefensa* di Michoacán dengan alasan utama mereka mengambil senjata adalah untuk melawan pemerkosaan sistematis terhadap wanita dan gadis muda oleh anggota kartel.<sup>43</sup> Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat Meksiko yang merasa tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah atau pihak internasional, mulai mengambil langkah-langkah perlindungan sendiri. Meskipun hal ini menunjukkan keberanian warga dalam menghadapi ancaman kartel, keberadaan kelompok-kelompok tersebut justru menambah tantangan bagi UNODC dan pihak berwenang. Mereka tidak hanya harus menghadapi kekuatan kartel, tetapi juga menghadapi ketegangan antara milisi lokal dan aparat keamanan yang sah.

---

<sup>43</sup> Alexander Markendale Curry, "Autodefensas and the Construction of Citizenship and State-Society Relations in Mexico" (University of London, 2019), <https://sas-space.sas.ac.uk/9822/1/Thesis - Autodefensas - Alexander M Curry - post viva final version.pdf>.

## C. Kesimpulan

Memberantas kartel narkoba di Meksiko merupakan tantangan yang sangat kompleks dan membutuhkan upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun komunitas internasional. Tantangan-tantangan yang dihadapi UNODC sangat beragam dan saling terkait, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi masalah ini. Meskipun upaya UNODC dalam memberantas kartel narkoba di Meksiko telah melibatkan berbagai program dan kerjasama internasional, namun pencapaian yang signifikan masih memerlukan waktu dan usaha yang lebih besar. Program-program yang ada telah membantu memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan negara-negara tetangga, akan tetapi keberhasilan dalam menangani masalah ini bergantung pada penerapan yang lebih konsisten dan berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi UNODC bukan hanya terkait dengan penguatan penegakan hukum dan kerjasama antarnegara, tetapi juga dalam menghadapi ketidakstabilan internal di Meksiko. Keberhasilan UNODC dalam mendukung Meksiko untuk mengatasi kartel narkoba bergantung pada seberapa efektif program-program yang ada dapat diterapkan secara konsisten. Pemberantasan kartel narkoba membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi, serta melibatkan semua

pihak terkait, termasuk masyarakat lokal. Dengan langkah-langkah yang lebih terkoordinasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan permasalahan ini dapat diatasi dengan lebih efektif dalam jangka panjang.

---

## Daftar Pustaka

- ANTARA. "Badan Narkotika AS Tangkap Eks Menteri Pertahanan Meksiko." *Antaraneews.Com*, 2020. <https://www.antaraneews.com/berita/1787569/badan-narkotika-as-tangkap-eks-menteri-pertahanan-meksiko>.
- . "Pembunuhan Di Meksiko Meningkat Pada 2019." *Antara*, 2019. <https://www.antaraneews.com/berita/969950/pembunuhan-di-meksiko-meningkat-pada-2019>.
- Arindrayani, Angelica Putri, and Sarah Anabarja. "Kejahatan Terorganisir Transnasional: Penyelundupan Manusia Dalam Jaringan Snakeheads Cina." *Intermestic: Journal of International Studies* No 8 (2), no. 2 (2024): 449-473. Diambil dari. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v8n2.4>.
- BBC News Indonesia. "Dalam Seminggu 12 Polisi Meksiko Terbunuh Dalam Perang Melawan Kartel Narkoba, Satu Di Antaranya Dimutilasi." *Bbc.Com*, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50837521>.

- . “Warga Sipil Meksiko Lawan Kartel Narkoba.” *BBC News Indonesia*, n.d. [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/01/140113\\_meksiko\\_mafia](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/01/140113_meksiko_mafia).
- Congressional Research Service. “Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations (CRS Report Number R41576).” *CRS Reports*, 2022. <https://crsreports.congress.gov>.
- Danur Lambang Priandaru. “Kejam Dan Brutal: Berikut Profil 4 Kartel Narkoba Terkuat Di Meksiko.” *Kompas.Com*, 2020. [https://www.kompas.com/global/read/2020/12/16/124737270/kejam-dan-brutal-berikut-profil-4-kartel-narkoba-terkuat-di-meksiko?page=all&utm\\_source=chatgpt.com](https://www.kompas.com/global/read/2020/12/16/124737270/kejam-dan-brutal-berikut-profil-4-kartel-narkoba-terkuat-di-meksiko?page=all&utm_source=chatgpt.com).
- DetikNews. “Ngeri! Ini 7 Akibat Kartel Narkoba Kuasai Meksiko.” *News.Detik.Com*, 2012. <https://news.detik.com/berita/d-2057265/ngeri-ini-7-akibat-kartel-narkoba-kuasai-meksikohttps://news.detik.com/berita/d-2057265/ngeri-ini-7-akibat-kartel-narkoba-kuasai-meksiko>.
- Editors, CFR.org. “Mexico’s Long War: Drugs, Crime, and the Cartels.” *Council on Foreign Relations*, 2024. <https://www.cfr.org/backgrounder/mexicos-long-war-drugs-crime-and-cartels>.

- Efita Ayu, Maria. "Perdagangan Perempuan Dan Anak Serta Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Parlemo." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018): 1–12. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.5>.
- Efragil Samosir, Faisyal Rani. "Efektivitas Kerjasama Penanggulangan Peredaran Narkoba Ilegal (Merida Initiative) Antara Pemerintah Meksiko Dan Amerika Serikat (2007-2012)." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau* 1, no. 2 (2012).
- Falah, Humam Shafar Al. "Implementasi Smart Oleh United Nations of on Drug and Crime (UNODC) Dalam Mengatasi Permasalahan Narkotika Di Meksiko Tahun 2018-2020." Universitasl Islam Indonesia, 2024. [dspace.uui.ac.id/123456789/51131](https://dspace.uui.ac.id/123456789/51131).
- Gunawan, Ricky, Miko Ginting, Raynov T. Pamintori, Aisya Humaida, and Maidina Rahmawati. *Mendorong Kebijakan Non-Pemidanaan Bagi Penggunaan Narkotika: Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia*. *Icjr.or.Id*, 2021. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/05/Final-Tata-Kelola-Narkotika-ICJR-16032021.pdf>.
- Hayatzada, Haseebullah. "Crime and Development The Direct and Indirect Impacts of Organized Crime Operated by Major Drug Cartels on Secondary Education and Formal Employment among Youth in Mexico." *LUP Student*

- Papers*, 2019, 1–41. <http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8995200>.
- Indonesia, CNN. “Kenapa Di Meksiko Banyak Kartel Narkoba?” *CNN Indonesia*, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241009133715-134-1153336/kenapa-di-meksiko-banyak-kartel-narkoba>.
- Indonesia, VOA. “Tragis, Kartel Narkoba Meksiko Kerap Rekrut Anak-Anak Berusia 10 Tahun.” *Voaindonesia.Com*, 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/tragis-kartel-narkoba-meksiko-kerap-rekrut-anak-anak-berusia-10-tahun-/6273916.html>.
- Jelita, Almira Farah. “Analisis Kerja Sama Merida Initiative Antara Meksiko Dan Amerika Serikat Dalam Mengurangi Drug Trafficking Organizations Di Meksiko.” *Indonesian Journal of Global Discourse* 2, no. 2 (2020): 52–73. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v2i2.23>.
- Markendale Curry, Alexander. “Autodefensas and the Construction of Citizenship and State-Society Relations in Mexico.” University of London, 2019. <https://sas-space.sas.ac.uk/9822/1/Thesis - Autodefensas - Alexander M Curry - post viva final version.pdf>.
- Masullo, Juan, and Davide Morisi. “The Human Costs of the War on Drugs. Attitudes Towards Militarization of Security in Mexico.” *Comparative Political Studies* 57, no. 6 (2024): 887–920.

<https://doi.org/10.1177/00104140231192056>.

Muhaimin. "10 Kartel Narkoba Terbesar Di Dunia, Ada Yang Pendapatannya Rp311 Triliun." *Sindonews.Com*, 2024. <https://international.sindonews.com/read/1298947/45/10-kartel-narkoba-terbesar-di-dunia-ada-yang-pendapatannya-rp311-triliun-1705294905>.

Nathanael, Nikko. "Narkoba Di Meksiko: Kartel Menyebabkan Kesenjangan Sosial Di Masyarakat." *Kumparan.Com*, 2023. <https://kumparan.com/nikko-nathanael/narkoba-di-meksiko-kartel-menyebabkan-kesenjangan-sosial-di-masyarakat-21So3WjJEbS/1>.

News, Tribun. "Blackberry Dimodifikasi Untuk 'Membantu Kartel Penyelundup Narkoba.'" *Tribunnews.Com*, 2018. <https://m.tribunnews.com/internasional/2018/03/19/blackberry-dimodifikasi-untuk-membantu-kartel-penyelundup-narkoba?page=1>.

Report, United Nations. *World Drug Report 2024*. Edited by Jonathan Gibbons. *United Nations*. United Nations publication, 2024. [https://doi.org/10.1049/pbpo124e\\_ch20](https://doi.org/10.1049/pbpo124e_ch20).

S, Ade. "Sejarah Dunia: Bagaimana Kartel Meksiko Ambil Alih Kerajaan Narkoba Pablo Escobar?" *Nationalgeographic.Grid.Id*, 2024. <https://nationalgeographic.grid.id/read/134108548/sejarah-dunia-bagaimana-kartel-meksiko-ambil-alih-kerajaan-narkoba-pablo-escobar?page=all>.

- Salman Al Farisi Herdiana. "Pengaruh Perjanjian Amerika Serikat Dan Kolombia Mengenai Pemberantasan Peredaran Narkotika Dan Psikotropika Ilegal Melalui Jalur Laut Terhadap Penanggulangan Masalah Narkotika Ilegal Di Amerika Serikat" 19, no. 19 (2009): 19.
- Schultze-kraft, Markus. "Organised Crime, Violence and Development: Topic Guide." *Gsdrc.Org*, 2018, 2–15. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17782.40007>.
- Shirk, David. "Transnational Crime, U.S. Border Security and the War on Drugs in Mexico," 2011, 1–12. <http://catcher.sandiego.edu/items/peacestudies/110331-Shirk-Testimony.pdf>.
- Stratfor Worldview. "The Geography of Mexican Drug Cartels," 2016. <https://worldview.stratfor.com/article/geography-mexican-drug-cartels>.
- . "Tracking Mexico's Cartels in 2021," 2021. <https://worldview.stratfor.com/article/tracking-mexicos-cartels-2021>.
- Tempo. "Bos Kartel Narkoba El Chapo Pernah Bunuh Polisi Untuk Wali Kota." *Tempo.Co*, 2019. <https://www.tempo.co/internasional/bos-kartel-narkoba-el-chapo-pernah-bunuh-polisi-untuk-wali-kota-777319>.
- . "Konflik Kartel Narkoba Di Meksiko Menewaskan 53 Orang Dan 51 Hilang." *Tempo.Com*, 2024.

<https://www.tempo.co/internasional/konflik-kartel-narkoba-di-meksiko-menewaskan-53-orang-dan-51-hilang--7369>.

The United Nations Office on Drugs and Crime. "About UNOV." *United Nations Office at Vienna*, 2017. <https://www.unov.org/unov/en/unodc.html>.

United Nations Office on Drugs and Crime. "About the United Nations Office on Drugs and Crime." *United Nations Office on Drugs and Crime*, n.d. <https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html>.

———. "Definitions of Organized Crime." *Unodc.Org*, April 2018. <https://www.unodc.org/e4j/ru/organized-crime/module-1/key-issues/defining-organized-crime.html>.

———. *Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean A Threat Assessment*. UNODC, 2012. <https://doi.org/10.18356/493ae18b-en>.

UNODC. "Our Mandate." *UNODC*, 2002. <https://www.unodc.org/unodc/en/environment-climate/our-mandate.html>.

———. "UNODC Supported Pilot Initiative for Mexico UNTOC Review Process Begins Its Activities." *United Nations Office on Drugs and Crime*, 2023.

VOA. "Kartel Narkoba Suap Para Pejabat Meksiko." *Voaindonesia.Com*, 2012.

<https://www.voaindonesia.com/a/kartel-narkoba-suap-para-pejabat-meksiko-139164434/104769.html>.

———. “Meksiko Gugat Produsen Senjata AS Atas Perdagangan Senjata Ilegal.” *Voaindonesia.Com*, 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/meksiko-gugat-produsen-senjata-as-atas-perdagangan-senjata-illegal/5991587.html>.

Yuntho, Emerson. “Narkotika Dan Korupsi.” *Indonesia Corruption Watch*, 2016. <https://antikorupsi.org/id/article/narkotika-dan-korupsi>.

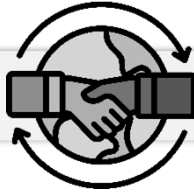


UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# **KEBIJAKAN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DI ERA KONTEMPORER: KONSEP DAN STUDI KASUS**



## **BAB III**

# **Peran Uni Eropa dalam *The Great Green Wall Initiative* di Afrika Tahun 2021-2025**

---

*The Great Green Wall Initiative* adalah sebuah gerakan yang diinisiasi oleh negara-negara Afrika pada tahun 2007 yang bertujuan untuk memulihkan dan menghidupkan kembali wilayah Sahel di Afrika. Wilayah Sahel yang termasuk dalam gerakan *The Great Green Wall Initiative* meliputi Djibouti yang terletak di ujung timur Benua Afrika hingga Senegal yang berlokasi di bagian paling barat Benua Afrika. Wilayah Sahel tersebut telah terdegradasi dan semestinya dapat memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Target yang ingin dicapai oleh gerakan *The Great Green Wall Initiative* adalah

memulihkan 100 juta hektar wilayah Sahel dan menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030.

Program *Global Gateway* Uni Eropa merupakan strategi investasi infrastruktur Uni Eropa untuk membangun koneksi digital, energi, dan transportasi yang aman dan berkelanjutan. Program *Global Gateway* diimplementasikan melalui berbagai proyek yang dilaksanakan di berbagai region di dunia, salah satunya adalah Afrika. Melalui *Global Gateway Investment Package* Uni Eropa-Afrika, Uni Eropa berkolaborasi dengan negara-negara yang terlibat dalam *The Great Green Wall Initiative* melalui investasi di bidang infrastruktur.

### **A. Latar Belakang *The Great Green Wall Initiative***

Selama puluhan tahun terakhir, perubahan iklim menjadi topik yang banyak diperbincangkan di seluruh dunia, tidak terkecuali Benua Afrika. Perubahan iklim, pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan, serta pertanian berlebihan menyebabkan desertifikasi dan degradasi lahan, seperti kekeringan dan menurunnya jumlah lahan subur di Benua Afrika pada 30 tahun terakhir. Peristiwa tersebut tentu merugikan masyarakat Afrika, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah Sahel yang sebagian besar populasinya bergantung pada sektor pertanian. Sebagai wilayah yang penduduknya bergantung pada sektor pertanian, tidak

adanya lahan subur untuk bertani dapat menyebabkan munculnya permasalahan sosial yang lain, yaitu kemiskinan.<sup>1</sup>

Pada tahun 1980, Thomas Sankara, Pemimpin Burkina Faso pada masa itu, mengusulkan solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan yang tengah terjadi, yaitu dengan mentransformasi wilayah di Benua Afrika yang terdegradasi mulai dari Djibouti yang berada di bagian timur hingga Senegal yang berada di bagian barat Benua Afrika melalui '*The Great Green Wall Initiative.*' Agenda tersebut baru terwujud pada tahun 2005 ketika Presiden Senegal Abdoulaye Wade dan Presiden Nigeria Olusegun Obasanjo memasukkan agenda *The Great Green Wall Initiative* ke dalam agenda internasional pada KTT Kepala Negara CEN-SAD (Community of Sahel-Saharan States) ketujuh.<sup>2</sup> Agenda *The Great Green Wall Initiative* secara resmi diadopsi oleh Uni Afrika pada tahun 2007 yang berfokus pada wilayah Sahel.<sup>3</sup> Negara-negara yang terlibat dalam Great Green Wall Initiative adalah negara-negara yang berada di wilayah Sahel-Sahara, yaitu Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Sudan, Chad, Ethiopia, Eritrea, dan Djibouti.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), "The Great Green Wall Press Kit," Januari 2021, [https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/OPS%20Press%20kit%20ENG%20%20Version%20-%20Final\\_0.pdf](https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/OPS%20Press%20kit%20ENG%20%20Version%20-%20Final_0.pdf)

<sup>2</sup> United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD).

<sup>3</sup> Global Environment Facility, "The Great Green Wall Initiative: Supporting Resilient Livelihoods and landscapes in the Sahel," Agustus 2019.

<sup>4</sup> Ryan Schleeter, "The Great Green Wall," National Geographic, Oktober 2023, <https://education.nationalgeographic.org/resource/great-green-wall/>

Penciptaan penghalang vegetasi antara 100 hingga 400 mm isohyet dengan panjang 7000 km dan lebar 15 km di sepanjang wilayah Sahel merupakan tujuan awal pendirian agenda *The Great Green Wall Initiative*. Seiring dengan berjalannya waktu, tujuan *The Great Green Wall Initiative* telah berevolusi menjadi suatu pengelolaan ekosistem yang terintegrasi, yang mencakup berbagai penggunaan lahan dan sistem produksi. Hal tersebut termasuk upaya konservasi dan pengelolaan air, regenerasi vegetasi alami, serta retorasi dan pengelolaan lahan kering yang berkelanjutan.<sup>5</sup>

*The Great Green Wall Initiative* melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah nasional, sektor privat, organisasi internasional, hingga warga sipil. Berbagai pihak tersebut bekerja sama di bawah koordinasi Pan-Afrika untuk menghentikan degradasi lahan. Untuk menyukseskan implementasi *The Great Green Wall Initiative*, beberapa mitra internasional melakukan investasi pada insiatif ini, yaitu Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), World Bank, United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), International Union for Conservation of Nature (IUCN), Global Environment Facility (GEF), dan Uni Eropa.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Climatekos gGmbH, "The Great Green Wall Implementation Status and Way Ahead to 2030," 2020, [https://catalogue.unccd.int/1551\\_GGW\\_Report\\_ENG\\_Final\\_040920.pdf](https://catalogue.unccd.int/1551_GGW_Report_ENG_Final_040920.pdf)

<sup>6</sup> Climatekos gGmbH, "The Great Green Wall Implementation Status and Way Ahead to 2030," 2020, [https://catalogue.unccd.int/1551\\_GGW\\_Report\\_ENG\\_Final\\_040920.pdf](https://catalogue.unccd.int/1551_GGW_Report_ENG_Final_040920.pdf)

## B. Program Investasi *Global Gateway* Uni Eropa

*Global Gateway* merupakan salah satu strategi Uni Eropa untuk mengatasi tantangan global melalui kemitraan internasional yang mempromosikan dan menjunjung tinggi kepentingan dan nilai-nilai Eropa, serta berkontribusi terhadap kemakmuran dan perdamaian dunia. *Global Gateway* adalah strategi Uni Eropa untuk meningkatkan koneksi yang aman, bersih, dan cerdas dalam bidang digital, transportasi, dan energi. Selain itu, *Global Gateway* juga bertujuan untuk memperkuat sistem pendidikan, penelitian, dan kesehatan di seluruh dunia.<sup>7</sup> Program investasi *Global Gateway* pertama kali diperkenalkan oleh Uni Eropa ke seluruh dunia pada bulan Desember tahun 2021. Program investasi *Global Gateway* diperkenalkan untuk membantu mengatasi kesenjangan investasi infrastruktur global dengan menggalang investasi proyek hingga €300 miliar dalam periode tahun 2021 hingga 2027.<sup>8</sup>

Pendanaan berbagai proyek yang berada di bawah naungan program investasi *Global Gateway* disampaikan melalui pendekatan *Team Europe* yang menyatukan inisiatif Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, lembaga keuangan dan pembangunan, serta sektor swasta. *Team Europe* terdiri dari Uni Eropa, anggota-anggota Uni Eropa, serta lembaga

---

<sup>7</sup> European Union, "International Partnerships," t.t., [https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies\\_en](https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies_en)

<sup>8</sup> European Parliament. Directorate General for Parliamentary Research Services., *Global Gateway 2030: The Future of Europe's Global Infrastructure Bid.* (LU: Publications Office, 2024), <https://data.europa.eu/doi/10.2861/97607>

keuangan dan pembangunan Uni Eropa. Berbagai proyek tersebut harus berkelanjutan, dapat memperkuat pertahanan, dan dijalankan dengan kolaborasi atau kerja sama dengan mitra-mitra yang berpikiran sama. Proyek dalam *Global Gateway* berfokus pada lima prioritas tantangan global, yaitu iklim dan energi, digital, kesehatan, transportasi, riset, dan pendidikan.<sup>9</sup>

Pada isu iklim dan energi, Uni Eropa memiliki tujuan untuk investasi di bidang infrastruktur dan memfasilitasi transisi energi ramah lingkungan di luar negeri. Pada isu digital, tujuan Uni Eropa adalah mendanai berbagai proyek yang memungkinkan transisi digital agar sejalan dengan nilai-nilai dan standar Eropa. Sedangkan pada isu kesehatan, Uni Eropa memprioritaskan pengembangan manufaktur lokal. Pada isu ini, proyek *Global Gateway* akan berfokus pada memperkuat kapasitas produksi vaksin dan diversifikasi pasokan farmasi negara mitra di seluruh dunia. Pada isu transportasi, Uni Eropa memiliki tujuan untuk mempromosikan investasi infrastruktur global yang menciptakan jaringan transportasi yang cerdas, berketahanan, berkelanjutan, aman, dan inklusif dalam sistem multimoda. Pada isu riset dan pendidikan, Uni Eropa melakukan investasi pada kualitas pendidikan, termasuk edukasi digital dan pembelajaran seumur hidup, serta

---

<sup>9</sup> European Parliament. Directorate General for Parliamentary Research Services.

bekerja sama dengan negara-negara mitra untuk memperkuat kerja sama dalam penelitian dan inovasi.<sup>10</sup>

Proyek-proyek kerja sama yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan negara-negara mitra dalam *Global Gateway* harus berdasarkan pada enam prinsip. Enam prinsip tersebut yaitu<sup>11</sup>:

Prinsip nilai-nilai demokratis memiliki arti bahwa proyek-proyek *Global Gateway* tunduk pada hukum, menjunjung tinggi HAM, hukum internasional, dan standar kekayaan intelektual.

Prinsip *good governance* dan transparansi, yaitu proyek-proyek *Global Gateway* harus bersifat terbuka kepada publik, transparan, berkesinambungan secara ekonomi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip kemitraan setara, yang berarti bahwa negara-negara mitra harus dilibatkan dalam perancangan, pengembangan, dan implementasi proyek.

Prinsip hijau dan bersih, yaitu proyek-proyek *Global Gateway* bersifat netral terhadap iklim untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan transisi menuju ekonomi global yang sirkuler dan lebih bersih.

Prinsip fokus pada keamanan, yang memiliki arti bahwa proyek-proyek *Global Gateway* harus mampu membangun konektivitas yang terpercaya, mampu memitigasi kerentanan, dan melawan ancaman siber, fisik, dan paksaan ekonomi.

---

<sup>10</sup> Marcin Szczepanski, "The Global Gateway Taking Stock After Its First Year," *European Parliamentary Research Service*, Januari 2023.

<sup>11</sup> Szczepanski.

Mendorong investasi dari sektor swasta, yaitu *Global Gateway* harus memanfaatkan sektor-sektor swasta terdepan Eropa dengan melibatkan modal swasta melalui pemanfaatan sumber daya publik dari Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, lembaga keuangan, dan keuangan publik multilateral.

Implementasi proyek *Global Gateway* terbagi menjadi tiga region, yaitu Amerika Latin dan Karibia; Timur Tengah, Asia, dan Pasifik; serta Afrika Sub-Sahara.<sup>12</sup> Meskipun *Global Gateway* diperkenalkan sebagai proyek investasi pembangunan, penciptaan *Global Gateway* sebenarnya juga didasari oleh kondisi geopolitik, yaitu untuk menghalau pengaruh China dan memberikan alternatif yang lebih baik dibanding pembiayaan infrastruktur China.<sup>13</sup>

### **C. Global Gateway Investment Package Uni Eropa – Afrika**

Salah satu region yang menjadi mitra Uni Eropa dalam implementasi proyek *Global Gateway* adalah Afrika-Sub Sahara, yaitu melalui *The Global Gateway Africa – Europe Investment Package*. *The Global Gateway Africa – Europe Investment Package* bertujuan untuk mendukung Afrika menciptakan transformasi dan pemulihan yang ramah lingkungan, inklusif, kuat, dan digital, yang akan dicapai

---

<sup>12</sup> European Union, “Global Gateway Projects by Region,” t.t., [https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/initiatives-region\\_en](https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/initiatives-region_en)

<sup>13</sup> European Parliament. Directorate General for Parliamentary Research Services., *Global Gateway 2030*.

melalui beberapa strategi. Strategi tersebut antara lain yaitu mempercepat transisi digital, mempercepat transisi ramah lingkungan, mempercepat penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta mempercepat sistem kesehatan.<sup>14</sup>

Sama seperti implementasi *Global Gateway* pada umumnya, *The Global Gateway Africa – Europe Investment Package* diimplementasikan melalui inisiatif *Team Europe* yang terdiri dari Uni Eropa dan negara-negara anggotanya serta institusi keuangan Uni Eropa. Bantuan investasi yang diberikan *Team Europe* dalam implementasi *The Global Gateway Africa – Europe Investment Package* adalah sebesar €150 miliar. Investasi tersebut bertujuan untuk mendukung dan membantu Afrika dalam melakukan pemulihan dan transformasi yang inklusif, kuat, dan hijau dengan cara mempercepat transisi hijau, mempercepat transisi digital, mempercepat pertumbuhan berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, memperkuat sistem kesehatan, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan.<sup>15</sup> Melalui *The Global Gateway Africa – Europe Investment Package*, Uni Eropa juga berperan dalam membantu implementasi *Great Green Wall Initiative* di wilayah Sahel. Tujuan Uni Eropa dalam membantu *Great Green Wall Initiative* adalah untuk menciptakan pembangunan

---

<sup>14</sup> European Union, “EU-Africa: Global Gateway Investment Package,” t.t., [https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/initiatives-region/initiatives-sub-saharan-africa/eu-africa-global-gateway-investment-package\\_en](https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/initiatives-region/initiatives-sub-saharan-africa/eu-africa-global-gateway-investment-package_en)

<sup>15</sup> European Union.

berkelanjutan berbasis masyarakat yang memberikan keamanan, stabilitas, dan ketahanan di Kawasan Afrika, terutama wilayah Sahel.

Bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa sebesar €17,7 miliar.<sup>16</sup> Bantuan tersebut berupa berbagai program di sektor iklim dan energi, seperti perubahan iklim dan keamanan pangan yang dilaksanakan di 18 negara yang berkaitan dengan *Great Green Wall Initiative*. Program-program tersebut bertujuan untuk mengatasi pengurusan dan energi berkelanjutan yang merupakan tujuan utama dibentuknya *Great Green Wall Initiative*. Negara-negara tersebut terdiri dari 11 negara anggota Pan African Agency of the Great Green Wall (PAGGW), yaitu Sudan, Senegal, Burkina Faso, Chad, Nigeria, Niger, Mali, Mauritania, Ethiopia, Djibouti, Eritrea dan 7 negara Afrika-Sub Sahara, yaitu Benin, Ghana, Somalia, Sudan Selatan, Gambia, Cape Verde, dan Kamerun. Pada implementasinya, Uni Eropa menggunakan pendekatan terintegrasi yang menggabungkan aksi iklim, pembangunan pertanian pedesaan dengan konservasi keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan berkelanjutan untuk melaksanakan pengelolaan lahan berkelanjutan atau *sustainable land management*.<sup>17</sup>

Selain itu, Uni Eropa juga memberikan bantuan sebesar lebih dari €700 juta per tahun untuk *The Great Green Wall*

---

<sup>16</sup> European Union, "Growing the Great Green Wall," t.t., [https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/growing-great-green-wall\\_en#:~:text=The%20EU's%20support%20to%20the,the%20Convention%20on%20Biological%20Diversity](https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/growing-great-green-wall_en#:~:text=The%20EU's%20support%20to%20the,the%20Convention%20on%20Biological%20Diversity)

<sup>17</sup> European Union.

*Accelerator. The Great Green Wall Accelerator* diluncurkan secara resmi oleh Presiden Perancis, Emmanuel Macron, pada 11 Januari 2021 pada pertemuan One Planet Summit. *The Great Green Wall Accelerator* akan dikoordinasikan melalui Pan Africa Agency for the Great Green Wall (PAAGGW) dengan bantuan United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD). Pembentukan *The Great Green Wall Accelerator* dianggap perlu karena fokus *Great Green Wall Initiative* telah bergeser, dari yang awalnya penanaman pohon menjadi inisiatif pembangunan pedesaan komprehensif yang bertujuan untuk mengubah kehidupan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Sahel dengan menciptakan lahan hijau dan produktif di negara-negara PAAGGW.<sup>18</sup>

Selain itu, meski *Great Green Wall Initiative* berhasil memperbaiki sekitar 18 juta lahan yang rusak dan menciptakan 350.000 lapangan pekerjaan di negara-negara PAAGGW, *Great Green Wall Initiative* masih harus menghadapi beberapa tantangan, seperti struktur organisasi dan proses implementasi yang lemah, kurangnya pertimbangan dalam prioritas lingkungan nasional, dan kurangnya koordinasi informasi di tingkat regional dan nasional. Hal tersebut menyebabkan pembentukan *The Great Green Wall Accelerator* diperlukan agar fokus dan tujuan *Great Green Wall Initiative* dapat tercapai pada tahun 2030.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), "Green Wall Accelerator," t.t., <https://www.unccd.int/our-work/ggwi/great-green-wall-accelerator>

<sup>19</sup> United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD).

## D. Kesimpulan

Berdasarkan bacaan di atas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah *Great Green Wall Initiative* merupakan gerakan yang diinisiasi oleh negara-negara Afrika yang bertujuan untuk memulihkan dan menghijaukan kembali wilayah Sahel dan memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat di wilayah tersebut. Implementasi *Great Green Wall Initiative* juga dibantu oleh berbagai organisasi internasional, salah satunya adalah Uni Eropa. Uni Eropa melalui *The Global Gateway Africa – Europe Investment Package* memberikan bantuan investasi sebesar €17,7 miliar pada *Great Green Wall Initiative* lebih dari €700 per tahun pada *The Great Green Wall Accelerato*.

---

## Daftar Pustaka

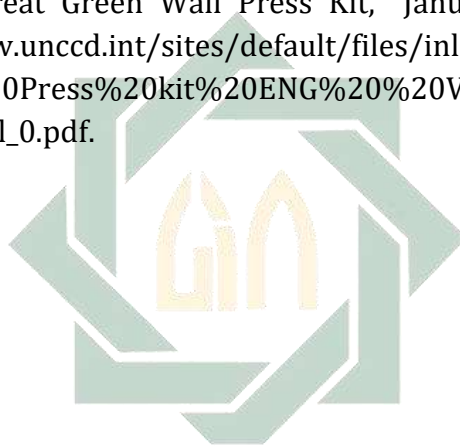
- Climatekos gGmbH. "The Great Green Wall Implementation Status and Way Ahead to 2030," 2020. [https://catalogue.unccd.int/1551\\_GGW\\_Report\\_ENG\\_Final\\_040920.pdf](https://catalogue.unccd.int/1551_GGW_Report_ENG_Final_040920.pdf).
- European Parliament. Directorate General for Parliamentary Research Services. *Global Gateway 2030: The Future of Europe's Global Infrastructure Bid*. LU: Publications Office, 2024. <https://data.europa.eu/doi/10.2861/97607>.

- European Union. "EU-Africa: Global Gateway Investment Package," t.t. [https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/initiatives-region/initiatives-sub-saharan-africa/eu-africa-global-gateway-investment-package\\_en](https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/initiatives-region/initiatives-sub-saharan-africa/eu-africa-global-gateway-investment-package_en).
- . "Global Gateway Projects by Region," t.t. [https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/initiatives-region\\_en](https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/initiatives-region_en).
- . "Growing the Great Green Wall," t.t. [https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/growing-great-green-wall\\_en#:~:text=The%20EU's%20support%20to%20the,the%20Convention%20on%20Biological%20Diversity](https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/growing-great-green-wall_en#:~:text=The%20EU's%20support%20to%20the,the%20Convention%20on%20Biological%20Diversity).
- . "International Partnerships," t.t. [https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies\\_en](https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies_en).
- Global Environment Facility. "The Great Green Wall Initiative: Supporting Resilient Livelihoods and Landscapes in the Sahel," Agustus 2019.
- Schleeter, Ryan. "The Great Green Wall." *National Geographic*, Oktober 2023. <https://education.nationalgeographic.org/resource/great-green-wall/>.

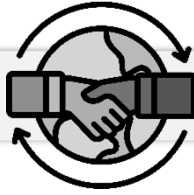
Szczepanski, Marcin. "The Global Gateway Taking Stock After Its First Year." *European Parliamentary Research Service*, Januari 2023.

United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD). "Green Wall Accelerator," t.t. <https://www.unccd.int/our-work/ggwi/great-green-wall-accelerator>.

———. "The Great Green Wall Press Kit," Januari 2021. [https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/OPS%20Press%20kit%20ENG%20%20Version%20-%20Final\\_0.pdf](https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/OPS%20Press%20kit%20ENG%20%20Version%20-%20Final_0.pdf).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## **BAB IV**

# ***Energy Security: Inisiatif Penghapusan Batubara, Singapura Dorong Akselerasi Energi Hijau***

---

Memasuki abad ke-21, isu kenaikan suhu permukaan bumi (*heat waves*) dan krisis energi menjadi perhatian masyarakat global. Dampak dari pemanasan global dirasakan oleh berbagai negara di dunia. Tidak hanya mempengaruhi perubahan struktur lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem sosial, ekonomi, politik global, dan lingkungan.<sup>1</sup> Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019), arus transformasi energi global dengan energi

---

<sup>1</sup> Enny Narwati, Dina Sunyowati, and R. Yahdi Ramadani, "Dampak Pergeseran Wilayah Akibat Naiknya Permukaan Laut Dan Dampaknya Bagi Navigasi," *Media Iuris* 5, no. 1SpecialIssue (2022): 41-66, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1specialissue.41983>.

terbarukan (*renewable resources*) tidak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan sumber energi konvensional (*non-renewable resources*) yang berasal dari energi fosil (seperti batu bara, lignit, gas, dan minyak) telah lama menjadi penopang utama untuk memenuhi pasokan energi masyarakat. Kondisi tersebut menempatkan kawasan Asia Pasifik tercatat sebagai kawasan yang menghasilkan jumlah emisi terbanyak (17,74 miliar metrik ton) pada tahun 2021<sup>2</sup> yang mana melebihi jumlah total emisi gabungan kawasan lain pada tahun yang sama.

Dewasa ini, masing-masing negara telah berupaya untuk mereduksi produksi emisi gas yang berpotensi memperburuk buntut dari fenomena kerusakan lingkungan (*global warming* dan *climate change*). Tidak terkecuali Singapura, bank sentral, Otoritas Moneter Singapura (*Monetary Authority of Singapore/MAS*) mengumumkan rencana untuk merilis “Taksonomi Asia Singapura” yang menetapkan kriteria untuk penghentian dini pembangkit listrik tenaga batu bara. Taksonomi ini dikembangkan oleh the Green Finance Industry Taskforce, sebuah inisiatif industri yang dibentuk oleh MAS untuk mempercepat pengembangan keuangan hijau di Singapura.<sup>3</sup> Langkah berani Singapura untuk

---

<sup>2</sup> Nurus Shofiyana, Imam Supriyadi, and Muhammad Uwais Al Qarni, “Transisi Energi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Dan Konflik Militer Rusia-Ukraina,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 2723–2328, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3375/pdf>.

<sup>3</sup> Diandra Paramitha, “Singapura Mengambil Langkah Berani: MAS Mendorong Inisiatif Penghapusan Batu Bara” ([goodnewsfromindonesia.id](http://goodnewsfromindonesia.id), 2023), <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/06/05/singapura->

bertransformasi ke energi terbarukan dilakukan sebagai respons terhadap mitigasi perubahan iklim untuk peluang ekonomi. Misalnya, bank-bank lokal Singapura, seperti OCBC Bank yang memiliki *roadmap* dekarbonisasi pada tahun 2019 melalui pemutusan biaya untuk PLTU baru. Upaya dekarbonisasi ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan krisis energi yang semakin parah. Meskipun demikian, pemerintah Singapura telah mengambil tindakan serius terkait ancaman krisis energi global ini. Singapura berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan bahan bakar yang ramah karbon, serta meningkatkan efisiensi energi. Otoritas telah mendorong masyarakat untuk mereduksi konsumsi listrik. Langkah *pre-emptive* ini dilakukan mengingat batasan seberapa jauh Singapura mampu mengurangi emisinya. Oleh karena itu, meningkatkan efisiensi energi akan tetap menjadi prioritas utama bagi Singapura.<sup>4</sup>

## A. Pembahasan

Secara geografis Singapura merupakan negara kecil dengan sumber daya alam dan energi yang terbatas. Oleh karena itu, Singapura bergantung pada pasokan minyak dan gas alam dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya. Antara tahun 2007 dan 2010, pemerintah Singapura menerbitkan tiga dokumen utama yang menguraikan visi dan strateginya dalam menghadapi

---

mengambil-langkah-berani-mas-mendorong-inisiatif-penghapusan-batu-bara.

<sup>4</sup> Paramitha.

tantangan energi yang terus meningkat. Dokumen yang pertama adalah Singapore National Energy Policy Report (2007) Dokumen ini menguraikan kebijakan energi nasional Singapura, termasuk fokus pada diversifikasi sumber energi dan peningkatan efisiensi energi. Dalam laporan ini, pemerintah menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan<sup>5</sup> Kemudian selanjutnya Energy Conservation Act (ECA) (2007) Undang-undang ini dimaksudkan untuk mempromosikan efisiensi energi di sektor industri dan komersial. Menurut peraturan, pemerintah Singapura mengharuskan bisnis besar untuk melakukan audit energi secara berkala dan menerapkan praktik manajemen energi yang efektif.<sup>6</sup> Lalu untuk dokumen ketiga yang menjadi concern terakhir hingga keberlanjutan kedepan adalah The Sustainable Singapore Blueprint (2009) Blueprint ini adalah proses perencanaan jangka panjang yang mencakup berbagai inisiatif untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Ada strategi untuk mengembangkan infrastruktur energi baru, seperti tenaga surya, dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya konservasi energi.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Asia Pacific Energy Research Centre, "Apec Energy Demand and Supply Outlook 5Th Edition\_Singapore," 2013, 182, <http://aperc.ieej.or.jp/>.

<sup>6</sup> T.K. Doshi and a Loi, "Singapore Country Report," *Analysis on Energy Saving Potential in East Asia*, no. June (2013): 277–96.

<sup>7</sup> Ministry of the Environment and Water Resources and Ministry of National Development, *Our Home Our Environment Our Future Sustainable Singapore*, 2015, [www.sustainable singapore.gov.sg](http://www.sustainable singapore.gov.sg).

Dalam dokumen-dokumen ini, pemerintah mengidentifikasi diversifikasi energi sebagai salah satu strategi utama untuk membantu mencapai tujuan menyeluruh negara dalam hal daya saing ekonomi, keamanan energi, dan kelestarian lingkungan. Bahkan, para akademisi dan pakar lingkungan memberi penghargaan kepada Singapura yang baik dalam bidang pelestarian lingkungan. Sebagai contoh, Singapura diakui sebagai kota ter hijau di Asia<sup>8</sup> meskipun memiliki populasi yang sangat urban dan padat, sebagian karena kebijakan nasionalnya dan kemampuan pemerintah untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan standar tersebut.

Fakta tersebut nyatanya tidak menempatkan Singapura di posisi terdepan dalam hal ketahanan energi di dunia. Dengan diselenggarakannya KTT Bumi di Rio pada tahun 1992 dan Paris Agreement tahun 2015 penggunaan bahan bakar fosil terus meningkat hingga tahun 2018 telah menunjukkan peningkatan penggunaan bahan bakar fosil tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Demikian pula, emisi gas rumah kaca global juga meningkat secara drastis pada periode tersebut, dan diperkirakan telah mencapai rekor tertinggi pada tahun 2018, yang mana konsentrasi CO<sub>2</sub> mencapai 407,8 ± 0,1 ppm, CH<sub>4</sub> mencapai 1869 ± 2 ppb dan N<sub>2</sub>O mencapai 331,1 ± 0,1 ppb. Konsentrasi CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> dan

---

<sup>8</sup> Ministry of the Environment and Water Resources and Ministry of National Development.

N2O masing-masing mengalami peningkatan sebesar 147%, 259% dan 123% terhadap periode preindustrial.<sup>9</sup>

## B. Kondisi Singapura dan Target Nasional

Sayangnya, komitmen Singapura saat ini masih jauh untuk memenuhi target pemanasan 1.5°C, seperti yang ditetapkan dalam *Paris Agreement*. Bahkan dalam beberapa studi membuktikan bahwa Singapura belum memprioritaskan isu ketahanan energi sebagai agenda utamanya. Dalam studi tersebut disimpulkan bahwa ketahanan energi Singapura sering diidentifikasi sebagai area yang membutuhkan perbaikan. Sebagai contoh, studi terhadap 21 ekonomi APEC oleh *Asia Pacific Energy Research Center*, ketahanan energi Singapura terbukti mengecewakan dibandingkan dengan kecanggihan ekonomi negara tersebut. Studi lain oleh Sovacool membandingkan 18 negara dari tahun 1990 hingga 2010 dan Singapura berada di peringkat ketujuh dari 18 negara dalam hal kinerja ketahanan energi.<sup>10</sup>

Kondisi ini dikarenakan adanya kompleksitas antara *energy security*, *energy equity*, dan *environmental sustainability* yang di ilustrasikan dalam *Energy Trilemma Index* (kemampuan negara untuk menyediakan energi yang berkelanjutan melalui tiga dimensi: keamanan energi, kesetaraan energi (aksesibilitas dan keterjangkauan),

---

<sup>9</sup> Dwi Indriyati et al., *KRISIS IKLIM & PERLUNYA AKSI IKLIM YANG LEBIH MASIF*, ed. Alifi Maria Ulfah, III (KEDEPUTIAN BIDANG KLIMATOLOGI, BMKG., 2020).

<sup>10</sup> New Zealand et al., "Energy Working Group," no. January (2007): 26–30.

kelestarian lingkungan).<sup>11</sup> Pada tahun 2022, indeks trilema energi untuk Singapura adalah 69,4 indeks. Meskipun indeks trilema energi Singapura berfluktuasi secara substansial dalam beberapa tahun terakhir, indeks ini cenderung meningkat selama periode 2016 - 2022 dan berakhir pada indeks 69,4 pada tahun 2022.<sup>12</sup> Indeks trilema energy yang ideal didapatkan oleh negara Denmark dengan world rank 1 untuk saat ini dengan skor 83.2. melihat indeks trilema energy negara lain khususnya di ASEAN Singapura termasuk yang terdepan, Indonesia dengan world rank 58 dengan skor 60.5, sedangkan Myanmar turun lebih jauh dengan world rank 82 dengan skor 46.5.<sup>13</sup> Dengan melihat indeks trilema energi milik Denmark yang mencapai 83.2, skor milik Singapura termasuk belum memuaskan.

Fakta bahwa Singapura merupakan negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Asia Tenggara, yang mana diperkirakan akan mengkonsumsi energi dalam jumlah yang lebih besar di masa depan, tidak menghentikan otoritas Singapura dalam mempromosikan energi terbarukan setelah akses Kyoto Protokol, yang mana telah ditandatangani pada bulan Juli 2006. Meskipun demikian, rencana energi terbarukan tersebut masih diragukan. Hal ini dikarenakan belum ada satupun kebijakan atau pernyataan MEWR (*Ministry of Environment and Water Resources*) atau NEA

---

<sup>11</sup> Doshi and Loi, "Singapore Country Report."

<sup>12</sup> World Energy Council, "World Energy Trilemma 2024: Evolving with Resilience and Justice," 2024, 1-92, <https://trilemma.worldenergy.org>.

<sup>13</sup> World Energy Council.

(*National Environment Agency*) yang menargetkan pengurangan total terkait emisi karbon Singapura. Upaya diversifikasi energi pun tidak cukup untuk mencapai target *net-zero emission*, dengan keterbatasan sumber daya Singapura upaya tersebut semakin mempersulit perumusan kebijakan energi.

Meskipun publik menilai bahwa emisi Singapura hanya berkontribusi 0.11% dari emisi global, faktanya angka tersebut tidak mempertimbangkan tingginya angka emisi yang terkandung dalam konsumsi per kapita Singapura. Singapura berkontribusi di bawah 1 persen dari emisi gas rumah kaca—GRK (greenhouse gas—GHG) global, kota ini berniat untuk menjadi bagian dari upaya global dalam menjamin kelestarian lingkungan.<sup>14</sup> Jika publik membandingkan dengan dua negara penghasil emisi tertinggi, AS dengan 15% dan China dengan 30% maka argumen tersebut hanya dijadikan sebagai legitimasi untuk menghindari tanggung jawab sekaligus semakin memperparah dilema politik iklim internasional.

### **C. Urgensi Reformasi Peran Pemerintah terhadap Kebijakan Keamanan Energi**

Argumen yang disampaikan oleh *Analytics and New Climate Institute*,

---

<sup>14</sup> Neeraj Prasad et al., “Profil Kota Singapura,” *Kota Berketahanan Iklim: Pedoman Dasar Pengurangan Kerentanan Terhadap Bencana*, 2007.

“Meskipun memiliki kapasitas ekonomi yang tinggi, Singapura memiliki target iklim yang sangat lemah, yang dinilai “sangat tidak memadai”, dan kemungkinan besar akan mencapai target tersebut tanpa menerapkan kebijakan tambahan. Singapura perlu memperkuat targetnya secara substansial. Meskipun kapasitas energi terbarukan telah meningkat, gas tetap menjadi sumber energi yang dominan di sektor listrik. Singapura mulai menerapkan pajak karbon pada tahun 2019, tetapi fokus utamanya untuk mitigasi iklim adalah pada program efisiensi energi. Hal ini tidak akan mengimbangi peningkatan permintaan energi dari sektor industri dan bangunan, yang akan mengakibatkan peningkatan emisi.”

Perlu adanya strategi penguatan peran pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan keamanan energi. Dapat dimulai dengan memperluas kesadaran mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di tatanan pemerintah, utamanya pada lembaga yang berfokus pada pembangunan. Standar operasi terkait pembangunan berkelanjutan mesti diperketat baik dalam teknis maupun perumusan kebijakannya. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan menjamin tindakan-tindakan pelestarian lingkungan termanifestasi dalam kebijakan-kebijakan di seluruh departemen pemerintah. Tujuannya sebagai tindakan antisipatif untuk memastikan bahwa proyek-proyek

pembangunan, telah melewati proses tinjauan dan evaluasi sehingga dinilai aman dan ramah lingkungan.

Tidak hanya di kalangan elit dan pemerintah, distribusi informasi dan edukasi terkait ancaman kerusakan lingkungan juga harus merata hingga warga sipil. Untuk mencapai tujuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, diperlukan evolusi model pengelolaan pemerintahan kota, dari pendekatan “vertikal” menjadi pendekatan tata kelola yang terintegrasi, yang didasarkan pada kolaborasi berkelanjutan antara berbagai aktor teritorial yang berbeda (dunia ekonomi, akademisi, masyarakat sipil, dan administrasi pelayanan publik).<sup>15</sup> Sebagai contoh, promosi *European Climate Pact* yang diasumsikan semakin banyak agen-agen yang terlibat dalam suatu gerakan perubahan maka akan semakin tinggi pula probabilitas isu tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, kolaborasi aktif ditegaskan sebagai cara baru untuk mengimplementasikan demokrasi baik di tingkat global maupun lokal. Untuk mencapai ini, pemerintah dapat bekerja sama sekaligus mendukung *grassroots initiative* atau *transnational municipal networks* (TMNs) sebagai agen advokasi yang harapannya dapat mengarahkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap ancaman perubahan iklim. Beberapa TMNs seperti ICLEI, C40, Fridays for Future,

---

<sup>15</sup> Saveria Olga Murielle Boulanger and Martina Massari, “Advocating Urban Transition: A Qualitative Review of Institutional and Grassroots Initiatives in Shaping Climate-Aware Cities,” *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 5 (2022), <https://doi.org/10.3390/su14052701>.

Extinction Rebellion terbukti memiliki potensi untuk mendukung kota dalam transisi iklim yang lebih baik.<sup>16</sup>

Pemerintah juga dapat membuat komitmen yang tegas dalam hal pengeluaran fiskal untuk mengalokasikan sebagian dari PDB setiap tahunnya untuk langkah-langkah dekarbonisasi. Ekonom Robert Pollin, dengan melihat skala global, menyatakan bahwa dekarbonisasi dapat dilakukan, jika setiap negara dapat membuat komitmen sebesar 1,5-2% dari PDB untuk kebijakan transisi yang diperlukan. Mengingat PDB per kapita Singapura sangat tinggi dibandingkan dengan sebagian besar negara lain, komitmen seperti ini tentu akan memberikan Singapura banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk mengejar dan mencapai dekarbonisasi.<sup>17</sup>

#### **D. Potensi MAS (Monetary Authority of Singapore) Dorong Dekarbonisasi**

Keistimewaan Singapura sebagai ‘pusat keuangan’ di kawasan Asia Tenggara menentukan apakah industri keuangan tersebut mendorong upaya dekarbonisasi atau

---

<sup>16</sup> ANUR HIDAYATI, “Peran United Nations High Commissioner For Refugees (Unhcr) Terhadap Pengungsi Dan Migran Dari Venezuela Di Brazil Pada Tahun 2015-2019,” 2021, 1-78, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/34540%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/34540/17323095> Annisa Nur Hidayati.pdf?sequence=1.

<sup>17</sup> Oleh Sean Sweeney, “Melampaui Pemulihan : Kesepakatan Baru Ramah Lingkungan Global Dan Kepemilikan Publik Terhadap Energi,” n.d.

justru menghambat. Meskipun MAS telah mengumumkan pemutusan pembangkit listrik tenaga batu bara, akan tetapi mempertimbangkan keterbatasan diversifikasi energi oleh Singapura tampaknya langkah tersebut dinilai terlalu ambisius. Wacana pemanfaatan energi nuklir pun menurut PM Lee Hsien Loong, harus dihindari karena minimnya lahan membuat Singapura tidak dapat menetapkan radius aman 30 km di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir terlepas dari energi nuklir termasuk dalam spektrum energi bersih karena pembelahan atom uranium menghasilkan emisi karbon nol.<sup>18</sup>

### **E. Rencana Akselerasi Singapura Dorong Energi Hijau: Konsep Keamanan Energi**

Dalam siaran pers kedatangan Menteri Pembangunan Nasional Singapura, H.E. Mr. Desmond Lee di Jakarta, pada Rabu (23/03) disebutkan bahwa rencana Singapura dalam 10 hingga 15 tahun ke depan akan memprioritaskan pada pembangunan hijau termasuk bangunan ramah lingkungan (*green building*), infrastruktur hijau, serta investasi dalam riset dan pengembangan, selain upaya mitigasi terhadap kelangkaan pangan dan energi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ministry of the Environment and Water Resources and Ministry of National Development, *Our Home Our Environment Our Future Sustainable Singapore*.

<sup>19</sup> Tiara Aliya Azzahra, "Anies Bertemu Menteri Pembangunan Nasional Singapura, Bahas Apa?," March 24, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5998277/anies-bertemu-menteri-pembangunan-nasional-singapura-bahas-apa>.

*Pertama*, terdapat ancaman terhadap keamanan energi (*energy security*) yang berasal dari ancaman geopolitik, ekonomi, teknis, psikologis, dan lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan ancaman krisis energi akibat konsumsi energi fosil yang dalam jumlah banyak dan terus-menerus sehingga terjadi penumpukan emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim yang ekstrem (kenaikan suhu, gelombang panas, kenaikan permukaan air laut, dll).<sup>20</sup>

*Kedua*, jika dilihat dari definisi keamanan, mencakup aspek harga dan berdampak pada negara. Aspek harga dapat mempengaruhi fluktuasi tingkat suatu sumber energi yang tidak terkendali dan berdampak pada ketidakstabilan kondisi negara.

*Ketiga*, adalah harga energi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketersediaan dana dan modal untuk melakukan investasi dalam pengembangan dan eksplorasi sumber daya energi. Ketersediaan dana menjadi faktor penting dalam menjaga tingkat permintaan terhadap sumber daya energi.

*Keempat*, upaya menjaga pasokan sumber daya energi dapat dilakukan melalui diversifikasi sumber energi. Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong mengutarakan bahwa Singapura akan menargetkan impor mencapai kapasitas pembangkit listrik rendah karbon

---

<sup>20</sup> Muhammad Farid, "Keamanan Energi Dalam Politik Luar Negeri Indonesia," *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2nd 2* (2016): 71–80.

sebesar 4 gigawatt (GW) pada tahun 2035, yang setara dengan sekitar 30% dari total pasokan Listrik.<sup>21</sup>

*Kelima*, diversifikasi sumber daya energi baru di dalam wilayah bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara produsen sumber daya energi. Strategi diversifikasi sedang diupayakan oleh pemerintah Singapura, melalui pemanfaatan tenaga surya. Tenaga surya masih menjadi sumber energi terbarukan yang paling menjanjikan dalam waktu dekat untuk Singapura. Selain tenaga surya terdapat tiga *power supply* yang dinilai lebih ramah lingkungan, yaitu jaringan listrik regional (*regional power grids*), pengolahan, pemanfaatan dan penyimpanan hidrogen dan karbon (CCUS), dan gas alam.

## F. Penutup

Singapura adalah negara kecil dengan sumber daya alam dan energi terbatas, sehingga bergantung pada impor minyak dan gas alam. Pemerintah telah mengidentifikasi diversifikasi energi sebagai strategi utama untuk mencapai tujuan dalam daya saing ekonomi, keamanan energi, dan kelestarian lingkungan. Meskipun Singapura diakui sebagai kota ter hijau di Asia, negara ini masih memiliki tantangan dalam mencapai target ketahanan energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Studi menunjukkan bahwa ketahanan energi Singapura

---

<sup>21</sup> Finn Harini, "Singapura Berencana Impor Listrik Hingga 4 GW Pada 2035," 2021, <https://validnews.id/ekonomi/singapura-berencana-impor-listrik-hingga-4-gw-pada-2035>.

perlu diperbaiki, dan negara ini memiliki komitmen yang lemah terhadap target iklim jangka panjang.

Diperlukan reformasi peran pemerintah untuk mengatasi kebijakan keamanan energi. Kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan harus diperluas di semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Kolaborasi antara berbagai aktor teritorial dan partisipasi publik harus didorong. Pengeluaran fiskal juga dapat dialokasikan untuk langkah-langkah dekarbonisasi. Sebagai pusat keuangan, Singapura memiliki potensi untuk mendorong dekarbonisasi. Namun, keterbatasan diversifikasi energi dan masalah lahan menghadirkan tantangan. Singapura memiliki rencana akselerasi dalam pengembangan energi hijau, termasuk pembangunan bangunan ramah lingkungan dan investasi dalam riset dan pengembangan. Secara keseluruhan, keamanan energi menjadi perhatian utama Singapura, tetapi tantangan besar masih harus diatasi untuk mencapai tujuan energi yang berkelanjutan.

---

## Daftar Pustaka

- Asia Pacific Energy Research Centre. "Apec Energy Demand and Supply Outlook 5Th Edition\_Singapore," 2013, 182. <http://aperc.iece.or.jp/>.
- Azzahra, Tiara Aliya. "Anies Bertemu Menteri Pembangunan Nasional Singapura, Bahas Apa?," March 24, 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-5998277/anies-bertemu-menteri-pembangunan-nasional-singapura-bahas-apa>.

- Boulanger, Saveria Olga Murielle, and Martina Massari. "Advocating Urban Transition: A Qualitative Review of Institutional and Grassroots Initiatives in Shaping Climate-Aware Cities." *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 5 (2022). <https://doi.org/10.3390/su14052701>.
- Doshi, T.K., and a Loi. "Singapore Country Report." *Analysis on Energy Saving Potential in East Asia*, no. June (2013): 277–96.
- Farid, Muhammad. "Keamanan Energi Dalam Politik Luar Negeri Indonesia." *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2nd 2* (2016): 71–80.
- Harini, Finn. "Singapura Berencana Impor Listrik Hingga 4 GW Pada 2035," 2021. <https://validnews.id/ekonomi/singapura-berencana-impor-listrik-hingga-4-gw-pada-2035>.
- HIDAYATI, ANUR. "Peran United Nations High Commissioner For Refugees (Unhcr) Terhadap Pengungsi Dan Migran Dari Venezuela Di Brazil Pada Tahun 2015-2019," 2021, 1–78. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/34540%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/34540/17323095AnnisaNurHidayati.pdf?sequence=1>.
- Indriyati, Dwi, Rendy Artha Luvian, R. Hikmat Kurniawan, and

Nurul Hidayah Yuliani. *KRISIS IKLIM & PERLUNYA AKSI IKLIM YANG LEBIH MASIF*. Edited by Alifi Maria Ulfah. III. KEDEPUTIAN BIDANG KLIMATOLOGI, BMKG., 2020.

Ministry of the Environment and Water Resources, and Ministry of National Development. *Our Home Our Environment Our Future Sustainable Singapore*, 2015. [www.sustainablesingapore.gov.sg](http://www.sustainablesingapore.gov.sg).

Narwati, Enny, Dina Sunyowati, and R. Yahdi Ramadani. "Dampak Pergeseran Wilayah Akibat Naiknya Permukaan Laut Dan Dampaknya Bagi Navigasi." *Media Iuris* 5, no. 1SpecialIssue (2022): 41–66. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1specialissue.41983>.

Paramitha, Diandra. "Singapura Mengambil Langkah Berani: MAS Mendorong Inisiatif Penghapusan Batu Bara." [goodnewsfromindonesia.id](http://goodnewsfromindonesia.id), 2023. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/06/05/singapura-mengambil-langkah-berani-mas-mendorong-inisiatif-penghapusan-batu-bara>.

Prasad, Neeraj, Federica Raghieri, Fatima Shah, Trohanis Earl, and Kessler Ravi. "Profil Kota Singapura." *Kota Berketahanan Iklim: Pedoman Dasar Pengurangan Kerentanan Terhadap Bencana*, 2007.

Shofiyana, Nurus, Imam Supriyadi, and Muhammad Uwais Al Qarni. "Transisi Energi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Dan Konflik Militer Rusia-Ukraina." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 2723–2328.

<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3375/pdf>.

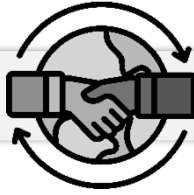
Sweeney, Oleh Sean. "Melampaui Pemulihan : Kesepakatan Baru Ramah Lingkungan Global Dan Kepemilikan Publik Terhadap Energi," n.d.

World Energy Council. "World Energy Trilemma 2024: Evolving with Resilience and Justice," 2024, 1-92. <https://trilemma.worldenergy.org>.

Zealand, New, New Zealand, Acting Lead Shepherd, David Smol, Deputy Secretary, New Zealand, Russian Federation, et al. "Energy Working Group," no. January (2007): 26-30.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# **BAB V**

## **Strategi Gastrodiplomasi Indonesia dalam Mempromosikan Kopi Khas Indonesia di Mesir Tahun 2021-2023**

---

### **A. Pendahuluan**

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Indonesia menduduki peringkat ke-4 sebagai negara penghasil biji kopi terbanyak, setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan tradisi budidaya kopi telah dilakukan sejak tahun 1696. Dimana pada tahun tersebut, Belanda pertama kali memperkenalkan kopi ke Indonesia

---

<sup>1</sup> Ramadhillah Balqis dan Ismail Yunita, "Climate Change Impacts on Coffee Production in Indonesia: A Review" *Journal of Critical Ecology* 1, no. 1 (29 Februari 2024): 1-2, <https://doi.org/10.61511/jcreco.v1i1.645>.

dengan membawa bibit dari Malabar, India, yang berasal dari Yaman. Bibit kopi tersebut kemudian ditanam di Pulau Jawa.

Produksi kopi robusta di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh kondisi lingkungan yang baik, khususnya di dataran rendah seperti, Jawa dan Sumatera.<sup>2</sup> Jika melihat data pada Badan Pusat Statistik (BPS), daerah-daerah penghasil kopi terbanyak di Indonesia, yaitu 27% dari Riau, 12% dari Sumatera Utara, 14% dari Lampung, 9% dari Aceh, 7% dari Bengkulu, dan 31% dari provinsi lainnya.<sup>3</sup> Adapun jenis-jenis kopi yang berasal dari Indonesia seperti, Kopi Arabika Gayo, Kopi Arabika Kintamani, Kopi Arabika Mandailing, Kopi Robusta Lampung, Kopi Flores Bajawa, Kopi Toraja, Kopi Liberka Riau, Kopi Luwak, dan masih banyak lagi.<sup>4</sup>

Keanekaragaman jenis kopi di Indonesia mencerminkan kekayaan alam dan budaya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Setiap jenis kopi memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari kopi negara lain. Sehingga dapat memberikan pengalaman rasa yang khas bagi para penikmatnya. Seperti di dataran tinggi Aceh, kopi Arabika

---

<sup>2</sup> Nescafe. "Jenis Kopi di Indonesia yang Sukses Mendunia, Apa Saja?" <https://www.nescafe.com/id/id-id/budaya-kopi/pengetahuan/jenis-kopi-di-indonesia>

<sup>3</sup> Solimah et al., *Statistik Kopi Indonesia 2023: Volume 8, 2024* (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024) Halaman 9, <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/29/d748d9bf594118fe112fc51e/statistik-kopi-indonesia-2023.html>

<sup>4</sup> Nescafe. "Jenis Kopi di Indonesia yang Sukses Mendunia, Apa Saja?" <https://www.nescafe.com/id/id-id/budaya-kopi/pengetahuan/jenis-kopi-di-indonesia>

Gayo, kopi Kintamani di Bali, kopi Mandheling di Sumatra Utara, kopi Flores Bajawa, kopi Toraja, kopi Liberika dari Riau, dan kopi Luwak. Setiap jenis kopi Indonesia memiliki karakteristiknya masing-masing, mencerminkan warisan alam dan tradisi yang telah terjaga selama berabad-abad. Dengan cita rasa yang khas, kopi Indonesia terus memikat hati para penikmat kopi di seluruh dunia, menjadikannya salah satu yang terbaik di kancah global.<sup>5</sup>

Dalam hal ekspor, budidaya kopi di Jawa untuk pasar dunia khususnya ke negara-negara eropa dimulai pada awal abad ke-18.<sup>6</sup> Hingga saat ini, sebagian besar hasil produksi kopi Indonesia diekspor ke pasar internasional, sementara sisanya dipasarkan di dalam negeri. Selain itu, sebagian besar ekspor kopi Indonesia masih dalam bentuk biji kopi mentah (*green bean*) dan hanya sebagian kecil yang berupa kopi olahan seperti kopi sangrai (*roasted coffee*) atau kopi instan (*soluble coffee*).<sup>7</sup>

Di sisi lain, Mesir juga merupakan negara yang memiliki sejarah panjang dalam hal minum kopi. Kebiasaan minum kopi di Mesir telah menjadi bagian kehidupan sosial dan

---

<sup>5</sup> Nescafe. "Jenis Kopi di Indonesia yang Sukses Mendunia, Apa Saja?" <https://www.nescafe.com/id/id-id/budaya-kopi/pengetahuan/jenis-kopi-di-indonesia>

<sup>6</sup> Breman, Jan "Mobilizing Labour for the Global Coffee Market Profits From an Unfree Work Regime in Colonial Java" Amsterdam University Press B.V., Amsterdam 2015. Hal 11.

<sup>7</sup> Febrianti Reyhan, et al, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Kopi Indonesia dipasar Internasional," t.t. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial. Vol 6, No 2 (2023)

budaya masyarakatnya sejak abad ke-16.<sup>8</sup> Kopi pertama kali diperkenalkan ke Mesir melalui para sufi dari Yaman.<sup>9</sup> Seiring berjalannya waktu, kebiasaan minum kopi semakin berkembang dan menjadi bagian penting dalam interaksi sosial di Mesir. Hal ini ditandai dengan munculnya kedai-kedai kopi atau *qahwa* yang berfungsi sebagai pusat diskusi politik, budaya, dan berbagai aktivitas sosial lainnya. Semakin tingginya konsumsi kopi di Mesir juga didorong oleh bertambahnya populasi penduduk. Seperti yang kita tahu bahwa Mesir merupakan negara Arab dengan populasi terbanyak di dunia.<sup>10</sup> Selain itu, perubahan gaya hidup, urbanisasi, meningkatnya kelas menengah, meningkatnya daya beli konsumen serta berkembangnya kedai kopi modern dan kopi specialty juga menjadi faktor yang mendorong tingginya permintaan kopi di Mesir.

Meskipun tingkat kebutuhan kopi di Mesir terus meningkat setiap tahunnya, Mesir bukan merupakan negara penghasil kopi. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis Mesir yang tidak mendukung. Wilayah Mesir didominasi oleh gurun pasir dengan curah hujan yang rendah, sedangkan kopi

---

<sup>8</sup><https://food.detik.com/info-kuliner/d-6837704/sejak-abad-16-budaya-ngopi-di-mesir-jadi-sarana-bersosialisasi>. Diakses pada 16/03/2025

<sup>9</sup> <https://khazanah.republika.co.id/berita/rf0nkw320/nikmatnya-kopi-yaman-yang-dulu-diperkenalkan-sufi-dan-nasibnya-kini#:~:text=Sam-pai%20awal%201700-an%2C%20Yaman%20adalah%20satu-satunya%20produsen%20dan,menyebarkan%20budaya%20kopi%20-negara%20itu%20ke%20seluruh%20dunia>. Diakses pada 16/03/2025

<sup>10</sup> <https://housingfinanceafrica.org/countries/egypt/>. Diakses pada 16/03/2025.

merupakan tumbuhan yang membutuhkan kelembapan yang tinggi. Selain itu, Sungai Nil sebagai sumber air utama negara tersebut, lebih diprioritaskan pada tanaman pangan utama seperti gandum, tebu dan jagung yang lebih vital dalam menjaga ketahanan pangan nasional Mesir. Menanam kopi dalam jumlah yang besar akan membutuhkan banyak air, sehingga tidak efisien mengingat keterbatasan air di Mesir.

Kondisi tersebut membuka peluang bagi Indonesia sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia.<sup>11</sup> Dengan kekayaan jenis kopi Indonesia seperti *Arabica*, *Robusta*, serta kopi spesialti dari daerah seperti Gayo, Toraja, dan Mandailing. Indonesia telah lama menjadi mitra dagang Mesir dalam hal ekspor kopi, meskipun belum diketahui secara pasti terkait kapan pertama kali Indonesia melakukan ekspor kopi ke Mesir.

Namun, di tengah peluang tersebut, Indonesia dihadapkan pada persaingan dengan negara-negara penghasil kopi lainnya, seperti Brasil, Ethiopia, dan Vietnam. Brasil, sebagai produsen kopi terbesar di dunia, unggul dalam produksi skala besar dengan harga yang kompetitif.<sup>12</sup> Ethiopia, dengan sejarah panjang salah satu asal mula kopi,

---

<sup>11</sup> Boga, Kuntoro "Tren 2025: Peluang dan Daya Saing Kopi Indonesia" <https://tanamanindustri.bsip.pertanian.go.id/berita/tren-2025-peluang-dan-daya-saing-kopi-indonesia#:~:text=INDONESIA%20adalah%20produsen%20kopi%20terbesar,Kementerian%20Pertanian%20untuk%202022%2D2025.> Diakses pada 16/03/2025

<sup>12</sup> Rahman, Mahab "Produsen dan Eksportir Kopi Terbesar di Dunia: Brasil" <https://www.morethanshipping.com/worlds-largest-coffee-producer-and-exporter-brazil/>. Diakses pada 16/03/2025.

juga memiliki daya tarik yang kuat bagi konsumen Mesir sebagai salah satu negara pembawa kopi ke Mesir.<sup>13</sup> Sementara itu, Vietnam sebagai negara penghasil kopi *Robusta*, menguasai segmen pasar *Robusta* di dunia.<sup>14</sup>

Perlu diketahui bahwa, Mesir menjadi salah satu negara tujuan utama dalam hal ekspor kopi Indonesia kedua setelah Amerika Serikat.<sup>15</sup> Jenis kopi yang paling banyak diekspor ke Mesir adalah jenis Kopi Robusta, yang belum disangrai dan belum didekafein.<sup>16</sup> Pada tahun 2012 periode Januari hingga Oktober, ekspor kopi Indonesia ke Mesir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan nilai USD 33,82 juta. Nilai tersebut mengingkat sebesar 92% dari periode yang sama dengan tahun sebelumnya, yang membuat kopi Indonesia mendominasi pangsa pasar di Mesir sebesar 45,60%.<sup>17</sup> Hingga saat ini, nilai ekspor kopi Indonesia terus menunjukkan tren positif.

---

<sup>13</sup> <https://kopikita.id/mengungkap-sejarah-kopi-hitam/#:~:text=mula%20penemuan%20kopi.,Perjalanan%20ke%20Arab,menyebarkan%20ke%20seluruh%20dunia%20Islam. Diakses pada 16/03/2024>

<sup>14</sup> Nguyen Coffee Suply “Sepuluh Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang Kopi Vietnam” [https://nguyencoffeesupply-com.translate.goog/blogs/news/ten-things-you-need-to-know-about-vietnamese-coffee?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sge#:~:text=Vietnam%20merupakan%20produsen%20biji%20kopi,berarti%20itu%20adalah%20kopi%20Vietnam. Diakses pada 16/03/2025](https://nguyencoffeesupply-com.translate.goog/blogs/news/ten-things-you-need-to-know-about-vietnamese-coffee?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Vietnam%20merupakan%20produsen%20biji%20kopi,berarti%20itu%20adalah%20kopi%20Vietnam. Diakses pada 16/03/2025)

<sup>15</sup> Ibid. Halaman 13-14.

<sup>16</sup> Suheri et al., “Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia: Ekspor 2023” *Volume 19, 2024* (BPS-Statistic Indonesia, 2024) halaman 257-258.

<sup>17</sup> Antara Sulteng “Indonesia Rajai Pasar Minyak Sawit Di Mesir” <https://sulteng.antaranews.com/berita/6045/indonesia-rajai-pasar-minyak-sawit-di-mesir. Diakses pada 17/03/2025>

Hal tersebut menunjukkan bahwa kopi Indonesia telah lama mendominasi pasar Mesir, menjadi salah satu komoditas unggulan yang sangat diminati oleh konsumen di negara tersebut. Dominasi ini tidak lepas dari kualitas dan cita rasa khas kopi Indonesia, khususnya jenis robusta, yang sesuai dengan preferensi pasar Mesir. Namun, pada akhir tahun 2019, dunia dihadapkan pada krisis kesehatan global yaitu COVID-19, yang secara resmi dinyatakan sebagai darurat kesehatan global oleh *World Health Organization (WHO)* pada 11 Maret 2020. Penyebaran virus COVID-19 yang begitu cepat di seluruh dunia telah mengubah tatanan kehidupan sosial dan interaksi antar manusia. Masyarakat global dihimbau untuk menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.<sup>18</sup> Kebijakan tersebut secara langsung membatasi berbagai aktivitas ekonomi, termasuk proses produksi, distribusi, hingga pemasaran barang dan jasa di berbagai negara.

Dalam hal ekspor kopi Indonesia ke Mesir, Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan dalam mempertahankan kestabilan kinerja ekspor selama masa pandemi. Pada tahun 2020, ekspor kopi Indonesia ke Mesir sempat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 34,285 menjadi 32,536, dengan nilai ekspor sebesar USD 55,023 juta.<sup>19</sup> Namun pada

---

<sup>18</sup> Kementerian Keuangan. "Pandemi Covid-19 Dan Menurunnya Perekonomian Indonesia"  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html>

<sup>19</sup> BPS "Ekspor Kopi Menurut Negara Tujuan Utama, 2000-2023"  
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAxNCMx/ekspor-kopi->

tahun 2021, Indonesia berhasil mengekspor kopi ke Mesir sebesar 48,521 ribu ton, dengan nilai USD 89,082 juta.<sup>20</sup> Yang mana nilai tersebut meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.<sup>21</sup> Kemudian, pada tahun 2022, Indonesia mengekspor 37,428 ribu ton, dengan nilai ekspor kopi Indonesia ke Mesir sebesar USD 81,73 juta.<sup>22</sup> Nilai tersebut berhasil menguasai 44,65% pangsa pasar.<sup>23</sup> Selanjutnya masih dalam periode pandemi COVID 19, pada tahun 2023, Indonesia berhasil mengekspor 32,047 ribu ton, dengan nilai ekspor kopi Indonesia ke Mesir sebesar USD 84,5 juta.<sup>24</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu

---

menurut-negara-tujuan-utama--2000-2022.html. diakses pada 6 April 2025

<sup>20</sup> BPS "Ekspor Kopi Menurut Negara Tujuan Utama, 2000-2023" <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAxNCMx/ekspor-kopi-menurut-negara-tujuan-utama--2000-2022.html>. diakses pada 6 April 2025

<sup>21</sup> BPS "Ekspor Kopi Menurut Negara Tujuan Utama, 2000-2023" <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAxNCMx/ekspor-kopi-menurut-negara-tujuan-utama--2000-2022.html>. diakses pada 6 April 2025

<sup>22</sup> BPS "Ekspor Kopi Menurut Negara Tujuan Utama, 2000-2023" <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAxNCMx/ekspor-kopi-menurut-negara-tujuan-utama--2000-2022.html>. diakses pada 6 April 2025

<sup>23</sup> Liputan 6, "Raih Transaksi 2.000 Ton, Ekspor Kopi Jawa Timur Rajai Pasar Mesir" <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5306381/raih-transaksi-2000-ton-ekspor-kopi-jawa-timur-rajai-pasar-mesir>

<sup>24</sup> BPS "Ekspor Kopi Menurut Negara Tujuan Utama, 2000-2023" <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAxNCMx/ekspor-kopi-menurut-negara-tujuan-utama--2000-2022.html>. diakses pada 6 April 2025

mempertahankan daya ekonominya, di mana pada tahun 2021, di tengah darurat kesehatan global yang mengubah hampir seluruh pola hidup masyarakat, ekspor kopi ke Mesir mengalami peningkatan secara signifikan, bahkan meskipun nilai pada tahun 2022 dan 2023 cenderung lebih rendah dibanding 2021, nilai tersebut masih melampaui nilai ekspor yang dicapai pada tahun-tahun sebelum terjadinya pandemi.

<b>Tahun</b>	<b>Volume (ribu ton)</b>	<b>Nilai (juta USD)</b>
<b>2019</b>	34.285,0	59.042,0
<b>2020</b>	32.536,7	55.023,0
<b>2021</b>	48.521,3	89.082,7
<b>2022</b>	37.428,4	81.732,3
<b>2023</b>	32.047,8	84.530,6

Fenomena tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait strategi gastrodiplomasi Indonesia dalam kurun waktu 2021 hingga 2023. Penelitian ini akan melihat bagaimana strategi yang diterapkan oleh Indonesia dalam mempromosikan kopi di pasar Mesir sehingga ekspor kopi Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan meskipun di tengah darurat kesehatan global, COVID-19. Atas dasar ketertarikan tersebut, penelitian ini akan disusun dengan judul “Strategi Gastrodiplomasi

Indonesia dalam Mempromosikan Kopi Khas Indonesia di Mesir Tahun 2021-2023”.

Untuk itu, sebagai bagian dari strategi gastrodiplomasi dalam memperkuat kehadiran kopi Indonesia di Mesir pada tahun 2021 - 2023, Indonesia melakukan berbagai upaya. Upaya upaya tersebut seperti fasilitasi pertemuan pelaku usaha Indonesia dengan calon buyer Mesir, kunjungan dan pertemuan bisnis dengan buyer potensial Mesir, fasilitasi Kedai Kopi Villa Sumatra Coffee, menyelenggarakan Business Meeting dan Business Matching dengan calon Buyer, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pameran makanan dan minuman, pengembangan Inaexport, penggunaa sosial media, serta melalui penyelenggaraan workshop.

## **B. Konsep**

Gastrodiplomasi, sebagaimana dikemukakan oleh Rockower, merupakan bagian dari diplomasi publik yang memanfaatkan unsur diplomasi kuliner dan diplomasi budaya suatu negara untuk mempengaruhi secara emosional dan tidak langsung kepada masyarakat internasional.<sup>25</sup> Pendekatan ini dinilai efektif karena masyarakat cenderung lebih terbuka terhadap budaya asing melalui pengalaman rasa, sehingga membuka peluang manfaat ekonomi dan politik.<sup>26</sup> Dengan menggabungkan unsur diplomasi budaya dan kuliner, gastrodiplomasi berperan dalam membangun

---

<sup>25</sup> Ibid. 236

<sup>26</sup> Rockower, Paul S. "Recipes for gastrodiplomacy." *Place Branding and Public Diplomacy* 8.3 (2012): 236. 10.1057/pb.2012.17

citra positif negara secara berkelanjutan di kancah global, bukan hanya melalui kegiatan promosi kuliner yang bersifat sesaat.<sup>27</sup>

Dalam penerapan gastrodiplomasi, Juyan Zhang mengemukakan enam strategi utama yang efektif digunakan negara untuk memperkuat citra kuliner nasional di tingkat global. Pertama, *product marketing strategy*, yaitu promosi melalui jaringan restoran, sistem waralaba, dan ekspor produk makanan yang tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga membawa pesan budaya.<sup>28</sup> Kedua, *food event strategy*, mencakup partisipasi dalam festival internasional atau penyelenggaraan acara kuliner sebagai sarana memperkenalkan makanan khas secara langsung kepada publik global.<sup>29</sup> Ketiga, *coalition-building strategy*, yaitu menjalin kerja sama dengan pelaku industri pariwisata, hotel, kedutaan, dan pusat kebudayaan guna memperluas jangkauan diplomasi kuliner.<sup>30</sup> Keempat, *use of opinion leaders strategy*, melibatkan tokoh berpengaruh dan lembaga seperti UNESCO untuk meningkatkan legitimasi dan daya

---

<sup>27</sup> Rockower, Paul S. "Recipes for gastrodiplomacy." *Place Branding and Public Diplomacy* 8.3 (2012): 236. 10.1057/pb.2012.17

<sup>28</sup> Juyan Zhang, "The Foods of the Worlds: Mapping and Comparing Contemporary Gastrodiplomacy Campaigns" *International Journal of Communication* 9(2015): Hal 10.

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Juyan Zhang, "The Foods of the Worlds: Mapping and Comparing Contemporary Gastrodiplomacy Campaigns" *International Journal of Communication* 9(2015): Hal 13.

tarik budaya kuliner.<sup>31</sup> Kelima, *media relations strategy*, memanfaatkan media massa dan digital, seperti media sosial, untuk memperkuat jangkauan komunikasi dan membentuk persepsi publik. <sup>32</sup> Terakhir, *education strategy*, dilakukan melalui pelatihan juru masak dan program edukatif bagi masyarakat global untuk meningkatkan pemahaman serta keterlibatan terhadap budaya kuliner negara asal.<sup>33</sup>

## C. Pembahasan

Dalam hal mempromosikan kopi Indonesia ke Mesir Indonesia melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan konsep gastrodiplomasi, sehingga kopi dapat dipahami sebagai unsur kuliner dan budaya Indonesia. Dalam mempromosikan kopi Indonesia ke Mesir Indonesia melakukan beberapa pendekatan ala Juyan Zhang.

Pertama, *product marketing* dalam promosi kopi Indonesia ke Mesir diwujudkan melalui fasilitasi pertemuan bisnis antara pelaku usaha Indonesia dan buyer Mesir. Salah satu bentuk konkret terjadi pada 4 Januari 2022, saat KBRI memediasi pertemuan antara PT Aka Azharyyah Group dan

---

<sup>31</sup> Juyan Zhang, *"The Foods of the Worlds: Mapping and Comparing Contemporary Gastrodiplomacy Campaigns"* International Journal of Communication 9(2015): Hal 14

<sup>32</sup> Ibid. Hal 16

<sup>33</sup> Juyan Zhang, *"The Foods of the Worlds: Mapping and Comparing Contemporary Gastrodiplomacy Campaigns"* International Journal of Communication 9(2015): Hal 17.

Egypt Coffee Export (Moca Coffee) dalam rangka ekspor perdana kopi.<sup>34</sup> Upaya serupa juga dilakukan pada 20 Maret 2022 melalui pertemuan resmi antara Atase Perdagangan KBRI dan R & SH Import & Export di Luxor, yang menunjukkan minat mengimpor kopi robusta dan arabika dari Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Atdag KBRI menegaskan dukungan penuh terhadap kerja sama dagang dengan eksportir Indonesia yang terpercaya dan kompetitif.<sup>35</sup> Selanjutnya, KBRI Kairo juga memfasilitasi penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Ameera Mentaya Indah asal Kalimantan dengan Globo Farms Mesir, yang disaksikan langsung oleh jajaran diplomatik Indonesia.<sup>36</sup> Kemudian, pada Juli 2022, KBRI juga memediasi kesepakatan dagang antara PT Asal Jaya dan Al Rehab For Trading & Distribution yang mencakup pengiriman dua kontainer kopi ke Pelabuhan Damietta, Mesir, sebagai

---

<sup>34</sup> <sup>34</sup> Atase Perdagangan Kairo “Mengawali Transaksi Ekspor Perdana ke Mesir di Tahun 2022, KBRI Kairo Fasilitas Pelaku Usaha Indonesia Transaksi Bisnis Kopi dengan Buyer Mesir” instagram @cairoatdag. <https://www.instagram.com/p/CYT9eXLMvxM/?igsh=ZnNyOGs0ZnU3c2xi>

<sup>35</sup> Atase Perdagangan Kairo, “Buyer Kopi, R & SH Import & Export di Luxor Jajaki Impor Kopi dari Indonesia” instagram @cairoatdag. <https://www.instagram.com/p/CbYmPOMsTPk/?igsh=cWJ5a292YjM00Ghq>

<sup>36</sup> Atase Perdagangan Kairo, “KBRI Cairo Fasilitas Penandatanganan Kesepakatan Dagang antara Perusahaan Indonesia dengan Buyer Mesir di bidang Produk Kopi” . instagram @cairoatdag. <https://www.instagram.com/p/Cc2-psqs6Fq/?igsh=MXZkZjZ1MmhxYjBldg==>

langkah awal ekspor di semester II tahun tersebut.<sup>37</sup> Selain itu, KBRI Kairo turut menginisiasi pertemuan bisnis virtual antara Mocca Coffee Mesir dan salah satu pemasok kopi Indonesia guna membuka peluang peningkatan volume ekspor. Duta Besar RI menegaskan komitmen untuk terus mendukung kerja sama dagang yang berkelanjutan di sektor pangan dan minuman.<sup>38</sup>

Selain melalui fasilitasi pertemuan bisnis antara pelaku usaha Indonesia dan buyer Mesir, product marketing strategy diwujutkan melalui kunjungan dan pertemuan bisnis dengan buyer potensial secara door to door. Seperti kunjungan Atase Perdagangan KBRI Kairo ke Al Rehab for Import & Export Co di Port Said, yang diketahui secara konsisten mengimpor kopi Indonesia meski di tengah pandemi. Selain itu, pertemuan dengan perusahaan Trade Acts pada Januari 2022 menunjukkan tingginya minat terhadap kopi robusta Indonesia, sejalan dengan tren peningkatan konsumsi kopi di Mesir.<sup>39</sup> Kunjungan ke Bayt Qahwah di Port Said dan Bon

---

<sup>37</sup> Atase Perdagangan Kairo “KBRI Cairo Fasilitasi Kesepakatan Dagang antara Perusahaan Indonesia dengan Buyer Mesir di bidang Produk Biji Kopi” Instagram @cairoatgd. <https://www.instagram.com/p/Cfq7ZrAPSWD/?igsh=MTNpYnFva2xnZHdkYQ==>

<sup>38</sup> Atase Perdagangan Kairo, “KBRI Kairo Fasilitasi Pertemuan Virtual Bisnis Kopi” instagram @cairoatdag <https://www.instagram.com/p/CiSbowJs1px/?igsh=MTY2OWZrOGMzZGpoYg>

<sup>39</sup> Atase Perdagangan Kairo, “Bahas Penambahan Volume Ekspor Kopi ke Mesir, KBRI Cairo Temui Buyer Potensial, Trade Acts” instagram @cairoatdag.

<https://www.instagram.com/p/CZc2uSOMOGw/?igsh=bjBjN25xaG15czj>

Badran di Mit Ghamr memperlihatkan kuatnya distribusi kopi Indonesia di tingkat lokal, yang didukung oleh strategi pemasaran berbasis layanan cepat.<sup>40</sup> Kunjungan ke Al Garas di Alexandria juga menegaskan tingginya nilai impor produk kopi dan rempah-rempah dari Indonesia. Selain berbagai kunjungan dan pertemuan bisnis sebelumnya, pemerintah Indonesia juga melanjutkan upaya promosi kopi melalui kunjungan langsung ke sejumlah pelaku usaha di Mesir, seperti Kafe Bayt El Bon di Nasr City, pengusaha kopi di Port Said, serta perusahaan Hypervet for Import & Export, Villa Sumatra Coffee Company, dan Sunrise for Import and Export. Kunjungan-kunjungan ini mencerminkan konsistensi strategi gastrodiplomasi Indonesia yang berorientasi pada penguatan citra dan penetrasi kopi Indonesia di pasar Mesir. Melalui interaksi langsung dengan calon buyer dan importir, pemerintah tidak hanya membangun kemitraan dagang, tetapi juga memperkuat posisi kopi Indonesia sebagai produk unggulan yang memiliki nilai budaya dan daya saing global.

Product marketing strategy juga diwujudkan dengan fasilitasi dan peresmian kedai kopi Villa Sumatra Coffee dan El Omda Coffee. Pada tahun 2021, Villa Sumatra Coffee Company meresmikan kedai kopi pertamanya di kawasan strategis Medical Park Premier (MPP), New Cairo, menjadikannya kedai pertama di Mesir yang mengusung

---

<sup>40</sup> Atase Perdagangan Kairo. "Bidik Peningkatan Permintaan Kopi, KBRI Cairo Kunjungi Pelaku Usaha Kopi di Kota Mit Ghamr Provinsi Dakahlia" Instagram @cairoatdag. <https://www.instagram.com/p/CdipNUPsmkC/?igsh=MTJ5Z214ODNxbDY1Zg==>

nama Indonesia dan menyajikan beragam kopi spesialti asal Tanah Air.<sup>41</sup> Peresmian ini turut dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Mesir, Bapak Lutfi Rauf, dan Atase Perdagangan RI di Kairo, Bapak Irman Adi Moefti, yang menegaskan dukungan pemerintah terhadap inisiatif promosi kopi melalui sektor swasta.<sup>42</sup> Dalam kesempatan tersebut, CEO Villa Sumatra, Haytham, menjelaskan bahwa perusahaannya yang berdiri sejak 2018 berfokus pada penyediaan kopi Arabika spesialti dari Sumatera dengan metode *fresh roast*, guna memenuhi selera konsumen pencinta kopi premium di Mesir. Selain aktivitas dagang, Villa Sumatra juga menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melalui pendampingan petani kopi di Indonesia dengan mengedepankan prinsip perdagangan yang adil.<sup>43</sup>

Pertumbuhan jumlah pecinta kopi di Mesir membuka peluang pasar yang potensial bagi kopi Indonesia, ditandai dengan meningkatnya jumlah kedai kopi tradisional, termasuk di kawasan Matariah, Distrik Ain Shams, Kairo. Salah satu contoh nyata adalah pembukaan Kedai Kopi El Omda oleh Haji Emad Attia pada 6 Februari 2022, yang turut

---

<sup>41</sup> “Villa Sumatra; Kedai Kopi Specialty Indonesia Pertama diresmikan di Mesir” instagram @cairoatdag. <https://www.instagram.com/p/CScKguHsbny/?igsh=czNrZDI4YjFnNDd0>

<sup>42</sup> Villa Sumatra; Kedai Kopi Specialty Indonesia Pertama diresmikan di Mesir” instagram @cairoatdag. <https://www.instagram.com/p/CScKguHsbny/?igsh=czNrZDI4YjFnNDd0>

<sup>43</sup> Atase Perdagangan Kairo, “Specialty Coffee Arabika Indonesia Tembus Pasar Mesir” Instagram @cairoatdag. <https://www.instagram.com/p/CFKyakOhLFF/?igsh=MTE4d2ZuZWFobnR3bA==>

dihadiri perwakilan KBRI Kairo.<sup>44</sup> Atase Perdagangan menyampaikan apresiasi atas kontribusi El Omda dalam memasarkan kopi robusta Indonesia, serta mendorong perluasan impor ke jenis arabika dan kopi spesialti. Dukungan KBRI mencerminkan sinergi antara diplomasi ekonomi dan pelaku usaha lokal. Pembukaan kedai ini merupakan bentuk nyata dari strategi *product marketing*, di mana kedai kopi berfungsi sebagai media promosi sekaligus ruang interaksi budaya, memperkuat posisi kopi Indonesia di pasar ritel Mesir.

Kedua, *food event strategy* dalam promosi kopi Indonesia ke Mesir diwujudkan melalui partisipasi pada Food Afrika tahun 2021, 2022, dan 2023, Cairo Supermarket Expo 2021, 2022, 2023, Egypt Coffee Festival dan partisipasi dalam CAFEX pada tahun 2022. Partisipasi dalam *Food Africa* dan *Cairo Supermarket Expo* memungkinkan Indonesia menampilkan produk kopi unggulan bersama produk makanan dan minuman lainnya. Kehadiran ini memperkuat citra merek nasional serta membuka peluang kerja sama bisnis dengan pelaku industri dari berbagai negara. Sementara itu, dalam *Egypt Coffee Festival*, Indonesia menampilkan berbagai jenis kopi dari daerah seperti

---

<sup>44</sup> Atase Perdagangan Kairo, “Mengawali 2022, Kedai Kopi Asal Indonesia Bertambah di Mesir” [instagram @cairoatdag. https://www.instagram.com/p/CZq6rhBsGXg/?igsh=MTN0OGhwNGIxOHh0Mw==](https://www.instagram.com/p/CZq6rhBsGXg/?igsh=MTN0OGhwNGIxOHh0Mw==)

Sumatera, Jawa, Malang, dan Flores.<sup>45</sup> Festival ini dimanfaatkan sebagai sarana membangun brand awareness dan membentuk narasi budaya melalui seni penyajian kopi, termasuk melalui penyelenggaraan kompetisi barista.<sup>46</sup> Hal ini memperkuat pesan bahwa kopi Indonesia bukan sekadar komoditas, tetapi juga simbol identitas budaya. Partisipasi dalam *CAFEX 2022* semakin menegaskan peran gastrodiplomasi, dengan kehadiran pelaku usaha seperti Villa Sumatra yang memperkenalkan kopi specialty dari berbagai wilayah. Pameran ini menjadi momentum penting dalam memperluas pasar ekspor serta memperkenalkan keanekaragaman rasa kopi Indonesia kepada konsumen Mesir dan kawasan Timur Tengah secara lebih luas.

Ketiga, *coalition building strategy* dalam promosi kopi Indonesia ke Mesir tidak hanya bergantung pada peran institusional pemerintah, tetapi juga melibatkan aktor non negara seperti eksportir kopi Indonesia, diaspora dan mahasiswa Indonesia sebagai bagian dari strategi gastrodiplomasi. Kementerian Perdagangan memanfaatkan potensi diaspora yang memiliki usaha mandiri dan akses langsung ke konsumen lokal untuk memperluas distribusi produk secara nonformal. Di sisi lain, mahasiswa Indonesia yang memiliki kemampuan bahasa Arab dan pemahaman budaya Mesir turut dilibatkan dalam berbagai kegiatan

---

<sup>45</sup> Difa Yashinta "Di Festival Kopi Mesir, Indonesia gelar lomba barista" Antara News. <https://jambi.antaranews.com/berita/459394/di-festival-kopi-mesir-indonesia-gelar-lomba-barista>

<sup>46</sup> Ibid

promosi, menjembatani komunikasi antarbudaya secara efektif. Sinergi antara pemerintah, eksportir, diaspora, dan mahasiswa ini mencerminkan pendekatan kolaboratif dalam diplomasi ekonomi, menjadikan promosi kopi Indonesia sebagai langkah yang inklusif dan berdampak.

Keempat, *media relation strategy* dalam promosi kopi Indonesia ke Mesir diwujudkan melalui platform *InaExport*, pemerintah menyediakan wadah resmi berbasis digital yang memfasilitasi hubungan B2B antara eksportir Indonesia dan importir Mesir dengan informasi produk kopi yang lengkap dan terverifikasi.<sup>47</sup> Selain itu, promosi juga dilakukan melalui media lokal seperti kanal Nile TV International, yang digunakan sebagai sarana diplomasi publik untuk menyampaikan informasi kopi Indonesia kepada khalayak Mesir secara langsung dan luas.<sup>48</sup> Di sisi lain, Atase Perdagangan KBRI Cairo mengoptimalkan media sosial seperti YouTube dan Instagram @cairoatdag untuk mendiseminasi konten visual terkait promosi kopi, testimoni pengunjung, serta dokumentasi kegiatan dagang secara dinamis dan menarik. Ketiga pendekatan ini menunjukkan penerapan strategi gastrodipomasi berbasis media yang adaptif, memperkuat citra Indonesia sebagai negara eksportir kopi yang responsif terhadap perkembangan teknologi komunikasi dalam diplomasi ekonomi global.

---

<sup>47</sup>

[https://www.inaexport.id/front\\_end/list\\_product/category/1118?page=24](https://www.inaexport.id/front_end/list_product/category/1118?page=24)

<sup>48</sup> <https://youtu.be/nNp1B72Lqgc?si=yCEmnZSjshkUXzFA>

Kelima, *education strategy* dalam promosi kopi Indonesia ke Mesir diwujudkan melalui penyelenggaraan seminar dan sosialisasi yang melibatkan pakar dari Asosiasi Kopi Spesialti Indonesia, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kualitas, karakteristik, serta nilai tambah kopi Indonesia di pasar internasional. Sasaran kegiatan mencakup mahasiswa Indonesia di Mesir, perwakilan KBRI Kairo, pelaku usaha lokal, hingga masyarakat umum Mesir, dengan harapan membentuk jejaring komunikasi yang luas dan memperkuat citra kopi Indonesia melalui agen-agen komunikasi lintas komunitas. Selain itu, inisiatif partisipatif juga diwujudkan dalam bentuk lomba esai bertema strategi produk Indonesia di pasar Mesir, yang dirancang untuk mendorong kontribusi ide kreatif dari diaspora. Upaya ini menunjukkan sinergi antara edukasi, diplomasi, dan keterlibatan masyarakat sebagai elemen penting dalam memperluas jangkauan promosi kopi melalui pendekatan berbasis pengetahuan dan kolaboratif.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan strategi gastrodiplomasi yang dijalankan Indonesia dalam mempromosikan kopi ke Mesir, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan sangat komprehensif dan kolaboratif. Melalui lima strategi utama yang dikembangkan oleh Juyan Zhang, yaitu product

marketing, food event, coalition building, media relations, dan education strategy. Indonesia tidak hanya menonjolkan kopi sebagai komoditas ekspor, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya nasional yang memiliki nilai ekonomi dan diplomatik. Berbagai kegiatan seperti fasilitasi pertemuan dagang, keikutsertaan dalam pameran internasional, pembukaan kedai kopi Indonesia, pelibatan diaspora dan mahasiswa, hingga pemanfaatan media digital menunjukkan bahwa promosi kopi dilakukan secara sistematis dan strategis. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, diaspora, dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan promosi kopi Indonesia di Mesir, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara produsen kopi yang memiliki daya saing global dan identitas budaya di Mesir. Strategi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan volume ekspor, tetapi juga pada peningkatan citra Indonesia di Mesir.

Namun, penulis belum menemukan adanya implementasi strategi *use of opinion leader* dalam promosi kopi Indonesia ke Mesir selama periode 2021–2023 sebagaimana dimaksud oleh Juyan Zhang dalam konsep gastrodiplomasi. Strategi ini seharusnya melibatkan tokoh publik, selebriti, atau influencer lokal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi dan perilaku konsumen, guna membentuk opini positif serta meningkatkan ketertarikan terhadap kopi Indonesia. Ketidakhadiran pendekatan ini menunjukkan adanya celah yang dapat dieksplorasi untuk memperkuat

strategi gastrodiplomasi ke depan. Dengan melibatkan figur-figur berpengaruh di Mesir, promosi kopi Indonesia berpotensi menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun kedekatan emosional yang lebih kuat dengan konsumen lokal. Oleh karena itu, penggunaan *opinion leader* dapat menjadi strategi pelengkap untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik kopi Indonesia di pasar Mesir.

---

## Daftar Pustaka

Antara Sulteng. "Indonesia Rajai Pasar Minyak Sawit Di Mesir."

<https://sulteng.antaranews.com/berita/6045/indonesia-rajai-pasar-minyak-sawit-di-mesir>. Diakses pada 17/03/2025.

Atase Perdagangan Kairo. "Bahas Penambahan Volume Ekspor Kopi ke Mesir, KBRI Cairo Temui Buyer Potensial, Trade Acts." Instagram @cairoatdag. <https://www.instagram.com/p/CZc2uSOMOGw/?igsh=bjBjN25xaG15czJo>

Atase Perdagangan Kairo. "Bidik Peningkatan Permintaan Kopi, KBRI Cairo Kunjungi Pelaku Usaha Kopi di Kota Mit Ghamr Provinsi Dakahlia." Instagram @cairoatdag. <https://www.instagram.com/p/CdipNUPsmkC/?igsh=M TJ5Z2l4ODNxbDY1Zg==>

- Atase Perdagangan Kairo. “Buyer Kopi, R & SH Import & Export di Luxor Jajaki Impor Kopi dari Indonesia.” Instagram @cairoatdag.  
<https://www.instagram.com/p/CbYmPOMsTPk/?igsh=cWJ5a292YjM0OGhq>
- Atase Perdagangan Kairo. “KBRI Cairo Fasilitas Kesepakatan Dagang antara Perusahaan Indonesia dengan Buyer Mesir di bidang Produk Biji Kopi.” Instagram @cairoatdag.  
<https://www.instagram.com/p/Cfq7ZrAPSWD/?igsh=M TNpYnFva2xnZHdkYQ==>
- Atase Perdagangan Kairo. “KBRI Cairo Fasilitas Penandatanganan Kesepakatan Dagang antara Perusahaan Indonesia dengan Buyer Mesir di bidang Produk Kopi.” Instagram @cairoatdag.  
<https://www.instagram.com/p/Cc2-psqs6Fq/?igsh=MXZkZjZ1MmhxYjBldg==>
- Atase Perdagangan Kairo. “KBRI Kairo Fasilitas Pertemuan Virtual Bisnis Kopi.” Instagram @cairoatdag.  
<https://www.instagram.com/p/CiSbowJs1px/?igsh=MT Y2OWZrOGMzZGpoYg>
- Atase Perdagangan Kairo. “Mengawali 2022, Kedai Kopi Asal Indonesia Bertambah di Mesir.” Instagram @cairoatdag.  
<https://www.instagram.com/p/CZq6rhBsGXg/?igsh=M TN0OGhwNGIxOHh0Mw==>
- Atase Perdagangan Kairo. “Mengawali Transaksi Ekspor Perdana ke Mesir di Tahun 2022, KBRI Kairo Fasilitas

Pelaku Usaha Indonesia Transaksi Bisnis Kopi dengan Buyer Mesir.” Instagram @cairoatdag. <https://www.instagram.com/p/CYT9eXLMvxM/?igsh=ZnNyOGs0ZnU3c2xi>

Boga, Kuntoro. "Tren 2025: Peluang dan Daya Saing Kopi Indonesia."

<https://tanamanindustri.bsip.pertanian.go.id/berita/tren-2025-peluang-dan-daya-saing-kopi-indonesia>. Diakses pada 16/03/2025.

BPS. "Ekspor Kopi Menurut Negara Tujuan Utama, 2000-2023."

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAxNCMx/ekspor-kopi-menurut-negara-tujuan-utama--2000-2022.html>. Diakses pada 6 April 2025.

Difa Yashinta. "Di Festival Kopi Mesir, Indonesia Gelar Lomba Barista." Antara News.

<https://jambi.antaranews.com/berita/459394/di-festival-kopi-mesir-indonesia-gelar-lomba-barista>

Febrianti Reyhan, et al. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Kopi Indonesia di Pasar Internasional." *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial*, Vol. 6, No. 2, 2023.

Housing Finance Africa. "Egypt."

<https://housingfinanceafrica.org/countries/egypt/>.

Diakses pada 16/03/2025.

Kementerian Keuangan. "Pandemi Covid-19 Dan Menurunnya Perekonomian Indonesia."

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html>

Liputan 6. "Raih Transaksi 2.000 Ton, Ekspor Kopi Jawa Timur Rajai Pasar Mesir." <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5306381/raih-transaksi-2000-ton-ekspor-kopi-jawa-timur-rajai-pasar-mesir>

Nguyen Coffee Supply. "Sepuluh Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang Kopi Vietnam." <https://nguyencoffeesupply.com.translate.goog/blogs/news/ten-things-you-need-to-know-about-vietnamese-coffee>

Nescafe. "Jenis Kopi di Indonesia yang Sukses Mendunia, Apa Saja?" <https://www.nescafe.com/id/id-id/budaya-kopi/pengetahuan/jenis-kopi-di-indonesia>

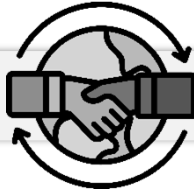
Ramadhillah Balqis dan Ismail Yunita. "Climate Change Impacts on Coffee Production in Indonesia: A Review." *Journal of Critical Ecology* 1, no. 1 (29 Februari 2024): 1–2. <https://doi.org/10.61511/jcreco.v1i1.645>

Rahman, Mahab. "Produsen dan Eksportir Kopi Terbesar di Dunia: Brasil." <https://www.morethanshipping.com/worlds-largest-coffee-producer-and-exporter-brazil/>. Diakses pada 16/03/2025.

Rockower, Paul S. "Recipes for Gastrodiplomacy." *Place Branding and Public Diplomacy* 8.3 (2012): 236–237. <https://doi.org/10.1057/pb.2012.17>

- Solimah, et al. *Statistik Kopi Indonesia 2023: Volume 8*. Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024, hlm. 9.  
<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/29/d748d9bf594118fe112fc51e/statistik-kopi-indonesia-2023.html>
- Suheri, et al. *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia: Ekspor 2023*. Volume 19, BPS-Statistics Indonesia, 2024, hlm. 257–258.
- Villa Sumatra. “Kedai Kopi Specialty Indonesia Pertama Diresmikan di Mesir.” Instagram @cairoatdag.  
<https://www.instagram.com/p/CScKguHsbny/?igsh=czNrZDI4YjFnNDd0>
- YouTube Atase Perdagangan Cairo.  
<https://youtu.be/nNp1B72Lqgc?si=yCEmnZSJshkUXzFA>
- Zhang, Juyan. “The Foods of the Worlds: Mapping and Comparing Contemporary Gastrodiplomacy Campaigns.” *International Journal of Communication* 9 (2015): 10–17.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# BAB VI

## Kolaborasi Budaya Antara Korea Selatan dan Indonesia Melalui Pameran Busana Batik-Jinju Silk di Jakarta Tahun 2023

---

### A. Pendahuluan

Di era globalisasi, diplomasi budaya menjadi salah satu strategi *soft power* yang efektif bagi negara dalam membangun citra positif dan memperluas pengaruhnya di tingkat internasional. Mengacu pada Joseph S. Nye, *soft power* adalah kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi pihak lain melalui daya tarik budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri yang sah secara moral, bukan melalui paksaan atau imbalan.<sup>1</sup> *Soft power* berperan penting dalam

---

<sup>1</sup> Iva Rachmawati, *Diplomasi publik: meretas jalan bagi harmoni dalam hubungan antarnegara*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Calpulis, 2016).

membentuk persepsi positif dan menciptakan hubungan internasional yang didasarkan pada ketertarikan, bukan ketakutan atau kepentingan semata. Sebagai bagian dari diplomasi publik, diplomasi budaya memanfaatkan kekuatan budaya sebagai jembatan untuk memperkenalkan identitas nasional, menumbuhkan rasa saling peduli, serta mempromosikan dan melindungi kepentingan nasional. Melalui pendekatan ini, negara dapat membangun *foundation of trust* atau fondasi kepercayaan yang kuat dan berkelanjutan dalam hubungan antarbangsa.<sup>2</sup> Dengan adanya saling percaya tersebut negara akan merasakan manfaat jangka panjang dengan terbentuknya kedekatan personal yang semakin terbentuk untuk mendapatkan opini masyarakat internasional yang positif. Untuk mencapai tujuan yang efektif tersebut, Diplomasi Budaya tentunya harus dijalankan dengan strategi yang tepat.<sup>3</sup>

Diplomasi pada intinya berperan sebagai jembatan untuk mengkomunikasikan kebijakan dan tujuan nasional suatu negara kepada pihak internasional secara efektif, sehingga membangun pemahaman, kolaborasi, dan kepercayaan antara negara-negara. Komunikasi menjadi elemen kunci dalam diplomasi budaya karena budaya adalah aspek yang menarik dan memerlukan pendekatan komunikasi yang tepat

---

<sup>2</sup> Al Busyra Basnur, *Diplomasi publik: catatan, inspirasi dan harapan* (Minormatani, Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2018).

<sup>3</sup> Qonita Assabil dan Agung Triyatno, "DIPLOMASI BUDAYA KOREA SELATAN & K-POP PADA 2021 (SOUTH KOREAN CULTURAL DIPLOMACY & K-POP AT 2021)," *Jurnal Sosial Politik Peradaban (JSPP)* 4, no. 1 (16 April 2023):

75–100,

<https://journal.peradaban.ac.id/index.php/jspp/article/view/1401>.

agar nilai-nilai dan keunikan yang dimiliki suatu negara dapat diterima dan diapresiasi oleh khalayak global. Diplomasi budaya mencakup berbagai aspek seperti seni, bahasa, dan informasi, di mana masing-masing unsur ini memainkan peran strategis dalam memperkenalkan identitas dan nilai-nilai suatu bangsa.

Kolaborasi budaya antarnegara juga menjadi sumber inspirasi yang kaya bagi inovasi dalam bidang seni dan kreativitas, menciptakan karya-karya baru yang menggabungkan elemen unik dari berbagai tradisi. Gabungan elemen-elemen ini tidak hanya menambah keberagaman seni global tetapi juga membuka potensi baru dalam industri kreatif dan ekonomi. Sebagai contoh, Korea Selatan telah berhasil memanfaatkan diplomasi budaya sebagai bagian dari strategi *soft power* dengan mengembangkan dan mengeksport kebudayaan populernya, seperti K-pop dan drama Korea, ke panggung internasional.<sup>4</sup> Korea Selatan secara aktif menggunakan budaya populer sebagai salah satu upaya diplomasi budaya yang berorientasi ekspor, sekaligus menguatkan posisi budaya Korea dalam jaringan global. Melalui diplomasi budaya, negara-negara tidak hanya memperkenalkan identitas mereka, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan seni dan budaya global sambil meningkatkan daya saing ekonomi kreatif masing-masing.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Assabil dan Triyatno.

<sup>5</sup> Qonita Assabil dan Agung Triyatno, "DIPLOMASI BUDAYA KOREA SELATAN & K-POP PADA 2021 (SOUTH KOREAN CULTURAL DIPLOMACY & K-POP AT 2021)," *Jurnal Sosial Politik Peradaban (JSPP)* 4, no. 1 (16 April 2023): 75–100, <https://journal.peradaban.ac.id/index.php/jspp/article/view/1401>.

Diplomasi budaya Korea Selatan berkembang pesat sebagai instrumen utama dalam menciptakan citra nasional yang positif sekaligus memperkuat fondasi ekonomi negara. Melalui pendekatan ini, Korea Selatan memanfaatkan budaya populer sebagai *soft power* yang efektif, menyampaikan nilai-nilai dan warisan budaya nasional secara global. Pada tahun 1992, di tengah kebangkitan industri kebudayaan, Korea Selatan mulai memperluas diplomasi budayanya, yang mendapatkan respons positif baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk di Indonesia. Masuknya budaya Korea ke Indonesia pada 2000-an, melalui drama '*Winter Sonata*' yang memperkenalkan masyarakat Indonesia pada berbagai aspek budaya Korea, menciptakan ketertarikan yang semakin meningkat. Momen tersebut menandai awal dari strategi budaya Korea Selatan untuk membangun citra yang lebih modern dan diakui di dunia internasional. Keberhasilan ekonomi Korea yang luar biasa, menjadikannya salah satu "*Asian Miracle*" pada dekade 1990-an, memperkuat daya tarik budaya Korea, sehingga makin diterima oleh komunitas internasional, termasuk di Indonesia.<sup>6</sup>

Di samping drama Korea, gelombang K-Pop juga memainkan peran penting dalam meningkatkan minat internasional terhadap budaya Korea. Dengan popularitasnya yang mendunia, K-Pop berhasil menarik audiens dari berbagai latar belakang budaya dan menjadi elemen kunci dalam diplomasi budaya Korea. Musik K-Pop yang penuh energi dan inovatif menginspirasi banyak penggemar internasional dan menciptakan ruang pertukaran budaya

---

<sup>6</sup> Assabil dan Triyatno.

yang dinamis. Grup-grup K-Pop sering berpartisipasi dalam acara-acara global, mempromosikan citra Korea Selatan sekaligus memperkenalkan nilai-nilai budaya melalui lirik, tarian, dan gaya fashion yang khas. Keberhasilan artis-artis K-Pop ini tidak hanya meningkatkan citra Korea Selatan secara global, tetapi juga menciptakan koneksi budaya yang lebih mendalam dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia. Dalam perspektif diplomasi, K-Pop menjadi media yang sangat efektif untuk mempromosikan budaya Korea, yang pada akhirnya mendorong niat baik dan minat terhadap Korea di berbagai negara.<sup>7</sup>

Selain penyebaran budaya populer melalui media hiburan, Korea Selatan juga menggunakan kolaborasi budaya sebagai strategi diplomasi. Dalam hal ini, beberapa proyek kolaboratif telah diinisiasi oleh lembaga pemerintah Korea, bekerja sama dengan berbagai pihak internasional untuk memperkuat jalinan budaya dan industri kreatif antara Korea Selatan dan negara-negara sahabat. Salah satu inisiatif signifikan adalah kerja sama dalam penyelenggaraan pameran busana yang memadukan unsur batik Indonesia dan Jinju Silk dari Korea Selatan. Keberhasilan proyek-proyek ini terwujud berkat dukungan dari lembaga-lembaga penting Korea Selatan, seperti Korean Foundation for International Culture Exchange (KOFICE) dan Korea Creative Content Agency (KOCCA), yang memiliki peran besar dalam memperkuat hubungan budaya serta memperluas cakupan industri kreatif Korea di pasar global. KOFICE, sebagai lembaga yang fokus pada pertukaran budaya internasional,

---

<sup>7</sup> Assabil dan Triyatno.

memiliki misi utama untuk mempromosikan dan memperkenalkan budaya Korea ke dunia internasional.<sup>8</sup> Mereka mendukung berbagai proyek kolaborasi budaya yang bertujuan mempertemukan elemen-elemen budaya dari kedua negara, seperti pameran, festival, dan program pendidikan yang memberikan pengalaman budaya yang kaya dan mendalam bagi masyarakat internasional.

Di sisi lain, KOCCA, sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan konten kreatif, bertindak sebagai penghubung antara pemerintah dan industri. KOCCA memberikan dukungan yang komprehensif pada berbagai bidang kreatif, mulai dari produksi hingga distribusi, dalam genre-genre seperti film, musik, game, fashion, dan animasi. Melalui ekspansi internasional yang difasilitasi KOCCA, perusahaan-perusahaan Korea Selatan mendapatkan peluang untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar global dengan lebih mudah, termasuk dalam konteks kolaborasi budaya dengan Indonesia. KOCCA juga berfokus pada peningkatan daya saing industri kreatif Korea Selatan melalui pendidikan bagi para pencipta konten dan dukungan penelitian. Kolaborasi antara KOFICE dan KOCCA dalam proyek pameran busana yang memadukan batik Indonesia dan desain Hanbok modern dari Korea Selatan menunjukkan hasil nyata dari diplomasi budaya Korea. Proyek-proyek ini tidak hanya memperkaya pengalaman budaya bagi kedua negara, tetapi juga membuka peluang baru dalam industri

---

<sup>8</sup> kofice, "Moija CPI," Moija CPI, diakses 6 Juli 2025, <http://www.kofice.or.kr/moijacpi/>.

fashion internasional, menciptakan nilai tambah bagi industri kreatif kedua negara.<sup>9</sup>

## B. Sejarah Batik dan Jinju Silk Sebagai Warisan Budaya

Batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang kaya akan nilai sejarah, makna, dan teknik yang unik, sehingga diakui secara internasional sebagai representasi identitas budaya bangsa. UNESCO telah menetapkan batik sebagai *Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity* pada tahun 2009, sebuah pengakuan yang menegaskan keunikan dan nilai artistik batik dalam kebudayaan global.<sup>10</sup> Batik tidak hanya berupa pola dan teknik pencelupan kain, tetapi juga mencakup makna filosofis yang terkandung dalam motif-motifnya. Setiap motif batik, seperti parang, kawung, atau lereng, memiliki makna tertentu yang sering kali berkaitan dengan ajaran moral, status sosial, dan sejarah masyarakat yang membuatnya.<sup>11</sup> Selain itu, batik memiliki nilai historis yang erat kaitannya dengan berbagai periode dalam sejarah Indonesia, mulai dari masa kerajaan hingga masa perjuangan kemerdekaan. batik juga berfungsi sebagai ekspresi budaya yang menghubungkan berbagai

---

<sup>9</sup> "KOCCA," diakses 31 Oktober 2024, <https://www.kocca.kr/en/main.do>.

<sup>10</sup> "Menilik Sejarah Batik, Salah Satu Duta Budaya Indonesia - Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek," 3 Oktober 2023, <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/menilik-sejarah-batik-salah-satu-duta-budaya-indonesia/>.

<sup>11</sup> "Menilik Sejarah Batik, Salah Satu Duta Budaya Indonesia - Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek."

generasi, memperkaya nilai seni dalam kehidupan masyarakat, dan membentuk identitas budaya yang kuat. Tradisi pembuatan batik di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Jawa, Sumatera, dan Bali, memperlihatkan variasi motif, teknik, dan warna yang mencerminkan ciri khas masing-masing daerah. Misalnya, batik Jawa dikenal dengan dominasi warna cokelat, biru tua, dan krem serta motif yang cenderung terikat pada aturan-aturan tertentu, sedangkan batik pesisir yang berkembang di daerah seperti Pekalongan menunjukkan motif yang lebih bebas dan warna yang lebih cerah. Perkembangan batik dari pakaian tradisional menjadi produk fashion yang diterima luas di kancah internasional juga menunjukkan kemampuan batik untuk beradaptasi dan berkembang tanpa kehilangan identitas aslinya.<sup>12</sup> Batik tidak hanya penting sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai komoditas ekonomi yang mendukung keberlanjutan industri kreatif di Indonesia. Pembuatan batik melibatkan proses yang rumit dan teknik-teknik khas seperti canting dan cap, yang membutuhkan keahlian tinggi dan ketelitian, sehingga produk batik memiliki nilai eksklusif dan berdaya jual tinggi.<sup>13</sup> Melalui pelatihan dan pengembangan industri batik, pemerintah Indonesia berupaya menjaga kelestarian tradisi ini sekaligus meningkatkan daya saing produk batik di pasar global. Oleh karena itu, batik sebagai warisan budaya memiliki nilai yang sangat penting dalam memperkenalkan

---

<sup>12</sup> “Menilik Sejarah Batik, Salah Satu Duta Budaya Indonesia - Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.”

<sup>13</sup> “Menilik Sejarah Batik, Salah Satu Duta Budaya Indonesia - Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.”

Indonesia kepada dunia serta dalam mempertahankan identitas budaya yang khas di tengah arus globalisasi.<sup>14</sup>

Di sisi lain, Jinju Silk merupakan jenis kain sutra yang dihasilkan di kota Jinju, Korea Selatan, yang terkenal dengan kualitas dan kehalusannya. Jinju telah menjadi pusat produksi sutra di Korea Selatan sejak berabad-abad lalu, sehingga Jinju Silk bukan hanya produk tekstil, tetapi juga bagian penting dari warisan budaya Korea Selatan.<sup>15</sup> Kain ini dibuat dari benang sutra yang ditenun secara halus untuk menghasilkan tekstur lembut, kuat, dan bercahaya yang sangat dihargai dalam budaya Korea. Proses pembuatan Jinju Silk masih mempertahankan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun, meskipun sudah banyak yang dikombinasikan dengan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas khasnya. Makna Jinju Silk dalam budaya Korea Selatan sangat mendalam, karena sutra ini telah lama dikaitkan dengan keanggunan, kemakmuran, dan status sosial.<sup>16</sup> Pada masa lalu, kain sutra ini hanya tersedia untuk keluarga kerajaan dan kaum bangsawan, sehingga menjadi simbol prestise dan

---

<sup>14</sup> “Menilik Sejarah Batik, Salah Satu Duta Budaya Indonesia - Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.”

<sup>15</sup> Sidik Pramono, “Batik-Jinju Silk Berkolaborasi di Pameran Busana Jakarta,” [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com/humaniora/633270/batik-jinju-silk-berkolaborasi-di-pameran-busana-jakarta), 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora/633270/batik-jinju-silk-berkolaborasi-di-pameran-busana-jakarta>.

<sup>16</sup> Natisha Andarningtyas, “Batik Fractal bawakan kisah ‘bonghwang’ Jinju dalam tiga desain batik,” Antara News, 28 November 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/3845244/batik-fractal-bawakan-kisah-bonghwang-jinju-dalam-tiga-desain-batik>.

kemewahan. Dalam konteks modern, Jinju Silk tetap menjadi simbol elegansi dan sering digunakan dalam acara-acara formal, seperti pakaian adat Korea, hanbok, dan produk-produk fashion berkualitas tinggi. Nilai budaya yang melekat pada Jinju Silk juga tercermin dalam pelestarian teknik-teknik tradisional pembuatannya, yang menunjukkan kebanggaan masyarakat Korea Selatan terhadap warisan leluhur mereka. Selain itu, Jinju Silk memiliki peran penting dalam diplomasi budaya Korea Selatan. Pemerintah dan lembaga budaya Korea Selatan, seperti KOCCA dan KOFICE, kerap mempromosikan Jinju Silk dalam acara-acara budaya internasional, yang tidak hanya memperkenalkan kualitas produk Korea tetapi juga menonjolkan warisan seni dan budaya lokal. Dengan kualitasnya yang unggul dan sejarahnya yang panjang, Jinju Silk menjadi salah satu contoh bagaimana tradisi tekstil Korea Selatan mampu bersanding dengan budaya global dan beradaptasi dalam perkembangan industri fashion internasional.

### **C. Kolaborasi Budaya Indonesia Dan Korea Selatan**

Pameran busana bertajuk “Bagian Kedua dari Kisah Batik Indonesia dan Jinju Silk” merupakan bentuk konkret dari diplomasi budaya antara Indonesia dan Korea Selatan. Diselenggarakan di Jakarta pada 28 dan 29 November 2023, acara ini merupakan lanjutan dari pameran yang serupa di

tahun 2022.<sup>17</sup> Kolaborasi budaya ini memiliki tujuan untuk memperkenalkan ‘Batik-Jinju Silk’ yang memiliki desain modern berdasarkan budaya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia dan juga Kota Jinju di Korea Selatan. Kolaborasi ini juga sebagai suatu upaya untuk menggali kembali warisan kebudayaan kota Jinju menggunakan cara yang kreatif agar mendapatkan nilai daya tarik tinggi dalam mempromosikan kebudayaan baik dari Korea Selatan dan juga kebudayaan Indonesia melalui kolaborasi busana. Kolaborasi busana antara batik dan jinju silk di Jakarta pada tahun 2023 berfungsi sebagai sarana diplomasi budaya yang penting. Melalui proyek ini, desainer dari kedua tradisi berpadu untuk menciptakan karya yang tidak hanya menampilkan keindahan dan kekayaan tekstil Indonesia, tetapi juga memperkuat identitas budaya.<sup>18</sup>

Pameran busana kolaboratif yang mengusung tema “Batik-Jinju Silk” menjadi sarana penting untuk menyebarluaskan budaya Indonesia dan Korea Selatan di panggung internasional. Di era globalisasi, di mana batas geografis semakin kabur, diplomasi budaya memainkan peran signifikan dalam memperkenalkan identitas dan nilai-nilai unik dari masing-masing negara. Dengan menampilkan perpaduan antara batik Indonesia dan Jinju Silk Korea Selatan, pameran ini memberikan peluang bagi kedua negara

---

<sup>17</sup> Dannu, “Batik-Jinju Silk, Kolaborasi Budaya Indonesia dan Kota Jinju Korea Selatan Gelar Pameran di Jakarta,” *beritasatu.com*, 29 November 2023, <https://www.beritasatu.com/network/idpost/60403/batik-jinju-silk-kolaborasi-budaya-indonesia-dan-kota-jinju-korea-selatan-gelar-pameran-di-jakarta>.

<sup>18</sup> Pramono, “Batik-Jinju Silk Berkolaborasi di Pameran Busana Jakarta.”

untuk mengenalkan kekayaan budaya tradisional mereka dalam format modern dan kontekstual, menjangkau khalayak yang lebih luas. Perpaduan ini bukan sekadar bentuk ekspresi artistik, melainkan upaya diplomasi budaya yang strategis, memanfaatkan seni dan fashion sebagai media untuk mempererat hubungan antarbangsa melalui pemahaman dan apresiasi budaya. Dalam hal ini, pameran busana menjadi sarana edukatif sekaligus komunikatif, di mana nilai-nilai budaya yang diusung masing-masing negara dapat dikenali dan diterima oleh masyarakat internasional.<sup>19</sup>

Diplomasi budaya melalui pertukaran fashion dan seni, seperti yang dicontohkan dalam pameran “Batik-Jinju Silk”, memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan sekaligus membuka jalan untuk kolaborasi jangka panjang dalam bidang-bidang lainnya. Proyek ini mendorong interaksi antarbudaya yang tidak hanya memperkenalkan motif dan kain tradisional, tetapi juga mengajak audiens untuk memahami filosofi dan makna yang terkandung di baliknya. Batik Indonesia, yang dikenal dengan motif-motif simbolisnya, dikombinasikan dengan Jinju Silk Korea Selatan, yang mencerminkan keindahan dan nilai luhur masyarakat Korea. Pertukaran fashion ini memungkinkan kedua negara untuk menyampaikan keunikan budaya mereka dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh audiens global. Dengan demikian, pameran ini tidak hanya memperkuat citra nasional masing-masing negara, tetapi juga berfungsi sebagai

---

<sup>19</sup> Qonita Assabil dan Agung Triyatno, “DIPLOMASI BUDAYA KOREA SELATAN & K-POP PADA 202” 4, no. 1 (2023).

katalis untuk meningkatkan hubungan diplomatik melalui jalur yang kreatif dan efektif.

Selain itu, pameran kolaboratif ini memberikan dampak positif pada pengembangan industri kreatif dan ekonomi pariwisata di kedua negara. Dengan meningkatnya minat global terhadap produk-produk berbasis budaya, pameran seperti “Batik-Jinju Silk” membuka peluang ekonomi yang signifikan bagi sektor kreatif, khususnya fashion.<sup>20</sup> Kolaborasi ini mendorong desainer, pengrajin, dan seniman dari kedua negara untuk bekerja sama, menciptakan karya-karya baru yang inovatif dan menarik perhatian pasar internasional. Hasilnya adalah terbukanya peluang bagi peningkatan ekspor produk fashion berbasis budaya dan terciptanya daya saing baru dalam industri kreatif global. Dari perspektif pariwisata, pameran ini juga berperan sebagai magnet yang dapat menarik wisatawan mancanegara untuk datang dan mengalami kebudayaan Indonesia dan Korea Selatan secara langsung, meningkatkan minat wisata budaya dan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata masing-masing negara.

Sebagai platform untuk menampilkan perpaduan artistik dan pertukaran budaya, pameran “Batik-Jinju Silk” bertujuan untuk menampilkan karya fashion yang terinspirasi oleh budaya tradisional namun dirancang secara modern. Motif batik yang kaya dengan simbolisme budaya Indonesia dipadukan dengan elemen Jinju Silk, menghasilkan karya yang merefleksikan harmonisasi antara tradisi dan inovasi. Desain yang dihadirkan tidak hanya memperlihatkan

---

<sup>20</sup> Pramono, “Batik-Jinju Silk Berkolaborasi di Pameran Busana Jakarta.”

keindahan visual, tetapi juga menekankan pada esensi dan nilai-nilai budaya yang diwakilinya, menjadikan acara ini sebagai medium komunikasi lintas budaya yang efektif.<sup>21</sup>

## **D. Dampak Pameran Busana Batik-Jinjusilk Bagi Indonesia Dan Korea Selatan**

Dalam konteks global, pameran ini memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk menunjukkan bagaimana elemen-elemen tradisional mereka dapat bertransformasi menjadi karya yang relevan bagi audiens modern, menyoroti kekuatan kolaborasi dan kemampuan beradaptasi budaya masing-masing. Dengan demikian, pameran ini bukan sekadar acara fashion, melainkan simbol dari kolaborasi budaya yang berhasil dalam mengekspresikan identitas, kreativitas, dan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh Indonesia dan Korea Selatan.

Pameran ini tidak hanya menampilkan keindahan tekstil, tetapi juga memperkenalkan perpaduan unik antara budaya tradisional Indonesia, melalui batik, dengan kehalusan Jinju Silk yang berasal dari kota Jinju di Korea Selatan. Mengusung konsep desain modern, pameran ini menonjolkan kekayaan budaya masing-masing negara, yang dituangkan ke dalam koleksi kain dan motif yang beragam. Pameran ini juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat hubungan diplomatik dan meningkatkan pemahaman lintas budaya,

---

<sup>21</sup> “Kolaborasi Fashion Sebagai Wadah Akulturasi Budaya antara Indonesia dan Korea,” diakses 31 Oktober 2024, <https://www.jakartafashionweek.co.id/news-flash/kolaborasi-fashion-sebagai-wadah-akulturasi-budaya-antara-indonesia-dan-korea>.

menampilkan bagaimana elemen budaya yang kaya dapat berinteraksi dan bertransformasi menjadi karya seni kontemporer yang relevan di kancah internasional.

Dalam kolaborasi ini, Batik Fractal, sebagai salah satu desainer dan produsen batik ternama di Indonesia, memanfaatkan unsur cerita rakyat Korea Selatan dalam setiap motif yang dihadirkan. Motif-motif seperti bonghwang (burung phoenix), pepohonan paulownia, bambu, serta elemen arsitektur tradisional dancheong yang lazim ditemukan pada bangunan di Korea Selatan diadaptasi dan diterapkan ke dalam berbagai desain batik. Motif Sido Muli, misalnya, terinspirasi dari filosofi motif “sido” yang bermakna doa atau pengharapan, menghadirkan harapan agar burung phoenix dapat kembali ke tanah asalnya. Sementara itu, motif Kukila Rawuh Wedari dari Pekalongan menggambarkan kembalinya dua burung phoenix ke Jinju, di mana salah satunya digambarkan terbang di antara pepohonan bambu. Motif lainnya, Bawana Kukila dari Tuban, mengangkat tema burung phoenix yang menjadi pusat dunia setelah kembali ke Jinju. Penggunaan kain Jinju Silk sebagai bahan dasar menunjukkan sinergi antara tekstil tradisional Korea dengan motif batik Indonesia, menghasilkan produk yang memiliki nilai budaya serta daya tarik estetika tinggi.<sup>22</sup>

Pameran “Bagian Kedua dari Kisah Batik Indonesia dan Jinju Silk” juga bertujuan untuk memperkenalkan Batik-Jinju

---

<sup>22</sup> Natisha Andarningtyas, “Batik Fractal bawakan kisah ‘bonghwang’ Jinju dalam tiga desain batik,” diakses 31 Oktober 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3845244/batik-fractal-bawakan-kisah-bonghwang-jinju-dalam-tiga-desain-batik>.

Silk ke dalam dunia fashion modern, memperlihatkan bahwa warisan budaya tradisional dapat diadaptasi dengan desain kontemporer tanpa kehilangan identitas aslinya. Produk kolaboratif ini tidak hanya berbicara soal estetika, tetapi juga menekankan pada makna filosofis dan simbolisme budaya yang mendalam. Dengan memadukan teknik tradisional dan narasi budaya dari kedua negara, pameran ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat akan pentingnya menghargai dan melestarikan warisan budaya sambil tetap membuka ruang untuk inovasi dan kreasi. Selain berfungsi sebagai media pengenalan budaya, pameran ini berkontribusi dalam memperkuat sektor industri kreatif dan membuka peluang bagi produk fashion Indonesia dan Korea Selatan untuk lebih dikenal secara global.

Lebih jauh, pameran ini juga merupakan upaya dalam memperkenalkan Jinju sebagai salah satu pusat penghasil sutra berkualitas tinggi di Korea Selatan. Dengan kontribusi sebesar 80% produksi sutra nasional, Jinju telah lama dikenal sebagai kota penghasil kain sutra yang bermutu tinggi.<sup>23</sup> Sutra dari Jinju terkenal dengan kelembutannya yang elegan, kualitas yang kuat, serta proses pembuatannya yang memadukan teknik tradisional dengan teknologi modern. Nilai filosofis kain ini juga mencerminkan prestise dan status sosial, yang dalam sejarah Korea sering kali dikaitkan dengan kalangan bangsawan dan keluarga kerajaan. Sebagai salah satu simbol kemewahan dan kebudayaan tradisional Korea Selatan, Jinju Silk memiliki makna yang mendalam dalam tradisi, serta mempertahankan teknik pembuatannya yang

---

<sup>23</sup> Pramono, "Batik-Jinju Silk Berkolaborasi di Pameran Busana Jakarta."

diwariskan turun-temurun. Dengan menampilkan produk Jinju Silk dalam konteks internasional melalui kolaborasi ini, Korea Selatan secara efektif menggunakan diplomasi budaya untuk memperkenalkan produk berkualitas sekaligus memperkuat citra nasional di panggung global.<sup>24</sup>

Selain memberikan dampak diplomasi budaya, pameran ini juga menawarkan potensi ekonomi yang besar bagi industri fashion dan pariwisata kedua negara. Kolaborasi ini memperkenalkan kain-kain berkualitas tinggi kepada pasar internasional yang semakin tertarik pada produk fashion berbasis budaya. Kain batik dan Jinju Silk, dengan teknik pembuatan yang rumit dan nilai eksklusifnya, memiliki daya tarik tersendiri yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan daya saing produk fashion Indonesia dan Korea Selatan di pasar global. Peluang ekspor dan kerja sama di bidang industri kreatif pun terbuka lebar, di mana desainer dan pengrajin dari kedua negara dapat terus mengembangkan kreasi mereka, menghasilkan karya yang tidak hanya indah secara visual tetapi juga bermakna secara kultural. Melalui kolaborasi lintas budaya ini, kedua negara tidak hanya memperkaya khasanah seni dan budaya, tetapi juga memperkuat kerja sama ekonomi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

---

<sup>24</sup> “Proyek Kolaborasi Budaya Indonesia dan Kota Jinju Korea Selatan, Tampilkan Batik dan Jinju Silk - Lifestyle Liputan6.com,” diakses 31 Oktober 2024, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5384652/proyek-kolaborasi-budaya-indonesia-dan-kota-jinju-korea-selatan-tampilkan-batik-dan-jinju-silk>.

## E. Kesimpulan

Pameran busana yang menggabungkan batik Indonesia dengan Jinju Silk Korea Selatan merupakan inisiatif penting dalam memperkuat hubungan diplomasi budaya antara kedua negara di tengah era globalisasi. Pameran ini memiliki urgensi yang tinggi, mengingat peran budaya sebagai media soft power yang efektif dalam diplomasi publik. Kolaborasi budaya ini tidak hanya memperkenalkan warisan budaya Indonesia dan Korea Selatan secara global tetapi juga mendorong saling pemahaman dan penghormatan antar budaya, yang menjadi fondasi hubungan diplomatik jangka panjang. Selain aspek diplomasi, pameran ini memainkan peran strategis dalam mengembangkan industri fashion dan kreatif kedua negara. Menggabungkan elemen khas seperti batik dan Jinju Silk membuka peluang inovasi baru bagi desainer, memungkinkan terciptanya karya-karya kreatif yang tidak hanya memadukan teknik tradisional tetapi juga membawa sentuhan modern. Kolaborasi ini memperluas cakrawala industri fashion global, di mana produk berbasis budaya tradisional mendapat tempat dalam desain kontemporer yang memiliki daya saing internasional. Dari segi ekonomi, pameran ini memberikan kesempatan bagi Indonesia dan Korea Selatan untuk mempromosikan produk budaya masing-masing kepada khalayak global, meningkatkan potensi ekspor, dan mendukung pertumbuhan pariwisata. Masyarakat internasional yang tertarik pada

keunikan batik dan Jinju Silk tidak hanya akan mendukung industri fashion kedua negara, tetapi juga membuka jalan bagi peningkatan jumlah wisatawan dan minat terhadap budaya lokal. Dengan demikian, penyelenggaraan pameran ini sangat relevan sebagai upaya pemererat hubungan diplomasi melalui budaya sekaligus memperkuat posisi budaya masing-masing negara di panggung internasional.

---

## Daftar Pustaka

- Andarningtyas, Natisha. “Batik Fractal bawakan kisah ‘bonghwang’ Jinju dalam tiga desain batik.” *Antara News*, 28 November 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3845244/batik-fractal-bawakan-kisah-bonghwang-jinju-dalam-tiga-desain-batik>.
- . “Batik Fractal bawakan kisah ‘bonghwang’ Jinju dalam tiga desain batik.” Diakses 31 Oktober 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/3845244/batik-fractal-bawakan-kisah-bonghwang-jinju-dalam-tiga-desain-batik>.
- Assabil, Qonita, dan Agung Triyatno. “DIPLOMASI BUDAYA KOREA SELATAN & K-POP PADA 2021 (SOUTH KOREAN CULTURAL DIPLOMACY & K-POP AT 2021).” *Jurnal Sosial Politik Peradaban (JSPP)* 4, no. 1 (16 April 2023): 75–100.

<https://journal.peradaban.ac.id/index.php/jspp/article/view/1401>.

Dannu. "Batik-Jinju Silk, Kolaborasi Budaya Indonesia dan Kota Jinju Korea Selatan Gelar Pameran di Jakarta." *beritasatu.com*, 29 November 2023.

<https://www.beritasatu.com/network/idpost/60403/batik-jinju-silk-kolaborasi-budaya-indonesia-dan-kota-jinju-korea-selatan-gelar-pameran-di-jakarta>.

kofice. "Moija CPI." *Moija CPI*. Diakses 6 Juli 2025. <http://www.kofice.or.kr/moijacpi/>.

Pramono, Sidik. "Batik-Jinju Silk Berkolaborasi di Pameran Busana Jakarta." *mediaindonesia.com*, 2023. <https://mediaindonesia.com/humaniora/633270/batik-jinju-silk-berkolaborasi-di-pameran-busana-jakarta>.

Rachmawati, Iva. *Diplomasi publik: meretas jalan bagi harmoni dalam hubungan antarnegara*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Calpulis, 2016.

Basnur, Al Busyra. *Diplomasi publik: catatan, inspirasi dan harapan*. Minormatani, Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2018.

"KOCCA." Diakses 31 Oktober 2024. <https://www.kocca.kr/en/main.do>.

"Kolaborasi Fashion Sebagai Wadah Akulturasi Budaya antara Indonesia dan Korea." Diakses 31 Oktober 2024. <https://www.jakartafashionweek.co.id/news-flash/kolaborasi-fashion-sebagai-wadah-akulturasi-budaya-antara-indonesia-dan-korea>.

“Menilik Sejarah Batik, Salah Satu Duta Budaya Indonesia - Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek,” 3 Oktober 2023. <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/menilik-sejarah-batik-salah-satu-duta-budaya-indonesia/>.

“Proyek Kolaborasi Budaya Indonesia dan Kota Jinju Korea Selatan, Tampilkan Batik dan Jinju Silk - Lifestyle Liputan6.com.” Diakses 31 Oktober 2024. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5384652/proyek-kolaborasi-budaya-indonesia-dan-kota-jinju-korea-selatan-tampilkan-batik-dan-jinju-silk>.

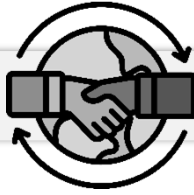


UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# **KEBIJAKAN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DI ERA KONTEMPORER: KONSEP DAN STUDI KASUS**



## BAB VII

# Kerja Sama Internasional

---

Kerja sama internasional telah berkembang menjadi kebutuhan fundamental untuk mengatasi tantangan global yang kompleks. Di era pasca Perang Dingin, kerja sama internasional tidak lagi didominasi oleh aktor negara, karena keterlibatan aktor non-negara dalam isu-isu internasional mulai dianggap penting. Adanya arus globalisasi semakin mendorong perkembangan kerja sama internasional menjadi fenomena multidimensional yang mencakup tidak hanya isu-isu *high politics*, tetapi juga *low politics*. Buku ini memberikan gambaran mendasar tentang konsep kerja sama internasional sekaligus beberapa contoh konteks kerja sama internasional yang dikaji oleh sejumlah penulis.

## A. Definisi

Pemahaman terhadap konsep kerja sama internasional dapat dimulai dari definisi yang merujuk pada para ahli. Dougherty dan Pfaltzgraff mendefinisikan kerja sama internasional sebagai "*a condition in which actor participants take steps to adapt their behavior to the needs of others by means of a process of policy coordination.*"<sup>1</sup> Di sisi lain, secara lebih komprehensif, Holsti memberikan beberapa definisi dari kerja sama internasional, yaitu sebagai berikut.<sup>2</sup>

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, tujuan saling bertemu dan menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
2. Harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
3. Persetujuan pada masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan.
4. Seperangkat aturan mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi kebutuhan dan persetujuan mereka.

Pada intinya, kerja sama internasional merupakan hasil interaksi antar aktor dalam hubungan internasional yang

---

<sup>1</sup> Robert L. Dougherty, James Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations*, 5th edn (Pearson College Div, 2000).

<sup>2</sup> Kalevi Jaakko Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II*, ed. by M. Tahrir Azhari, 2nd edn (Erlangga, 1988).

berupa kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Terbentuknya kerja sama internasional dimulai dari kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam dinamika hubungan antar negara, kebijakan luar negeri menjadi instrumen bagi suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya di tingkat global. Kebijakan ini dapat diimplementasikan melalui dua pendekatan utama, yaitu perang atau diplomasi.

Ketika suatu negara memilih diplomasi sebagai pendekatan utama, ia menempatkan dialog dan saling pengertian sebagai fondasi interaksi internasional. Diplomasi menjadi pilihan strategis yang mengedepankan penyelesaian damai, komunikasi terbuka, dan negosiasi yang konstruktif. Melalui diplomasi, negara dapat saling membangun kepercayaan, bertukar gagasan, dan menciptakan solusi bersama atas tantangan global.

Sebagai hasil dari diplomasi yang efektif, berbagai bentuk kerja sama internasional pun lahir, baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral, dengan melibatkan multi-aktor, multi-mekanisme, dan multi-level. Berkembangnya perjanjian perdagangan, aliansi strategis, kolaborasi dalam penanganan isu bersama (*global public goods*), hingga kemitraan yang prospektif di era kontemporer, menjadi bukti bahwa kerja sama internasional dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan negara: politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan teknologi.

## B. Kriteria

Dalam Working Papers yang berjudul “*Political Theories of Development Cooperation – A Study of Theories of International Cooperation*”, Lauri Siitonen membagi kriteria kerja sama internasional berdasarkan tiga paradigma: Realisme, Liberalisme, dan Sosialisme.<sup>3</sup> Menurut pandangan Realisme, kerja sama muncul karena didasarkan pada perhitungan rasional terhadap kepentingan nasional, khususnya ditujukan untuk memelihara perdamaian dan ketertiban. Negara-negara mau bekerja sama jika kerja sama tersebut dianggap dapat memenuhi tujuan keamanan dan mencapai kekuasaan mereka. Aktor kerja sama internasional menurut Realisme adalah negara (*nation state*), yang dianggap sebagai satu kesatuan yang berdaulat dan berfokus pada kepentingan keamanan mereka.

Liberalisme menekankan peran lembaga, norma, dan rezim internasional yang menciptakan kerangka kerja untuk kerja sama dengan mengubah konteks di mana negara-negara membuat keputusan. Kerja sama muncul dari kepentingan bersama dan adanya manfaat yang didapatkan dari tatanan berbasis aturan. Bagi Liberalisme, aktor dalam kerja sama internasional adalah organisasi internasional dan aktor transnasional (seperti *Multinational Corporations/MNCs* dan *Non-Governmental Organizations/-NGOs*). Para aktor tersebut memainkan peran penting dalam

---

<sup>3</sup> Lauri Siitonen, ‘Political Theories of Development Cooperation - A Study of Theories of International Cooperation’, *Development*, 1990.

memfasilitasi kerja sama internasional melalui institusi dan norma.

Sosialisme mendasarkan kerja sama pada prinsip-prinsip sosio-ekonomi, seperti keadilan sosial dan kedaulatan rakyat. Sosialisme memandang kerja sama sebagai bagian dari hubungan sosial yang lebih luas, yang melampaui batas-batas negara, yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama. Aktor kerja sama internasional dalam pandangan Sosialisme meliputi kelas-kelas sosial dan rakyat yang berdaulat. Kedua aktor ini melihat kerja sama sebagai hasil dari dorongan kekuatan sosial di luar struktur negara, termasuk gerakan dan kelompok yang mewakili kepentingan rakyat.

## **C. Mekanisme Kerja Sama Internasional**

Mekanisme kerja sama internasional adalah tentang bagaimana para aktor saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Pada konteks ini, terdapat berbagai tahap yang harus ditempuh untuk membuat, melaksanakan, dan mengawasi kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

### **1. Pembentukan Perjanjian Internasional**

Mekanisme pertama dalam kerja sama internasional adalah pembentukan perjanjian antar aktor berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam buku berjudul "*International*

*Cooperation and Development: A Conceptual Overview*”, yang ditulis oleh Sebastian Paulo, mekanisme ini meliputi dua tahapan.<sup>4</sup>

**Pertama**, definisi masalah dan penetapan agenda. Pada tahap ini, para aktor mengidentifikasi tantangan global yang membutuhkan tindakan bersama dan memasukkannya ke dalam agenda global. Suatu masalah harus diakui sebagai isu yang mendesak dan penting agar mendapat perhatian dari para pembuat kebijakan. Proses ini bisa berasal dari diskusi informal hingga menjadi agenda formal yang memerlukan tindakan nyata. Dalam konteks ini, penting untuk memahami kepentingan nasional dan bagaimana perjanjian tersebut dapat memperkuat hubungan antar pihak.

**Kedua**, negosiasi dan pengambilan keputusan. Pada tahap ini, para aktor melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang akan diambil. Proses pengambilan keputusan harus menyeimbangkan efisiensi, kekuasaan, dan legitimasi, serta dapat melibatkan berbagai jenis aturan, mulai dari hukum yang mengikat hingga aturan lunak (*soft law*). Hasil dari negosiasi akan dituangkan ke dalam suatu perjanjian yang bersifat hukum dan perlu diratifikasi agar berlaku secara efektif.

## 2. Implementasi Kerja Sama Internasional

Setelah suatu perjanjian disepakati, dan bahkan diratifikasi, maka mekanisme selanjutnya adalah implementasi. Dalam mengimplementasikan suatu kerja

---

<sup>4</sup> Sebastian Paulo, *International Cooperation and Development, Brazil-India Renewable Energy Cooperation*, 2021, doi:10.1007/978-981-16-4877-9\_3.

sama internasional ke dalam level domestik, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui.

**Pertama**, harmonisasi kerangka hukum. Pada tahap ini, para pihak perlu mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan nasional yang ada untuk mengidentifikasi kesesuaian antara kewajiban perjanjian internasional dengan hukum domestik. Proses ini melibatkan penyesuaian peraturan yang ada dan pencabutan ketentuan yang bertentangan dengan kewajiban internasional.<sup>5</sup> Hal ini untuk memastikan konsistensi dan koherensi dalam sistem hukum nasional serta menghindari konflik normatif yang dapat menghambat implementasi kerja sama. Selanjutnya, terdapat beberapa pendekatan dalam mengintegrasikan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional, yaitu memberikan efek langsung pada teks perjanjian, menggunakan sebagian rumusan perjanjian, atau menintegrasikan substansi perjanjian ke dalam hukum nasional.<sup>6</sup> Pendekatan yang dipilih bergantung pada tradisi hukum negara tersebut, apakah menganut sistem *monist* atau *dualist*.

**Kedua**, pembentukan kerangka kelembagaan. Setiap pihak perlu menunjuk lembaga yang bertanggung jawab

---

<sup>5</sup> Mario Mendez, 'The Legal Effects of Treaties in Domestic Legal Orders and the Role of Domestic Courts', *The Legal Effects of EU Agreements*, 2013, pp. 1–60, doi:10.1093/acprof:oso/9780199606610.003.0002.

<sup>6</sup> Law Reform Commission, 'Discussion Paper: Domestic Implementation Of International Obligations', 2020.

terhadap koordinasi implementasi perjanjian internasional.<sup>7</sup> Biasanya lembaga yang ditunjuk adalah kementerian luar negeri atau kementerian teknis yang relevan dengan substansi perjanjian. Selain itu, juga dibutuhkan pembentukan badan koordinasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Badan ini berfungsi sebagai forum untuk sinkronisasi kebijakan, pembagian tanggung jawab, dan penyelesaian konflik kepentingan antar lembaga.<sup>8</sup>

**Ketiga**, pelibatan dan koordinasi *stakeholder*. Implementasi kerja sama perlu membutuhkan pelibatan aktif berbagai pemangku kepentingan.<sup>9</sup> Proses konsultasi harus melibatkan sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok masyarakat yang terkena dampak langsung dari perjanjian tersebut. Keterlibatan masyarakat sipil sangat penting karena dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan implementasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>10</sup>

**Keempat**, perencanaan implementasi. Pemerintah perlu mengawali tahap ini dengan menyusun rencana aksi nasional yang detail dan komprehensif, mencakup tujuan spesifik,

---

<sup>7</sup> M Aximillian L F Eldman, B Global-facing Agencies May, and Shirk Their, 'THE DOMESTIC IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL REGULATIONS', 2013, pp. 401–38.

<sup>8</sup> Eldman, May, and Their, 'THE DOMESTIC IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL REGULATIONS'.

<sup>9</sup> Center for Civil and Political Rights, *Guide for Ratification and Implementation*.

<sup>10</sup> Rudi Natamiharja and Chaidir Ali, 'Follow-up of Indonesian Legislation on the International Treaties', no. 32 (1981), pp. 1–20.

kegiatan prioritas, *timeline*, alokasi sumber daya, dan indikator keberhasilan. Rencana aksi ini akan menjadi panduan operasional bagi semua lembaga yang terlibat dalam implementasi.<sup>11</sup> Alokasi yang dimaksud dalam konteks ini meliputi sumber daya finansial, sumber daya manusia yang kompeten, dan infrastruktur yang diperlukan. Selain menyusun rencana aksi, juga diperlukan pembentukan program pengembangan kapasitas seperti pelatihan teknis dan pengembangan keterampilan, untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat menjalankan perannya secara efektif.

**Kelima**, pelaksanaan program. Tahap ini melibatkan implementasi konkrit dari program yang telah direncanakan, yaitu mulai dari penerapan regulasi baru, peluncuran program-program spesifik, dan mobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan perjanjian. Pelaksanaan harus mengikuti *timeline* yang telah ditetapkan dan tetap mempertahankan koordinasi antar lembaga. Selain itu, pelaksanaan program harus bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi dan tantangan yang muncul.<sup>12</sup> Fleksibilitas dalam pendekatan implementasi memungkinkan penyesuaian strategi ketika menghadapi hambatan atau peluang baru yang tidak terduga sebelumnya.

---

<sup>11</sup> J Eduardo Malaya and Jilliane Joyce R De Dumo-cornista, 'IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL AGREEMENTS AND THE SELF-EXECUTING AND NON-SELF-EXECUTING DICHOTOMY: THE CASE OF THREE HCCH CONVENTIONS', pp. 56-92.

<sup>12</sup> Eldman, May, and Their, 'THE DOMESTIC IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL REGULATIONS'.

### 3. *Monitoring dan Evaluasi*

Dalam mengimplementasikan kerja sama internasional, para aktor perlu mengembangkan sistem pemantauan yang komprehensif untuk melacak kemajuan implementasi.<sup>13</sup> Sistem ini harus mencakup indikator kinerja yang jelas, mekanisme pengumpulan data yang reliabel, dan proses pelaporan yang terstruktur. Sementara itu, evaluasi diperlukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian tujuan kerja sama.<sup>14</sup> Evaluasi ini tidak hanya mengukur *output* kegiatan, tetapi juga *outcome* dan *impact* terhadap sasaran yang ingin dicapai. Baik *monitoring* maupun evaluasi, harus mencakup mekanisme umpan balik yang memungkinkan pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan.<sup>15</sup> Umpan balik dari berbagai *stakeholder*, termasuk masyarakat sipil dan kelompok sasaran, menjadi

---

<sup>13</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, 'Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention Against Transnational Organised Crime', 2012, p. 240 <[http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC\\_Legislative\\_Guide\\_E.pdf](http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_E.pdf)>[https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative\\_Guide\\_2017/Legislative\\_Guide\\_E.pdf](https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_E.pdf)>.

<sup>14</sup> Policy Department for External Relations, *Requested by the AFET Committee The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine: A Comparative Perspective The Development of an Institutional Framework for the Implement*, 2018.

<sup>15</sup> Anastasia M. Otrashkevskaya, Alexander M. Solntsev, and Parzad N. Yusifova, 'THE ROLE OF TREATY BODIES IN MONITORING COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL OBLIGATIONS', *Moscow Journal of International Law*, 2023, pp. 47–75.

*input* berharga untuk meningkatkan efektivitas implementasi.

#### **4. Pelaporan dan Tinjauan**

Sebagian besar perjanjian internasional mewajibkan para pihaknya untuk menyampaikan laporan secara berkala. Laporan ini mencakup langkah-langkah yang telah diambil, kemajuan, yang dicapai, tantangan yang dihadapi, dan rencana ke depan. Pelaporan yang berkualitas menunjukkan komitmen dan akuntabilitas terhadap kewajiban internasionalnya. Implementasi kerja sama internasional juga memerlukan tinjauan berkala dan pembaruan strategi sesuai dengan perkembangan kondisi domestik dan internasional.<sup>16</sup> Tinjauan ini memungkinkan adaptasi terhadap tantangan baru dan pemanfaatan peluang yang muncul untuk meningkatkan efektivitas implementasi.

#### **D. Efektivitas Kerja Sama Internasional**

Efektivitas kerja sama internasional merujuk pada keberhasilan suatu kerja sama internasional dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh para aktor, sebagaimana yang telah mereka sepakati pada awal pembentukan kerja sama. Untuk mengukur keberhasilan tersebut, dibutuhkan indikator yang relevan. Terdapat tiga indikator yang sering kali dijadikan sebagai alat ukur efektivitas kerja sama. Namun demikian, bukan berarti tiga indikator ini menjadi acuan baku

---

<sup>16</sup> Eldman, May, and Their, 'THE DOMESTIC IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL REGULATIONS'.

dalam mengukur efektivitas kerja sama, karena sejatinya pemilihan indikator bergantung pada konteks kerja sama yang dikaji.

### 1. Kepatuhan terhadap perjanjian

Indikator ini mengukur sejauh mana para pihak menaati ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian atau kesepakatan internasional.<sup>17</sup>

### 2. Dampak sosial dan ekonomi

Indikator ini mengukur bagaimana kerja sama tersebut mempengaruhi kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi di negara peserta.<sup>18</sup>

### 3. Keberlanjutan

Indikator ini mengukur kemampuan untuk mempertahankan hasil positif dari kerja sama dalam jangka panjang tanpa mempengaruhi generasi mendatang.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ignatius Satya Paramitha, Mesta Limbong, and Bintang R. Simbolon, 'Implementasi Praktik Kerja Lapangan Guna Meningkatkan Mutu Lulusan Dan Kesiapan Kerja', *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6.1 (2024), pp. 813–22, doi:10.31004/edukatif.v6i1.6393.

<sup>18</sup> Sada R. E. Shaddai, Ganjar Widhiyoga, and Hasna Wijayati, 'Kerja Sama Indonesia-Korea Selatan Dalam Akselerasi Pengembangan Mobil Listrik Di Indonesia', *Global Political Studies Journal*, 7.2 (2023), pp. 127–48, doi:10.34010/gpsjournal.v7i2; Bagus Dirgantoro, Veri Arinal, and Refi Nabillah Royadi, 'Dampak Penerapan Jalur Sutra Tiongkok Terhadap Perdagangan Internasional Indonesia', *Jurnal Tren Bisnis Global*, 4.1 (2024), pp. 10–14, doi:10.38101/jtbg.v4i1.11821.

<sup>19</sup> Stevani Anggina and Ahmad Zaki, 'Peran Kerjasama Regional Keantariksaan Bagi Pembangunan Berkelanjutan Indonesia: Studi Kasus APRSAF', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12.2 (2023), pp. 248–58, doi:10.23887/jish.v12i2.60614.

Efektivitas suatu kerja sama internasional tentu saja tidak terlepas dari adanya berbagai faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan kerja sama. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi efektivitas kerja sama internasional, di antaranya adalah sebagai berikut.

### 1. Komitmen Politik

Komitmen yang kuat dari para aktor dalam melaksanakan kesepakatan kerja sama adalah faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Komitmen ini mencakup dukungan politik yang berkelanjutan dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian.<sup>20</sup>

### 2. Koordinasi antar Lembaga

Efektivitas juga tergantung pada seberapa baik berbagai lembaga pemerintah dan organisasi internasional dapat berkoordinasi satu sama lain. Ketidakselarasan antar lembaga sering kali mengakibatkan kebingungan dan inefisiensi dalam pelaksanaan kerja sama.<sup>21</sup>

### 3. Sumber Daya yang Tersedia

---

<sup>20</sup> Ahmad Sarjito, 'Sinkronisasi Kebijakan Pertahanan Dalam Operasi Militer Dengan Hak Asasi Manusia', *Journal of Governance and Policy Innovation*, 3.2 (2023), pp. 17-41.

<sup>21</sup> Denny Simanjuntak, 'Urgensi Kerja Sama Internasional Kepolisian Indonesia Dan Malaysia Dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang "Trafficking in Persons"', *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 5.1 (2024), pp. 410-23, doi:10.36312/jcm.v5i1.2768.

Ketersediaan sumber daya, baik finansial, teknis, maupun manusia, sangat mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan kerja sama dengan efektif. Dalam beberapa kasus, negara-negara berkembang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan program-program kerja sama internasional secara efektif, sehingga sering kali tidak mendapatkan hasil yang optimal.<sup>22</sup>

#### 4. Stabilitas dan Lingkungan Politik

Kondisi politik yang stabil di negara peserta juga berkontribusi pada efektivitas kerja sama. Ketidakstabilan politik, korupsi, atau konflik internal dapat menghambat, atau bahkan menggagalkan upaya kerja sama, meskipun semua pihak telah berkomitmen untuk melaksanakannya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Rachmat Fauzan and Deasy Silvy Sari, 'Vaksin SARS-CoV-2: Kontribusi Global Pfizer Dan BioNTech Dalam Menangani Covid-19', *Jurnal Hubungan Internasional*, 16.1 (2023), pp. 192–210, doi:10.20473/jhi.v16i1.37690; Muhammad Kamil Ghiffary Abdurrahman, Dini Putri Saraswati, and Nurfarah Nidatya, 'Analisis Reflektif Pada Pendekatan Neo-Institusional Dalam Memahami ASEAN Sebagai Organisasi Kontraterorisme Di Regional Asia Tenggara', *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 4.2 (2023), pp. 103–25, doi:10.33822/jpds.v4i2.5969.

<sup>23</sup> Firdaus Muhamad Iqbal and Irawati Irawati, 'Hukum Internasional Sebagai Perangkat Politik: Pembuatan Perjanjian Internasional Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia', *Jurnal Caraka Prabhu*, 7.2 (2023), pp. 61–84, doi:10.36859/jcp.v7i2.1833.

## Daftar Pustaka

- Ahmad Sarjito, 'Sinkronisasi Kebijakan Pertahanan Dalam Operasi Militer Dengan Hak Asasi Manusia', *Journal of Governance and Policy Innovation*, 3.2 (2023), pp. 17–41
- Anggina, Stevani, and Ahmad Zaki, 'Peran Kerjasama Regional Keantariksaan Bagi Pembangunan Berkelanjutan Indonesia: Studi Kasus APRSAF', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12.2 (2023), pp. 248–58, doi:10.23887/jish.v12i2.60614
- Center for Civil and Political Rights, *Guide for Ratification and Implementation*
- Denny Simanjuntak, 'Urgensi Kerja Sama Internasional Kepolisian Indonesia Dan Malaysia Dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang "Trafficking in Persons"', *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 5.1 (2024), pp. 410–23, doi:10.36312/jcm.v5i1.2768
- Dirgantoro, Bagus, Veri Arinal, and Refi Nabillah Royadi, 'Dampak Penerapan Jalur Sutra Tiongkok Terhadap Perdagangan Internasional Indonesia', *Jurnal Tren Bisnis Global*, 4.1 (2024), pp. 10–14, doi:10.38101/jtbg.v4i1.11821
- Dougherty, James, Pfaltzgraff, Jr., Robert L., *Contending Theories of International Relations*, 5th edn (Pearson College Div, 2000)

- Eldman, M Aximillian L F, B Global-facing Agencies May, and Shirk Their, 'THE DOMESTIC IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL REGULATIONS', 2013, pp. 401–38
- Fauzan, Rachmat, and Deasy Silvy Sari, 'Vaksin SARS-CoV-2: Kontribusi Global Pfizer Dan BioNTech Dalam Menangani Covid-19', *Jurnal Hubungan Internasional*, 16.1 (2023), pp. 192–210, doi:10.20473/jhi.v16i1.37690
- Ghiffary Abdurrahman, Muhammad Kamil, Dini Putri Saraswati, and Nurfarah Nidatya, 'Analisis Reflektif Pada Pendekatan Neo-Institusional Dalam Memahami ASEAN Sebagai Organisasi Kontraterorisme Di Regional Asia Tenggara', *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 4.2 (2023), pp. 103–25, doi:10.33822/jpds.v4i2.5969
- Holsti, Kalevi Jaakko, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II*, ed. by M. Tahrir Azhari, 2nd edn (Erlangga, 1988)
- Iqbal, Firdaus Muhamad, and Irawati Irawati, 'Hukum Internasional Sebagai Perangkat Politik: Pembuatan Perjanjian Internasional Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia', *Jurnal Caraka Prabhu*, 7.2 (2023), pp. 61–84, doi:10.36859/jcp.v7i2.1833
- Law Reform Commission, 'Discussion Paper: Domestic Implementation Of International Obligations', 2020
- Malaya, J Eduardo, and Jilliane Joyce R De Dumo-cornista, 'IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL AGREEMENTS

AND THE SELF-EXECUTING AND NON-SELF-EXECUTING DICHOTOMY: THE CASE OF THREE HCCH CONVENTIONS', pp. 56–92

Mendez, Mario, 'The Legal Effects of Treaties in Domestic Legal Orders and the Role of Domestic Courts', *The Legal Effects of EU Agreements*, 2013, pp. 1–60, doi:10.1093/acprof:oso/9780199606610.003.0002

Natamiharja, Rudi, and Chaidir Ali, 'Follow-up of Indonesian Legislation on the International Treaties', no. 32 (1981), pp. 1–20

Otrashevskaya, Anastasia M., Alexander M. Solntsev, and Parzad N. Yusifova, 'THE ROLE OF TREATY BODIES IN MONITORING COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL OBLIGATIONS', *Moscow Journal of International Law*, 2023, pp. 47–75

Paramitha, Ignatius Satya, Mesta Limbong, and Bintang R. Simbolon, 'Implementasi Praktik Kerja Lapangan Guna Meningkatkan Mutu Lulusan Dan Kesiapan Kerja', *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6.1 (2024), pp. 813–22, doi:10.31004/edukatif.v6i1.6393

Paulo, Sebastian, *International Cooperation and Development, Brazil-India Renewable Energy Cooperation*, 2021, doi:10.1007/978-981-16-4877-9\_3

Policy Department for External Relations, *Requested by the AFET Committee The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association*

*Agreements in Georgia , Moldova and Ukraine: A Comparative Perspective The Development of an Institutional Framework for the Implement*, 2018

Shaddai, Sada R. E., Ganjar Widhiyoga, and Hasna Wijayati, 'Kerja Sama Indonesia-Korea Selatan Dalam Akselerasi Pengembangan Mobil Listrik Di Indonesia', *Global Political Studies Journal*, 7.2 (2023), pp. 127–48, doi:10.34010/gpsjournal.v7i2

Siitonen, Lauri, 'Political Theories of Development Cooperation - A Study of Theories of International Cooperation', *Development*, 1990

United Nations Office on Drugs and Crime, 'Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention Against Transnational Organised Crime', 2012, p. 240 <[http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC\\_Legislative\\_Guide\\_E.pdf%0Ahttps://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative\\_Guide\\_2017/Legislative\\_Guide\\_E.pdf](http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_E.pdf%0Ahttps://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_E.pdf)>

# BAB VIII

## Terbentuknya Formasi QUAD akibat Pengaruh China di Indo- Pasifik

---

QUAD merupakan kerjasama kemitraan empat negara yang terdiri dari Jepang, AS, Australia dan India yang bertujuan untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dalam bidang-bidang strategis internasional mencakup ekonomi, kerjasama militer dan penetapan standar berdasarkan aturan berbasis liberal.<sup>1</sup> Kerjasama ini berdiri pada 2007 dan mengalami masa jeda ketidakaktifan selama satu dekade atau 10 tahun dan mulai kembali aktif pada 2017 dan terus berlanjut sampai penelitian ini ditulis. bangkitnya QUAD ditandai setelah melihat kekuatan China yang muncul dan berkembang secara pesat di Indo-Pasifik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lavina Lee, "Assessing the Quad: Prospects and Limitations of Quadrilateral Cooperation for Advancing Australia's Interest," Lowy Institute, 2020, <https://www.lowyinstitute.org/publications/assessing-quad-prospects-limitations-quadrilateral-cooperation-advancing-australia-s>.

<sup>2</sup> Zongyou Wei, "The Evolution of the 'QUAD': Driving Forces, Impacts, and Prospects," *China International Strategy Review* 4, no. 2 (2022): 288, <https://doi.org/10.1007/S42533-022-00119-W>.

QUAD dengan susunan aliansi dari beberapa negara yang secara geografis dan strategis memiliki kepentingan khusus dalam menghadapi pengaruh kekuatan China yang berkembang pesat dan mulai mendominasi di kawasan Indo Pasifik dalam beberapa dekade terakhir.<sup>3</sup> Bangkitnya China menjadi kekuatan baru menyebabkan dominasi signifikan terhadap bidang ekonomi, keamanan serta pertahanan. Kehadiran China yang semakin kuat telah menimbulkan gesekan dengan negara-negara di kawasan Indo Pasifik terutama pada masalah perbatasan maritim yang menjadi isu internasional pada beberapa dekade terakhir. Gesekan tersebut menarik perhatian negara adidaya seperti Amerika Serikat yang dengan visi dan misi mereka untuk membawa kawasan Indo Pasifik sebagai tempat yang aman dan terbuka telah melihat gesekan dari kehadiran China sebagai ancaman terhadap keamanan Indo Pasifik.<sup>4</sup> Dalam melihat kerjasama QUAD yang telah lama non aktif dan kembali terbangun menandakan adanya isu-isu global maupun regional yang sedang dihadapkan pada hadirnya satu kekuatan besar dengan keberadaan yang semakin kuat dan sedang mengembangkan dominasinya terhadap suatu kawasan. Semangat nasionalis negara China untuk bisa mendapatkan pengakuan dunia telah jauh berkembang menjadi salah satu

---

<sup>3</sup> Zaheena Rasheed, "What is the Quad and can it counter China's rise?," Al Jazeera, 2020, <https://www.aljazeera.com/news/2020/11/25/what-is-the-quad-can-us-india-japan-and-australia-deter-china>.

<sup>4</sup> United States Agency for International Development, "Indo-Pacific Strategy of the United States," USAID from the american people, 2022, <https://www.usaid.gov/asia-regional/indo-pacific-strategy-united-states>.

kekuatan superioritas di dunia saat ini.<sup>5</sup> Kekuatan yang dihimpun oleh China memberikan mereka kemampuan untuk bisa mengalahkan dominasi barat dari segala sektor penting dan menanamkan pengaruh mereka kedalam wilayah strategis politik dan ekonomi nasional China.

## A. Dominasi Kekuatan China di Indo Pasifik

Pada era 2000-an negara China bangkit menjadi kekuatan baru dengan perkembangan pesat pada bidang sosial, politik ekonomi dan teknologi sehingga membawa mereka untuk menjadi aktor penting dalam politik dunia internasional. Kemajuan Ekonomi dan Kekuatan militer negara China menjadi investasi besar bagi negara tersebut untuk bisa mendapatkan dan mengamankan dominasi seperti pengaruh mereka terhadap wilayah maritim Indo-Pasifik.<sup>6</sup> Kebijakan BRI (*belt and road Initiative*) ikut memberikan jangkauan luas terhadap kepentingan strategis China di Indo

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>5</sup> S Kamarani, S Sundari, dan Y D Kuntjoro, "Nasionalisme dan Kebijakan Luar Negeri Tiongkok: Implikasi bagi Kawasan Asia Tenggara," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 88–94, <https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/4>.

<sup>6</sup> Emma Salisbury, "Chins's PLAN : Maritime Domination beyond the South China Sea," 2024, <https://www.geostrategy.org.uk/app/uploads/2024/05/GPPP05-Chinas-PLAN.pdf>.

Pasifik, dan memiliki potensi untuk membalikan keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut.<sup>7</sup>

Sengketa laut China selatan telah menyebabkan gesekan dengan negara-negara Indo Pasifik seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan Indonesia.<sup>8</sup> Pengakuan China atas wilayah maritim serta keberanian untuk melakukan pelanggaran batas teritorial wilayah negara yang berdaulat memberikan implikasi serius terhadap keberadaan China di Indo Pasifik. Klaim China atas laut China Selatan diikuti dengan intimidasi untuk menghalangi negara-negara Asia Tenggara dalam mendapatkan sumber daya di kawasan tersebut sekaligus menantang Jepang di kawasan laut China timur.<sup>9</sup> Keberanian China dalam melakukan agresi merupakan bentuk dari dominasi mereka yang bertumbuh semakin kuat di kawasan.

---

<sup>7</sup> Soumyodeep Deb dan Nathan Wilson, "The Coming of Quad and the Balance of Power in the Indo-Pacific," Air University Press, 2021, <https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/2870653/the-coming-of-quad-and-the-balance-of-power-in-the-indo-pacific/>.

<sup>8</sup> Lisbet, "Ketegangan Filipina dan China di Laut China Selatan serta Upaya ASEAN dalam Mengatasinya," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XV*, no. 23 (2023): 1, [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-XV-24-II-P3DI-Desember-2023-238.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XV-24-II-P3DI-Desember-2023-238.pdf).

<sup>9</sup> U.S Department of State, "China's Military Aggression in the Indo-Pacific Region - United States Department of State," Website of United States Government, 2020, <https://2017-2021.state.gov/chinas-military-aggression-in-the-indo-pacific-region/>.

## **B. Formasi terbentuknya QUAD karena pengaruh China di Indo Pasifik**

Pengaruh China di Indo Pasifik mendorong Amerika Serikat, India, Australia dan India untuk melakukan kerjasama kuadritateral, dengan tujuan melakukan perimbangan kekuatan, promosi kerjasama kolektif dan keamanan maritim.<sup>10</sup> Amerika Serikat dan Australia telah melihat dominasi China di kawasan Indo Pasifik sebagai ancaman yang tidak bisa diabaikan terutama status laut China selatan yang menjadi jalur penggerak perikanan dan keamanan pangan di wilayah Indo Pasifik serta cadangan sumber daya minyak dan gas alam yang besar.<sup>11</sup> Australia sebagai negara yang berhadapan langsung dengan pengaruh China di Indo Pasifik harus memperkuat posisi dan pertahanan diri dengan langkah kemitraan.<sup>12</sup>

Kekuatan China yang semakin kuat telah menyebarkan pengaruh mereka terhadap negara-negara yang berbatasan langsung dengan negara tersebut, seperti India yang secara geografis merupakan negara yang berbatasan langsung dengan China di sepanjang garis Himalaya. Negara India dan

---

<sup>10</sup> Zongyou Wei, "The Evolution of the 'QUAD': Driving Forces, Impacts, and Prospects," *China International Strategy Review* 4, no. 2 (2022): 288, <https://doi.org/10.1007/S42533-022-00119-W>.

<sup>11</sup> Mariane Olivia Delanova dan Yanyan Mochamad Yani, "Dampak Kebijakan Amerika Serikat di Indo-Pasifik Dalam Menghadapi China Terhadap Keamanan Indonesia," *Jurnal Academia Praja* 5, no. 1 (2022): 79-97, <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.413>.

<sup>12</sup> Natalie Caloca, "Australia's Growing Defense and Security Role in the Indo-Pacific," Council on Foreign Relations, 2024, <https://www.cfr.org/in-brief/australias-growing-defense-and-security-role-indo-pacific>.

China bersaing dalam bidang militer terutama di perbatasan antar negara, China membangun infrastruktur militer seperti jalur kereta api dan bandara di dataran tinggi Tibet lengkap dengan pesawat tempur, diikuti oleh India yang membangun jalan dan lapangan terbang di perbatasan Himalaya serta modernisasi militer untuk peningkatan kekuatan pada tahun 2013.<sup>13</sup>

India menjadi negara yang merasakan secara langsung pengaruh dan dominasi China terhadap mereka sehingga pada tahun 2020 India menerapkan kebijakan untuk memblokir dan membatasi produk teknologi asal China yang dimana di tahun tersebut tren terhadap penggunaan aplikasi buatan China sangat diminati oleh penduduk India.<sup>14</sup> Konflik kepentingan perbatasan pada tahun 2017 saat China sedang melakukan pembangunan infrastruktur dan dihadang oleh tentara India untuk menghentikan aktifitas mereka menimbulkan situasi ketegangan selama 73 hari.<sup>15</sup> Krisis tersebut telah menyebabkan kerusakan terhadap hubungan kerjasama antara India dan Tiongkok.<sup>16</sup> India yang sedang

---

<sup>13</sup> Refika Febrianti, Abubakar Eby Hara, dan Bagus Sigit Sunarko, "Persaingan Kekuasaan Antara India dan Cina : Dari Kekuasaan Militer Sampai Dengan Konflik Siber," *Intermestic: Journal of International Studies* 6, no. 2 (2022): 292–314, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v6n2.3>.

<sup>14</sup> *ibid.*

<sup>15</sup> Vida Mardiana, "Krisis Doklam dan Kepentingan Nasional India," *Review of International Relations* 2, no. 2 (2020): 91–102, <https://doi.org/10.24252/RIR.V2I2.17966>.

<sup>16</sup> Vania Bunga Widhianingsih, Reni Windiani, dan Fendy Eko Wahyudi, "India-us strategic partnership sebagai upaya india mengamankan wilayah perbatasan dengan tiongkok," *Journal of International Relations*

bersaing dengan China menggunakan strategi kerjasama dengan menggandeng Amerika Serikat untuk bisa meningkatkan perekonomian negara dan mendapatkan keamanan.<sup>17</sup>

Perdana menteri Shinzo Abe pada tahun 2017 memprakasai bangkitnya QUAD di tengah memburuknya hubungan ke empat negara dengan China yang ditandai dengan eskalasi konflik di laut China selatan dan Timur serta perbatasan India.<sup>18</sup> Jepang pernah dihadapkan pada konflik dengan China yang mengerakkan kapal dan armada penangkapan ikan di perairan kepulauan Senkaku yang masuk ke dalam wilayah maritim Jepang.<sup>19</sup> Pada April 2013 terdapat delapan kapal pemerintah China yang masuk ke dalam wilayah maritim Jepang dan tiga kapal pada Mei 2013, China juga mengirim pesawat tempur untuk melintasi wilayah yang sedang disengketakan sehingga memperburuk situasi konflik.<sup>20</sup> Agresi tersebut menciptakan kondisi bagi

---

*Universitas Diponegoro* 8, no. 4 (2022): 796-807, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/35861>.

<sup>17</sup> *ibid.*

<sup>18</sup> Felix Heiduk dan Christian Wirth, "The Quadrilateral Security Dialogue between Australia, India, Japan and the United States," *Stifung Wissenschaft und Politik*, no. 31 (2023): 1-7, <https://doi.org/10.18449/2023C31>.

<sup>19</sup> U.S Department of State, "China's Military Aggression in the Indo-Pacific Region - United States Department of State," Website of United States Government, 2020, <https://2017-2021.state.gov/chinas-military-aggression-in-the-indo-pacific-region/>.

<sup>20</sup> Elli Listiana dan Erna Kurniawati, "Perpanjangan Aliansi Keamanan Jepang-Amerika Serikat pada Tahun 2013 (Perspektif Jepang)," *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan* 19, no. 2 (2018):

Jepang untuk membangun kembali kerjasama dalam pertahanan dan keamanan luar negeri mereka.

### C. Kesimpulan

Formasi QUAD merupakan gabungan dari negara-negara yang secara khusus menjadikan China sebagai ancaman terhadap wilayah teritorial dan regional, dominasi serta pengaruh China secara nyata telah mengundang kekuatan asing untuk ikut terlibat secara aktif untuk menandingi dan menetralkan pengaruh tersebut. Hadirnya QUAD memberikan tantangan bagi China dalam melanjutkan kepentingan mereka di Indo Pasifik, di sisi lain keberadaan QUAD memberikan gambaran nyata bahwa negara China merupakan kekuatan besar yang sudah berkembang sangat jauh melampaui negara-negara tetangga dan mengharuskan mereka untuk membentuk aliansi dan kerjasama untuk mengatasi tantangan tersebut.

QUAD memahami bagaimana potensi dominasi China di regional Indo Pasifik semakin nyata dengan beberapa peristiwa seperti ekspansi ekonomi dan militer serta konflik perbatasan yang disebabkan oleh keinginan China untuk bisa menaruh kepentingannya di wilayah tersebut. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terbentuknya QUAD serta keaktifan kerjasama yang telah lama nonaktif disebabkan oleh munculnya isu bersama di antara negara-negara QUAD, kesamaan faktor dari kepentingan masing-masing negara

---

39-55,

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/article/view/2437>.

memotivasi mereka untuk membangun kembali aliansi dan kerjasama kemitraan untuk menjawab tantangan yang sedang dihadapi.

---

## Daftar Pustaka

- Caloca, Natalie. "Australia's Growing Defense and Security Role in the Indo-Pacific." Council on Foreign Relations, 2024. <https://www.cfr.org/in-brief/australias-growing-defense-and-security-role-indo-pacific>.
- Deb, Soumyodeep, dan Nathan Wilson. "The Coming of Quad and the Balance of Power in the Indo-Pacific." Air University Press, 2021. <https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/2870653/the-coming-of-quad-and-the-balance-of-power-in-the-indo-pacific/>.
- Delanova, Mariane Olivia, dan Yanyan Mochamad Yani. "Dampak Kebijakan Amerika Serikat di Indo-Pasifik Dalam Menghadapi China Terhadap Keamanan Indonesia." *Jurnal Academia Praja* 5, no. 1 (2022): 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.413>.
- Febrianti, Refika, Abubakar Eby Hara, dan Bagus Sigit Sunarko. "Persaingan Kekuasaan Antara India dan Cina : Dari Kekuasaan Militer Sampai Dengan Konflik Siber." *Intermestic: Journal of International Studies* 6, no. 2 (2022): 292–314.

- <https://doi.org/10.24198/intermestic.v6n2.3>.
- Heiduk, Felix, dan Christian Wirth. "The Quadrilateral Security Dialogue between Australia, India, Japan and the United States." *Stifung Wissenschaft und Politik*, no. 31 (2023): 1-7. <https://doi.org/10.18449/2023C31>.
- Kamarani, S, S Sundari, dan Y D Kuntjoro. "Nasionalisme dan Kebijakan Luar Negeri Tiongkok: Implikasi bagi Kawasan Asia Tenggara." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 88-94.  
<https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/4>.
- Lee, Lavina. "Assessing the Quad: Prospects and Limitations of Quadrilateral Cooperation for Advancing Australia's Interest." Lowy Institute, 2020.  
<https://www.lowyinstitute.org/publications/assessing-quad-prospects-limitations-quadrilateral-cooperation-advancing-australia-s>.
- Lisbet. "Ketegangan Filipina dan China di Laut China Selatan serta Upaya ASEAN dalam Mengatasinya." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XV*, no. 23 (2023): 1.  
[https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-XV-24-II-P3DI-Desember-2023-238.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XV-24-II-P3DI-Desember-2023-238.pdf).
- Listiana, Elli, dan Erna Kurniawati. "Perpanjangan Aliansi Keamanan Jepang-Amerika Serikat pada Tahun 2013 (Perspektif Jepang)." *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan* 19, no. 2 (2018): 39-55.  
<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/article/>

view/2437.

Mardiana, Vida. "Krisis Doklam dan Kepentingan Nasional India." *Review of International Relations* 2, no. 2 (2020): 91–102. <https://doi.org/10.24252/RIR.V2I2.17966>.

Rasheed, Zaheena. "What is the Quad and can it counter China's rise?" *Al Jazeera*, 2020. <https://www.aljazeera.com/news/2020/11/25/what-is-the-quad-can-us-india-japan-and-australia-deter-china>.

Salisbury, Emma. "Chins's PLAN: Maritime Domination beyond the South China Sea ," 2024. <https://www.geostrategy.org.uk/app/uploads/2024/05/GPPP05-Chinas-PLAN.pdf>.

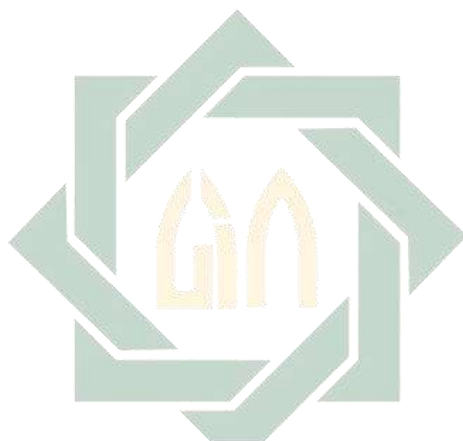
U.S Department of State. "China's Military Aggression in the Indo-Pacific Region - United States Department of State." Website of United States Government, 2020. <https://2017-2021.state.gov/chinas-military-aggression-in-the-indo-pacific-region/>.

United States Agency for International Development. "Indo-Pacific Strategy of the United States." USAID from the american people, 2022. <https://www.usaid.gov/asia-regional/indo-pacific-strategy-united-states>.

Wei, Zongyou. "The Evolution of the 'QUAD': Driving Forces, Impacts, and Prospects." *China International Strategy Review* 4, no. 2 (2022): 288. <https://doi.org/10.1007/S42533-022-00119-W>.

Widhianingsih, Vania Bunga, Reni Windiani, dan Fendy Eko

Wahyudi. "India-us strategic partnership sebagai upaya india mengamankan wilayah perbatasan dengan tiongkok." *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 8, no. 4 (2022): 796–807. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/35861>.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# **BAB IX**

## **Kontribusi *Central Committee for Drug Abuse Control (CCDAC)* Myanmar dalam Kasus Penyelundupan Sabu Bentuk Teh China Tahun 2021-2023 di Indonesia**

---

Peredaran narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba jenis sabu masuk melalui berbagai jalur penyelundupan, salah satunya yang paling marak adalah penyelundupan sabu dalam kemasan teh China. Kasus ini memperlihatkan betapa canggihnya sindikat narkoba internasional dalam hal penyelundupan barang-barang ilegal mereka, dengan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan utama di kawasan Asia Tenggara. Data dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) mengungkapkan bahwa sabu dalam kemasan teh ini, berasal dari Myanmar, telah beredar luas dan menimbulkan dampak yang merusak bagi masyarakat.<sup>1</sup> Dalam menghadapi realita ini, kerjasama lintas negara menjadi kunci utama untuk

---

<sup>1</sup> Moh Khory Alfarizi, "BNN Duga Sabu Berbungkus Teh Cina Berasal Dari Myanmar," March 8, 2022, <https://www.tempo.co/hukum/bnn-duga-sabu-berbungkus-teh-cina-berasal-dari-myanmar-418950>.

mempersempit ruang gerak jaringan narkoba. Myanmar, sebagai salah satu negara produsen narkoba terbesar di kawasan, memiliki lembaga khusus bernama *Central Committee for Drug Abuse Control* (CCDAC) yang berperan dalam menangani produksi dan distribusi narkoba di dalam negeri dan bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk menangani masalah lintas batas.

Pada chapter ini menyoroti kontribusi *Central Committee for Drug Abuse Control* (CCDAC) dalam menangani kasus penyelundupan narkoba, khususnya sabu berbentuk teh China, ke Indonesia selama periode 2021-2023. Pembahasan mencakup konteks narkoba di Myanmar, kasus penyelundupan narkoba di Indonesia, strategi CCDAC dalam menghadapi sindikat narkoba. Memahami peran nyata CCDAC dalam penelitian ini penting untuk mengevaluasi kontribusi langsung mereka terhadap pengurangan ancaman narkoba di Indonesia, serta untuk menggambarkan bagaimana kolaborasi yang solid antara lembaga dapat menjadi kunci dalam menciptakan kawasan yang lebih aman dari penyalahgunaan narkoba.

## **A. Produksi Opium di Myanmar**

Myanmar, negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Thailand, Laos, dan Cina, telah menjadi perhatian dunia sebagai salah satu penghasil narkoba terbesar di Asia,

khususnya untuk produksi opium dan metamfetamin.<sup>2</sup> Posisi geografisnya yang strategis di kawasan yang dikenal sebagai “Segitiga Emas” (*Golden Triangle*), bersama dengan Laos dan Thailand, menjadikan Myanmar sebagai pusat utama perdagangan narkotika ilegal. Myanmar telah menjadi pusat produksi opium selama beberapa dekade dan telah melampaui Afghanistan sebagai produsen terbesar di dunia.<sup>3</sup> Hal ini tidak terlepas dari perubahan sosial, politik dan ekonomi yang terjadi di negara ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, konflik internal dan kurangnya kontrol pemerintah di wilayah perbatasan telah menciptakan kondisi ideal bagi penanaman opium dan perdagangan narkoba. Sejak awal tahun 2000an, Myanmar telah mengalami perubahan signifikan dalam upayanya mengatasi masalah perdagangan narkoba.<sup>4</sup> Pemerintah Myanmar telah melakukan upaya signifikan untuk mengurangi produksi opium melalui berbagai strategi, termasuk kampanye pemberantasan, program substitusi tanaman, dan kerja sama internasional dengan negara tetangga dan organisasi global. Namun demikian, tantangan masih tetap ada, terutama mengingat kompleksitas jaringan perdagangan narkoba yang melibatkan pelaku domestik dan internasional, serta faktor geografis dan ekonomi yang mendukung keberlanjutan

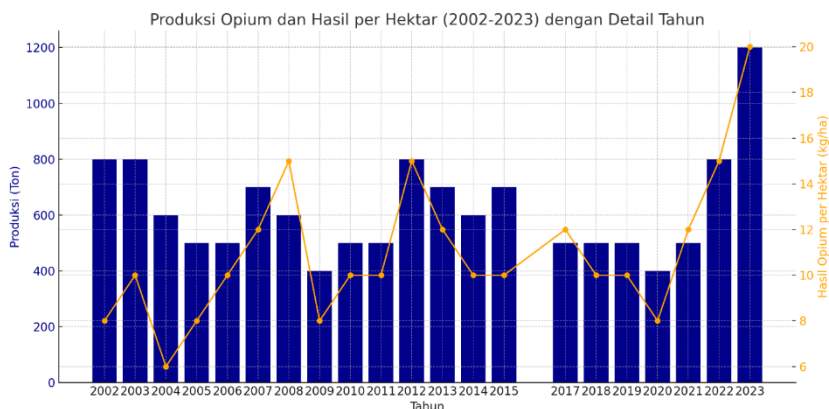
---

<sup>2</sup> Ko Ko Aung, “Lima Alasan Myanmar Geser Afghanistan Jadi Produsen Opium Terbesar Di Dunia,” December 15, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0vy894ry7vo>.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Asia Report N°299, “Fire and Ice: Conflict and Drugs in Myanmar’s Shan State,” January 8, 2019.

produksi opium. Perubahan-perubahan ini menandai perubahan besar dalam lanskap perdagangan narkoba global.



Gambar 1. 1 Produksi dan hasil opium di Myanmar

Sumber : UNODC “Myanmar Opium Survey”

[https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2023/Myanmar\\_Opium\\_Survey\\_2022.pdf](https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2023/Myanmar_Opium_Survey_2022.pdf)

Dari tahun 2021 hingga 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam hasil opium per hektar, dengan kenaikan bertahap dari 12 kg/ha pada 2021 menjadi 20 kg/ha pada 2023.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya perbaikan dalam teknik budidaya atau faktor lingkungan yang lebih mendukung produksi. Seiring dengan berkembangnya permintaan opium di pasar internasional, terutama di negara-negara Asia dan Eropa, produksi opium di Myanmar tetap stabil meski dihadapkan pada tekanan untuk memberantas tanaman ilegal ini. Di negara-negara

<sup>5</sup> UNODC Research, “Myanmar Opium Survey 2022 Cultivation, Production, and Implications,” January 2023, [www.unodc.org/roseap](http://www.unodc.org/roseap).

perbatasan seperti Thailand dan Laos, Myanmar telah dikenal sebagai pemasok utama bagi kebutuhan opium. Pada masa kolonial, opium mulai diperkenalkan sebagai komoditas yang mendatangkan keuntungan bagi ekonomi lokal.<sup>6</sup> Pasca-kemerdekaan, situasi ini semakin kompleks dengan adanya konflik antara pemerintah Myanmar dan kelompok-kelompok etnis di wilayah perbatasan. Shan State wilayah penghasil opium terbesar di Myanmar.<sup>7</sup>

Menurut data yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) tahun 2021-2022, hampir 90% opium yang diproduksi di Myanmar berasal dari wilayah Shan. Lokasi Shan yang berada di pegunungan dan terpencil, dengan iklimnya yang mendukung, merupakan faktor utama mengapa opium tumbuh subur di wilayah ini. Shan juga memiliki jaringan distribusi yang sudah lama, sehingga memudahkan para pengedar narkoba untuk mendapatkan opium dari Myanmar dan menjualnya di pasar internasional. Situasi ekonomi di wilayah Shan sangat memengaruhi pilihan orang untuk bergantung pada opium sebagai sumber pendapatan utama mereka. Mayoritas orang Shan hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki akses ke pekerjaan formal. Hal ini membuat mereka tidak punya pilihan selain terlibat dalam budidaya opium. Selain itu, budidaya opium jauh lebih menguntungkan daripada tanaman lain, yang

---

<sup>6</sup> James R. Rush, *Opium to Java : Revenue Farming and Chinese Enterprise in Colonial Indonesia, 1860-1910* (Cornell University Press, 1990).

<sup>7</sup> Asia Report N°299, "Fire and Ice: Conflict and Drugs in Myanmar's Shan State," January 8, 2019.

berarti petani cenderung terus menanam tanaman tersebut meskipun ada upaya pemberantasan.

Pada tahun 2022, UNODC mencatat adanya peningkatan signifikan dalam produksi opium di Myanmar. Peningkatan ini disebabkan oleh ketidakstabilan politik di Myanmar, terutama setelah kudeta militer pada tahun 2021 yang memperlemah kemampuan pemerintah untuk memberantas produksi narkoba. Keadaan politik yang tidak stabil ini menciptakan kondisi yang memungkinkan para petani opium untuk memperluas lahan dan meningkatkan produksi tanpa banyak kekhawatiran akan penindakan hukum. Selain itu, kelompok-kelompok bersenjata di wilayah ini juga memanfaatkan situasi ini untuk meningkatkan produksi opium guna mendanai aktivitas mereka.

**Tabel 1. 1 Luas areal penanaman tanaman opium di Myanmar (ha)**

<b>Region</b>	<b>Year 2021 (rounded)</b>	<b>Year 2022 (rounded)</b>	<b>Change 2021- 2022</b>
<b>South Shan</b>	11,300 (7,100 to 22,100)	16,900 (7,900 to 34,500)	50%
<b>East Shan</b>	8,200 (5,000 to 14,600)	9,200 (5,700 to 15,800)	11%

<b>North Shan</b>	5,400 (2,600 to 14,600)	8,400 (3,300 to 19,500)	57%
<b>Shan State total</b>	24,900 (18,900 to 32,500)	34,600 (23,700 to 45,500)	39%
<b>Kachin</b>	4,200 (2,400 to 9,000)	4,400 (2,500 to 10,900)	3%
<b>Chin</b>	560 (516 to 610)	640 (310 to 970)	14%
<b>Kayah</b>	450 (440 to 470)	500 (280 to 720)	11%
<b>National total</b>	30,100 (23,900 to 44,600)	40,100 (29,000 to 62,900)	33%

Sumber : UNODC “Myanmar Opium Survey”

[https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2023/Myanmar\\_Opium\\_Survey\\_2022.pdf](https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2023/Myanmar_Opium_Survey_2022.pdf)<sup>8</sup>

Tabel di atas menunjukkan perubahan luas lahan budidaya opium di berbagai wilayah di Myanmar antara tahun 2021 dan 2022. Wilayah Shan Selatan memiliki peningkatan signifikan dari 11.300 hektar pada tahun 2021 menjadi 16.900 hektar pada tahun 2022, dengan kenaikan sebesar 50%. Wilayah Shan Utara mengalami kenaikan tertinggi, yaitu 57%, dari 5.400 hektar menjadi 8.400 hektar.

<sup>8</sup> UNODC Research, “Myanmar Opium Survey 2022 Cultivation, Production, and Implications,” January 2023, [www.unodc.org/roseap](http://www.unodc.org/roseap).

Secara keseluruhan, total wilayah Shan mengalami kenaikan luas budidaya sebesar 39%, menjadikannya wilayah utama dalam budidaya opium di Myanmar. Total nasional budidaya opium pada tahun 2022 mencapai 40.100 hektar, meningkat 33% dibandingkan tahun sebelumnya (30.100 hektar). Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam luas lahan yang digunakan untuk budidaya opium di Myanmar dari tahun 2021 ke 2022.<sup>9</sup>

**Tabel 1. 2 Potensi produksi opium menurut wilayah dan negara bagian**

<b>Region</b>	<b>Potential production 2021</b>	<b>Potential production 2022</b>	<b>Change 2021-2022</b>	<b>2022 proportion by State</b>
<b>South Shan</b>	157 (99 to 307)	288 (134 to 587)	83%	36%
<b>East Shan</b>	105 (64 to 186)	170 (104 to 295)	62%	21%
<b>North Shan</b>	79 (35 to 157)	210 (82 to 488)	167%	26%
<b>Shan State total</b>	340 (257 to 528)	670 (460 to 1100)	96%	84%

<sup>9</sup> UNODC Research, "Myanmar Opium Survey 2022 Cultivation, Production, and Implications," January 2023, [www.unodc.org/roseap](http://www.unodc.org/roseap).

<b>Kachin State</b>	68 (38 to 140)	100 (58 to 260)	52%	13%
<b>Chin State</b>	7.9 (4.9 to 17.5)	11.9 (6.1 to 19)	61%	2%
<b>Kayah State</b>	6.3 (4.0 to 16.1)	10 (5.7 to 14)	58%	1%
<b>Total</b>	420 (330 to 630)	790 (580 to 1200)	88%	100%

Sumber: UNODC “Myanmar Opium Survey”

[https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2023/Myanmar\\_Opium\\_Survey\\_2022.pdf](https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2023/Myanmar_Opium_Survey_2022.pdf)<sup>10</sup>

Tabel di atas memperlihatkan potensi produksi opium dalam ton metrik dari setiap wilayah dan negara bagian di Myanmar pada tahun 2021 dan 2022, beserta persentase perubahan dan kontribusi masing-masing wilayah terhadap produksi total di tahun 2022. Shan Selatan memiliki peningkatan potensi produksi sebesar 83% dari 157 ton pada tahun 2021 menjadi 288 ton pada tahun 2022, mencakup 36% dari total produksi. Shan Utara mengalami peningkatan yang sangat besar (167%) dari 79 ton menjadi 210 ton, mencakup 26% dari total produksi pada tahun 2022. Secara keseluruhan, total wilayah Shan memiliki potensi produksi sebesar 670 ton pada tahun 2022, meningkat 96% dari tahun

<sup>10</sup> UNODC Research, *Ibid*

sebelumnya dan menyumbang 84% dari total produksi opium di Myanmar. Total nasional potensi produksi opium pada tahun 2022 mencapai 790 ton, meningkat 88% dari 420 ton pada tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar produksi opium di Myanmar terkonsentrasi di wilayah Shan, yang mencakup lebih dari 80% dari total potensi produksi opium nasional pada tahun 2022.<sup>11</sup>

## **B. Central Committee for Drug Abuse Control (CCDAC)**

Myanmar memiliki badan nasional yang bertanggung jawab atas pengendalian dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Didirikan pada tahun 1975, CCDAC beroperasi di bawah Kementerian Dalam Negeri Myanmar dan memiliki tujuan utama untuk mengurangi produksi, distribusi, dan konsumsi narkoba di dalam negeri. Lembaga ini memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi permasalahan narkoba yang kompleks di Myanmar, terutama di wilayah Segitiga Emas, yang merupakan salah satu pusat produksi opium terbesar di dunia. Dengan berbagai ancaman dari kelompok bersenjata dan ketidakstabilan politik, tugas CCDAC menjadi semakin penting tetapi penuh tantangan.

CCDAC aktif melakukan penegakan hukum untuk memberantas perdagangan narkoba yang melibatkan polisi dan militer. Selain kegiatan penegakan hukum, CCDAC juga melakukan pemantauan ketat di wilayah-wilayah yang

---

<sup>11</sup> UNODC Research, "Myanmar Opium Survey 2022 Cultivation, Production, and Implications," January 2023, [www.unodc.org/roseap](http://www.unodc.org/roseap).

dikenal sebagai penghasil opium. Sebagai produsen opium terbesar di Asia Tenggara, Myanmar memiliki tantangan besar dalam mengurangi aktivitas penanaman opium yang telah menjadi sumber pendapatan bagi banyak masyarakat lokal. Untuk itu, CCDAC aktif melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk dari tanaman ini, serta melakukan penghancuran ladang-ladang opium dengan metode pembakaran atau penghancuran mekanis. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi jumlah opium yang diproduksi di dalam negeri. Mereka juga memiliki program pencegahan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Melalui kampanye di sekolah, komunitas, dan media massa, CCDAC berusaha memberi pemahaman kepada masyarakat, terutama para remaja, tentang bahaya narkoba. CCDAC menjalankan dua pendekatan utama dalam upaya mengurangi penyalahgunaan narkoba. Pendekatan pertama adalah program pencegahan yang difokuskan pada langkah-langkah proaktif untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba sebelum terjadi. Hal ini mencakup pengawasan distribusi obat-obatan terlarang, penghancuran sumber produksi seperti ladang opium, dan penegakan hukum terhadap sindikat narkoba. Pendekatan kedua adalah kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang bertujuan memberikan edukasi kepada berbagai kelompok, terutama remaja, tentang bahaya narkoba. Edukasi ini

dilakukan melalui kegiatan di sekolah, komunitas, dan media massa.

Program pencegahan bertujuan untuk memutus rantai distribusi narkoba, menghapus sumber produksi, dan menghentikan penyalahgunaan sejak dini. Sementara itu, kampanye peningkatan kesadaran berfokus pada mengurangi permintaan narkoba dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dan dampaknya. Kedua program ini saling melengkapi dalam menciptakan masyarakat yang lebih terlindungi dari ancaman narkoba. Program pencegahan ini penting untuk membangun kesadaran kolektif di tengah masyarakat agar mereka tidak terjerat dalam penggunaan atau perdagangan narkoba. Di sisi lain, CCDAC juga menyadari pentingnya rehabilitasi bagi para pengguna narkoba. Mereka bekerja sama dengan beberapa organisasi internasional, seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC),<sup>12</sup> untuk menyediakan layanan rehabilitasi bagi pengguna yang ingin pulih. Namun, karena keterbatasan anggaran dan fasilitas, upaya rehabilitasi ini belum menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Hal ini masih menjadi tantangan besar bagi CCDAC, mengingat tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Myanmar. Selain itu, CCDAC terlibat dalam berbagai bentuk kerja sama internasional, terutama dengan negara-negara tetangga dan organisasi regional seperti ASEAN dan Interpol. Melalui kerja sama ini, CCDAC mendapat bantuan teknis dan

---

<sup>12</sup> UNODC Research, "Myanmar Opium Survey 2022 Cultivation, Production, and Implications," January 2023, [www.unodc.org/roseap](http://www.unodc.org/roseap).

finansial, serta pertukaran informasi terkait jaringan perdagangan narkoba yang melibatkan beberapa negara di Asia Tenggara. Proyek pemberantasan narkoba lintas negara ini penting dalam menekan peredaran narkoba yang terus meningkat di kawasan tersebut, khususnya metamfetamin yang diproduksi dalam jumlah besar di Myanmar.

**Tabel 1. 3 Asean Drug Monitoring Report 2022**

<b>Tahun</b>	<b>Cultivated (Hectares)</b>	<b>Production (Mt)</b>	<b>Destroyed (Hectares)</b>
<b>2012-13</b>	57,800	870	12,258
<b>2013-14</b>	57,600	670	15,188
<b>2014-15</b>	55,500	647	13,274
<b>2015-16</b>	-	-	7,562
<b>2016-17</b>	41,000	550	3,536.96
<b>2017-18</b>	37,300	520	2,578.52
<b>2018-19</b>	33,100	508	2,459.91
<b>2019-20</b>	29,500	405	2,026.58

Sumber : ASEAN.org <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/11/Drug-Monitoring-Report-2022.pdf><sup>13</sup>

Data ini menunjukkan luas lahan (dalam satuan hektar) yang digunakan untuk menanam opium setiap tahun di Myanmar. Luas lahan ini mengalami perubahan signifikan dari tahun ke tahun, mencerminkan fluktuasi dalam kegiatan budidaya opium yang dipengaruhi oleh berbagai faktor,

<sup>13</sup> Manop Kanoto, Rachanikorn Sarasiri, and Poonrut Leyatikul, "ASEAN DRUG MONITORING REPORT 2022," August 2023.

seperti kebijakan pemberantasan, kondisi sosial-ekonomi, dan permintaan pasar global.

Luas lahan budidaya opium di Myanmar mengalami penurunan signifikan dari 57.800 hektar pada 2012-2013 menjadi 33.100 hektar pada 2018-2019, mencerminkan kontribusi CCDAC dalam menekan produksi opium. CCDAC berhasil menghancurkan lahan opium secara konsisten, misalnya 12.258 hektar pada 2012-2013 dan 15.188 hektar pada 2013-2014. Meski upaya penghancuran lahan sempat menurun menjadi 2.578 hektar pada 2017-2018, secara keseluruhan, langkah-langkah ini efektif mengurangi total luas lahan opium menjadi hanya 29.500 hektar pada 2019-2020. Strategi CCDAC ini mencakup penghancuran lahan, kerja sama internasional, dan kampanye pencegahan untuk melawan produksi narkoba secara komprehensif.

### **C. Kasus Penyelundupan Sabu Bentuk Teh China di Indonesia**

Kasus narkoba di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 2023.<sup>14</sup> Situasi ini menciptakan kekhawatiran besar karena ancaman narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada stabilitas sosial dan keamanan negara. Indonesia, sebagai negara yang terletak di kawasan strategis antara produsen dan pasar besar narkoba di Asia Tenggara,

---

<sup>14</sup> BNN Humas, "HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar," June 27, 2019, <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>.

menghadapi risiko tinggi sebagai jalur transit narkoba. Narkoba yang berasal dari kawasan Segitiga Emas yang mencakup Myanmar, Laos, dan Thailand. Indonesia tidak hanya menjadi negara dengan pengguna narkoba yang tinggi, tetapi juga menjadi sasaran empuk bagi sindikat narkoba internasional. Sindikat ini menggunakan berbagai jalur dan teknik untuk memasukkan narkoba ke Indonesia, termasuk melalui pelabuhan dan bandara yang dijadikan pintu masuk barang-barang terlarang. Teknologi yang semakin maju dimanfaatkan oleh sindikat-sindikat ini untuk mengembangkan strategi baru dalam menyelundupkan narkoba. Misalnya, mereka menggunakan layanan pengiriman internasional dan platform e-commerce untuk mendistribusikan narkoba secara sembunyi-sembunyi. Peredaran narkoba jenis sintetis, seperti sabu dan ekstasi, semakin marak karena biaya produksi yang relatif rendah dan proses distribusi yang dapat dilakukan secara tersembunyi.

Peningkatan kasus narkoba di Indonesia juga dipengaruhi oleh distribusi narkoba dari Myanmar. Salah satu produk yang masuk ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah sabu jenis terbaru yang dibungkus menggunakan kemasan teh asal Cina. Kemasan ini dimaksudkan untuk mengelabui petugas dan mempermudah distribusi melalui jalur darat dan laut. Peningkatan masuknya narkoba jenis sabu dengan bungkus teh Cina menjadi tren yang signifikan dalam jaringan perdagangan narkoba. Bentuk

bungkus teh ini tampaknya didesain untuk menghindari deteksi oleh aparat keamanan, karena tampilan yang sederhana dan tampak seperti barang dagangan biasa. Polri dan BNN telah mengungkapkan bahwa kemasan ini sering ditemukan dalam jumlah besar saat penggerebekan, menandakan adanya peran aktif jaringan internasional yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara untuk mendistribusikan sabu jenis ini ke Indonesia.

Pada tahun 2021, Polri berhasil membongkar jaringan mafia narkoba yang beroperasi antara Myanmar dan Indonesia, mengamankan total 62,9 kilogram sabu yang dikemas dalam bungkus teh Cina.<sup>15</sup> Kasus ini menjadi sorotan utama karena membuktikan semakin kuatnya hubungan jaringan narkoba internasional yang menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial dan tujuan utama distribusi sabu dari Myanmar. Di tahun yang sama, petugas kembali melakukan penangkapan penting yang menunjukkan betapa cerdasnya sindikat narkoba dalam memanfaatkan berbagai cara untuk menyelundupkan barang terlarang ke Indonesia. Dalam operasi penegakan hukum tersebut, petugas berhasil mengamankan dua buah tabung gas yang di dalamnya tersembunyi 17 bungkus teh Cina berisi sabu dengan berat

---

<sup>15</sup> Safyra Primadhyta, "Polisi Ciduk Penedar Sabu Dalam Kemasan Teh China Di Medan," October 20, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211020232234-12-710189/polisi-ciduk-penedar-sabu-dalam-kemasan-teh-china-di-medan>.

total 17,81 kilogram.<sup>16</sup> Di lokasi penggerebekan kedua, petugas juga berhasil menyita 27 kilogram sabu yang dikemas dalam bungkus teh Cina berwarna hijau. Terlihat jelas bahwa sindikat narkoba internasional semakin gencar memanfaatkan metode ini untuk menyelundupkan narkoba dalam jumlah besar.<sup>17</sup>

Pada tahun 2022, BNN berhasil menggagalkan peredaran 255,96 kilogram sabu-sabu yang berasal dari wilayah Segitiga Emas.<sup>18</sup> Hingga tahun 2023, terjadi lonjakan signifikan dalam kasus sabu yang dikemas dalam bungkus teh Cina di Indonesia. Bea Cukai dan Polri berhasil menggagalkan penyelundupan 200 kilogram sabu di Aceh,<sup>19</sup> sementara BNN Sumatera Selatan menangkap seorang pria yang membawa 115 kilogram sabu dalam kemasan serupa.<sup>20</sup> Selain itu, Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat menangkap empat

---

<sup>16</sup> Humas BNN, "BNN Sita 581,31 Kg Sabu Jaringan Internasional," May 5, 2021, <https://bnn.go.id/bnn-sita-58131-kg-sabu-jaringan-internasional/>.

<sup>17</sup> Humas BNN, *Ibid*

<sup>18</sup> Putu Indah Savitri, "BNN Gagalkan Peredaran 255,96 Kg Sabu-Sabu Asal Segitiga Emas," April 7, 2022, <https://www.antaraneews.com/berita/2806901/bnn-gagalkan-peredaran-25596-kg-sabu-sabu-asal-segitiga-emas>.

<sup>19</sup> Humas Bea Cukai, "Bea Cukai Dan Polri Gagalkan Penyelundupan 200 Kilogram Sabu Di Perairan Aceh," March 1, 2023, <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-dan-polri-gagalkan-penyelundupan-200-kilogram-sabu-di-perairan-aceh.html>.

<sup>20</sup> Prima Syahbana, "BNN Sumsel Tangkap Pria Bawa 115 Kg Sabu Dikemas Teh China Baca Artikel Detiksumut, "BNN Sumsel Tangkap Pria Bawa 115 Kg Sabu Dikemas Teh China," January 25, 2023, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6533349/bnn-sumsel-tangkap-pria-bawa-115-kg-sabu-dikemas-teh-china>.

kurir narkoba dengan barang bukti 18,6 kilogram sabu dalam kemasan teh Cina, yang ditaksir bernilai sekitar Rp 28 miliar.<sup>21</sup> Lonjakan ini mencerminkan semakin kuatnya jaringan distribusi narkoba internasional asal Myanmar dentan sindikat kemasan teh Cina yang menjadikan Indonesia sebagai target pasar utama.

#### **D. Kontribusi CCDAC Myanmar dalam Kasus Penyelundupan Sabu Bentuk Teh China Tahun 2021-2023 di Indonesia**

CCDAC (*Central Committee for Drug Abuse Control*) Myanmar telah mengambil berbagai langkah dalam menanggulangi dan memerangi penyelundupan sabu dari Myanmar ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia Sejak tahun 2021 hingga 2023. Central Committee for Drug Abuse Control (CCDAC) Myanmar terus berupaya memerangi peredaran narkoba yang berasal dari wilayah Segitiga Emas, termasuk jenis sabu yang disamarkan dalam kemasan teh Cina. CCDAC mengadopsi berbagai pendekatan, mulai dari operasi penindakan hingga kolaborasi internasional untuk menekan sindikat narkoba yang kerap kali mengirimkan sabu melalui jalur laut ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu titik utama dalam jaringan peredaran sabu internasional,

---

<sup>21</sup> Humas Polda Metrojaya, "Polres Jakbar Berhasil Ungkap Peredaran 18,6 Kg Sabu, Polisi Amankan Empat Tersangka," June 9, 2023, <https://tribratanews.metro.polri.go.id/polres-jakbar-berhasil-ungkap-peredaran-186-kg-sabu-polisi-amankan-empat-tersangka/>.

Myanmar menyadari peran penting yang diemban CCDAC dalam mengurangi produksi dan distribusi narkoba, terutama dalam bentuk kemasan teh Cina yang telah meningkat jumlahnya secara signifikan.

Pada tahun 2021, CCDAC memperkuat pemantauan di wilayah perbatasan, khususnya di wilayah Shan, yang dikenal sebagai area utama produksi narkoba di Myanmar. Wilayah Shan telah lama menjadi pusat produksi opium dan sabu karena kondisi geografisnya yang sulit dijangkau serta minimnya akses pengawasan. CCDAC melakukan patroli rutin serta pengawasan intensif di wilayah ini, menargetkan sindikat narkoba lokal yang berperan sebagai penghubung utama antara produsen dan jaringan internasional. Dengan adanya patroli ini, sejumlah jaringan sindikat narkoba yang memproduksi sabu berhasil dideteksi dan dicegah agar tidak menyuplai sabu bentuk teh China tersebut ke Indonesia melalui jalur yang kerap mereka gunakan.

Selain patroli perbatasan, CCDAC bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia serta badan-badan internasional lainnya. Kolaborasi ini melibatkan pertukaran intelijen, yang memungkinkan CCDAC untuk mendapatkan informasi tentang jalur distribusi sabu yang mengarah ke Indonesia dan negara-negara lain. Pada tahun 2021, beberapa kasus besar berhasil digagalkan melalui koordinasi yang efektif antara CCDAC dan BNN. Informasi terkait pergerakan sindikat narkoba yang mengirimkan sabu dalam kemasan teh Cina secara rutin diteruskan kepada BNN,

memungkinkan otoritas di Indonesia untuk lebih siap dalam mencegah masuknya narkoba melalui pelabuhan dan jalur masuk lainnya.

Di tahun yang sama, Myanmar dan Indonesia menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk memperkuat kerja sama dalam menangani peredaran narkoba, khususnya jenis sabu.<sup>22</sup> Ruang lingkup kerja sama yang menjadi kesepakatan antara BNN dengan CCADC Myanmar adalah sebagai berikut :

1. Pengurangan penyediaan dan permintaan narkotika dalam upaya penanggulangan narkotika, zat psikotropika, dan prekursor;
2. Pertukaran informasi dan pengalaman yang berkaitan dengan penegakan hukum yang efektif termasuk metode pengungkapan pencarian dan penyitaan narkotika, modus operandi, serta produksi dan rute perdagangan gelap narkotika;
3. Pertukaran pengalaman dan pengetahuan dalam bidang yang relevan tentang teknologi modern untuk mendeteksi narkotika, profiling dan analisis ilmiah termasuk hasil tes, jenis narkotika baru serta sampel narkotika;
4. Pertukaran informasi dan pengalaman yang berkaitan dengan undang-undang dan praktik peradilan untuk pengawasan narkotika, pencegahan penyalahgunaan

---

<sup>22</sup> BNN, "Kepala BNN Terima Lawatan Duta Besar RI Untuk Myanmar Akselerasi MOU BNN Dengan CCADC Myanmar," November 8, 2021, <https://bnn.go.id/kepala-bnn-terima-lawatan-duta-besar-ri-untuk/>.

- narkotika, program pendidikan yang efektif dan kampanye anti Narkoba, serta modalitas rehabilitasi;
5. Pertukaran praktik terbaik tentang Pembangunan Alternatif baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan; dan
  6. Peningkatan kapasitas, pelatihan serta pertukaran kunjungan ahli dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.<sup>23</sup>

Melalui MoU ini, CCDAC dan BNN menyusun program pelatihan dan peningkatan kapasitas penegak hukum di kedua negara, serta menyelenggarakan latihan bersama dalam mengidentifikasi modus operandi yang digunakan oleh sindikat narkoba. Salah satu hasil signifikan dari kerja sama ini adalah meningkatnya kesadaran para petugas lapangan terhadap penggunaan kemasan teh Cina sebagai salah satu modus penyelundupan sabu. Dengan pengetahuan ini, BNN dan CCDAC dapat lebih proaktif dalam mendeteksi dan menggagalkan pergerakan narkoba di lintas batas.

Pada tahun 2022, CCDAC meningkatkan frekuensi operasi penindakan di wilayah produksi narkoba utama, yang berfokus pada penggerebekan laboratorium-laboratorium produksi sabu di daerah perbatasan. Selain itu, CCDAC melaporkan peningkatan signifikan dalam penyitaan sabu dari sindikat lokal yang berencana mengirimkan narkoba ke Indonesia melalui jaringan laut.

---

<sup>23</sup> BNN, *Ibid*

**Tabel 1. 4 Asean Drug Monitoring Report 2022**

<b>Tahun</b>	<b>Cultivated (Hectares)</b>	<b>Production (Mt)</b>	<b>Destroyed (Hectares)</b>
<b>2020-21</b>	30,200	423	4,632.97
<b>2021-22</b>	40,100	790	1,403.27
<b>2022-23</b>	-	-	1,894.84

Sumber : ASEAN.org <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/11/Drug-Monitoring-Report-2022.pdf> <sup>24</sup>

Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan pola fluktuatif dalam produksi dan upaya penghancuran ladang opium di Myanmar. Tahun 2021-2022 menunjukkan bahwa produksi opium di Myanmar mengalami peningkatan tajam antara tahun 2021-2022, dengan peningkatan luas lahan yang dibudidayakan sebesar sekitar 32.74% dan peningkatan produksi opium sebesar sekitar 86.69%. Setelah itu, terjadi peningkatan luas lahan yang dihancurkan pada tahun 2022-2023, mencerminkan upaya untuk mengatasi masalah produksi opium yang semakin meningkat. Luas lahan opium yang dihancurkan juga meningkat signifikan, dari 1,403.27 hektar pada tahun 2021-22 menjadi 1,894.84 hektar pada tahun 2022-23, dengan total peningkatan sebesar 491.57 hektar atau sekitar 34.98%. Ini menunjukkan adanya upaya yang lebih besar dalam penghancuran ladang opium untuk menghadapi tantangan penyalahgunaan narkoba di Myanmar. Hal ini menegaskan bahwa meskipun terdapat peningkatan upaya pemberantasan, skala tantangan yang

---

<sup>24</sup> Manop Kanoto, Rachanikorn Sarasiri, and Poonrut Leyatikul, "ASEAN DRUG MONITORING REPORT 2022," August 2023.

dihadapi tetap sangat besar, mengingat luasnya lahan yang digunakan untuk budidaya opium serta tingginya produksi yang dihasilkan setiap tahunnya. Data ini juga mencerminkan bagaimana Myanmar masih menjadi salah satu produsen utama opium di dunia, dengan tantangan pemberantasan yang memerlukan kerja sama internasional yang lebih erat untuk mencapai hasil yang lebih efektif.

Kerja sama yang erat melalui pertukaran informasi intelijen antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia dan CCDAC Myanmar telah memainkan peran krusial dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara hingga tahun 2023. Pertukaran data yang terus dilakukan ini memungkinkan CCDAC untuk mengidentifikasi dan menghancurkan sejumlah basis produksi opium di wilayah-wilayah rawan di Myanmar, khususnya di area Segitiga Emas yang menjadi salah satu pusat produksi opium terbesar di dunia. Dalam operasi ini, CCDAC menargetkan laboratorium-laboratorium yang menjadi sumber produksi sabu yang diselundupkan ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Tindakan penutupan dan penghancuran fasilitas produksi tersebut diharapkan mampu memutus aliran suplai bahan baku sabu, mengurangi volume penyelundupan, dan secara keseluruhan mengurangi jumlah kasus narkoba lintas negara yang meresahkan. Berkat sinergi yang kuat antara CCDAC dan BNN melalui pertukaran intelijen, langkah-langkah ini memberikan dampak signifikan

dalam menghambat jaringan sindikat narkoba yang selama ini memanfaatkan wilayah perbatasan Myanmar sebagai jalur transit untuk mengirim sabu dalam kemasan teh Cina ke pasar Indonesia.

## **E. Kesimpulan**

CCDAC (*Central Committee for Drug Abuse Control*) sebagai lembaga pengendalian narkoba utama di Myanmar menunjukkan komitmennya dalam menekan produksi dan distribusi narkoba melalui berbagai kebijakan dan tindakan, seperti operasi penghancuran ladang narkotika serta patroli di daerah perbatasan untuk meminimalisir peredaran gelap. Upaya ini melibatkan kerjasama lintas negara, termasuk berbagi informasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia. Melalui kolaborasi semacam ini, CCDAC berusaha untuk mempersempit ruang gerak sindikat penyelundupan dan mempersulit jalur masuk narkotika ke negara-negara tetangga. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dengan peningkatan produksi narkotika yang masih sulit dikendalikan. Meskipun CCDAC berhasil menghancurkan sebagian ladang opium dan menyita sabu siap diedarkan, upaya ini terbatas oleh kompleksitas sindikat dan faktor sosial-ekonomi lokal yang menjadikan narkotika sebagai pilihan ekonomi bagi sebagian masyarakat Myanmar. Instabilitas politik dan ekonomi juga memperburuk kondisi,

menyulitkan penghancuran narkoba secara konsisten. CCDAC perlu dukungan internasional lebih lanjut, terutama dalam kerjasama intelijen, pelatihan, dan sumber daya operasional. Dengan penguatan kolaborasi internasional, terutama dengan negara-negara target pasar seperti Indonesia, diharapkan peredaran narkoba di Asia Tenggara dapat ditekan lebih efektif.

---

## Daftar Pustaka

- Asia Report N°299. "Fire and Ice: Conflict and Drugs in Myanmar's Shan State," January 8, 2019.
- BNN. "Kepala BNN Terima Lawatan Duta Besar RI Untuk Myanmar Akselerasi MOU BNN Dengan CCADC Myanmar," November 8, 2021. <https://bnn.go.id/kepala-bnn-terima-lawatan-duta-besar-ri-untuk/>.
- BNN Humas. "HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar," June 27, 2019. <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>.
- Humas Bea Cukai. "Bea Cukai Dan Polri Gagal Penyelundupan 200 Kilogram Sabu Di Perairan Aceh," March 1, 2023. <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-dan-polri-gagal-penyelundupan-200->

kilogram-sabu-di-perairan-aceh.html.

Humas BNN. "BNN Sita 581,31 Kg Sabu Jaringan Internasional," May 5, 2021. <https://bnn.go.id/bnn-sita-58131-kg-sabu-jaringan-internasional/>.

Humas Polda Metrojaya. "Polres Jakbar Berhasil Ungkap Peredaran 18,6 Kg Sabu, Polisi Amankan Empat Tersangka," June 9, 2023. <https://tribrataneews.metro.polri.go.id/polres-jakbar-berhasil-ungkap-peredaran-186-kg-sabu-polisi-amankan-empat-tersangka/>.

Ko Ko Aung. "Lima Alasan Myanmar Geser Afghanistan Jadi Produsen Opium Terbesar Di Dunia," December 15, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0vy894ry7vo>.

Moh Khory Alfarizi. "BNN Duga Sabu Berbungkus Teh Cina Berasal Dari Myanmar," March 8, 2022. <https://www.tempo.co/hukum/bnn-duga-sabu-berbungkus-teh-cina-berasal-dari-myanmar-418950>.

Prima Syahbana. "BNN Sumsel Tangkap Pria Bawa 115 Kg Sabu Dikemas Teh China Baca Artikel Detiksumut, "BNN Sumsel Tangkap Pria Bawa 115 Kg Sabu Dikemas Teh China," January 25, 2023. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6533349/bnn-sumsel-tangkap-pria-bawa-115-kg-sabu-dikemas-teh-china>.

Putu Indah Savitri. "BNN Gagalkan Peredaran 255,96 Kg

Sabu-Sabu Asal Segitiga Emas,” April 7, 2022.  
<https://www.antaranews.com/berita/2806901/bnn-gagalkan-peredaran-25596-kg-sabu-sabu-asal-segitiga-emas>.

Safyra Primadhyta. “Polisi Ciduk Pengedar Sabu Dalam Kemasan Teh China Di Medan ,” October 20, 2021.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211020232234-12-710189/polisi-ciduk-pengedar-sabu-dalam-kemasan-teh-china-di-medan>.

UNODC Research. “Myanmar Opium Survey 2022 Cultivation, Production, and Implications,” January 2023.  
[www.unodc.org/roseap](http://www.unodc.org/roseap).

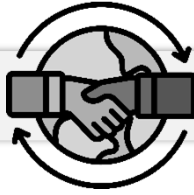


UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# **KEBIJAKAN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DI ERA KONTEMPORER: KONSEP DAN STUDI KASUS**



# BAB X

## Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan di Era Kontemporer

---

### A. Pendahuluan

Awal pada isu kontemporer hubungan internasional terjadi pada pasca perang dunia II, lebih tepatnya pada perang dingin. Perkembangannya isu-isu hubungan internasional juga semakin berkembang yang dari sifat klasik menuju kontemporer yang lebih kompleks. Dilemma yang dihadapi oleh isu global bukan lagi didominasi oleh ancaman nuklir, persaingan ideologi marxisme, liberalisme dan sebagainya. Masyarakat internasional saat ini harus dihadapi dengan dengan *New World Order*.<sup>1</sup> Pada tatanan global ini

---

<sup>1</sup> Indah Pangestu, "Keamanan Nasional Dalam Konteks Isu-Isu Global Kontemporer: Sebuah Tinjauan Hubungan Internasional," *Jurnal Keamanan Nasional* 3, no. 1 (2017): 110.

menanggapi isu-isu tentang kesejahteraan manusia serta masalah lingkungan yang menjadi agenda baru bagi baik Negara-Negara Selatan ataupun Utara. Pasca Perang Dingin juga terciptalah sebuah era kontemporer yang berfokus pengaplikasian ilmu serta teknologi dari berbagai bidang yang dimana eskalasi ini tercipta sangat cepat dan menciptakan sebuah era kontemporer yang disebut juga *Modern Globalization*.<sup>2</sup> Dampak dari perubahan arah isu-isu hubungan internasional dari *Hard Power* menuju kepada *Soft Power* serta globalisasi yang tidak dapat terbendung, menjadikan negara untuk dapat menerima perkembangan serta tantangan zaman yang tidak dapat terpisahkan.

Seluruh dunia mencoba untuk dapat beradaptasi pada perkemabangan isu global ini, tak terkecuali Indonesia yang berusaha untuk bisa menciptakan sebuah potensial dengan tatanan dunia yang baru serta *Soft Power Diplomacy* yang menjadikan eksistensi Indonesia tetap terlihat di tatanan dunia. Berbagai diplomasi dan konferensi internasional diikuti oleh Indonesia guna memenuhi kepentingan nasional ataupun untuk dapat memberikan dampak global dalam partisipasinya di dunia internasional. salah satu hal yang paling menarik yang dapat dilihat dari Indonesia dalam partisipasi membenahi isu-isu global dan mengikuti hirarki serta tatanan dunia adalah sebuah konsep yang disebut dengan Kerjasama Selatan-selatan. Kerjasama Selatan-selatan ini bermula ketika terjadinya sebuah konferensi di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 yang dihadiri oleh 29

---

<sup>2</sup> “Peran Globalisasi Di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi Di Era Kontemporer,” *Jurnal Sospol* 3, no. 1 (2017): 127.

negara yang kini disebut sebagai Konferensi Asia-Afrika.<sup>3</sup> Konferensi ini menjadi dasar bagi Indonesia untuk dapat memberikan dampak yang signifikan bagi dunia internasional. konferensi ini menghimpun negara-negara yang mengalami kolonialisasi sehingga hasil dari konferensi ini untuk dapat bekerjasama dalam membangun konstruksi negara dan menolak kolonialisasi.

Perkembangan yang dilalui oleh Indonesia dalam menjalankan Kerjasama Selatan-selatan ini memiliki perjalanan yang sangat Panjang hingga bertahan samapai saat ini. Kerjasama Selatan-selatan ini mengalami banyak percaturan politik internasioanl dan Pembangunan internasional dengan dibentuknya Gerakan Non-Blok (1961), G77 (1964), Kelompok 15 (1989), Buenos Aires Plan of Action (BAPA),<sup>2</sup> Accra Agenda for Action (AAA), High Level Meeting on Aid Effectiveness di Busan, Korea Selatan, hingga South Summit di Kuba (2000).<sup>4</sup> Selain ini juga terdapat sebuah inisiasi yang tertuang dalam resolusi PBB No. 58/220 tentang Pembentukan High Level Committee on South-South Cooperation yang berfokus pada kerjasama Teknik antar negara berkembang di kawasan selatan.<sup>5</sup> kerjasama Selatan-

---

<sup>3</sup> Roeslan Abdulgani, *The Bandung Connection: Konferensi Asia-Afrika Di Bandung Tahun 1955* (Bandung: MKAA-Dirjen Diplik Kemenlu RI, 2015), 53.

<sup>4</sup> Kementerian Luar Negeri RI, *Perjalanan Satu Dekade KSS Indonesia: Kontribusi Bagi Tercapainya Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2023), 2.

<sup>5</sup> "A/RES/58/220," accessed October 30, 2024, <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F58%2F220&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False>.

Selatan yang menjadi semakin penting bagi arah diplomasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini sebagai upaya mengangkat citra positif Indonesia di dunia internasional. Indonesia berusaha berkontribusi untuk menghasilkan solusi-solusi bersama untuk pembangunan negara berkembang melalui berbagi pengetahuan terkait keunggulan-keunggulan yang dimiliki negara ini. Guna mengoptimalkan pelaksanaan program, Pemerintah Indonesia kerap bekerja sama dengan mitra pembangunan lain, baik dari negara-negara maju ataupun organisasi internasional dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) kerjasama ini bersifat teknik dan pemberian hibah kepada negara lain, jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Indonesia pun diantaranya seperti pelatihan/*training*, pemberian beasiswa, workshop, knowledge sharing, dan seminar-seminar.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024 dijelaskan bahwa visi Kementerian Luar Negeri Indonesia adalah “Memimpin diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.<sup>6</sup> Hal ini merupakan salah satu strategi Indonesia untuk dapat bersaing di dunia internasional, Indonesia mencoba untuk dapat memiliki kepemimpinan serta peran Indonesia di dunia internasional. Hal ini sebagai antisipasi pemerintah Indonesia untuk melihat dinamika Indonesia dalam melihat isu-isu kontemporer, isu kontemporer ini sangat memiliki

---

<sup>6</sup> Kementerian Luar Negeri RI, *Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024* (Jakarta, 2020), 80.

keterhubungan dalam isu pembangunan berkelanjutan. Ide pembangunan keberlanjutan ini telah berubah menjadi kerjasama kolektif anatar negara untuk menciptakan dunia menjadi lebih baik. Ide pembangunan ini menciptakan *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2001 yang menjadi sebuah kelanjutan dari *UN Millennium Summit* pada tahun 2000 sebagai bentuk dari *Millenium Declaration*.<sup>7</sup> Dalam perjalanan MDGs selama 15 tahun terdapat perubahan dengan adanya perkembangan isu-isu kontemporer sehingga disepakati untuk agenda 2030 *for Sustainable Development* sebagai hasil dari *UN Sustainable Development Summit 2015*.<sup>8</sup>

Indonesia melalui dasar hukum Keputusan Menteri Luar Negeri No.83 Tahun 2017 menyatakan bahwa Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Pada tahun 2017. Kementerian Luar Negeri berperan penting dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2018, yang menjelaskan tentang prosedur pemberian hibah kepada pemerintah dan lembaga asing, yang kemudian diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2019, yang berfungsi sebagai kerangka hukum bagi pemberian hibah Pemerintah Indonesia di luar negeri. Sesuai dengan peraturan ini, dua Peraturan Menteri telah ditetapkan: Permenlu No.11 Tahun 2019, yang mengatur kebijakan pemberian hibah kepada pemerintah dan lembaga asing, dan Permenlu No.12 Tahun

---

<sup>7</sup> "United Nations Millennium Development Goals" (United Nations), accessed October 30, 2024, <https://www.un.org/millenniumgoals/>.

<sup>8</sup> "17 Sustainable Development Goals 17 Partnerships | Department of Economic and Social Affairs," accessed October 30, 2024, <https://sdgs.un.org/publications/17-sustainable-development-goals-17-partnerships-17979>.

2019, yang menjadikannya prosedur penilaian proposal hibah yang diajukan oleh pemerintah dan lembaga asing.<sup>9</sup> Pada tanggal 18 Oktober 2019, pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau dikenal dengan Badan Pembangunan Internasional Indonesia (Indonesian AID), sebagai momen penting untuk mencapai “diplomasi tangan di atas”. LDKPI merupakan bukti komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama global dan regional. Melalui LDKPI, pengelolaan dana bantuan hibah pemerintah asing/lembaga asing di Indonesia akan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.<sup>10</sup>

Maka pemerintah Indonesia mencoba untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan isu serta globalisasi yang terjadi di dunia melalui Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular dalam menghadapi kontempresasi dunia agar dapat bersaing di kancah global. Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular merupakan hal yang sangat unik untuk dapat dibahas, karena dalam kerjasama ini Indonesia menjadi sebuah negara *middle income* yang akan tetapi juga sebagai negara pendonor untuk dapat menjalankan kerjasama ini. Penulis mencoba untuk dapat menyajikan sebuah penelitian tentang bagaimana peranan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan pada era Kontemporer. Kerjasama yang

---

<sup>9</sup> Kementerian Luar Negeri RI, *Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024*, 42.

<sup>10</sup> “LDKPI,” Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional, accessed October 30, 2024, <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/page/sejarah-ldkpi>.

bersifat teknik sekaligus memecahkan isu kontemporer dalam negara selatan-selatan.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Perkembangan Hubungan Internasional Kontemporer**

Hubungan internasional kontemporer sering disebut sebagai hubungan internasional pada era globalisasi. Penggunaan kata globalisasi sudah sangat mendunia yang menggantikan diksi kata internasional, sehingga dalam hubungan internasional kontemporer ini sering menggunakan istilah-istilah diplomasi global, keuangan global, ekonomi global, dan politik global, semakin sering didengar daripada istilah ekonomi internasional, politik internasional dan lain-lain. Pada saat ini, hubungan internasional kontemporer sering diwarnai oleh banyak kehadiran *non state actor*. Dinamika internasional yang terlibat dalam *non state actor* ini diantaranya seperti individu, organisasi internasional, Perusahaan transnasional dan Non Government Organization (NGO). Kehadiran aktor-aktor lintas batas negara ini telah banyak memberikan perubahan pada aspek global, sehingga kajian yang ada ala hubungan internasional semakin meluas pada masalah seperti Gender, Lingkungan Hidup, Hak Asasi Manusia, perusahaan transnasional, keterbelakangan, interdependensi

perekonomian dan bahkan kesenjangan pada utara dan selatan.<sup>11</sup>

Dalam implementasi hubungan internasional kontemporer, interaksi antara *state actor*, ataupun *state actor* dengan *non state actor* terdiri dari Kerjasama (cooperation), pertentangan (conflict) dan persingan (cooperation).<sup>12</sup> Sebuah kompetisi antar negara sangat sering terjadi dan kemungkinan akan sulit untuk dapat dihindarkan dalam praktik hubungan internasional. kemudian yang menjadi sebuah permasalahannya adalah bagaimana untuk dapat mempertahankan eksistensi negara tersebut dan bagaimana untuk dapat memelihara, mempertahankan dan bekerjasama guna mencegah terjadinya konflik serta menjadikan sebuah kompetisi dan konflik tersebut menjadi sebuah Kerjasama yang adil dan memiliki keuntungan bagi seluruh pelaku. Pada era kontemporer ini, konflik yang terjadi pada hubungan internasional ini adalah terkait langkanya sumber daya alam seperti kelangkaan air, kelaparan, ketidakpercayaan, kemiskinan, permusushan dan egosentrisme dari masing-masing entitas yang saling berinteraksi. Tingginya angka pertumbuhan sebuah penduduk yang tidak seimbang dengan produksi makanan, ketersediaan air, dampak industrialisasi dan globalisasi serta liberalisasi perdagangan juga menjadi isu umum dalam hubungan internasional kontemporer ini. Dari perkembangan isu ini , maka berbagai

---

<sup>11</sup> Sefrani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 4.

<sup>12</sup> May Rudy, *Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah-Masalah Global* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 2.

pendekatan sebagai jalan dalam kerjasama internasional juga semakin berkembang. Yang berawal pada *hard diplomacy* menuju *soft diplomacy* hal ini menuntut untuk berbagai negara/kawasan untuk dapat berbuat kreatif guna memberikan dampak terbaik bagi para penduduknya yang dimana, hasil dari diplomasi ini dapat diterima oleh masyarakat internasional sebagai bentuk interaksi yang adil dan saling memberikan manfaat.

Indonesia sebagai salah satu aktor hubungan internasional yang juga terkena dampak dari globalisasi, maka harus dapat berperan dalam penyelesaian isu-isu global. Akan tetapi dalam permasalahan ini juga, Indonesia harus dapat mengutamakan *national interest* guna ketika berdiplomasi dan bekerjasama dengan negara lain dapat memberikan keuntungan yang adil. Kerjasama selatan-selatan merupakan salah satu andil besar Indonesia dalam menghadapi masalah global ini. Kolonialisme yang dilakukan pada perang dunia mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi negara-negara selatan yang salah satunya adalah Indonesia. Kerjasama ini didasari pada konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang samapai pada saat ini, Kerjasama selatan-selatan semakin berkembangn bahkan saat ini disebut sebagai Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangula dan menciptakan suatu kebersamaan pada negara-negara berkembang untuk dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai negara berkembang.

## 2. Sejarah Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular

Konsep Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular bukanlah suatu hal yang baru bagi Indonesia. Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular didasari pada Konferensi Asia-Afrika yang diselenggarakan pada tahun 1955 yang merupakan perjuangan anti kolonialisasi pada masa tersebut. Kerjasama ini sebagai bentuk wujud solidaritas negara-negara berkembang untuk dapat bekerjasama Teknik dan ekonomi.<sup>13</sup> Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular sebagai sebuah alternatif untuk dapat meredam dominasi negara-negara utara. Dengan Kerjasama yang didasari pada kegiatan berbagi pengalaman dan pertukaran keahlian teknologi. Program Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia telah dilaksanakan secara rutin sejak tahun 1980-an. Namun, dalam satu dekade terakhir, program ini mengalami perkembangan yang signifikan baik dari segi jumlah maupun jenis kegiatan yang diselenggarakan.

Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan pada tahun 1955 dinilai sebagai dasar kemunculan kesadaran kolektif akan solidaritas antar negara-negara selatan yang nantinya akan menjadi awal kemunculan Kerjasama Selatan-Selatan. Hasil dari Konferensi Asia Afrika lahirlah Dasasila Bandung yang menjadi dasar dalam perkembangan Kerjasama Selatan-Selatan dalam mewujudkan semangat solidaritas untuk mewujudkan kepentingan bersama dan Kerjasama yang

---

<sup>13</sup> "Indonesia.go.id - Bandung Spirit sebagai Memory of the World," accessed October 31, 2024, <https://indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/bandung-spirit-sebagai-memory-of-the-world>.

tertuang dalam poin ke 9 dalam Dasasila Bandung. Program Kerjasama selatan-selatan semakin memiliki perkembangan yang sangat pesat dan memiliki politik global yang kuat dengan terbentuknya Gerakan Non-Blok (1961), G77 (1964), Kelompok 15 (1989), Buenos Aires Plan of Action (BAPA),<sup>2</sup> Accra Agenda for Action (AAA), High Level Meeting on Aid Effectiveness di Busan, Korea Selatan, hingga South Summit di Kuba (2000).<sup>14</sup> Hal ini juga menjadikan kerjasama mendapat perhatian penting dari PBB dan menghasilkan sebuah resolusi PBB No. 58/220 tentang Pembentukan High Level Committee on South-South Cooperation, sebuah program Kerjasama yang berbentuk Teknik antar negara berkembang.<sup>15</sup> Kerjasama yang ditunjukkan untuk berbagi pengalaman serta pengetahuan dalam hal Pembangunan melalui berbagai kegiatan pertukaran ahli dan berbagai pelatihan.

Dalam perkembangan Kerjasama selatan-selatan ini, Indonesia melaksanakannya sesuai dengan UU No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Hal ini semakin diperkuat dengan pembentukan tim kordinasi Kerjasama selatan-selatan indoensia di tahun 2010 yang beranggotakan dari empat Kementerian Kementerian Luar Negeri (bidang kebijakan luar negeri dan diplomasi), Kementerian PPN/BAPPENAS (bidang kebijakan nasional, kerja sama pembangunan, dan penganggaran), Kementerian Sekretariat

---

<sup>14</sup> Kementerian Luar Negeri RI, *Perjalanan Satu Dekade KSS Indonesia: Kontribusi Bagi Tercapainya Pembangunan Berkelanjutan*, 2.

<sup>15</sup> "Indonesia.go.id - Bandung Spirit sebagai Memory of the World."

Negara (dukungan dan fasilitas), dan Kementerian Keuangan. Dengan adanya Tim Kornas KSS Indonesia, berbagai perbaikan secara Lembaga dilakukan oleh pemerintah sehingga pada tahun 2017, Kementerian Luar Negeri ditetapkan sebagai pemeran utama Tim Kornas. Langkah besar juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pembentukan sebuah Lembaga keuangan yang akan memenuhi pendanaan Kerjasama Selatan-Selatan ini adalah Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) tahun 2019. Lembaga ini berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 927/KMK.05/2019. Hal ini dibentuk untuk mengatur keuangan dalam menata program Kerjasama Pembangunan Indonesia. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 18 oktober 2019 pada tahun 2019 oleh presiden Jusuf Kalla sebagai bentuk diplomasi tangan di atas.<sup>16</sup>

### **3. Peran Indonesia Dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular**

Dalam perjalanan mengenai kerjasama selatan-selatan, sejak indonesia menjadi *Middle Income Country*, arah indonesia dalam berperan di kerjasama ini memiliki perubahan arah yang dulunya dari negara penerima dan sekarang menjadi salah satu negara "*new emerging donors*".<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> "LDKPI," Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional, accessed October 31, 2024, <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/post/diplomasi-tangan-di-atas-geoekonomi-indonesian-aid-dan-konsolidasi-ekonomi-nasional>.

<sup>17</sup> Leonard Felix Hutabarat and Angel Damayanti, "Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan," *Intermestic: Journal of*

Indonesia mencoba secara konsisten untuk dapat memberikan don or bantuan kepada negara-negara selatan dalam bantuan kerja teknik maupun hibah. Kegiatan ini ditunjukkan sebagai wujud dari diplomasi indonesia sebagai negara pendonor. Inisiasi ini didukung dengan pembentukan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau juga dikenal sebagai Indonesia Agency for International Development (Indonesian AID) pada tahun 2019.

Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular indonesia ini menjadi dasar dan sebuah strategi indonesia untuk dapat memberikan kontribusi dalam membuat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang kemudian mengalami perkembangan dan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs). Millenium Development Goals Tujuan Pembangunan Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (MDGs) memiliki 8 tujuan yang kemudian telah disetujui oleh Negara-negara Anggota PBB untuk dicapai pada tahun 2015. Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa, ditandatangani pada bulan September tahun 2000 yang mewajibkan para pemimpin dunia untuk memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, kerusakan lingkungan, dan diskriminasi terhadap perempuan. Setiap MDG memiliki target yang ditetapkan untuk tahun 2015 dan indikator untuk memantau kemajuan dari tingkat tahun 1990. Beberapa tujuan pembangunan ini di antaranya

---

*International Studies* 7, no. 2 (May 29, 2023): 436,  
<https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.3>.

berhubungan langsung dengan kesehatan.<sup>18</sup> Setelah adanya perkembangan selama 15 tahun, maka PBB melakukan pembaharuan terkait komitmen pembangunan berkelanjutan dengan disepakatinya Agenda 2030 for Sustainable Development sebagai hasil dari UN Sustainable Development Summit 2015. Dalam agenda sustainable development goals memiliki 17 program yang merupakan seruan mendesak bagi semua negara maju dan berkembang untuk bertindak dalam kemitraan global.<sup>19</sup> SDGs menajak seluruh dunia bahwa untuk dapat mengakhiri kemiskinan dan kekurangan lainnya harus berjalan seiring dengan strategi yang meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan, dan memacu pertumbuhan ekonomi dengan mengatasi perubahan iklim dan berupaya melestarikan lautan dan hutan di dunia.


Dalam menjalankan kemajuan pembangunan dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular pada isu kontemporer ini, SDGs dibangun dalam lima pilar yang diantaranya adalah:<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> "Millennium Development Goals (MDGs)," accessed October 31, 2024, [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-\(mdgs\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs)).

<sup>19</sup> "THE 17 GOALS | Sustainable Development," accessed November 1, 2024, <https://sdgs.un.org/goals>.

<sup>20</sup> Kementerian Luar Negeri RI, *Perjalanan Satu Dekade KSS Indonesia: Kontribusi Bagi Tercapainya Pembangunan Berkelanjutan*, 8.

5Ps	Goals	Sectors
People	     	Social
Prosperity	    	Economic
Planet	   	Environmental
Peace		Fostering Peace and Partnership
Partnership		

1. **People**, kategori ini menghimpun usaha yang dilaksanakan oleh negara-negara dalam menyelesaikan kemiskinan dan kelaparan. Pilar ini mencakup SDGs 1, 2, 3, 4 dan 5.
2. **Planet**, kategori ini mengupayakan segala cara untuk dapat melindungi bumi dari degradasi yang dimana kategori ini mencakup dari SDGs 6, 12, 13, 14 dan 15.
3. **Prosperity**, kategori ini merupakan cangkupan dari upaya dalam meningkatkan kesejahteraan yang terkait dalam usaha ekonomi, teknologi dan sosial. Pilar ini mencakup SDGs 7, 8, 9, 10 dan 11.
4. **Peace**, kategori ini menitikberatkan dalam usaha untuk menciptakan keadilan, perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk dapat terbebas dari kekerasan dan ketakutan. Pilar ini tertulis dalam SDGs 16.

5. **Partnership**, kategori ini menghimpun usaha dalam melaksanakan agenda pembangunan global yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang merupakan pilar dari SDGs 17.

Hal ini merupakan sejalan dengan tujuan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular. Penting untuk dapat memetakan program kerjasama ini. Indonesia dalam pemetaan SDGs ini menunjukkan peran aktif untuk dapat mencapai seluruh poin yang terdapat dalam sustainable development goals sekaligus sebagai bahan evaluasi program yang sudah terlaksana. Semangat solidaritas indonesia dan rasa tanggung jawab terhadap isu global kontemporer yang ada sebagai masyarakat internasional serta aksi amanah indonesia terhadap kosntitusi. Indonesia terbukti mampu dalam melaksanakan secara konsisten dan menampilkan peran aktifnya guna mewujudkan meajuan bersama menuju masyarakat internasional yang sejahtera, berkeadilan dan inklusif.

#### 4. **Strategi Pendekatan Kebijakan Luar Negeri Indonesia**

Dalam Rancangan Strategi Kementerian Luar Negeri Indonesia 2020-2024 dinyatakan bahwa visi yang akan dijalankan pada tahun ini adalah “Memimpin diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan

Gotong Royong”. Dalam menjalankan upaya pencapaian visi ini maka prioritas politik luar negeri menetapkan lima, enam sasaran strategis dan sepuluh arah kebijakan strategis, kerangka regulasi dan kerangka Lembaga Kementerian Luar Negeri untuk dapat mencapainya di tahun 2020-2024. Selain daripada itu, Kementerian luar negeri juga memiliki Prioritas Politik Luar Negeri untuk lima tahun mendatang yang dirangkum menjadi 4+1 yaitu Peningkatkan Kontribusi dan Kepemimpinan Indonesia di Kawasan dan Dunia, Diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan, Diplomasi Perlindungan, Penguatan Diplomasi Ekonomi, plus Penguatan Infrastruktur Diplomasi.<sup>21</sup> Dalam prioritas ini, Kerjasama Selatan-Selatan menjadi poin prioritas pada Peningkatkan Kontribusi dan Kepemimpinan Indonesia di Kawasan dan Dunia. Indonesia mencoba untuk dapat memiliki peranan lebih untuk meningkatkan Pembangunan di negara-negara selatan dengan memberikan bantuan teknis ataupun hibah dalam menangani permasalahan global di Kawasan tersebut. Dalam menjalankan misionis ini, Indonesia terus untuk dapat menjalankan haluan berdiplomasi dengan politik luar negeri bebas aktif. Dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dijelaskan bahwa Indonesia memegang prinsip “Bebas Aktif”.<sup>22</sup> Yang dimaksud prinsip bebas aktif ini, merujuk pada politik luar negeri yang pada dasarnya bukan untuk bersifat netral, tetapi prinsip ini

---

<sup>21</sup> Kementerian Luar Negeri RI, *Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024*, iv.

<sup>22</sup> Pemerintah Pusat, “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri,” 1999.

memiliki kebebasan dalam menentukan sikap dan kebijakan terhadap isu-isu internasional tanpa perlu untuk terikat pada satu kekuatan global tertentu. Selain itu, prinsip politik ini berperan secara aktif dengan memberikan kontribusi kepada global, baik melalui pemikiran maupun partisipasi langsung, dalam menyelesaikan konflik, perselisihan, dan masalah global lainnya untuk mewujudkan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam strategi pendekatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular ini, Indonesia menggunakan Teknik soft power. Isu hubungan internasional ini banyak mengandung unsur post positifisme, sehingga untuk dapat menyelesaikannya maka hal yang dilakukan dalam melakukan aksinya adalah menggunakan pendekatan soft power. Josep Nye menciptakan istilah “soft power” untuk menggambarkan kemampuan kemampuan suatu negara untuk menarik dan membujuk. Prinsi soft power muncul daridaya tarik budaya, cita-cita politik, dan kebijakan serta bertumpu pada kemampuan untuk membentuk preferensi orang lain.<sup>23</sup> Maka dengan memberikan beberapa bantuan hibah dan bantuan yang bersifat teknis pada negara-negara selatan alam konsep Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia mengaharpkan persnoalisasi Indonesia dapat ditemia dengan baik dan dapat mamailiki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi arah politik global di negara-negara selatn

---

<sup>23</sup> Joseph S. Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics* (New York: PublicAffairs, 2009), 5.

dan mereka mau untuk dapat bekerjasama dengan Indonesia dalam berbagai sektor.

Ketika soft power sudah berjalan dengan napa yang dimaksudkan oleh tujuan kebijakan luar negeri Indonesia, maka hal ini menjadi suatu hal yang dapat memberikan banyak manfaat untuk Indonesia guna memenuhi kepentingan nasional Indonesia yang memang harus dapat digerakan melalui kebijakan luar negeri Indonesia. Permainan politik luar negeri Indonesia dengan prinsip bebas aktif ini memiliki keuntungan yang signifikan bagi Indonesia. Dengan membantu dan bekerjasama berdasarkan landasan konsep kenegaraan Indonesia, maka ruang lingkup Indonesia dalam bermanufer semakin signifikan.

## **5. Dampak Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Bagi Indonesia dan Negara Mitra**

Kerjasama Selatan-Selatan memberikan dampak penting kepada Indonesia dan negara-negara mitranya melalui pembangunan ekonomi, penguatan pengaruh, citra internasional, dan dampak sosial budaya. Dari sisi pembangunan ekonomi, Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular memberikan kesempatan untuk tukar-menukar teknologi, meningkatkan kapasitas, dan akses pasar antar-negara berkembang yang meningkatkan daya saing ekonomi. Pelatihan teknis yang kegiatan yang dilakukan oleh Indonesia telah memperbaiki keterampilan tenaga kerja di negara-negara tersebut, dan dengan demikian mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.<sup>24</sup> Kerjasama Selatan-Selatan

---

<sup>24</sup> Naufal Dzikri, "Kontribusi Indonesia Dalam Hubungan South-South Cooperation Periode 2016-2018," *Indonesian Journal of International*

dan Triangular juga memainkan peran penting dalam meningkatkan pengaruh dan citra Indonesia di kancah internasional. Dengan memfasilitasi berbagai program pelatihan dan bantuan teknis, Indonesia dikenal sebagai negara yang berkomitmen terhadap prinsip-prinsip solidaritas di antara negara-negara berkembang dan telah menjadi kekuatan baru yang besar dalam organisasi dan lembaga internasional. Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular menyediakan platform bagi Indonesia untuk menggunakan “soft power” dalam diplomasi, yang secara tidak langsung memperluas pengaruhnya di tingkat global tanpa harus menggunakan kekuatan militer.

Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular memperkuat peran Indonesia di kancah internasional, baik dalam pengaruh politik maupun citra positifnya. Dengan partisipasi aktif Indonesia dalam program bantuan teknis, Indonesia memperlihatkan komitmen pada solidaritas global dan menunjukkan kepemimpinannya di antara negara-negara berkembang. Melalui Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, Indonesia menggambarkan dirinya sebagai negara yang peduli pada perkembangan negara lain, memperkuat *soft power* yang krusial dalam diplomasi global. Dampak Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular juga tercermin dalam aspek sosial dan budaya, terutama melalui pertukaran nilai dan budaya antar bangsa. Hal ini mendorong terciptanya pemahaman lintas budaya yang mempererat hubungan antara masyarakat Indonesia dan negara-negara

---

*Relations* 4, no. 2 (July 28, 2020): 74,  
<https://doi.org/10.32787/ijir.v4i2.133>.

mitra. Program pertukaran pelajar dan keahlian, misalnya, memungkinkan masyarakat untuk belajar dan mengaplikasikan nilai-nilai positif dari budaya lain, yang secara langsung memperkaya budaya lokal. Dengan demikian, Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular tidak hanya memberi dampak ekonomi dan politik, tetapi juga membangun kohesi sosial yang lebih luas, memperkuat hubungan budaya antara negara-negara berkembang, dan mendorong pemahaman bersama yang lebih dalam.

Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular juga memberikan dampak sangat penting bagi negara-negara mitra, terutama dalam pembangunan yang didalamnya terdapat hal kemajuan ekonomi, penguatan kapasitas, dan hubungan diplomatik. Dengan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, negara-negara mitra menerima berbagai pengetahuan, teknologi, dan dukungan teknis yang membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan adanya akses yang lebih mudah ke pelatihan serta teknologi yang relevan, tenaga kerja lokal dapat meningkatkan keterampilannya, mendukung perkembangan sektor strategis, seperti industri kecil dan menengah.<sup>25</sup> Selain manfaat ekonomi, Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular juga memperkuat kapasitas institusional di negara-negara mitra melalui program pelatihan dan pertukaran keahlian. Hal ini menjadi penting untuk membangun institusi yang mampu mengimplementasikan kebijakan pembangunan

---

<sup>25</sup> Center for East Asian Cooperation Studies, Bappenas, and JICA, *Studi Arah Kebijakan Indonesia Dalam Kerjasama Selatan-Selatan* (Jakarta: Japan International Cooperation Agency, 210AD), 145.

berkelanjutan. Di sisi lain, Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular membantu mempererat hubungan diplomatik dengan meningkatkan solidaritas serta posisi negara-negara mitra dalam forum internasional.<sup>26</sup> Lewat kerjasama ini, negara-negara mitra tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat posisinya di panggung global sebagai komunitas yang saling mendukung dan bekerjasama.

---

## Daftar Pustaka

- “17 Sustainable Development Goals 17 Partnerships | Department of Economic and Social Affairs.” Accessed October 30, 2024. <https://sdgs.un.org/publications/17-sustainable-development-goals-17-partnerships-17979>.
- Abdulgani, Roeslan. *The Bandung Connection: Konferensi Asia-Afrika Di Bandung Tahun 1955*. Bandung: MKAA-Dirjen Diplkik Kemenlu RI, 2015.
- “A/RES/58/220.” Accessed October 30, 2024. <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FR ES%2F58%2F220&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False>.
- Center for East Asian Cooperation Studies, Bappenas, and JICA. *Studi Arah Kebijakan Indonesia Dalam Kerjasama Selatan-Selatan*. Jakarta: Japan International Cooperation Agency, 210AD.

---

<sup>26</sup> Adirini Pujayanti, “Kerja Sama Selatan-Selatan dan Manfaatnya bagi Indonesia” 6, no. 1 (2015): 69.

- Dzikri, Naufal. "Kontribusi Indonesia Dalam Hubungan South-South Cooperation Periode 2016-2018." *Indonesian Journal of International Relations* 4, no. 2 (July 28, 2020): 164–86. <https://doi.org/10.32787/ijir.v4i2.133>.
- Hutabarat, Leonard Felix, and Angel Damayanti. "Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan." *Intermestic: Journal of International Studies* 7, no. 2 (May 29, 2023): 428. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.3>.
- "Indonesia.go.id - Bandung Spirit sebagai Memory of the World." Accessed October 31, 2024. <https://indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/bandung-spirit-sebagai-memory-of-the-world>.
- Kementerian Luar Negeri RI. *Perjalanan Satu Dekade KSS Indonesia: Kontribusi Bagi Tercapainya Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2023.
- Kementerian Luar Negeri RI. *Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024*. Jakarta, 2020.
- Kusumastuti, Adi, and Ahmad Mustamil. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno, 2019.
- Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional. "LDKPI." Accessed October 30, 2024. <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/page/sejarah-ldkpi>.
- Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional. "LDKPI." Accessed October 31, 2024.

<https://ldkpi.kemenkeu.go.id/post/diplomasi-tangan-di-atas-geoekonomi-indonesian-aid-dan-konsolidasi-ekonomi-nasional>.

“Millennium Development Goals (MDGs).” Accessed October 31, 2024. [https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/millennium-development-goals-\(mdgs\)](https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs)).

Nye, Joseph S. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: PublicAffairs, 2009.

Pangestu, Indah. “Keamanan Nasional Dalam Konteks Isu-Isu Global Kontemporer: Sebuah Tinjauan Hubungan Internasional.” *Jurnal Keamanan Nasional* 3, no. 1 (2017).

Pemerintah Pusat. “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri,” 1999.

“Peran Globalisasi Di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi Di Era Kontemporer.” *Jurnal Sospol* 3, no. 1 (2017).

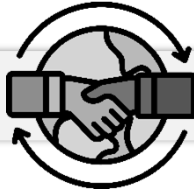
Pujayanti, Adirini. “Kerja Sama Selatan-Selatan dan Manfaatnya bagi Indonesia” 6, no. 1 (2015).

Rudy, May. *Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah-Masalah Global*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Sefrani. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

“THE 17 GOALS | Sustainable Development.” Accessed November 1, 2024. <https://sdgs.un.org/goals>.

“United Nations Millennium Development Goals.” United Nations. Accessed October 30, 2024. <https://www.un.org/millenniumgoals/>.



# BAB XI

## Indonesia Dalam Geopolitik Global: Tantangan dan Peluang di Era BRICS dan OECD

---

### A. Posisi Indonesia dalam Geopolitik Global

Indonesia memiliki posisi penting dalam geopolitik global berdasarkan letak geografisnya yang strategis terutama di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta antara benua Asia dan Australia.<sup>1</sup> Posisi ini sangat strategis dari sisi ekonomi, politik, dan militer. Indonesia juga memiliki sebagian besar jalur pelayaran

---

<sup>1</sup> Asep Kamaluddin Nashir, "Kepentingan dan Posisi Strategis Indonesia dalam Peta Geopolitik Indo-Pasifik," *Intermestic: Journal of International Studies* 8, no. 2 (May 31, 2024): 636–55, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v8n2.11>.

internasional di kawasan tersebut.<sup>2</sup> Indonesia juga menjadi negosiator hubungan yang rumit antar para aktor internasional yang penting seperti Tiongkok dan Amerika Serikat sebagai *middle power*. Seiring dengan upaya Indonesia untuk menyeimbangkan kepentingan nasional, stabilitas regional, dan kemajuan ekonomi dalam menghadapi ketegangan dan persaingan yang meningkat, peran ini menjadi semakin penting untuk menstabilkan posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Dengan terbentuknya aliansi seperti AUKUS (Australia, Inggris, dan Amerika Serikat), kawasan Indo-Pasifik telah muncul sebagai titik fokus persaingan geopolitik. Kekhawatiran akan perlombaan senjata dan meningkatnya ketegangan militer di Laut Cina Selatan muncul dari aliansi ini, yang dilihat sebagai respon terhadap kekuatan Cina yang semakin besar. Indonesia, yang mendukung postur non-blok dan mendorong keamanan kolektif di antara negara-negara ASEAN, telah menyuarakan keprihatinannya terhadap tren ini.<sup>3</sup>

Indonesia mengambil sikap proaktif dalam upaya diplomatiknya untuk mempromosikan komunikasi dan kolaborasi. Salah satu program penting yang menempatkan

---

<sup>2</sup> Bagus Wahyu Hutomo et al., “Kontribusi Indonesia Dalam Isu Kawasan Indo-Pasifik Melalui Kebijakan Global Maritime Fulcrum,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (June 30, 2023): 143–53, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4712>.

<sup>3</sup> Annisa Putri Nindya and Rifqy Alief Abiyaya, “Pengaruh AUKUS Terhadap Stabilitas Indo-Pasifik Dan Sikap Indonesia [The Influence of AUKUS to Indo-Pacific Regional Stability and Indonesia’s Stance],” *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 13, no. 1 (June 20, 2022): 67–84, <https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2917>.

ASEAN sebagai aktor utama dalam kontes geopolitik dan bukan sebagai aktor pendukung dalam konteks *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP). Dengan menggunakan kerangka kerja ini, Indonesia berharap dapat menjamin bahwa negara-negara di kawasan Indo-Pasifik dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah keamanan sembari memberikan prioritas utama pada pembangunan ekonomi. Sebagai bukti dedikasinya dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 semakin mengukuhkan posisinya sebagai mediator dan fasilitator pembicaraan.<sup>4</sup> Upaya ini ditunjukkan dengan baik oleh Forum ASEAN-Indo-Pasifik, yang telah menghasilkan berbagai perjanjian kerja sama senilai miliaran dolar dengan tujuan memperkuat ketahanan ekonomi regional.

Strategi geopolitik Indonesia erat kaitannya dengan perubahan ekonomi yang dialaminya. Indonesia bertujuan untuk meningkatkan daya saingnya melalui aliansi strategis seiring dengan pergerakan ekonomi dunia ke arah Asia, terutama karena hegemoni Tiongkok di bidang manufaktur. Indonesia telah memantapkan statusnya sebagai *middle power* yang dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi internasional yang besar dengan menjalin hubungan komersial yang luas dengan negara lain.<sup>5</sup> Selain itu,

---

<sup>4</sup> Muhammad E. Ekaputra, "Indonesia and ASEAN in the Vortex of the Indo-Pacific Geopolitical," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 4 (November 2021): 8988-94, <https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.2893>.

<sup>5</sup> Aidha Sahla Adiwidya, "Indonesia, India, dan Rusia Sepakat Seluruh Pihak Harus Menciptakan Keamanan dan Stabilitas Indo-Pasifik,"

partisipasi Indonesia dalam sejumlah perjanjian perdagangan regional menunjukkan dedikasi Indonesia dalam mengembangkan hubungan bisnis yang mendorong stabilitas regional dan pertumbuhan nasional. Strategi ini dilakukan untuk menarik investasi asing serta memastikan Indonesia memiliki suara yang signifikan dalam kawasan Indo-Pasifik khususnya bagi sektor ekonomi di masa depan. Terlepas dari itu, Indonesia masih memiliki banyak rintangan yang harus diatasi. Stabilitas regional terancam oleh interaksi konflik geopolitik, seperti persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Tindakan kolektif juga dapat terhambat oleh masalah internal seperti persatuan politik ASEAN dan ketidaksetaraan ekonomi.<sup>6</sup> Untuk mempertahankan kekuatan ekonomi dan memajukan iklim geopolitik yang stabil, Indonesia harus secara hati-hati menegosiasikan komplikasi-komplikasi ini.

Selain tambahan anggota baru seperti Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab, Indonesia baru-baru ini menunjukkan ketertarikan yang kuat untuk bergabung dengan kelompok BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Dalam KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, mengungkapkan tujuan ini dan menggarisbawahi bahwa

---

September 26, 2024,  
<https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/2342-indonesia-india-dan-rusia-sepakat-seluruh-pihak-harus-menciptakan-keamanan-dan-stabilitas-indo-pasifik>.

<sup>6</sup> Hari Mulyono, "Geostrategi Indonesia Dalam Dinamika Politik Global Dan Regional," *Jurnal Lemhannas RI* 5, no. 1 (2017): 19-30, <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/131>.

kebijakan luar negeri Indonesia yang independen dan tegas sejalan dengan keanggotaannya di masa depan.<sup>7</sup> Indonesia ingin mendukung reformasi multilateral dan pembangunan berkelanjutan serta berpartisipasi dalam forum-forum internasional tanpa berpihak pada salah satu kelompok.<sup>8</sup> Bersama dengan 12 negara lainnya, Indonesia saat ini diakui sebagai mitra dalam struktur BRICS. Status ini tidak memberikan hak keanggotaan penuh, namun memungkinkan partisipasi selektif dalam upaya BRICS. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi di antara negara-negara berkembang dan mengatasi tantangan-tantangan penting seperti ketahanan pangan, kemandirian energi, dan pengentasan kemiskinan, oleh karena itu Indonesia ingin bergabung dengan BRICS. Menurut pemerintah Indonesia, BRICS dapat membantu negara-negara di kawasan Selatan untuk bersatu dan bekerja sama dalam mengatasi isu-isu bersama.<sup>9</sup>

Satu isi berbeda dengan tujuan-tujuannya dengan BRICS, Indonesia terus memprioritaskan untuk memperkuat hubungannya dengan *Organization for Economic Co-*

<sup>7</sup> "BRICS: Apa itu BRICS dan mengapa Indonesia ingin bergabung di dalamnya?," BBC News Indonesia, October 28, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gpp3ke280o>.

<sup>8</sup> Revo M, "Mau Jadi Anggota BRICS, Indonesia Sumbang Rp21.000 Triliun," October 27, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241027150353-128-583388/mau-jadi-anggota-brics-indonesia-sumbang-rp21000-triliun>.

<sup>9</sup> Sebastian Strangio, "Indonesia to Push for Full BRICS Membership, New Foreign Minister Says," The Diplomat, October 25, 2024, <https://thediplomat.com/2024/10/indonesia-to-push-for-full-brics-membership-new-foreign-minister-says/>.

*operation and Development* (OECD). OECD adalah sebuah kelompok yang terdiri dari negara-negara industri yang mengadvokasi langkah-langkah untuk meningkatkan standar sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Pendekatan Indonesia untuk menyeimbangkan hubungan antara negara maju dan negara berkembang tercermin dalam keterlibatannya dengan OECD. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia bertujuan untuk memajukan agenda pembangunannya dengan memanfaatkan hubungannya dengan OECD. Hal ini termasuk mengambil bagian dalam diskusi mengenai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan, kebijakan ekonomi, dan praktik-praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan. Dengan berinteraksi dengan OECD dan BRICS, Indonesia berharap dapat membangun dirinya sebagai penghubung antara negara maju dan negara berkembang, mendorong komunikasi dan kolaborasi di berbagai arena geopolitik.<sup>10</sup>

## **B. Hubungan Indonesia dengan Negara-negara BRICS dan OECD**

Keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan bagian dari rencana besar untuk memperluas organisasi tersebut, yang telah dirumuskan pada KTT BRICS 2023 di Johannesburg.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Dimas Waraditya Nugraha, "Sampai di Mana Proses RI Gabung ke OECD dan BRICS?," Kompas.id, November 30, 2024, <https://www.kompas.id/artikel/sampai-di-mana-proses-ri-gabung-ke-oecd-dan-brics>.

<sup>11</sup> "Indonesia Gabung BRICS Dan Pentingnya Kolaborasi Dalam Bisnis | LBS Urun Dana," accessed February 6, 2025,

Bergabungnya Indonesia dengan BRICS disebut dapat memperkuat geopolitik dan memberikan peluang strategis, termasuk dalam isu geopolitik global.<sup>12</sup> Alasan masuknya Indonesia ke BRICS juga diakui sebagai upaya untuk menaikkan posisi tawar kepada dunia barat. Indonesia melihat BRICS sebagai forum penting dalam membahas isu-isu strategis seperti reformasi sistem pembayaran yang adil, ujung tombak dedolarisasi, dan reformasi tata kelola global.<sup>13</sup> Dengan bergabungnya ke BRICS, Indonesia berpotensi meningkatkan investasi asing, transfer teknologi, dan inovasi yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan industri dalam negeri.<sup>14</sup> Perdagangan dan investasi adalah dua cara utama Indonesia berinteraksi secara aktif dengan negara-negara BRICS. Bagi ekspor Indonesia, kelompok BRICS merupakan pasar yang penting. Keterlibatan Indonesia dalam sejumlah proyek terkait BRICS yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan aliran investasi semakin memperkuat hubungan ekonomi. Dimana perilaku pasar saham Indonesia berbeda dengan negara-negara BRICS

---

<https://www.lbs.id/publication/artikel/indonesia-resmi-gabung-brics-kerjasama-ekonomi-makin-kuat>.

<sup>12</sup> Setjen DPR RI, "RI Ingin Masuk BRICS, Legislator Yakin Bisa Perkuat Geopolitik Meski Harus Tetap Bebas Aktif," *Parlementaria Terkini - JDIH SETJEN DPR* (blog), October 29, 2024, <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/52137/t/javascript>.

<sup>13</sup> Kezia Dwina Nathania, "Dampak Diplomasi Hubungan Internasional RI Pasca Masuk Keanggotaan BRICS - Universitas Gadjah Mada," accessed February 6, 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/dampak-diplomasi-hubungan-internasional-ri-pasca-masuk-keanggotaan-brics/>.

<sup>14</sup> RI, "RI Ingin Masuk BRICS, Legislator Yakin Bisa Perkuat Geopolitik Meski Harus Tetap Bebas Aktif."

lainnya. Hubungan antara indeks output industri dan indeks pasar saham, misalnya, menunjukkan tingkat integrasi dan reaksi yang berbeda terhadap faktor-faktor makroekonomi di antara negara-negara BRICS pada masa stabilitas ekonomi atau krisis.<sup>15</sup>

Partisipasi Indonesia dalam BRICS juga mencakup faktor-faktor geopolitik. Sebagai negara berkembang dan anggota G-20, Indonesia bertujuan untuk menggunakan keanggotaannya di BRICS untuk meningkatkan reputasi dan pengaruhnya di dunia internasional. Keanggotaan BRICS juga memungkinkan Indonesia untuk menjaga keseimbangan di tengah ketegangan geopolitik global dan kompetisi ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok.<sup>16</sup> Hal ini mengukuhkan pandangan bahwa Indonesia ingin menjaga keseimbangan antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Dibalik keinginan tersebut, Indonesia juga memiliki peluang pasar berjumlah hingga 3 miliar jiwa dalam BRICS.<sup>17</sup> Indonesia juga dapat mengakses pendanaan untuk proyek infrastruktur strategis

---

<sup>15</sup> Yesim Helhel, "Financial Development and Economic Growth Relationship: An Analysis with Credit Based Financial Index," *Business and Economics Research Journal* 9, no. 4 (October 29, 2018): 761-71, <https://doi.org/10.20409/berj.2018.137>.

<sup>16</sup> RI, "RI Ingin Masuk BRICS, Legislator Yakin Bisa Perkuat Geopolitik Meski Harus Tetap Bebas Aktif."

<sup>17</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan RI, "Indonesia Bergabung Dengan BRICS, Apa Manfaat Serta Kerugiannya, Dan Bagaimana Strategi Pelaksanaannya?," February 4, 2025, <https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/02/04/indonesia-bergabung-dengan-brics-apa-manfaat-serta-kerugiannya-dan-bagaimana-strategi-pelaksanaannya.html>.

dengan keberadaan *New Development Bank* (NBD).<sup>18</sup> Hal tersebut juga menjadikan potensi pangsa pasar yang lebih luar untuk produk-produk utama Indonesia, seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga tekstil.

*Organisations for Economic Co-Operation and Development* (OECD) merupakan salah satu lembaga internasional yang memiliki peran penting dalam menetapkan standar kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Tingkat global. Meskipun Indonesia belum menjadi anggota resmi OECD, hubungan antara kedua pihak telah terjalin erat melalui kerja sama strategis yang mencakup berbagai sektor, seperti investasi perdagangan, tata Kelola pemerintahan, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan. Perdagangan, *foreign direct investment* (FDI), dan dinamika pertumbuhan ekonomi merupakan aspek-aspek interaksi Indonesia dengan negara-negara OECD. Perdagangan bilateral yang signifikan terjadi antara Indonesia dan OECD, terutama negara-negara G7. Arus perdagangan antara Indonesia dan negara-negara tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan per kapita, jumlah penduduk, serta jarak geografis, yang secara keseluruhan mencerminkan peran penting demografi dan ukuran ekonomi dalam menentukan hubungan perdagangan. Variabel-variabel tersebut menunjukkan bahwa demografi dan ukuran ekonomi merupakan faktor penentu penting dalam hubungan

---

<sup>18</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan RI.

perdagangan.<sup>19</sup> Salah satu bidang yang paling penting dalam hubungan antara Indonesia dan OECD adalah FDI. Menurut sebuah studi, Indonesia telah mengambil langkah yang berbeda dengan memberlakukan undang-undang yang dapat mendorong masuknya FDI, sementara negara-negara OECD sering kali membatasi FDI.<sup>20</sup> Di negara-negara OECD, dinamika ini digambarkan dengan hubungan berbentuk huruf U terbalik, di mana FDI pertama-tama dihambat oleh pembatasan yang lebih besar sebelum ambang batas tercapai.<sup>21</sup> Di sisi lain, meningkatnya arus masuk FDI telah dikaitkan dengan peraturan yang lebih ketat di Indonesia, yang menunjukkan adanya pendekatan yang berbeda untuk menarik modal internasional. Peraturan yang lebih ketat di Indonesia mencerminkan berbagai pembatasan dan regulasi yang diberlakukan pemerintah terhadap investasi asing. Salah satu bentuk utama regulasi tersebut adalah Daftar Negatif Investasi (DNI), yang membatasi atau bahkan melarang kepemilikan asing di sejumlah sektor strategis. Selain itu, terdapat batasan kepemilikan saham asing di sektor-sektor tertentu, seperti transportasi laut domestik dan jasa kurir, yang dibatasi maksimal sebesar 49%. Di samping

---

<sup>19</sup> Abshar Ramadhanny Subhan, Budi Santosa, and Soeharjoto Soeharjoto, "Bilateral Trade Flows Among G7 Member Countries and Indonesia: Gravity Model Approach," *Media Ekonomi* 29, no. 1 (October 19, 2021): 21–36, <https://doi.org/10.25105/me.v29i1.9108>.

<sup>20</sup> Muhammad Mudassar Naushahi et al., "Causes of Restrictiveness Policies on Foreign Direct Investment in OECD and Non-OECD Countries," *iRASD Journal of Economics* 6, no. 1 (March 21, 2024): 242–56, <https://doi.org/10.52131/joe.2024.0601.0205>.

<sup>21</sup> Naushahi et al.

itu, investor asing juga dihadapkan pada proses perizinan yang panjang dan birokratis, serta berbagai persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk dapat beroperasi di berbagai sektor ekonomi. Regulasi-regulasi ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga kepentingan nasional sekaligus menciptakan lingkungan investasi yang selektif.<sup>22</sup>

Keterkaitan Indonesia dengan negara-negara OECD juga tercermin dalam hubungan antara belanja untuk *Research & Development* (R&D) dan pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan potensi manfaat kerja sama R&D bagi inovasi dan pembangunan Indonesia, meskipun temuan empiris di negara-negara OECD menunjukkan bahwa belanja R&D dapat memberikan dampak yang beragam terhadap pertumbuhan. Peningkatan belanja *Research & Development* (R&D) memiliki hubungan yang kompleks dengan pertumbuhan ekonomi, dengan dinamika yang berbeda antara Indonesia dan negara-negara OECD. Negara-negara OECD, misalnya, mencatat rata-rata belanja R&D sebesar 2,4% dari PDB, dengan Korea Selatan mencapai 4% dan Jepang 3,4%.<sup>23</sup> Belanja tersebut terbukti berdampak signifikan, di mana setiap kenaikan 1% dalam investasi R&D dapat mendorong pertumbuhan PDB sebesar 0,61%. Sementara itu, Indonesia masih memiliki intensitas R&D yang rendah, yakni hanya 0,3% dari PDB pada

---

<sup>22</sup> Indonesia, Pemerintah Pusat, "PERPRES No. 49 Tahun 2021," accessed June 3, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/168534/perpres-no-49-tahun-2021>.

<sup>23</sup> John Wu, "Fueling Innovation: The Role of R&D in Economic Growth," December 7, 2015, <https://itif.org/publications/2015/12/07/fueling-innovation-role-rd-economic-growth/>.

tahun 2023—jauh di bawah rata-rata OECD.<sup>24</sup> Namun demikian, studi terbaru menunjukkan bahwa setiap peningkatan investasi R&D di Indonesia memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, yaitu sebesar 58% terhadap pertumbuhan ekonomi dan 62% terhadap daya saing industri.<sup>25</sup> Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan belanja R&D sebagai strategi untuk memperkuat pertumbuhan dan daya saing nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia dapat memperoleh manfaat dari lebih banyak kerja sama dalam proyek-proyek R&D untuk mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi, meskipun penelitian menunjukkan bahwa belanja R&D memiliki efek yang bertentangan terhadap pertumbuhan di negara-negara OECD.<sup>26</sup> Efek yang bertentangan tersebut bermaksud bahwa ubungan antara belanja Research & Development (R&D) dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara OECD bersifat beragam dan tidak selalu konsisten. Di satu sisi, peningkatan pengeluaran R&D mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi, produktivitas, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Namun, di sisi lain, tidak semua negara OECD mengalami dampak positif yang

---

<sup>24</sup> Loso Judijanto, "Impact of R&D Investment on Economic Growth and Industry Competitiveness in Indonesia," *West Science Accounting and Finance* 2, no. 03 (November 29, 2024): 544–51, <https://doi.org/10.58812/wsaf.v2i03.1433>.

<sup>25</sup> Judijanto.

<sup>26</sup> Amanah Abdulkadir, Wendra Afriana, and Harry Azis, "The Effects of R&D Expenditures on Economic Growth in OECD Countries," *Airlangga Journal of Innovation Management* 1, no. 2 (October 29, 2020): 175, <https://doi.org/10.20473/ajim.v1i2.21607>.

signifikan. Beberapa negara tidak menunjukkan hubungan kausal antara R&D dan pertumbuhan, akibat perbedaan kualitas institusi, kapasitas teknologi, dan struktur ekonomi.<sup>27</sup> Oleh karena itu, meskipun R&D berperan penting dalam mendorong pertumbuhan, efektivitasnya sangat bergantung pada konteks nasional dan kebijakan pendukung yang diterapkan.

Kerangka kerja sama ekonomi Indonesia dengan BRICS dan OECD dipengaruhi oleh peran strategis kedua kelompok tersebut dalam dinamika ekonomi global dan regional. Indonesia telah menjadi mitra strategis OECD sejak 2007 dan menandatangani Framework of Cooperation Agreement (FCA) pada 2012. Kerja sama ini terus diperkuat melalui Program Kerja Bersama (Joint Work Programme/JWP) yang saat ini memasuki periode keempat (2022-2025). Program ini mendukung reformasi kebijakan Indonesia sesuai prioritas nasional, termasuk tata kelola pemerintahan, kebijakan makroekonomi, kepatuhan pajak, iklim investasi, digitalisasi, sumber daya manusia, inklusi sosial, dan pembangunan berkelanjutan.<sup>28</sup> Indonesia sedang dalam

---

<sup>27</sup> Nimatush Sholikhah, Dyah Wulan Sari, and Lilik Sugiharti, "Pengeluaran Penelitian Dan Pengembangan (R&D) Dalam Model Pertumbuhan Endogen Di Negara Berkembang: Systematic Literature Review," *JURNAL EKONOMI PENDIDIKAN DAN KEWIRAUSAHAAN* 12, no. 1 (April 1, 2024): 147–64, <https://doi.org/10.26740/jepk.v12n1.p147-164>.

<sup>28</sup> Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, "Badan Kebijakan Fiskal - Indonesia Dan OECD Menguatkan Kerja Sama Untuk Ekonomi Yang Lebih Tangguh, Berkelanjutan, Dan Inklusif," July 14, 2022, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/07/14/4357-indonesia-dan-oecd-menguatkan-kerja-sama-untuk-ekonomi-yang-lebih-tangguh-berkelanjutan-dan-inklusif>.

proses akses menjadi anggota OECD, yang jika berhasil akan mempercepat integrasi ekonomi Indonesia dengan negara-negara maju, membuka akses pasar dan sumber daya keuangan internasional, serta mendorong investasi dan transfer teknologi. Namun, akses ini juga menuntut Indonesia menyesuaikan regulasi dan kebijakan agar sesuai dengan standar OECD, yang dapat berdampak pada sektor industri domestik seperti manufaktur.<sup>29</sup>

Indonesia resmi bergabung dengan BRICS pada Januari 2025, yang merupakan kelompok negara berkembang besar yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, serta beberapa anggota baru lainnya.<sup>30</sup> Bergabung dengan BRICS memungkinkan Indonesia mengakses pasar yang sangat besar, dengan total populasi lebih dari 3 miliar jiwa, termasuk pasar China dan India yang sangat potensial untuk ekspor produk utama Indonesia seperti minyak kelapa sawit, batu bara, tekstil, dan produk agrikultur.<sup>31</sup> Indonesia berpotensi mendapatkan akses pendanaan dari *New Development Bank* (NDB) milik BRICS untuk proyek-proyek infrastruktur strategis, yang dapat mempercepat

---

<sup>29</sup> INFID, "Bunga Rampai Mengkaji Akses Indonesia Menuju OECD Dalam Perspektif Masyarakat Sipil," July 2024, <https://infid.org/bunga-rampai-mengkaji-aksesi-indonesia-menuju-oecd-dalam-perspektif-masyarakat-sipil/>.

<sup>30</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan RI, "Indonesia Bergabung Dengan BRICS, Apa Manfaat Serta Kerugiannya, Dan Bagaimana Strategi Pelaksanaannya?"

<sup>31</sup> Muslim Muslim and Diah Permatasari, "Strategi Dan Peluang Indonesia Dalam Kerja Sama BRICS Untuk Memperkuat Keamanan Ekonomi Nasional," *Jurnal Keamanan Nasional* 10, no. 2 (December 31, 2024): 205–34, <https://doi.org/10.31599/s7aaj612>.

pembangunan nasional dan meningkatkan konektivitas ekonomi.<sup>32</sup>

## C. Tantangan yang Dihadapi Indonesia dalam Pusaran Geopolitik

### 1. Tantangan dan Kesenjangan Ekonomi

Negara-negara BRICS dan OECD menghadapi tantangan ekonomi, namun jalur pertumbuhan mereka berbeda secara signifikan. Ekonomi BRICS sering menunjukkan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi karena statusnya sebagai negara berkembang, namun juga menghadapi masalah struktural yang signifikan yang dapat menghambat pembangunan berkelanjutan.<sup>33</sup> Ekonomi BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, dan anggota baru yang baru saja bergabung, diperkirakan akan tumbuh dengan laju sekitar 3,4% pada tahun 2025, melampaui rata-rata global sebesar 2,8% dan jauh melampaui banyak negara OECD seperti Amerika Serikat, yang diperkirakan tumbuh sebesar 1,4% untuk tahun yang sama.<sup>34</sup> Di negara-negara OECD, ketimpangan ekonomi regional telah dianalisis secara

---

<sup>32</sup> Muslim and Permatasari.

<sup>33</sup> Xinxin Ma, Xiangyu Zong, and Ximing Chen, "Economic Fitness and Economy Growth Potentiality: Evidence from BRICS and OECD Countries," *Finance Research Letters* 50 (December 2022): 103235, <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103235>.

<sup>34</sup> Mayara Souto, "BRICS GDP Outperforms Global Average, Accounts for 40% of World Economy," BRICS Brazil 2025, May 2, 2025, <https://brics.br/en/news/brics-gdp-outperforms-global-average-accounts-for-40-of-world-economy>.

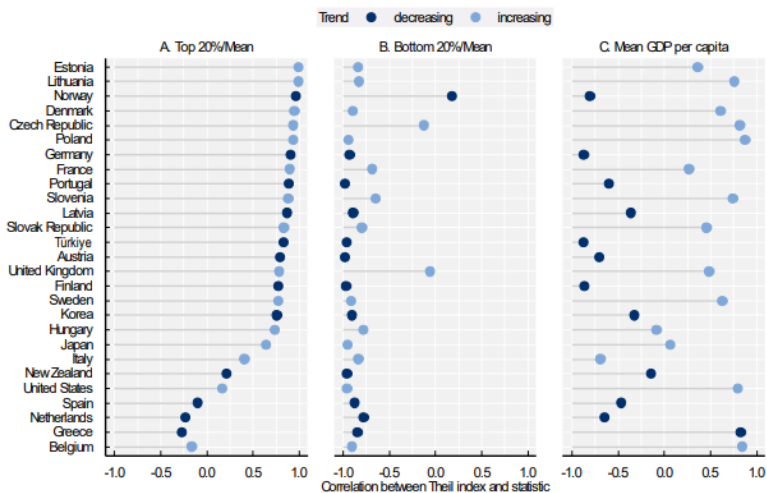
mendalam dan menunjukkan adanya tren konvergensi di sejumlah wilayah, di mana daerah-daerah yang tertinggal mulai mengejar ketertinggalannya. Namun, masih terdapat wilayah lain yang terus tertinggal. Kondisi ini berbeda dengan negara-negara BRICS, di mana ketimpangan regional cenderung lebih mencolok akibat pengaruh faktor historis, struktural, dan sosial-ekonomi yang lebih kompleks.<sup>35</sup> Selama dua dekade terakhir, tingkat PDB per kapita di antara negara-negara OECD secara umum menunjukkan tren konvergensi, terutama karena pertumbuhan yang lebih cepat terjadi di negara-negara berpendapatan lebih rendah dalam kelompok tersebut. Namun, di balik konvergensi di tingkat nasional, ketimpangan pendapatan rata-rata antarwilayah justru meningkat di lebih dari setengah dari 27 negara OECD. Artinya, meskipun negara-negara secara keseluruhan semakin setara, kesenjangan ekonomi di dalam masing-masing negara justru cenderung melebar.<sup>36</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>35</sup> OECD, *OECD Regions and Cities at a Glance 2020*, OECD Regions and Cities at a Glance (OECD, 2020), <https://doi.org/10.1787/959d5ba0-en>.

<sup>36</sup> OECD, *OECD Regional Outlook 2023: The Longstanding Geography of Inequalities*, OECD Regional Outlook (OECD, 2023), <https://doi.org/10.1787/92cd40a0-en>.



Sumber 1 <https://www.oecd.org/regional/regional-statistics/>

Ketimpangan pendapatan regional cenderung meningkat di banyak negara OECD dengan PDB per kapita di atas rata-rata, seperti Belgia, Denmark, Prancis, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat. Sebaliknya, sejumlah negara seperti Yunani, Spanyol, Portugal, Finlandia, Norwegia, Jerman, Belanda, dan Selandia Baru justru mengalami penurunan ketimpangan regional. Penurunan ini umumnya terjadi dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah atau berkat penerapan kebijakan regional yang lebih efektif dalam mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.<sup>37</sup>

## 2. Ketidakstabilan Politik dan Korupsi

Negara-negara OECD sering kali memiliki kondisi politik yang lebih stabil, meskipun volatilitas juga dapat terjadi di sana. Ketidakstabilan politik yang mencakup elemen-elemen

<sup>37</sup> OECD.

seperti pemerintahan yang korupsi juga secara serius menghambat kemajuan ekonomi di negara-negara ini.<sup>38</sup> Satu sisi dalam sistem politik negara-negara BRICS, korupsi sering kali sudah mendarah daging, sehingga menimbulkan iklim “*disseminated corruption*” di mana penyuapan diterima sebagai hal yang lumrah.<sup>39</sup> Kepercayaan publik terhadap pemerintah melemah karena kondisi ini, yang juga mempersulit penegakan hukum antikorupsi. Di Amerika Latin, yang memiliki hubungan erat dengan sejumlah negara BRICS, korupsi sistemik dapat membahayakan integritas dan akuntabilitas kelembagaan, seperti yang ditunjukkan oleh kasus Odebrecht.<sup>40</sup> Meskipun cenderung tidak terlalu parah, korupsi tetap menimbulkan masalah serius di negara-negara OECD.<sup>41</sup> OECD terus mendorong penerapan norma anti-korupsi yang kuat dan standar kepatuhan, dengan perusahaan-perusahaan semakin dievaluasi berdasarkan langkah-langkah anti-korupsi yang mereka terapkan,

---

<sup>38</sup> Alpaslan Akçoraoglu and Emin Ahmet Kaplan, “Political Instability, Corruption, and Economic Growth: Evidence from a Panel of OECD Countries,” *Business and Economics Research Journal* 8, no. 3 (August 10, 2017): 363–77, <https://doi.org/10.20409/berj.2017.55>.

<sup>39</sup> Maria Paula Bertran and Maria Virgínia Nabuco Do Amaral Mesquita Nasser, “Whistleblowing to a Latin Tune: The Adaptation Problems of the OECD/FCPA Paradigm in Environments with Disseminated Corruption through the Lenses of the Odebrecht Case in Latin America,” *Verfassung in Recht Und Übersee* 54, no. 2 (2021): 200–218, <https://doi.org/10.5771/0506-7286-2021-2-200>.

<sup>40</sup> Bertran and Nabuco Do Amaral Mesquita Nasser.

<sup>41</sup> Akçoraoglu and Kaplan, “Political Instability, Corruption, and Economic Growth.”

mencerminkan penekanan yang semakin besar pada integritas korporat dan transparansi.<sup>42</sup>

Forum Global Anti-Korupsi dan Integritas OECD 2025 diadakan untuk menekankan pentingnya memanfaatkan inovasi seperti *artificial intelligence* (AI), analisis data, dan forensik digital untuk mengganggu praktik korupsi dan memperkuat mekanisme penegakan hukum.<sup>43</sup> Hal ini mencerminkan pendekatan proaktif dalam memerangi korupsi melalui teknologi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk sektor swasta sebagai mitra kunci. Korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan biaya transaksi dan menurunkan efektivitas sektor publik. Korupsi sering kali melibatkan permintaan suap dan pembayaran khusus yang terkait dengan lisensi impor/ekspor, penilaian pajak, perlindungan polisi, atau pinjaman.<sup>44</sup> Praktik-praktik ini meningkatkan biaya berbisnis, menghambat investasi swasta, dan mengurangi keuntungan.<sup>45</sup> Dengan adanya korupsi, dapat mengurangi aliran investasi langsung asing (FDI) dengan mengurangi keuntungannya, karena investor asing lebih memilih lingkungan dengan risiko dan biaya transaksi yang lebih

---

<sup>42</sup> OECD, *Companies' Assessments of Anti-Corruption Compliance* (OECD Publishing, 2025), <https://doi.org/10.1787/977ed5a8-en>.

<sup>43</sup> Organisation for Economic and Co-operation and Development, "2025 OECD Global Anti-Corruption and Integrity Forum," OECD events, March 2025, <https://www.oecd-events.org/gacif/en>.

<sup>44</sup> Akçoraoglu and Kaplan, "Political Instability, Corruption, and Economic Growth."

<sup>45</sup> Akçoraoglu and Kaplan.

rendah.<sup>46</sup> Tidak hanya itu, korupsi melemahkan kemampuan negara untuk memungut pajak secara efektif, yang mengakibatkan penurunan pendapatan pemerintah.<sup>47</sup> Hal ini membatasi kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik esensial, seperti pendidikan dan kesehatan, yang sangat penting untuk pengembangan modal manusia dan pertumbuhan ekonomi. Tata kelola pemerintahan yang efektif sangat penting; birokrasi yang tidak efektif dapat memperburuk dampak buruk korupsi terhadap perekonomian.<sup>48</sup>

## **D. Peluang bagi Indonesia dalam Pusaran Geopolitik**

### **1. Potensi Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi negara-negara BRICS secara signifikan didorong oleh inovasi. Selain itu, dengan mempromosikan peningkatan teknologi dan meningkatkan produktivitas, kewirausahaan inovatif memberikan dampak yang baik pada pertumbuhan ekonomi.<sup>49</sup> Joseph Schumpeter dalam teori pembangunan ekonomi menyebutkan bahwa inovasi mendorong modernisasi dan industrialisasi, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas ekonomi dan

---

<sup>46</sup> Akçoraoglu and Kaplan.

<sup>47</sup> Akçoraoglu and Kaplan.

<sup>48</sup> Akçoraoglu and Kaplan.

<sup>49</sup> Na Wang, "Assessing the Role of Ecological Innovation and Economic Growth in Enhancing Educational Performance: Evidence of BRICS Countries," *Economic Research-Ekonomika Istraživanja* 36, no. 2 (July 10, 2023): 2169737, <https://doi.org/10.1080/1331677X.2023.2169737>.

mengubah proses pasar tradisional menjadi lebih maju.<sup>50</sup> Di negara-negara BRICS, inovasi ekologi dapat meningkatkan prestasi akademik dan mendukung pembangunan berkelanjutan.<sup>51</sup> Dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan, sektor-sektor ini dapat mengurangi ketidakpastian ekologis dan meningkatkan produktivitas, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi.<sup>52</sup> Hal ini menyiratkan bahwa melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan biaya lingkungan yang lebih rendah, memasukkan praktik-praktik ramah lingkungan ke dalam strategi ekonomi dapat mempercepat pertumbuhan.<sup>53</sup>

Satu sisi potensi pengembangan ekonomi OECD mungkin berbeda dengan BRICS, tren umum sering kali menyoroti pentingnya sumber daya manusia yang tinggi, supremasi hukum, dan stabilitas kelembagaan.<sup>54</sup> Kematangan ekonomi negara-negara OECD sering kali lebih tinggi dibandingkan

---

<sup>50</sup> Vincent Blok and Philosophy Documentation Center, "What Is Innovation?: Laying the Ground for a Philosophy of Innovation," *Techné: Research in Philosophy and Technology* 25, no. 1 (2021): 72–96, <https://doi.org/10.5840/techné2020109129>.

<sup>51</sup> Wang, "Assessing the Role of Ecological Innovation and Economic Growth in Enhancing Educational Performance."

<sup>52</sup> Shaker A. Zahra, "International Entrepreneurship in The Post Covid World," *Journal of World Business* 56, no. 1 (January 2021): 101143, <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2020.101143>.

<sup>53</sup> Wang, "Assessing the Role of Ecological Innovation and Economic Growth in Enhancing Educational Performance."

<sup>54</sup> Evgeny Sergeevich Streltsov et al., "The Economic Potential of The BRICS Countries as A Challenge to Modern World Realities," *Propósitos y Representaciones* 9, no. SPE3 (2021), <https://doi.org/10.20511/pyr2021.v9nSPE3.1143>.

dengan ekonomi pasar negara berkembang seperti BRICS.<sup>55</sup> Negara-negara OECD mengikuti Policy Framework yang telah teruji untuk Effective and Efficient Financial Regulation, yang memastikan bahwa intervensi dan regulasi pemerintah responsif terhadap perkembangan cepat sistem keuangan dan integrasi internasional.<sup>56</sup> Kerangka ini secara berkala dievaluasi (setiap 5 hingga 8 tahun) dan disesuaikan untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya. Mereka masih harus menghadapi isu-isu seperti populasi yang menua, mengurangi dampak perubahan iklim, dan tetap kompetitif dalam ekonomi yang terjalin secara global.<sup>57</sup>

OECD dan BRICS memiliki kontribusi unik terhadap dinamika ekonomi dunia. Negara-negara BRICS menggunakan sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang menguntungkan, dan populasi kelas menengah yang terus bertambah untuk keuntungan mereka di pasar global.<sup>58</sup> Di sisi lain, anggota OECD terus mendominasi karena teknologi mereka yang canggih, institusi yang kuat, dan jaringan perjanjian bilateral yang luas.<sup>59</sup> Bagi kedua kelompok ini, transisi yang berkelanjutan menuju digitalisasi dan solusi energi terbarukan

---

<sup>55</sup> Streltsov et al.

<sup>56</sup> OECD Legal Instruments, "Recommendation of the Council on a Policy Framework for Effective and Efficient Financial Regulation," November 26, 2009, <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0377>.

<sup>57</sup> Streltsov et al., "The Economic Potential of The BRICS Countries as A Challenge to Modern World Realities."

<sup>58</sup> Streltsov et al.

<sup>59</sup> Streltsov et al.

menghadirkan peluang dan tantangan. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam perekonomian berperan penting dalam proses ini, karena memungkinkan pergeseran dari ketergantungan pada sumber daya fisik menuju pemanfaatan sumber daya informasi. Dalam konteks ini, penting pula untuk memastikan bahwa layanan keuangan dapat diakses oleh individu serta usaha kecil dan menengah (UKM) yang terlibat dalam kegiatan konsumsi dan produksi hijau, agar transformasi menuju ekonomi digital dan berkelanjutan dapat berlangsung secara inklusif dan merata.<sup>60</sup> Mengadopsi teknologi mutakhir dapat memacu inovasi, tetapi mengelola transisi membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan pendidikan untuk meminimalkan gangguan yang mungkin terjadi.<sup>61</sup>

Dari aspek-aspek yang telah dijelaskan di atas, Indonesia dapat belajar dan berkolaborasi dalam ekosistem inovasi ini untuk mempercepat transformasi ekonominya menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi BRICS, terutama China dan India.<sup>62</sup> Seperti halnya AI yang

---

<sup>60</sup> Yuping Tang et al., "Examining the Potential Role of ICT Diffusion on Green Growth: Does Financial Development Matter in BRICS Economies?," *Environmental Science and Pollution Research* 30, no. 13 (December 30, 2022): 38582–91, <https://doi.org/10.1007/s11356-022-24894-6>.

<sup>61</sup> Tang et al.

<sup>62</sup> Durban University of Technology, South Africa, Department of Entrepreneurial Studies and Management and Gustave Mungeni Kankisingi, "A Trajectory of Innovation Outputs among the BRICS Countries: Critical Perspectives of Brazil, Russia, India, China, and South Africa," in *Brics and Economic Development: A Multidisciplinary*

berkembang di BRICS juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mengadopsi teknologi canggih yang dapat memperkuat sektor industri dan jasa.<sup>63</sup> Tidak hanya itu, keterbukaan perdagangan dan pembangunan infrastruktur fisik di BRICS menunjukkan bahwa diversifikasi pasar dan peningkatan konektivitas dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional dan FDI.<sup>64</sup>

## 2. Hubungan Budaya dan Diplomati dengan Negara-negara BRICS dan OECD

Salah satu peluang yang bisa didapatkan Indonesia dalam pusran geopolitik global dengan BRICS dan OECD berasal dari segi budaya. Membangun hubungan budaya dan kemanusiaan yang lebih kuat merupakan prioritas bagi negara-negara BRICS. Di bawah kepemimpinan Rusia, BRICS memberikan penekanan kuat pada kerja sama di tiga bidang utama pada tahun 2024: pertukaran budaya, ekonomi dan keuangan, serta politik dan keamanan. Menjelang KTT BRICS di Kazan, di mana anggota baru seperti Arab Saudi dan Mesir

---

*Perspective*, ed. University of Cape Town, Department of Chemical Engineering, Minerals to Metals Initiative and Byelongo Elisée Isheloke (IOR INTERNATIONAL PRESS, 2020), 14–30, <https://doi.org/10.34256/iorip20281>.

<sup>63</sup> A.B.M. Munibur Rahman et al., “The Influence of AI Innovation on Economic Performance: A Panel Data Analysis on BRICS Countries,” *ICEB 2024 Proceedings (Zhuhai, China)*, December 1, 2024, <https://aisel.aisnet.org/iceb2024/5>.

<sup>64</sup> Najabat Ali et al., “Does FDI Foster Technological Innovations? Empirical Evidence from BRICS Economies,” *PLOS ONE* 18, no. 3 (March 9, 2023): e0282498, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0282498>.

ikut serta secara penuh untuk pertama kalinya, kampanye ini terdiri dari hampir 250 kegiatan.<sup>65</sup> Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan di antara negara-negara anggota melalui diplomasi budaya.

Melibatkan diri dengan pasar-pasar baru dan memanfaatkan hal-hal yang berbau budaya untuk meningkatkan hubungan perdagangan merupakan komponen utama dari agenda ekonomi gabungan mereka. Sebagai contoh bagaimana media dapat melampaui batas-batas budaya, produksi media Brasil seperti serial “*Caminho das Indias*” telah memberikan kontribusi terhadap interaksi budaya antara Brasil dan India.<sup>66</sup> Negara-negara BRICS juga menggunakan sumber daya budaya mereka untuk mempengaruhi proses politik dan ekonomi di seluruh dunia. BRICS telah menjadi mitra pembangunan yang penting dengan secara signifikan meningkatkan keterlibatannya dengan negara-negara Afrika. Sejumlah besar arus masuk asing berasal dari investasi blok ini di Afrika, yang berpusat

---

<sup>65</sup> Siphamandla Zondi, “BRICS Policy Agenda, Partnership and Cooperation,” *Journal of BRICS Studies* 3, no. 1 (August 12, 2024): i–v, <https://doi.org/10.36615/191d9h79>.

<sup>66</sup> S. Rai and Joseph D. Straubhaar, “BRICS| Road to India—A Brazilian Love Story: BRICS, Migration, and Cultural Flows in Brazil’s *Caminho Das Indias*,” *International Journal of Communication*, June 28, 2016, <https://www.semanticscholar.org/paper/BRICS%7C-Road-to-India%E2%80%94A-Brazilian-Love-Story%3A-BRICS%2C-Rai-Straubhaar/eb25778c78c8fc7fb5f34c73047129f6459a1c04>.

pada pembagian sumber daya dan bantuan kemanusiaan.<sup>67</sup> Dalam konteks tersebut, mereka telah menjalin kemitraan seperti *BRICS Partnership on Land Restoration and the Global Alliance against Hunger and Poverty*, yang berfokus pada produktivitas pertanian berkelanjutan, konservasi tanah, dan pemberantasan kelaparan.<sup>68</sup> Strategi kekuatan lunak yang memprioritaskan hubungan budaya di samping kerja sama ekonomi menjadi ciri khas keterlibatan ini.<sup>69</sup>

Negara-negara OECD, berbeda dengan negara-negara BRICS, sering kali mengalami kesulitan dalam hal legislasi internal yang berdampak pada integrasi sosial. Masalah legislatif internal sering kali berpusat pada undang-undang yang membatasi akses ke pekerjaan bagi individu yang memiliki catatan kriminal.<sup>70</sup> Terdapat 38 negara OECD memiliki pembatasan ketenagakerjaan yang berbeda untuk orang-orang yang memiliki catatan kriminal.<sup>71</sup> Variasi lintas negara yang signifikan yang memengaruhi akses kelompok-

---

<sup>67</sup> Tatiana Deych, "BRICS as an Important Actor in Africa," *Insight on Africa* 7, no. 2 (July 2015): 169-85, <https://doi.org/10.1177/0975087815581459>.

<sup>68</sup> Maiva D'Auria, "BRICS Countries Approve Joint Declaration with Focus on Food Security," BRICS Brazil 2025, April 19, 2025, <https://brics.br/en/news/brics-countries-approve-joint-declaration-with-focus-on-food-security>.

<sup>69</sup> Deych, "BRICS as an Important Actor in Africa."

<sup>70</sup> Matthew Saleh et al., "'Civil Death' and Labor Market Alienation: Comparative Analysis of Legislation Limiting Access to Work for the Justice Impacted in OECD Countries," *SSRN Electronic Journal*, 2023, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4513000>.

<sup>71</sup> Saleh et al.

kelompok yang terpinggirkan ke pasar tenaga kerja terungkap melalui investigasi komparatif ini.<sup>72</sup> Di negara-negara industri ini, undang-undang tersebut merupakan cerminan dari sikap budaya yang lebih luas tentang kejahatan dan rehabilitasi.<sup>73</sup> Dalam upaya untuk mempromosikan kolaborasi global, negara-negara OECD juga mengambil bagian dalam sejumlah inisiatif pertukaran budaya. Program-program ini, yang memupuk pemahaman di antara negara-negara anggota, sering kali mencakup festival budaya, kolaborasi penelitian bersama, dan pertukaran pendidikan. Fokusnya adalah membina suasana inklusif yang menjunjung tinggi berbagai tradisi budaya dan meningkatkan hubungan diplomatik.

## **E. Peran Indonesia dalam BRICS dan OECD**

### **1. Status Keanggotaan dan Keterlibatan**

Indonesia secara aktif terlibat dalam proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi di antara negara-negara berkembang. Penggunaan *the G20/OECD Principles of Corporate Governance* secara agresif telah menuai pujian karena menunjukkan dedikasi Indonesia dalam meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan di sektor korporasi.<sup>74</sup> Melalui reformasi institusional dan perubahan

---

<sup>72</sup> Saleh et al.

<sup>73</sup> Saleh et al.

<sup>74</sup> Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Tatiana Lanshina, and Russian Academy of Sciences, "Implementing the G20/OECD Principles of Corporate Governance: What

hukum, Indonesia juga telah berpartisipasi dalam upaya *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) dari OECD, yang bertujuan untuk mencegah perusahaan-perusahaan multinasional menghindari pajak.<sup>75</sup> Bersama dengan negara-negara BRICS lainnya, Indonesia telah berpartisipasi dalam pembicaraan mengenai isu-isu lingkungan, terutama polusi dan pengelolaan sumber daya, serta pertumbuhan yang berkelanjutan.<sup>76</sup>

Satu sisi meskipun bukan anggota OECD, Indonesia telah menjalin kerja sama yang erat dengan OECD melalui berbagai forum, seperti *OECD Corporate Governance Committee*, *OECD-Asian Roundtable on Corporate Governance*, dan *Indonesia-OECD Policy Dialogue on Corporate Governance*.<sup>77</sup> Seperti halnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia telah berkomitmen untuk memperkuat praktik tata kelola

---

Is the Progress in BRICS and Indonesia?," *International Organisations Research Journal* 12, no. 3 (October 2017): 137-59, <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2017-03-137>.

<sup>75</sup> Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration and Andrey Shelepov, "Indonesia and the BRICS: Implementing the BEPS Action Plan," *International Organisations Research Journal* 12, no. 3 (October 2017): 114-36, <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2017-03-114>.

<sup>76</sup> Hasan Rüstemoğlu, "Growth with Environmental Pollution? A Comprehensive and Comparative Environmental Analysis for the BRICS, Mexico, Indonesia and Turkiye for the Period Between 1992-2020," *Energy Efficiency* 16, no. 8 (December 2023): 96, <https://doi.org/10.1007/s12053-023-10175-9>.

<sup>77</sup> OECD, *Corporate Governance Improving Corporate Governance in Indonesia Policy Options and Regulatory Strategies for Tackling Backdoor Listings* (Paris: OECD Publishing, 2016).

korporasi, termasuk menangani masalah seperti pencatatan saham secara tidak resmi melalui seminar teknis dan lokakarya yang didukung oleh keahlian OECD.<sup>78</sup> Sebagai anggota G20, Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan kepentingan negara-negara berkembang dalam kerangka kerja OECD, yang berperan sebagai penghubung antara negara maju dan negara berkembang.<sup>79</sup> Sebagai bagian dari upaya integrasi ke dalam sistem ekonomi global dan pemanfaatan kolaborasi dalam tata kelola internasional, Indonesia menargetkan untuk memperkuat partisipasinya dalam OECD sebagai langkah menuju keanggotaan penuh.

## **2. Kemitraan Perdagangan dan Ekonomi**

Partisipasi Indonesia di kawasan BRICS menawarkan sebuah forum untuk kerja sama ekonomi di antara pasar-pasar negara berkembang, dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan, investasi infrastruktur, dan fasilitasi perdagangan. Indonesia secara aktif terlibat dalam kerangka kerja OECD, khususnya dalam tata kelola perusahaan dan reformasi pajak seperti BEPS Action Plan, yang selaras dengan standar internasional dan meningkatkan kredibilitas

---

<sup>78</sup> OECD.

<sup>79</sup> Awidya Santikajaya, "Analyzing the Role of Non-BRICS Developing Countries in the G-20: A Case Study of Indonesia," 2015, <https://www.semanticscholar.org/paper/Analyzing-the-Role-of-Non-BRICS-Developing-in-the-A-Santikajaya/50ba82ea64115ede509dc8eb2f5cd379a8737387>.

Indonesia sebagai mitra dagang dalam BRICS.<sup>80</sup> Indonesia telah membuat kemajuan penting dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dibandingkan dengan negara-negara BRICS lainnya.<sup>81</sup> Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam menerapkan prinsip-prinsip utama yang terutama berkaitan dengan tata kelola korporasi sebagaimana diuraikan dalam kerangka kerja OECD dan G20/OECD.<sup>82</sup>

Sebagai calon anggota OECD, Indonesia telah berfokus untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik dari pedoman OECD, seperti *the G20/OECD Principles of Corporate Governance*. Komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam struktur tata kelola perusahaan ini dapat membuka peluang bagi Indonesia dalam hal perjanjian perdagangan dengan negara-negara maju.<sup>83</sup> Dengan mengikuti standar OECD, Indonesia dapat menarik investasi

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>80</sup> Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration and Shelepov, "Indonesia and the BRICS."

<sup>81</sup> Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Lanshina, and Russian Academy of Sciences, "Implementing the G20/OECD Principles of Corporate Governance."

<sup>82</sup> OECD, *Corporate Governance Improving Corporate Governance in Indonesia Policy Options and Regulatory Strategies for Tackling Backdoor Listings*.

<sup>83</sup> Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Lanshina, and Russian Academy of Sciences, "Implementing the G20/OECD Principles of Corporate Governance."

asing langsung (FDI) dan meningkatkan kemampuan ekspornya.<sup>84</sup>

## F. Kesimpulan

Indonesia, sebagai *middle power* di kawasan Indo-Pasifik, secara aktif terlibat dengan negara-negara BRICS dan OECD untuk mendorong kerja sama internasional. Strategi keterlibatan ganda ini bertujuan untuk menavigasi geopolitik global secara efektif, memastikan Indonesia tetap menjadi pemain kunci dalam kerangka kerja sama internasional yang sedang berkembang maupun yang sudah mapan. Hubungan Indonesia dengan negara-negara BRICS melibatkan interaksi yang kompleks, termasuk kerja sama ekonomi, integrasi keuangan, dan penyelarasan geopolitik strategis. Hubungan Indonesia dengan negara-negara OECD ditandai dengan interaksi perdagangan yang aktif, kebijakan FDI yang strategis, peluang kerja sama dalam penelitian dan pengembangan, peningkatan logistik untuk pertumbuhan ekonomi, dan reformasi perpajakan yang sedang berlangsung yang bertujuan untuk meningkatkan kesinambungan fiskal.

Indonesia berada pada posisi strategis dalam lanskap geopolitik global, dengan peluang besar sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam hubungannya dengan blok ekonomi seperti BRICS dan OECD. Di satu sisi, BRICS menawarkan potensi pertumbuhan yang tinggi, inovasi

---

<sup>84</sup> Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration and Shelepov, "Indonesia and the BRICS."

berbasis teknologi dan ekologi, serta keterlibatan aktif dalam pembangunan global, terutama di negara-negara berkembang. Namun, tantangan struktural seperti ketimpangan regional dan korupsi sistemik tetap menjadi perhatian. Di sisi lain, OECD mewakili stabilitas kelembagaan, tata kelola yang mapan, serta standar ekonomi dan keuangan yang tinggi, namun menghadapi masalah seperti populasi menua dan ketimpangan regional yang terus meningkat.

Bagi Indonesia, kerja sama dengan kedua blok tersebut membuka ruang untuk belajar dan beradaptasi, baik dari pendekatan inovatif BRICS dalam pertumbuhan berbasis teknologi ramah lingkungan maupun dari praktik tata kelola dan kebijakan fiskal OECD yang teruji. Indonesia juga menghadapi tantangan domestik, seperti meningkatkan transparansi, memperkuat kelembagaan, dan menyeimbangkan pembangunan antarwilayah. Dengan memperkuat peran aktifnya dalam forum-forum OECD dan kerja sama dengan negara-negara BRICS, Indonesia dapat mempercepat transformasi menuju ekonomi digital dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Keterlibatan Indonesia dalam BRICS dan OECD sangat penting bagi kemitraan perdagangan dan ekonominya. Dengan menyelaraskan diri dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi ini, Indonesia memperkuat posisinya sebagai pemain kunci di antara pasar-

pasar negara berkembang dan meningkatkan daya tariknya sebagai tujuan investasi asing.

---

## Daftar Pustaka

- Abdulkadir, Amanah, Wendra Afriana, and Harry Azis. "The Effects of R&D Expenditures on Economic Growth in OECD Countries." *Airlangga Journal of Innovation Management* 1, no. 2 (October 29, 2020): 175. <https://doi.org/10.20473/ajim.v1i2.21607>.
- Adiwiidya, Aidha Sahla. "Indonesia, India, dan Rusia Sepakat Seluruh Pihak Harus Menciptakan Keamanan dan Stabilitas Indo-Pasifik," September 26, 2024. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/2342-indonesia-india-dan-rusia-sepakat-seluruh-pihak-harus-menciptakan-keamanan-dan-stabilitas-indo-pasifik>.
- Akçoraoğlu, Alpaslan, and Emin Ahmet Kaplan. "Political Instability, Corruption, and Economic Growth: Evidence from a Panel of OECD Countries." *Business and Economics Research Journal* 8, no. 3 (August 10, 2017): 363–77. <https://doi.org/10.20409/berj.2017.55>.
- Ali, Najabat, Khamphe Phoungthong, Anwar Khan, Shah Abbas, Azer Dilanchiev, Shahbaz Tariq, and Muhammad Nauman Sadiq. "Does FDI Foster Technological Innovations? Empirical Evidence from BRICS Economies."

*PLOS ONE* 18, no. 3 (March 9, 2023): e0282498.  
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0282498>.

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. “Badan Kebijakan Fiskal - Indonesia Dan OECD Menguatkan Kerja Sama Untuk Ekonomi Yang Lebih Tangguh, Berkelanjutan, Dan Inklusif,” July 14, 2022.  
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/07/14/4357-indonesia-dan-oecd-menguatkan-kerja-sama-untuk-ekonomi-yang-lebih-tangguh-berkelanjutan-dan-inklusif>.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan RI. “Indonesia Bergabung Dengan BRICS, Apa Manfaat Serta Kerugiannya, Dan Bagaimana Strategi Pelaksanaannya?,” February 4, 2025.  
<https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/02/04/indonesia-bergabung-dengan-brics-apa-manfaat-serta-kerugiannya-dan-bagaimana-strategi-pelaksanaannya.html>.

BBC News Indonesia. “BRICS: Apa itu BRICS dan mengapa Indonesia ingin bergabung di dalamnya?,” October 28, 2024.  
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gpp3ke280o>.

Bertran, Maria Paula, and Maria Virgínia Nabuco Do Amaral Mesquita Nasser. “Whistleblowing to a Latin Tune: The Adaptation Problems of the OECD/FCPA Paradigm in Environments with Disseminated Corruption through the

Lenses of the Odebrecht Case in Latin America.” *Verfassung in Recht Und Übersee* 54, no. 2 (2021): 200–218. <https://doi.org/10.5771/0506-7286-2021-2-200>.

Blok, Vincent and Philosophy Documentation Center. “What Is Innovation?: Laying the Ground for a Philosophy of Innovation.” *Techné: Research in Philosophy and Technology* 25, no. 1 (2021): 72–96. <https://doi.org/10.5840/techne2020109129>.

Deych, Tatiana. “BRICS as an Important Actor in Africa.” *Insight on Africa* 7, no. 2 (July 2015): 169–85. <https://doi.org/10.1177/0975087815581459>.

Dimas Waraditya Nugraha. “Sampai di Mana Proses RI Gabung ke OECD dan BRICS?” *Kompas.id*, November 30, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/sampai-di-mana-proses-ri-gabung-ke-oecd-dan-brics>.

Durban University of Technology, South Africa, Department of Entrepreneurial Studies and Management, and Gustave Mungeni Kankisingi. “A Trajectory of Innovation Outputs among the BRICS Countries: Critical Perspectives of Brazil, Russia, India, China, and South Africa.” In *Brics and Economic Development: A Multidisciplinary Perspective*, edited by University of Cape Town, Department of Chemical Engineering, Minerals to Metals Initiative and Byelongo Elisée Isheloke, 14–30. IOR INTERNATIONAL PRESS, 2020. <https://doi.org/10.34256/iorip20281>.

Helhel, Yesim. “Financial Development and Economic Growth Relationship: An Analysis with Credit Based Financial

- Index." *Business and Economics Research Journal* 9, no. 4 (October 29, 2018): 761–71. <https://doi.org/10.20409/berj.2018.137>.
- Hutomo, Bagus Wahyu, Marsetio, Rudiyanto, Pujo Widodo, Herlina Juni Risma Saragih, and Panji Suwarno. "Kontribusi Indonesia Dalam Isu Kawasan Indo-Pasifik Melalui Kebijakan Global Maritime Fulcrum." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (June 30, 2023): 143–53. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4712>.
- "Indonesia Gabung BRICS Dan Pentingnya Kolaborasi Dalam Bisnis | LBS Urun Dana." Accessed February 6, 2025. <https://www.lbs.id/publication/artikel/indonesia-resmi-gabung-brics-kerjasama-ekonomi-makin-kuat>.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. PERPRES No. 49 Tahun 2021. Accessed June 3, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/168534/perpres-no-49-tahun-2021>.
- INFID. "Bunga Rampai Mengkaji Akses Indonesia Menuju OECD Dalam Perspektif Masyarakat Sipil," July 2024. <https://infid.org/bunga-rampai-mengkaji-aksesi-indonesia-menuju-oecd-dalam-perspektif-masyarakat-sipil/>.
- Judijanto, Loso. "Impact of R&D Investment on Economic Growth and Industry Competitiveness in Indonesia." *West Science Accounting and Finance* 2, no. 03 (November 29, 2024): 544–51. <https://doi.org/10.58812/wsaf.v2i03.1433>.

- Kezia Dwina Nathania. "Dampak Diplomasi Hubungan Internasional RI Pasca Masuk Keanggotaan BRICS - Universitas Gadjah Mada." Accessed February 6, 2025. <https://ugm.ac.id/id/berita/dampak-diplomasi-hubungan-internasional-ri-pasca-masuk-keanggotaan-brics/>.
- Ma, Xinxin, Xiangyu Zong, and Ximing Chen. "Economic Fitness and Economy Growth Potentiality: Evidence from BRICS and OECD Countries." *Finance Research Letters* 50 (December 2022): 103235. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103235>.
- Maiva D'Auria. "BRICS Countries Approve Joint Declaration with Focus on Food Security." BRICS Brazil 2025, April 19, 2025. <https://brics.br/en/news/brics-countries-approve-joint-declaration-with-focus-on-food-security>.
- Mayara Souto. "BRICS GDP Outperforms Global Average, Accounts for 40% of World Economy." BRICS Brazil 2025, May 2, 2025. <https://brics.br/en/news/brics-gdp-outperforms-global-average-accounts-for-40-of-world-economy>.
- Muhammad E. Ekaputra. "Indonesia and ASEAN in the Vortex of the Indo-Pacific Geopolitical." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 4 (November 2021): 8988-94. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.2893>.
- Mulyono, Hari. "Geostrategi Indonesia Dalam Dinamika Politik Global Dan Regional." *Jurnal Lemhannas RI* 5, no. 1

- (2017): 19–30.  
<https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/131>.
- Muslim, Muslim, and Diah Permatasari. “Strategi Dan Peluang Indonesia Dalam Kerja Sama BRICS Untuk Memperkuat Keamanan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Keamanan Nasional* 10, no. 2 (December 31, 2024): 205–34.  
<https://doi.org/10.31599/s7aaj612>.
- Nashir, Asep Kamaluddin. “Kepentingan dan Posisi Strategis Indonesia dalam Peta Geopolitik Indo-Pasifik.” *Intermestic: Journal of International Studies* 8, no. 2 (May 31, 2024): 636–55.  
<https://doi.org/10.24198/intermestic.v8n2.11>.
- Naushahi, Muhammad Mudassar, Asma Kanwal, Irem Batool, and Hafeez Ur Rehman. “Causes of Restrictiveness Policies on Foreign Direct Investment in OECD and Non-OECD Countries.” *iRASD Journal of Economics* 6, no. 1 (March 21, 2024): 242–56.  
<https://doi.org/10.52131/joe.2024.0601.0205>.
- Nindya, Annisa Putri, and Rifqy Alief Abiyya. “Pengaruh AUKUS Terhadap Stabilitas Indo-Pasifik Dan Sikap Indonesia [The Influence of AUKUS to Indo-Pacific Regional Stability and Indonesia’s Stance].” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 13, no. 1 (June 20, 2022): 67–84.  
<https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2917>.

- OECD. *Companies' Assessments of Anti-Corruption Compliance*. OECD Publishing, 2025. <https://doi.org/10.1787/977ed5a8-en>.
- . *Corporate Governance Improving Corporate Governance in Indonesia Policy Options and Regulatory Strategies for Tackling Backdoor Listings*. Paris: OECD Publishing, 2016.
- . *OECD Regional Outlook 2023: The Longstanding Geography of Inequalities*. OECD Regional Outlook. OECD, 2023. <https://doi.org/10.1787/92cd40a0-en>.
- . *OECD Regions and Cities at a Glance 2020*. OECD Regions and Cities at a Glance. OECD, 2020. <https://doi.org/10.1787/959d5ba0-en>.
- OECD Legal Instruments. "Recommendation of the Council on a Policy Framework for Effective and Efficient Financial Regulation," November 26, 2009. <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0377>.
- Organisation for Economic and Co-operation and Development. "2025 OECD Global Anti-Corruption and Integrity Forum." OECD events, March 2025. <https://www.oecd-events.org/gacif/en>.
- Rahman, A.B.M. Munibur, Arnab Paul, Zhan Zhan, and Mohammad Abir Shahid Chowdhury. "The Influence of AI Innovation on Economic Performance: A Panel Data Analysis on BRICS Countries." *ICEB 2024 Proceedings*

(Zhuhai, China), December 1, 2024.  
<https://aisel.aisnet.org/iceb2024/5>.

Rai, S., and Joseph D. Straubhaar. "BRICS| Road to India—A Brazilian Love Story: BRICS, Migration, and Cultural Flows in Brazil's Caminho Das Indias." *International Journal of Communication*, June 28, 2016.  
<https://www.semanticscholar.org/paper/BRICS%7C-Road-to-India%20%80%94A-Brazilian-Love-Story%3A-BRICS%2C-Rai-Straubhaar/eb25778c78c8fc7fb5f34c73047129f6459a1c04>.

Revo M. "Mau Jadi Anggota BRICS, Indonesia Sumbang Rp21.000 Triliun," October 27, 2024.  
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20241027150353-128-583388/mau-jadi-anggota-brics-indonesia-sumbang-rp21000-triliun>.

RI, Setjen DPR. "RI Ingin Masuk BRICS, Legislator Yakin Bisa Perkuat Geopolitik Meski Harus Tetap Bebas Aktif." *Parlementaria Terkini - JDIH SETJEN DPR* (blog), October 29, 2024.  
<https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/52137/t/javascript>.

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Tatiana Lanshina, and Russian Academy of Sciences. "Implementing the G20/OECD Principles of Corporate Governance: What Is the Progress in BRICS and Indonesia?" *International Organisations*

- Research Journal* 12, no. 3 (October 2017): 137–59.  
<https://doi.org/10.17323/1996-7845-2017-03-137>.
- Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, and Andrey Shelepov. “Indonesia and the BRICS: Implementing the BEPS Action Plan.” *International Organisations Research Journal* 12, no. 3 (October 2017): 114–36.  
<https://doi.org/10.17323/1996-7845-2017-03-114>.
- Rüstemoğlu, Hasan. “Growth with Environmental Pollution? A Comprehensive and Comparative Environmental Analysis for the BRICS, Mexico, Indonesia and Turkiye for the Period Between 1992–2020.” *Energy Efficiency* 16, no. 8 (December 2023): 96.  
<https://doi.org/10.1007/s12053-023-10175-9>.
- Saleh, Matthew, Timothy McNutt, Jodi Anderson Jr., Ethan Mulroy, Samantha Na, and Sarina Zhou. “‘Civil Death’ and Labor Market Alienation: Comparative Analysis of Legislation Limiting Access to Work for the Justice Impacted in OECD Countries.” *SSRN Electronic Journal*, 2023. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4513000>.
- Santikajaya, Awidya. “Analyzing the Role of Non-BRICS Developing Countries in the G-20: A Case Study of Indonesia,” 2015.  
<https://www.semanticscholar.org/paper/Analyzing-the-Role-of-Non-BRICS-Developing-in-the-A-Santikajaya/50ba82ea64115ede509dc8eb2f5cd379a8737387>.

- Sebastian Strangio. "Indonesia to Push for Full BRICS Membership, New Foreign Minister Says." *The Diplomat*, October 25, 2024. <https://thediplomat.com/2024/10/indonesia-to-push-for-full-brics-membership-new-foreign-minister-says/>.
- Sholikhah, Nimatush, Dyah Wulan Sari, and Lilik Sugiharti. "Pengeluaran Penelitian Dan Pengembangan (R&D) Dalam Model Pertumbuhan Endogen Di Negara Berkembang: Systematic Literature Review." *JURNAL EKONOMI PENDIDIKAN DAN KEWIRUSAHAAN* 12, no. 1 (April 1, 2024): 147–64. <https://doi.org/10.26740/jepk.v12n1.p147-164>.
- Streltsov, Evgeny Sergeevich, Aleksandr Aleksandrovich Rozhin, Sh. S. Vosiev, and Sergey Nikolaevich Kosnikov. "The Economic Potential of The BRICS Countries as A Challenge to Modern World Realities." *Propósitos y Representaciones* 9, no. SPE3 (2021). <https://doi.org/10.20511/pyr2021.v9nSPE3.1143>.
- Subhan, Abshar Ramadhanny, Budi Santosa, and Soeharjoto Soeharjoto. "Bilateral Trade Flows Among G7 Member Countries and Indonesia: Gravity Model Approach." *Media Ekonomi* 29, no. 1 (October 19, 2021): 21–36. <https://doi.org/10.25105/me.v29i1.9108>.
- Tang, Yuping, Wanling Chen, Shaoming Chen, and Muhammad Tayyab Sohail. "Examining the Potential Role of ICT Diffusion on Green Growth: Does Financial Development Matter in BRICS Economies?" *Environmental Science and*

*Pollution Research* 30, no. 13 (December 30, 2022): 38582-91. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-24894-6>.

Wang, Na. "Assessing the Role of Ecological Innovation and Economic Growth in Enhancing Educational Performance: Evidence of BRICS Countries." *Economic Research-Ekonomika Istraživanja* 36, no. 2 (July 10, 2023): 2169737. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2023.2169737>.

Wu, John. "Fueling Innovation: The Role of R&D in Economic Growth," December 7, 2015. <https://itif.org/publications/2015/12/07/fueling-innovation-role-rd-economic-growth/>.

Zahra, Shaker A. "International Entrepreneurship in The Post Covid World." *Journal of World Business* 56, no. 1 (January 2021): 101143. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2020.101143>.

Zondi, Siphamandla. "BRICS Policy Agenda, Partnership and Cooperation." *Journal of BRICS Studies* 3, no. 1 (August 12, 2024): i-v. <https://doi.org/10.36615/191d9h79>.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# **KEBIJAKAN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DI ERA KONTEMPORER: KONSEP DAN STUDI KASUS**

# BAB XII

## Kerja Sama Internasional Indonesia dan ASEAN dalam Mengatasi *Transboundary Haze Pollution*: Studi Kasus Kebakaran Hutan di Riau 1997

---

### A. Permasalahan Kabut Asap Lintas Batas

Hutan merupakan salah satu aset yang tidak banyak dimiliki oleh negara lain. Indonesia memiliki hutan yang luasnya membentang dari Sabang sampai Merauke, menjadi lambang kekayaan Indonesia. Sehingga hal tersebut menjadikan Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia.<sup>343</sup> Menurut KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) berdasarkan data dari buku statistik pada 2023, luas hutan di Indonesia meliputi daratan seluas 125,76 juta hektar atau 62,97% dari total luas daratan di Indonesia.<sup>344</sup> Jumlah luas hutan di Indonesia tersebut tentunya telah mengalami

---

<sup>343</sup> Syefira Citra, "My Baby Tree", WWF Indonesia, diakses di [https://www.wwf.or.id/cara\\_anda\\_membantu/bertindak\\_sekarang\\_juga/mybabytree/](https://www.wwf.or.id/cara_anda_membantu/bertindak_sekarang_juga/mybabytree/) diakses pada tanggal 10 Oktober 2024)

<sup>344</sup> Tasya, "Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ungkap Rumitnya Masalah Hutan Indonesia", dalam berita fakultas di UGM (<https://ugm.ac.id/id/berita/kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-ungkap-rumitnya-masalah-hutan-indonesia/>)

penurunan sejak beberapa dekade terakhir, di mana hutan-hutan banyak dieksploitasi dan pembukaan lahan sehingga mengakibatkan berkurangnya kawasan hutan. Hutan merupakan penyumbang 30% oksigen di muka bumi, apabila luas hutan menurun akibat deforestasi, tutupan hutan menipis makan serapan karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dan produksi oksigen akan terhambat.<sup>345</sup> Sedangkan kawasan industri juga tidak pernah berhenti untuk memproduksi CO<sub>2</sub> yang dapat meningkatkan emisi karbon. Kondisi tersebut jika terus dibiarkan akan mengakibatkan celah atmosfer yang berpotensi mengundang ancaman bencana yang lebih besar ke depannya. Pada kenyataannya, setiap tahun terdapat 1,1 juta hektar atau setara dengan 2% hutan di Indonesia menyusut akibat dari kebakaran hutan seperti yang dilaporkan oleh KLHK yang kemudian menimbulkan bencana kabut asap menjadi permasalahan bagi negara.<sup>346</sup> Terdapat empat alasan utama mengapa kabut asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan menjadi isu mendesak bagi suatu negara. Pertama, kebakaran hutan dapat menyebabkan negara mengalami kerugian ekologi seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan habitat bagi flora dan fauna yang tinggal di dalamnya.<sup>347</sup> Kemudian yang kedua, kabut asap membawa ancaman kesehatan bagi masyarakat dikarenakan

---

<sup>345</sup> Ibid

<sup>346</sup> Samsuari, "Kehutanan Indonesia", WWF Indonesia, diakses di [https://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/upaya\\_kami/forest\\_spesies/tentang\\_forest\\_spesies/kehutanan/](https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/) (diakses pada 10 Oktober 2024)

<sup>347</sup> Anonim, "Krisis Kebakaran dan Asap Indonesia", World Bank News, [www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/indonesias-fire-and-haze-crisis](http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/indonesias-fire-and-haze-crisis) (diakses pada 10 Oktober 2024)

senyawa karbon dalam asap yang berbahaya bagi pernapasan. Ketiga, kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan pariwisata. Terakhir, kabut asap yang sifatnya lintas batas negara dapat mengancam hubungan diplomatik antar negara.<sup>348</sup> Negara sebagai pengelola sumber daya alam dituntut untuk menjaga hutan mereka agar tidak terjadi fenomena seperti kebakaran hutan.

Indonesia menjadi salah satu negara yang sempat dikecam oleh anggota ASEAN karena dinilai tidak komperen dalam menjaga kawasan hutannya, sehingga sering kali terjadi kebakaran hutan dan lahan. Apabila diruntut, kebakaran hutan di Indonesia pertama kali terjadi pada 1980-an yang disebabkan oleh fenomena iklim el-nino disertai dengan pengelolaan hutan yang tidak kompeten oleh pemerintah Indonesia. Kemudian pada 1982 kebakaran hutan kembali terjadi di Kalimantan Timur, di mana sekitar 210.000 km<sup>2</sup> hutan yang terbakar dan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Indonesia dan negara tetangga yang terkena dampaknya, yaitu Malaysia.<sup>349</sup> Kebakaran terjadi kembali pada tahun 1997 dengan skala yang lebih besar, yaitu berhasil membakar seluas 10 juta hektar hutan yang berada di kawasan Kalimantan, Sumatera,

---

<sup>348</sup> Tim Forsyth, "Public Concerns about Transboundary Haze : a Comparison of Indonesia, Singapore, and Malaysia". Global Environmental Change, 2014. Halaman 76

<sup>349</sup> Syamsul Maarif, "Menuju Indonesia bebas Asap", 2008, diakses dari <http://www.setneg.go.id> Website Resmi Sekretarian Indonesia diakses pada tanggal 10 Oktober 2024

Jawa, Sulawesi, dan juga Papua. Kebakaran tersebut kerugiannya diperkirakan mencapai 5,96 triliun rupiah.<sup>350</sup> Kebakaran tersebut tidak hanya merugikan Indonesia, namun juga bagi negara tetangga, khususnya Singapura dan Malaysia yang terkena dampak dari kabut asap kebakaran ini. Diketahui bahwa Malaysia mengalami kerugian pada sektor wisata sekitar 300 juta USD dan Singapura yang mengalami kerugian pada sektor yang sama sebesar 60 juta USD.<sup>351</sup> Kerugian yang dialami oleh Malaysia dan Singapura disebabkan oleh kabut asap yang menyelimuti negara mereka sehingga transportasi darat dan udara di negara tersebut terganggu dan aktivitas pariwisata pun terkendala. Bahkan setelah itu pun kebakaran hutan di Indonesia masih kembali terjadi pada tahun 1999, 2002, 2004, 2006, dan 2010.<sup>352</sup> Kemudian pada Juni 2013, kebakaran hutan kembali terjadi dan menimbulkan fenomena krisis asap di kawasan Asia Tenggara. Koordinat api kebakaran ditemukan di kawasan hutan Kalimantan dan Sumatra, di mana kabut asap yang ditimbulkan melintasi batas negara hingga ke Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Banyaknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di Indonesia

---

<sup>350</sup> David Glover, Timothy Jessup, ed, "Indonesia Fires and Haze", The Cost Of Catastrophe( Singapore, Institute Of Southeast Asian Studies, 2006). Halaman 8

<sup>351</sup> Euston Quah, "Transboundary Pollution in Southeast Asia : The Indonesian Fires", World Development, Vol 30, No 3, 2002, [http://dx.doi.org/10.1016/S305-750X\(01\)00122-X](http://dx.doi.org/10.1016/S305-750X(01)00122-X)

<sup>352</sup> A.K.J Tan, "The Haze Crisis in Southeast Asia: Assessing Singapore's Transboundary Haze Pollution Act", National University Of Singapore Working Paper, 2015

tidak hanya berdampak serius bagi lingkungan dan masyarakat lokal, namun juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu kontributor utama kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Di mana 70% kabut asap yang terjadi di Asia Tenggara berasal dari kebakaran hutan di Indonesia.<sup>353</sup> Kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran tersebut terbawa angin hingga ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, sehingga menimbulkan krisis polusi udara regional yang berulang hampir disetiap tahunnya.

BBC melaporkan bahwa pada 21 Juni 2013, Singapura mengalami rekor tertinggi Indeks Polutan atau *Pollution Standard Index (PSI)* udara sebesar 401 yang disebabkan oleh kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia.<sup>354</sup> Rekor tersebut merupakan angka tertinggi melebihi polusi udara akibat kebakaran hutan Indonesia pada 1997. Sementara di Malaysia pada 23 Juni 2013, *Air Pollution Index* Muar, Johor juga melaporkan bahwa polusi udara yang disebabkan kabut asap akibat kebakaran hutan Indonesia kali ini mencapai indeks 746 atau 2,5 kali lebih tinggi di atas indeks minimum tingkat bahaya yang menyebabkan pemerintahan Malaysia

---

<sup>353</sup> Sidiq Ahmadi, "Prinsip Non-Interference Asean dan Problem Efektivitas Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution", Jurnal Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah, Vol 1, No 2, 2012

<sup>354</sup> BBC News Indonesia, "Kabut asap di Singapura 'mengancam jiwa'", [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/06/130621\\_singapura\\_haze](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/06/130621_singapura_haze)

merilis deklarasi keadaan darurat.<sup>355</sup> Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang menyebabkan kabut asap lintas negara inilah yang kemudian menjadi isu lingkungan mendesak yang harus diatasi tidak hanya oleh Indonesia, namun juga oleh negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian dalam menanggapi permasalahan tersebut, negara-negara anggota ASEAN melakukan beberapa kali pertemuan untuk merancang sebuah upaya dan mencari jalan keluar dari permasalahan kabut asap lintas batas ini. Hingga pada 10 Juni 2002, negara anggota ASEAN berhasil menyepakati sebuah perjanjian sebagai bentuk upaya penanganan kasus pencemaran udara berupa kabut asap lintas batas secara bersama-sama, yaitu ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution atau AATHP yang diberlakukan pada 2003.<sup>356</sup> Perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi, mengawasi, serta mencegah terjadinya polusi udara yang disebabkan oleh asap yang melintasi batas negara. AATHP ditandatangani pada 10 Juni 2002 di Malaysia.<sup>357</sup> AATHP dibentuk sebagai bentuk upaya penanganan dan pencegahan oleh ASEAN dalam kasus kabut asap yang mengancam negara anggota. Di mana dengan

---

<sup>355</sup> Ibid, Sidiq Ahmadi, "Prinsip Non-Interference Asean dan Problem Efektivitas Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution", Jurnal Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah, Vol 1, No 2, 2012

<sup>356</sup> Nazia Nazeer, "Overview of ASEAN Environment, Transboundary Haze Pollution Agreement and Public Health", International Journal Of Asia Pacific Studies, Vol 13, No 1, 2017. Halaman 76

<sup>357</sup> Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen luar Negeri RI, "Peningkatan Kerjasama ASEAN di Bidang Pertukaran Informasi dalam upaya Penanggulangan Masalah Kabut Asap," Jakarta: Deplu, 2004. Halaman 3

adanya perjanjian ini, negara anggota ASEAN berharap akan permasalahan polusi udara lintas negara dapat berkurang, dicegah, dan bahkan diakhiri.<sup>358</sup> Setelah peresmiannya pada 2003, beberapa negara anggota ASEAN langsung meratifikasi, seperti Malaysia, Singapura, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Laos, Thailand, dan Kamboja. Namun Indonesia sebagai penyebab utama kabut asap lintas batas dan terbesar di kawasan menjadi negara terakhir yang meratifikasi perjanjian tersebut.<sup>359</sup>

Berangkat dari hal tersebut, negara anggota ASEAN sepakat untuk menjalin kerja sama regional yang terbungkus dalam AATHP atau *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* untuk mengatasi masalah kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan hutan. AATHP diadopsi sebagai bentuk respons terhadap tantangan serius yang dialami oleh negara-negara di ASEAN, terutama negara dengan wilayah yang berpotensi besar mengalami kebakaran, khususnya Indonesia. Melalui perjanjian ini, negara anggota ASEAN berkomitmen untuk mencegah, mengendalikan, dan menangani kabut asap lintas batas, serta meningkatkan kapasitas dan pertukaran informasi terkait praktik

---

<sup>358</sup> ASEAN Agreement on transboundary Haze Pollution. ([http://www.aseansec.org/pdf/agr\\_haze.pdf](http://www.aseansec.org/pdf/agr_haze.pdf)) diakses pada tanggal 11 Oktober 2024)

<sup>359</sup> Januar Aden Nugroho, "Analisis Perubahan Kebijakan Indonesia Terhadap Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution", *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 4, 2018, Halaman 693-702

pengelolaan lahan yang berkelanjutan.<sup>360</sup> Dalam kerangka kerja sama, AATHP menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip solidaritas dan tanggung jawab bersama. Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai implementasi AATHP, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang diambil oleh negara anggota ASEAN dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi generasi mendatang.

## **B. Dinamika Kerja Sama Internasional dalam Mengatasi *Transboundary Haze Pollution* karena Kebakaran Hutan di Indonesia**

Dalam beberapa dekade terakhir, isu lingkungan semakin meluas dan serius. Permasalahan tersebut tidak terbatas hanya pada tingkat lokal atau translokal, namun nasional, regional, transnasional, hingga bahkan global. Kebakaran hutan merupakan isu lingkungan dan ekonomi yang menarik perhatian internasional, khususnya setelah bencana El Nino pada 1997-1998 yang berhasil menghanguskan lahan hutan

---

<sup>360</sup> Gheana, "PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA DALAM MENANGANI PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS DITINJAU DARI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP): INDONESIA'S RESPONSIBILITY IN MANAGING CROSS-BORDER SMOKE POLLUTION REVIEW FROM ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP)". LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Vol. 2 No. 2 (April 2023). Halaman 170-188.

seluas 25 juta hektar di seluruh dunia.<sup>361</sup> Kebakaran hutan dianggap sebagai ancaman potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena dampaknya secara langsung terhadap ekosistem dan peningkatan emisi karbon, serta bagi keanekaragaman flora dan fauna. Di Asia Tenggara, keprihatinan terkait dampak kebakaran hutan cukup signifikan, yang ditunjukkan dengan dibentuknya perjanjian bagi negara anggota ASEAN terkait pencemaran kabut asap yang lintas batas. Pada era globalisasi ini membuat banyak negara maju semakin terdorong untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dengan paham kapitalisme yang dimiliki sehingga menimbulkan dampak pada kerugian yang harus diterima oleh negara lain. Kebakaran hutan merupakan salah satu prioritas yang dinyatakan oleh Departemen Kehutanan Indonesia dan aksinya untuk menangani masalah ini dimasukkan ke dalam dokumen komitmen kepada negara donor yang terhimpun dalam *Consultative Group on Indonesia* (CGI).<sup>362</sup>

### **1. Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau, Indonesia pada 1997/98**

Di dalam hutan mengandung kumpulan plasma nutfah, pepohonan, dan juga aneka ragam tanaman yang terdapat di berbagai daerah, tumbuh dengan bunga yang beragam

---

<sup>361</sup> Rowell, A. dan Moore, P.F., "Global Review of Forest Fires", WWF; IUCN, Gland, 2001.

<sup>362</sup> Luca Tacconi, "Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya, dan Implikasi Kebijakan", Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia, 2003. Halaman 11

bentuk dan warna, di mana habitasi tersebut memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup planet ini. Hutan berfungsi sebagai pelindung untuk pengaturan tata air, mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor, memelihara kesuburan tanah, serta mengeluarkan oksigen yang baik untuk dihirup oleh manusia. <sup>363</sup>Indonesia sendiri memiliki hutan yang sangat luas sehingga dijuluki sebagai paru-paru dunia. Namun hal tersebut tidaklah bertahan lama sampai Indonesia mengalami tragedi kebakaran hutan terparah sepanjang sejarahnya. Indonesia mengalami permasalahan yang cukup serius terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin meningkat. Isu lingkungan hidup menjadi tanggung jawab besar karena menyangkut kualitas kehidupan di generasi yang akan datang. Indonesia yang kaya akan pepohonan dan hutan yang luas ini harus menghadapi maraknya kerusakan alam yang terjadi di mana-mana, baik ulah alam maupun manusia. Kerusakan alam seperti ekosistem lautan, rusaknya sebagian besar hutan yang menjadi paru-paru dunia, banjir, longsor, dan bencana lainnya. Salah satu dampak yang sering dirasakan adalah kebakaran hutan, di mana permasalahan kebakaran hutan ini hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan.<sup>364</sup> Penyebab utama kebakaran hutan dan lahan adalah penggunaan api atau persiapan lahan yang melalui proses

---

<sup>363</sup> PUSAT KRISIS KESEHATAN Kemenkes RI, "Fungsi Hutan Sebagai Pencegah Banjir", <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/fungsi-hutan-sebagai-pencegah-banjir>

<sup>364</sup> Badan Pusat Statistik, "Statistik Lingkungan Hidup Indonesia", Badan Pusat Statistik, Indonesia: 2018. Halaman 3

pembakaran.<sup>365</sup> Dampak negatif yang dihasilkan dari kebakaran hutan adalah asap tebalnya yang menyebabkan kualitas udara menurun, sehingga mengganggu beberapa kegiatan masyarakat, seperti transportasi dan kesehatan.

Pada tahun 1997, Indonesia mengalami kebakaran hutan paling parah di seluruh dunia. Citra situasi kota yang diselimuti kabut, hutan dan lahan yang terbakar, dan orangutan yang menderita terpampang di halaman utama berbagai koran dan televisi sehingga menarik perhatian khalayak umum. Kejadian ini dinyatakan sebagai salah satu bencana lingkungan terburuk sepanjang abad karena dampaknya bagi hutan dan jumlah emisi karbon yang diakibatkannya sangat besar.<sup>366</sup> Kebakaran pada tahun 1997/98 tersebut disebabkan oleh fenomena El Nino yang memicu gelombang kebakaran hutan berskala besar dan berhasil menghancurkan sekitar 5 juta hektar hutan tropis. Kebakaran tersebut terjadi di hutan gambut yang kaya akan karbon. Karbon dioksida berjumlah besar dilepaskan ke atmosfer beserta asap dan kabut yang menyelimuti wilayah sekitarnya.<sup>367</sup> Sekitar 40 persen luas daratan di Provinsi Riau

---

<sup>365</sup> Rosalina Kumalawati, "PENYEBAB KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT DI KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN". Prosiding Seminar Nasional diselenggarakan Pendidikan Geografi FKIP UMP "Manajemen Bencana di Era Revolusi Industri 5.0" (Agustus 2019)

<sup>366</sup> Glover, D. dan Jessup, T. eds. "The Indonesian Fires and Haze Of 1997: The Economic Toll", Dalam: P. Eaton dan M. Radojevic eds. *Forest Fires and Regional Haze in Southeast Asia*, Halaman 227-236

<sup>367</sup> Akhyari Hananto, "El Nino Datang, Indonesia Berisiko Alami Kebakaran Hutan Hebat", diakses pada

9,4 juta hektar diantaranya merupakan lahan gambut dan sebagiannya lagi merupakan lahan yang dipengaruhi oleh pasang surut.<sup>368</sup> Setiap kali musim kemarau, Provinsi Riau hampir selalu mengalami kebakaran hutan dan lahan. Meskipun kebakaran tersebut terus berulang dari tahun ke tahun, intensitas dan luas wilayah yang terbakar tidak pernah seburuk bencana kebakaran besar yang terjadi pada 1997-1998. Pada saat itu, kebakaran hutan mencapai skala yang sangat masif dan menimbulkan dampak lingkungan, kesehatan, serta ekonomi yang luar biasa, baik di tingkat nasional maupun regional. Sejak saat itu, meskipun kebakaran masih terjadi, upaya pencegahan dan penanganan telah mengalami berbagai peningkatan.<sup>369</sup> Terbatasnya lahan kering di Provinsi Riau disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan dan kegiatan transmigrasi, sehingga menyebabkan para investor perkebunan mulai mengarah ke lahan basah atau lahan yang bergambut. Kebakaran yang terjadi pada September 1997 hingga Mei 1998 tersebut berhasil membakar luasan area yang mencapai 51.255 hektar yang terdiri dari HPH 6.737 hektar, HPHTI 4.953 hektar, perkebunan 28.133 hektar, dan penggunaan lain 11.431 hektar.<sup>370</sup> Akibat adanya kebakaran pada tahun 1997 Indonesia menghasilkan emisi CO<sub>2</sub> sebesar 0.81-2.5 Giga Ton.

---

<https://www.mongabay.co.id/2015/07/06/el-nino-datang-indonesia-berisiko-alami-kebakaran-hutan-hebat/> (14 Oktober 2024)

<sup>368</sup> Afid Nurkholis, dkk, "Analisis Temporal Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 1997 dan 2015(Studi Kasus Provinsi Riau)", 16 Juni 2016. <http://doi.org/10.17605/OSF.IO/CMZUF>

<sup>369</sup> Ibid, halaman 6

<sup>370</sup> Ibid

Di mana nilai tersebut mendekati 13-40% total emisi CO<sub>2</sub> per tahun di dunia. Kebakaran 1997/98 di Provinsi Riau sendiri merupakan kebakaran hutan gambut yang berkontribusi terhadap pencemaran kabut asap terbesar dan mungkin menghasilkan 60-90% emisi yang menyebabkan kabut asap dan merupakan sumber utama emisi karbon.<sup>371</sup> Kabut asap tersebut menyebar hingga ke Singapura dan daratan utama Malaysia. Merujuk pada data Center for International Forestry Research (CIFOR), kabut asap lintas batas tersebut diprediksi merugikan perekonomian negara anggota ASEAN sebesar 10 miliar USD.

Permasalahan kabut asap lintas batas menimbulkan dampak yang mempengaruhi segi perekonomian, transportasi, pariwisata, kesehatan, dan juga stabilitas. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Provinsi Riau pada 1997/98 tersebut mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang diakibatkan oleh jarak penglihatan yang pendek karena tebalnya kabut asap. Fenomena tersebut juga memberikan dampak terhadap stabilitas regional di Asia Tenggara. Di mana Singapura dan Malaysia merupakan dua negara yang sering kali merasakan dampak dari kebakaran di Indonesia, sehingga kedua negara tersebut melayangkan protes terhadap pemerintah Indonesia selaku negara penyebab dari kasus kebakaran ini di berbagai macam forum di tingkat ASEAN, baik secara surat menyurat

---

<sup>371</sup> Luca Tacconi, "Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya, dan Implikasi Kebijakan", Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia, 2003. Halaman 11

maupun melakukan unjuk rasa di depan kantor Konsulat Jenderal dan Kedutaan Besar Republik Indonesia.<sup>372</sup>

## **2. Kerja Sama Regional: ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)**

Pada 1985, ASEAN untuk pertama kalinya menunjukkan fokusnya terhadap polusi kabut asap lintas batas dengan mengadopsi Perjanjian Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam terkait polusi udara dan efek lingkungan yang melintasi batas negara. Kemudian perjanjian kembali disusun merujuk ke Perjanjian Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam, seperti Kuala Lumpur *Accord of Environment and Development* pada 1990.<sup>373</sup> Selanjutnya diadakan *first workshop* yang membahas terkait *Transboundary Pollution and Haze* di negara anggota ASEAN, diadakan di Balikpapan pada Setpember 1992. Dalam *workshop* tersebut, secara eksplisit membahas terkait kabut asap sebagai isu utamanya. Kemudian diadakan Pertemuan Tingkat Menteri Informal ASEAN terkait lingkungan di Kuching, Sarawak pada 1994 yang menjadi tanda dimulainya upaya yang lebih oleh negara anggota ASEAN untuk menangani kabut asap yang terus-menerus. Dalam pertemuan tersebut, para meteri sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam pengelolaan sumber daya alam dan mengendalikan polusi udara lintas batas di

---

<sup>372</sup> Muhammad Suryadi, "Upaya Penanganan Kejahatan Lingkungan Pembakaran Hutan dan Lahan Gambut di Sumatera 2004-2015", *Journal of International Relations UNIDIP* Vol. 3 No. 2, 2017

<sup>373</sup> Ligar Yogaswara, "ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: Effective?", *Jurnal Hubungan Internasional Tahun XIV*, No. 1, Januari - Juni 2021. Halaman 178

kawasan ASEAN, mengembangkan sistem peringatan dan respon dini, dan meningkatkan kapasitas negara anggota ASEAN di berbagai bidang tersebut.<sup>374</sup>

Pada 2001, disusunlah sebuah perjanjian “*ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*” (AATHP) sebagai pengikat untuk mendukung terlaksananya *Regional Haze Action Plan*.<sup>375</sup> AATHP ditandatangani oleh 10 negara anggota ASEAN pada 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia. *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* atau AATHP ini memiliki syarat bahwa kekuatan mengikat bagi negara anggota untuk wajib mematuhi aturan dan ditegakkan dengan persetujuan. Ratifikasi terdiri dari penekanan kembali bahwa negara yang terikat oleh perjanjian internasional menyatakan bahwa mereka terikat oleh peraturan yang telah ditentukan. Ratifikasi merupakan bentuk persetujuan parlemen terhadap perjanjian internasional, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan perjanjian hukum internasional.<sup>376</sup> Proses ratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* ini memakan waktu cukup

---

<sup>374</sup> Yahaya, N., “Transboundary Air Pollution: Haze Pollution in Southeast Asia and its Significance”, *Journal of Diplomacy and Foreign Relations*, 2(2), 2000. Halaman 41-50

<sup>375</sup> Ibid, Ligar Yogaswara, “ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: Effective?”, *Jurnal Hubungan Internasional Tahun XIV*, No. 1, Januari - Juni 2021. Halaman 180

<sup>376</sup> Ditjen Migas, “Mengenal Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional” (2019), <https://migas.esdm.go.id/post/read/mengenal-proses-ratifikasi-perjanjianinternasional> (diakses pada 19 Oktober 2024)

lama, di mana Malaysia merupakan satu-satunya negara yang meratifikasi AATHP di tahun yang sama, yaitu pada 2 Desember 2002. Kemudian disusul oleh Singapura Pada 13 Januari 2003. Selanjutnya Brunei Darussalam mengikuti dan menyetujui kesepakatan pada 27 Februari 2003 dan Myanmar, Vietnam, serta Thailand di tahun yang sama. Selanjutnya, negara anggota ASEAN yang lain juga turut meratifikasi AATHP, seperti Laos pada 2004, Kamboja di tahun 2006, dan Filipina di 2010.<sup>377</sup> Sedangkan Indonesia sebagai negara yang paling besar kontribusinya terhadap kabut asap di Asia Tenggara membutuhkan waktu 12 tahun untuk meratifikasi AATHP, yaitu pada 2014. Indonesia sendiri menjadi negara anggota ASEAN terakhir yang meratifikasi AATHP, sehingga bersifat komplementer karena semua negara anggota ASEAN telah lebih dulu meratifikasi perjanjian tersebut.<sup>378</sup> AATHP mulai diberlakukan pada 25 November 2003, tepatnya 2 bulan setelah 6 negara menyepakati dan menyerahkan surat persetujuan kepada Sekretariat ASEAN.<sup>379</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>377</sup> Jones, D. S, "ASEAN and Transboundary Haze Pollution in Southeast Asia", *Asia Europe Journal*, 4(3), 2006.

<sup>378</sup> Banako, Markus Binse, "Perjanjian AATHP (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) Dalam Menanggapi Isu Kabut Asap Lintas Batas di Asia Tenggara Pasca Indonesia Meratifikasi Perjanjian Tahun 2014". Sarjana thesis, Universitas Brawijaya (2017)

<sup>379</sup> Febriana, Bella Rizki, "Proses Ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution oleh Indonesia tahun 2014". Malang, 2017. <http://eprints.umm.ac.id/37680/3/jiptummpp-gdl-bellariski-51372-3-babii.pdf>

Sempat menjadi pertanyaan besar, alasan dibalik mengapa Indonesia membutuhkan waktu kurang lebih 12 tahun untuk meratifikasi AATHP, padahal Indonesia merupakan negara dengan penyumbang kabut asap terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal otoritas, pemegang hak tertinggi dalam mengesahkan sebuah perjanjian internasional menjadi Rancangan Undang-Undang merupakan hak DPR RI, di mana, DPR RI memiliki peran penting dalam pengesahan ratifikasi perjanjian AATHP. Telah diatur dalam UU No. 37 (6) tahun 1999<sup>380</sup> tentang, *“Kewenangan penyelenggaraan politik luar negeri republik indonesia berada di tangan presiden sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan dari dewan perwakilan rakyat”*.<sup>381</sup> DPR RI harus memikirkan dengan matang terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk meratifikasi AATHP karena di dalam perjanjian tersebut terdapat konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia setelah meratifikasinya. Sementara itu, kondisi domestik yang belum memungkinkan, hingga kebijakan yang masih carut marut terkait pengelolaan hutan dan lahan menjadi alasan khusus bagi pemerintah Indonesia untuk menahan proses ratifikasi

---

380

381 UUD REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI, <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/FullText/1999/37TAHUN1999UU.htm#:~:text=Kewenangan%20penyelenggaraan%20Hubungan%20Luar%20Negeri,diperlukan%20persetujuan%20Dewan%20Perwakilan%20Rakyat.>

perjanjian tersebut.<sup>382</sup> Kemudian pada 2014, Indonesia berhasil meratifikasi AATHP dan mengubah kebijakannya. Perubahan yang dilakukan oleh Indonesia tersebut tidak sekadar karena pemerintah telah siap dengan konsekuensi dari perjanjian AATHP. Melainkan terdapat berbagai macam faktor yang mendorong pemerintah untuk segera meratifikasi, baik dorongan internal seperti keikutsertaan aktor swasta, pemangku kepentingan, serta aktor individu dalam pemerintahan. AATHP yang telah diratifikasi melalui UU No. 26 tahun 2014 berhasil menjadi hukum positif di Indonesia. Implikasi hukum setelah ratifikasi yaitu Indonesia harus semakin konsisten menegakkan hukum domestik kepada pihak-pihak yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Faktor alam memang sulit untuk dihindari, namun faktor manusia sangat mungkin untuk ditindak tegas. Individu atau pihak yang melakukan pembakaran hutan secara sengaja harus diproses secara hukum. Seperti contoh, perusahaan-perusahaan yang nakal akan dikenai sanksi hukum berupa hak gunanya diberhentikan maupun dibekukan.

### **3. Kerja Sama Indonesia dan Malaysia sebelum AATHP**

Indonesia dengan Malaysia telah menjalin kerja sama yang erat dalam upayanya menangani kebakaran hutan dan lahan, terutama mengingat dampak serius yang diakibatkan oleh kebakaran di Indonesia pada 1997, seperti kabut asap lintas batas. Sebelum Indonesia meratifikasi ASEAN

---

<sup>382</sup> Ibid, Januar Aden Nugroho, "Analisis Perubahan Kebijakan Indonesia Terhadap Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution", *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 4, 2018. Halaman 693-702

*Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)* pada 2014, Indonesia dan Malaysia telah melakukan berbagai upaya kolaboratif untuk menangani permasalahan ini. Malaysia yang juga terdampak oleh polusi asap dari kebakaran di Indonesia ini telah turut berperan aktif dalam mendukung Indonesia melalui berbagai inisiatif, termasuk pelatihan dan pengembangan kapasitas. Melalui dialog dan kerja sama bilateral, Indonesia dan Malaysia berupaya untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan efektif dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang pada akhirnya mendorong Indonesia untuk meratifikasi AATHP sebagai langkah penting dalam komitmen regional terhadap perlindungan lingkungan.<sup>383</sup>

ASEAN dibentuk dengan tujuan untuk mempererat kerja sama antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut didasari pada semangat kesetaraan dan kemitraan, yang artinya setiap negara anggota dianggap setara dan saling kerja sama tanpa saling mendominasi. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk menciptakan kawasan yang damai, sejahtera, serta stabil. Dengan saling membangun hubungan yang harmonis, negara-negara anggota ASEAN berharap dapat mencapai kemajuan bersama dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Kesepakatan

---

<sup>383</sup> Afni, "MOTIVASI INDONESIA MERATIFIKASI PERJANJIAN ASAP LINTAS "ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION" TAHUN 2014", Jom FISIP Volume 2 No.2 (Oktober 2015)

Kuala Lumpur mengenai Lingkungan dan Pembangunan yang diadopsi oleh para Menteri Lingkungan ASEAN pada 19 Juni 1990, menyerukan bahwa upaya-upaya menuju harmonisasi pencegahan pencemaran udara lintas batas dan praktik pengurangan kabut asap akibat dari pembakaran hutan dan lahan.<sup>384</sup> Komite Menteri Pengarah Sub-Regional atau *Sub-Regional Ministerial Steering Committee* (MSC) terkait polusi kabut asap lintas batas telah dibentuk pada tahun 2006 untuk mengawasi pelaksanaan upaya-upaya jangka pendek dan jangka panjang guna mengatasi polusi kabut asap lintas batas di bagian selatan kawasan Asia Tenggara. MSC yang terdiri dari menteri lingkungan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Singapura ini melaksanakan pertemuan pertamanya pada November 2006 di Cebu Filipina berhasil mengesahkan komprehensif rencana aksi Indonesia atau *Plan of Action* (PoA) dalam menyepakati terkait polusi udara lintas batas. *Plan of Action* ini menguraikan upaya dan langkah khusus pada pencegahan, pengawasan, pemadaman, peringatan dini, serta pemantauan melalui bantuan daerah maupun kolaborasi internasional. Indonesia mengalokasikan sumber dayanya untuk mengimplementasikan *Plan of Action* dan menargetkan untuk mengurangi jumlah titik api sebesar 50% pada 2009, 75% pada 2012, dan 95% pada 2025.<sup>385</sup>

---

<sup>384</sup> ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: Haze Pollution, diakses dari ([https://haze.asean.org/?wpfb\\_dl=32](https://haze.asean.org/?wpfb_dl=32)) diakses pada 20 Oktober 2024

<sup>385</sup> Malaysia – Indonesia Collaboration: In Preventive Measures to Deal with Land and Forest Fires in the Riau Province, Sumatera Republic of Indonesia, (<http://haze.asean.org/wpcontent/uploads/2013/06/ind-mal.pdf>). Diakses pada 21 Oktober 2024

Upaya Malaysia dalam mendukung Indonesia mengimplementasikan *Plan of Action* adalah dengan menjalin kerja sama bilateral dengan Indonesia, khususnya dalam peningkatan kapasitas mempraktekkan *zero burning technique* (pembukaan lahan tanpa membakar) untuk membersihkan tanah.

Bentuk upaya kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia dilakukan guna untuk menangani kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang merugikan pariwisata, perekonomian, dan kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, termasuk faktor alam dan manusia. Seperti faktor manusia yang disebabkan oleh ulah perusahaan asing yang membakar hutan dan lahan untuk keperluan perkebunan. Dengan membakar hutan maka akan lebih menghemat biaya untuk membuka lahan perkebunan yang baru dibandingkan menyewa alat untuk membuka lahan. Kabut asap lintas batas yang disebabkan oleh hal tersebut, khususnya kebakaran di Riau, telah mengakibatkan Malaysia sangat merugi karena kabut asap lintas batas tersebut mengganggu perekonomian, pariwisata, dan juga kesehatan.<sup>386</sup> Menyadari bahwa dengan saling menyalahkan tidak akan membuat masalah kabut asap terselesaikan, kemudian Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk menjalin kerja sama untuk menanggapi kasus ini.

---

<sup>386</sup> Muhammad Azan, "KERJASAMA INDONESIA - MALAYSIA DALAM MENANGANI TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (STUDY KASUS: PROVINSI RIAU) TAHUN 2008", *Jom FISIP* Volume 1 No.2 (Oktober 2014) Halaman 5

Permasalahan terkait kabut asap di Indonesia bukanlah isu baru, di mana hal tersebut telah terjadi sejak tahun 1982. Namun, kabut asap yang paling parah terjadi pada 1997 yang melintasi hingga ke Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Isu kabut asap ini cenderung melintasi batas negara Malaysia setiap tahunnya, sejak 1997 hingga 2006. Menanggapi hal tersebut, Indonesia dan Malaysia melakukan *first track diplomacy* dalam bentuk diplomasi bilateral. Diplomasi yang dilakukan antara kedua negara adalah dengan melakukan patroli udara dan memberi peringatan kepada masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar rumah.<sup>387</sup> Kemudian diplomasi tersebut menunjukkan perkembangan berupa perjanjian bilateral yang menghasilkan MoU terkait penanggulangan bersama kabut asap.<sup>388</sup> MoU tersebut mengandung ketentuan pembukaan lahan tanpa membakar atau *zero burning*, pemantauan, pencegahan yang dilakukan melalui pengolahan lahan gambut secara berkelanjutan (*peatland management*), pemadaman, pengembangan sistem peringatan dini, penegakan hukum, peningkatan kerja sama, mempersiapkan sukarelawan petugas kebakaran, serta tenaga medis. Kemudian *second track diplomacy* telah dilakukan sejak 1998 oleh beberapa NGO (*Non-Governmental Organization*), seperti CIFOR (*Centre for International Forestry Research*), Greenpeace, dan WWF (*World Wide Fund*), WWF (*World Wide Fun for Nature*), dan GEC (*Global*

---

387 "Environment Aspect", <http://www.american.edu/ted/ice/kaliman.htm>. Diakses pada 23 Oktober 2024

388 Mohd Shahwahid H.O, "World Conference on Land and Forest Fire Hazard 2002", Putra World Trade Centre: Malaysia, 2002. Halaman 331

*Environment Centre*).<sup>389</sup> NGO tersebut membantu *first track diplomacy* dalam mewujudkan negosiasi berupa mencegah kabut asap melintasi batas negara, memberikan informasi penyebab dan dampak kerugian kabut asap, melakukan kerja sama teknis, serta penelitian ilmiah.

Kerja sama bilateral yang dilakukan Malaysia dengan Indonesia ditandatangani pada 3 Juni 2008 di Jakarta. Kerja sama tersebut membahas terkait beberapa bidang kegiatan yang dilakukan, seperti:

- a. Pencegahan kebakaran dengan sosialisasi sebagai fokus utamanya
- b. Peningkatan kapasitas bagi petani, perusahaan, pemegang konsesi, dan juga masyarakat
- c. Proyek perintis terkait teknik *zero burning*
- d. Rehabilitasi lahan gambut yang rusak
- e. Peringatan dini dan pemantauan<sup>390</sup>

Terdapat beberapa program yang berhasil dilaksanakan, yaitu seperti:<sup>391</sup>

- a. Pelatihan Lokakarya Teknik *Zero Burning* untuk tokoh masyarakat dan petani dari Kabupaten Rokan Hilir, Riau pada 14-17 Juli 2008 di Sepang, Selangor,

---

<sup>389</sup> Malaysian Enviromental NGOs, <http://www.mengo.org/index2.shtml>, diakses pada 23 Oktober 2024

<sup>390</sup> Malaysia – Indonesia Collaboration: In Preventive Measures to Deal with Land and Forest Fires in the Riau Province, Sumatera Republic of Indonesia, diakses dari: (<http://haze.asean.org/wpcontent/uploads/2013/06/ind-mal.pdf>). Diakses pada 23 Oktober 2024

<sup>391</sup> Ibid

Malaysia. 27 peserta dari Indonesia menghadiri sesi pelatihan yang diresmikan oleh Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Malaysia pada 14 Juli 2008. Pelatihan tersebut didasari oleh UU pembakaran terbuka dan penegakan hukum, di mana teknik *zero burning* dalam praktek pertanian dan berkelanjutan pengelolaan lahan gambut disampaikan oleh para ahli dari Departemen Lingkungan Hidup, Departemen Pertanian, Departemen Drainase dan Irigasi, serta GEC atau *Global Environment Centre*.<sup>392</sup> Kemudian peserta diarahkan untuk menyaksikan praktek *zero burning* dalam pertanian di Taman Agrotek, Sepang, Selangor. Teknik tersebut merupakan sebuah metode dari pembukaan lahan, baik bekas tebang hutan sekunder ataupun daerah pepohonan perkebunan lama, seperti kelapa sawit ditebang, diparut, ditumpuk, dan dibiarkan agar dapat terurai secara alami.

- 1) Keuntungan teknik *zero burning*  
Pendekatannya ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi udara sehingga teknik *zero burning* ini mengurangi emisi gas rumah kaca khususnya CO<sub>2</sub>. Melalui *recycle* biomassa tanaman, teknik ini meningkatkan bahan organik

---

<sup>392</sup> Ibid, Muhammad Azan, "KERJASAMA INDONESIA – MALAYSIA DALAM MENANGANI TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (STUDY KASUS: PROVINSI RIAU) TAHUN 2008", Jom FISIP Volume 1 No.2 (Oktober 2014) Halaman 7

tanah, retensi air, dan kesuburan tanah, khususnya di daerah yang ditanami lebih dari satu generasi tanaman perkebunan dan mengurangi kebutuhan keseluruhan untuk pupuk anorganik, serta meminimalisir resiko pencemaran air yang disebabkan oleh pencucian permukaan nutrisi.<sup>393</sup> Kemudian manfaat agronomi dapat ditingkatkan ketika bibit kelapa sawit yang ditanam langsung diatas tumpukan residu, bukan di tanah yang gundul. Melalui penerapan teknik ini, kandungan total nitrogen, kalium, dan magnesium dalam tanah dapat meningkat secara signifikan. Selain itu juga memungkinkan pelepasan nutrisi berlangsung secara bertahap dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dengan begitu, tanaman dapat menyerap unsur hara lebih efisien dan berkelanjutan, sehingga mendukung pertumbuhan yang optimal dan hasil yang lebih baik.

- b. Pelatihan penanggulangan api untuk masyarakat peduli api di Provinsi Riau, dengan 28 peserta asal Indonesia menghadiri sesi pelatihan yang dilaksanakan oleh pelatih Akademi Kebakaran

---

<sup>393</sup> Herdito Ajis dalam artikel Mertani, <https://www.mertani.co.id/post/peran-biomassa-dalam-meningkatkan-ketersediaan-nutrisi-tanah>

- Malaysia. Pelatihan ini dilakukan di daerah lahan gambut di Bestari Jaya, Selangor, Malaysia.
- c. Pemasangan stasiun pemantauan kualitas udara di Bagan Siapi-api, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian pada Mei 2009, stasiun pemantauan kualitas udara tersebut kurang dari 10 mikron dalam diameter PM10 telah berhasil dipasang dan ditugaskan di Bagan Siapi-api, Kabupaten Rokan Hilir sebagai sistem peringatan dini guna mendeteksi kabut. Pada 8 Agustus 2009 dilaksanakannya sebuah serah terima stasiun pemantauan kualitas udara oleh Rachmat Witoelar, Menteri Lingkungan Hidup Indonesia atas nama Republik Indonesia.<sup>394</sup>
  - d. Proyek pencegahan kebakaran dan kabut asap lintas batas ini dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi dan peningkatan pengelolaan lahan gambut di 5 desa Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk LSM Malaysia, yaitu *Global Environment Center* (GEC) sebagai fasilitator teknologi dan mitra lokal, serta Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau) yang berperan dalam penguatan kapasitas masyarakat. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi resiko kebakaran lahan gambut dengan mendorong tindakan nyata berbasis masyarakat yang

---

<sup>394</sup> Ibid, Malaysia – Indonesia Collaboration: In Preventive Measures to Deal with Land and Forest Fires in the Riau Province, Sumatera Republic of Indonesia, (<http://haze.asean.org/wpcontent/uploads/2013/06/ind-mal.pdf>). Diakses pada 21 Oktober 2024

melibatkan sektor swasta dan pemerintah daerah, sehingga terciptanya pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan tahan terhadap potensi kebakaran. Dalam singkat waktu, proyek tersebut berhasil mencapai serangkaian hasil dengan memberikan pelatihan untuk pemerintah dan staf lembaga, mengorganisir dialog dan sosialisasi dengan warga lokal dalam pengelolaan lahan gambut berkelanjutan, membangun saluran untuk memblokir aliran di 5 desa, yaitu Desa Bantayan Baru, Desa Bantayan Hilir dan Desa Bantayan Induk di Batu Hampar Kecamatan, Desa Mamuju dan Desa Rantau Bais di Tanah Putih Kecamatan, dan juga menjelajahi pilihan untuk mata pencaharian alternatif dengan masyarakat setempat.<sup>395</sup> Pencapaian yang paling signifikan dari proyek ini adalah memperkenalkan konsep kanal *blocking*, membangun 15 sumur di Desa Mamuju, pengorganisasian warga lokal guna melakukan patroli kebakaran, serta pengembangan kemitraan dengan pemerintah setempat sektor swasta untuk pencegahan kebakaran.

#### 4. Efektifkah AATHP?

Ratifikasi Indonesia terhadap AATHP merupakan langkah baru bagi pemerintah untuk lebih proaktif dalam menangani masalah kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan. Dalam perspektif liberalisme, keputusan

---

<sup>395</sup> Ibid

suatu negara untuk meratifikasi perjanjian internasional dipengaruhi oleh berbagai aktor domestik, seperti pemangku kepentingan, kelompok swasta, dan individu. Aktor-aktor tersebut memainkan peranan penting dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional. Kemudian ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* kurang efektif dalam menangani masalah polusi asap lintas batas. Dampak yang ditimbulkan dinilai sangat kompleks. Penulis menilai bahwa ASEAN Way menjadi salah satu penghambat untuk menuju efektifitas dari pada AATHP itu sendiri.

Beberapa alasan mengapa AATHP tidaklah efektif dalam menangani permasalahan kabut asap lintas batas yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia,

1. Alasan yang pertama adalah munculnya prinsip non-intervensi yang terdapat dalam ASEAN Way. Dengan adanya prinsip tersebut kemudian menghasilkan pertanyaan terkait ratifikasi negara anggota terhadap AATHP. Hal tersebut dibuktikan dengan ketidakmampuannya ASEAN untuk mengintervensi atau membuat negara anggotanya meratifikasi AATHP dengan lebih cepat setelah penandatanganan perjanjian tersebut, karena masalah kabut asap lintas batas terus terjadi hampir setiap tahunnya.<sup>396</sup> Begitu pula dengan Malaysia yang pada saat pertama kali meratifikasi AATHP, tidak dapat memaksa Indonesia untuk segera meratifikasi perjanjian tersebut, mengingat Indonesia sebagai

---

<sup>396</sup> Florano, E. R., 2004. "Assesment of the "Strengths of the new ASEAN agreement on transboundary haze pollution", *International Review for Environmental Strategies*, 4(1). Halaman 127-147

kontributor terbesar polusi asap lintas batas yang melanda kawasan Asia Tenggara.

2. Alasan kedua masih tentang prinsip non-intervensi yang ada dalam ASEAN Way yang melihat fakta bahwa negara akan lebih mengutamakan sektor ekonominya masing-masing. Kemudian tidak heran bahwa pembakaran hutan untuk alasan penanaman sawit dan pengembangan ekonomi masih terus berlanjut. Dalam hal tersebut ASEAN dan negara anggota tidak dapat mencampuri urusan negara anggota lain.<sup>397</sup> Hal tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya larangan akan secara langsung melanggar kedaulatan negara sesuai dengan prinsip kedaulatan dari ASEAN Way itu sendiri.
3. Alasan ketiga yaitu cara pengambilan keputusan yang berdasarkan konsensus. Meskipun AATHP telah berhasil dirumuskan dan diratifikasi oleh sebagian besar anggota ASEAN, pendekatan konsensus ini akan sangat memungkinkan setiap negara, termasuk pemerintah Indonesia untuk mengecualikan isu-isu yang dianggap sangat sensitif secara politis agar tidak didiskusikan di forum ASEAN berkolerasi dengan kepatuhannya terhadap AATHP. Hal tersebut seringkali menghambat pembahasan mendalam atau penindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran karena tidak ada satu negara pun yang dapat dipaksa untuk membahas atau menerima

---

<sup>397</sup> Nguitragool, P., 2011. "Negotiating the haze treaty", Asian Survey, 51(2). Halaman 356-378.

keputusan yang bertentangan dengan kepentingan domestiknya.<sup>398</sup>

4. Dari alasan ketiga, munculah alasan keempat yakni minimnya komitmen dari negara anggota yang dikarenakan AATHP sebagai perjanjian yang mengikat namun dengan tidak adanya instrumen yang kuat maka mekanisme pengaplikasian pun cenderung lemah. Hal tersebut berarti bahwa tidak ada yang dapat menjamin komitmen dan ketaatan negara anggota terhadap AATHP dan segala peraturannya. Dalam AATHP sendiri tidak ada sebuah regulasi yang dapat membuat negara anggota untuk dapat terus menjalankan komitmennya. AATHP sendiri tidak memiliki hukuman atau sanksi terhadap negara anggota yang melanggar serta negara anggota yang tidak berkomitmen atau mencederai perjanjian tersebut.<sup>399</sup> AATHP dinilai tidak tegas yang kemudian menjadi titik kelemahan sehingga menjadi hambatan menuju efektifitasnya.
5. Alasan kelima yaitu tidak adanya regulasi yang jelas dan spesifik untuk mengatasi akar penyebab kabut asap lintas batas. AATHP mengatur kewajiban negara anggotanya untuk melakukan penelitian terkait penyebab polusi kabut lintas batas, namun tidak secara eksplisit menjabarkan faktor-faktor struktural seperti,

---

<sup>398</sup> Ibid

<sup>399</sup> Ghani, "REVIEW ON ASEAN TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION AGREEMENT 2002: PROBLEMS AND SOLUTIONS", Volume: Journal of Humanities, Language, Culture and Business (HLCB) Vol. 1: no. 1 (2017) page 153-161

pengelolaan sumber daya alam yang tidak sehat, konflik kepemilikan lahan, dan tekanan agribisnis yang secara empiris menjadi penyebab utama kebakaran dan kabut asap.<sup>400</sup> Misalnya, masyarakat tanpa teknologi yang cukup untuk mengelola lahan akan lebih memilih untuk membakar hutan dan lahan sebelum menanam tanaman yang diinginkan.

6. Alasan keenam, tidak adanya peraturan yang jelas, spesifik, dan tegas bagi negara anggota untuk mengatur pihak swasta yang terlibat dalam pembukaan lahan dengan cara pembakaran, di mana AATHP menyerahkan masalah tersebut untuk ditindak secara nasional.<sup>401</sup> Berangkat dari hal tersebut, organisasi regional, khususnya ASEAN, tidak dapat memastikan bahwa masalah yang mendasari pihak swasta melakukan pembakaran tersebut ditangani dengan benar dan tidak dapat dipungkiri bahwa pihak swasta sebagai aktor yang mampu memodifikasi pihak yang seharusnya menjadi penegak hukum terkait dengan pembakaran hutan yang dilakukannya.
7. Alasan terakhir, AATHP ini tidak dapat mengatur tindakan negara sepenuhnya dikarenakan setiap negara anggota memiliki otoritasnya sendiri yang bebas, tidak

---

<sup>400</sup> Florano, E. R., 2004. "Assesment of the "Strengths of the new ASEAN agreement on transboundary haze pollution", *International Review for Environmental Strategies*, 4(1), 127-147

<sup>401</sup> Jones, D. S., 2006. "ASEAN and Transboundary Haze Pollution in Southeast Asia", *Asia Europa Journal*, 4(3).

dapat diintervensi, dan memiliki kedaulatan negara yang kuat. Kemudian, kekuatan otoritas sendiri dan prinsip non-intervensi tersebut diperkuat oleh ASEAN itu sendiri yang tercantum dalam ASEAN Way. Berdasarkan hal tersebut AATHP tidak menjadi suatu aturan yang benar-benar mengatur secara tegas bahkan tidak menjadi sebuah rezim atas penanggulangan polusi kabut asap yang melanda kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, dapat dilihat bahwa AATHP tidaklah efektif dalam menyelesaikan permasalahan polusi kabut asap lintas batas yang ada di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian kabut asap tersebut bukan hanya sekedar masalah pemberlakuan sebuah perjanjian, namun regulasi untuk secara intensif mematuhi perjanjian dalam penegakan aturan yang dinilai cukup ketat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya kehadiran ASEAN Way digunakan untuk melawan ASEAN itu sendiri, terutama untuk melawan AATHP.

### **C. Kesimpulan**

Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Indonesia hampir setiap tahunnya. Kebakaran tersebut tentu akan menghasilkan efek samping berupa asap yang melintasi batas negara, yang kemudian zat-zat berbahaya tersebut akan

sangat merugikan masyarakat dan mengganggu kesehatan, ekonomi, dan hubungan diplomatik di kawasan. Berbagai upaya dan kerja sama internasional telah dijalin untuk membantu Indonesia dalam menangani permasalahan kabut asap, termasuk ASEAN. Dengan adanya AATHP (*ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*) menggambarkan bahwa ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara telah mengupayakan untuk menangani masalah yang menghasilkan instabilitas di kawasannya, terutama dalam bidang lingkungan. Perjanjian tersebut ditujukan untuk mengurangi, mengawasi, serta mencegah polusi kabut asap lintas batas. Regionalisme ASEAN berperan penting dalam mengkorelasikan negara anggota dengan sistem internasional secara efektif. Maka dari itu, ASEAN berkontribusi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan harapan mampu mengurangi dampak negatif dari permasalahan tersebut melalui *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Namun dalam pengimplementasiannya, AATHP menghadapi keterbatasan efektivitas karena adanya prinsip non-intervensi ASEAN yang membatasi campur tangan dalam urusan domestik negara-negara anggota. Selain itu, kurangnya instrumen hukum yang mengikat serta ketidakjelasan regulasi untuk mengontrol aktor swasta yang

terlibat dalam masalah pembakaran hutan dan lahan semakin memperburuk situasi.

---

## Daftar Pustaka

Syefira Citra, "My Baby Tree", WWF Indonesia, diakses pada [https://www.wwf.or.id/cara\\_anda\\_membantu/bertindak\\_sekarang\\_juga/mybabytree/](https://www.wwf.or.id/cara_anda_membantu/bertindak_sekarang_juga/mybabytree/)

Tasya, "Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ungkap Rumitnya Masalah Hutan Indonesia", dalam berita fakultas di UGM (<https://ugm.ac.id/id/berita/kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-ungkap-rumitnya-masalah-hutan-indonesia/#:~:text=Data%20Kementerian%20Lingkungan%20Hidup%20dan,dari%20total%20luas%20daratan%20Indonesia.>)

Samsuari, "Kehutanan Indonesia", WWF Indonesia, diakses pada [https://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/upaya\\_kami/forest\\_spesies/tentang\\_forest\\_spesies/kehutanan/](https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/)

Anonim, "Krisis Kebakaran dan Asap Indonesia", World Bank News, [www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/in-donesias-fire-and-haze-crisis](http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/in-donesias-fire-and-haze-crisis)

- Tim Forsyth, "Public Concerns about Transboundary Haze : a Comparison of Indonesia, Singapore, and Malaysia". Global Environmental Change, 2014. Halaman 76
- Syamsul Maarif, "Menuju Indonesia bebas Asap", 2008, diakses dari <http://www.setneg.go.id> Website Resmi Sekretarian Indonesia
- David Glover, Timothy Jessup, ed, "Indonesia Fires and Haze", The Cost Of Catastrophe( Singapore, Institute Of Southeast Asian Studies, 2006). Halaman 8
- Euston Quah, "Transboundary Pollution in Southeast Asia : The Indonesian Fires", World Development, Vol 30, No 3, 2002, [http://dx.doi.org/10.1016/S305-750X\(01\)00122-X](http://dx.doi.org/10.1016/S305-750X(01)00122-X)
- A.K.J Tan, "The Haze Crisis in Southeast Asia: Assessing Singapore's Transboundary Haze Pollution Act", National University Of Singapore Working Paper, 2015
- Sidiq Ahmadi, "Prinsip Non-Interference Asean dan Problem Efektivitas Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution", Jurnal Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah, Vol 1, No 2, 2012
- Nazia Nazeer, "Overview of ASEAN Environment, Transboundary Haze Pollution Agreement And Public Health", International Journal Of Asia Pacific Studies, Vol 13, No 1, 2017. Halaman 76
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen luar Negeri RI, "Peningkatan Kerjasama ASEAN di Bidang

- Pertukaran Informasi dalam upaya Penanggulangan Masalah Kabut Asap,” Jakarta: Deplu, 2004. Halaman 3
- ASEAN Agreement on transboundary Haze Pollution. ([http://www.aseansec.org/pdf/agr\\_haze.pdf](http://www.aseansec.org/pdf/agr_haze.pdf))
- Januar Aden Nugroho, “Analisis Perubahan Kebijakan Indonesia Terhadap Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution”, *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 4, 2018, Halaman 693-702
- Rowell, A. dan Moore, P.F., “Global Review of Forest Fires”, WWF; IUCN, Gland, 2001.
- Badan Pusat Statistik, “Statistik Lingkungan Hidup Indonesia”, Badan Pusat Statistik, Indonesia: 2018. Halaman 3
- Glover, D. dan Jessup, T. eds. “The Indonesian Fires and Haze Of 1997: The Economic Toll”, Dalam: P. Eaton dan M. Radojevic eds. *Forest Fires and Regional Haze in Southeast Asia*, Halaman 227-236
- Akhyari Hananto, “El Nino Datang, Indonesia Berisiko Alami Kebakaran Hutan Hebat”, diakses pada <https://www.mongabay.co.id/2015/07/06/el-nino-datang-indonesia-berisiko-alami-kebakaran-hutan-hebat/>
- Afid Nurkholis, dkk, “Analisis Temporal Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 1997 dan 2015(Studi Kasus Provinsi Riau)”, 16 Juni 2016. <http://doi.org/10.17605/OSF.IO/CMZUF>

- Luca Tacconi, “Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya, dan Implikasi Kebijakan”, Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia, 2003. Halaman 11
- Muhammad Suryadi, “Upaya Penanganan Kejahatan Lingkungan Pembakaran Hutan dan Lahan Gambut di Sumatera 2004-2015”, Journal of International Relations UNDIP Vol. 3 No. 2, 2017
- Ligar Yogaswara, “ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: Effective?”, Jurnal Hubungan Internasional Tahun XIV, No. 1, Januari - Juni 2021. Halaman 178
- Yahaya, N., “Transboundary Air Pollution: Haze Pollution in Southeast Asia and its Significance”, Journal of Diplomacy and Foreign Relations, 2(2), 2000. Halaman 41-50
- Ditjen Migas, “Mengenal Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional” (2019), <https://migas.esdm.go.id/post/read/mengenal-proses-ratifikasi-perjanjian-internasional>
- ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: Haze Pollution, diakses dari ([https://haze.asean.org/?wpfb\\_dl=32](https://haze.asean.org/?wpfb_dl=32))
- Malaysia – Indonesia Collaboration: In Preventive Measures to Deal with Land and Forest Fires in the Riau Province, Sumatera Republic of Indonesia,

- (<http://haze.asean.org/wpcontent/uploads/2013/06/ind-mal.pdf>).
- “Environment Aspect”,  
<http://www.american.edu/ted/ice/kaliman.htm>.
- Mohd Shahwahid H.O, “World Conference on Land and Forest Fire Hazard 2002”, Putra World Trade Centre: Malaysia, 2002. Halaman 331
- Malaysian Environmental NGOs,  
<http://www.mengo.org/index2.shtml>
- Malaysia – Indonesia Collaboration: In Preventive Measures to Deal with Land and Forest Fires in the Riau Province, Sumatera Republic of Indonesia, diakses dari:  
 (<http://haze.asean.org/wpcontent/uploads/2013/06/ind-mal.pdf>).
- Malaysia – Indonesia Collaboration: In Preventive Measures to Deal with Land and Forest Fires in the Riau Province, Sumatera Republic of Indonesia, diakses dari  
<http://haze.asean.org/wpcontent/uploads/2013/06/ind-mal.pdf>
- Florano, E. R., 2004. “Assesment of the “Strengths of the new ASEAN agreement on transboundary haze pollution”, International Review for Environmental Strategies, 4(1). Halaman 127-147
- Nguitragool, P., 2011. “Negotiating the haze treaty”, Asian Survey, 51(2). Halaman 356-378.
- Jones, D. S., 2006. “ASEAN and Transboundary Haze Pollution in Southeast Asia”, Asia Europa Journal, 4(3).

# TENTANG PENULIS



**Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int.** lahir di Malang pada tahun 1991. Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP.) Program Studi Hubungan Internasional dari Universitas Brawijaya pada tahun 2013 dan gelar Magister Hubungan Internasional (M.Hub.Int.) dari Universitas Airlangga pada tahun 2017. Saat ini mengajar sebagai dosen Program Studi Hubungan Internasional di UIN Sunan Ampel Surabaya. Minat penelitian: Hubungan Internasional, Politik Luar Negeri Indonesia dan Keamanan Non-Tradisional.

# TENTANG PENULIS



**Rifati Khoridatin Nabila** adalah mahasiswa semester akhir Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pengalaman akademik mencakup penelitian kelompok tentang strategi diplomasi digital untuk promosi ekspor produk lokal yang memperkuat pemahaman tentang diplomasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan internasional. Selain itu, partisipasinya dalam Model United Nations (MUN) sebagai delegasi negara memberikan pengalaman langsung dalam diplomasi, negosiasi multilateral, dan pengambilan keputusan strategis. Di luar akademik, memiliki pengalaman sebagai relawan di program sosial yang berfokus pada pendidikan, pengembangan masyarakat, dan aksi kemanusiaan yang membantu mengasah keterampilan komunikasi antarbudaya, kerja sama tim, dan manajemen waktu. Dengan latar belakang ini, diharapkan dapat menjadi dasar untuk terus berkontribusi dalam menghadapi tantangan global di bidang Hubungan Internasional.

# TENTANG PENULIS



**Dewinta Zahwa Nabila** merupakan seorang mahasiswi Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pada tahun 2023, ia mendapatkan beasiswa MOSMA dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melakukan

kegiatan pertukaran pelajar di SUNY Buffalo State University selama satu semester untuk memperluas wawasan akademik dan kebudayaan saya. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan, seperti berpartisipasi dalam Saturday SUNY MEU (Model European Union) di SUNY at Fredonia pada 2023 dan UINSA International Community Engagement di Thailand pada tahun 2024. Dewinta Zahwa Nabila memiliki minat dalam bidang diplomasi dan kebijakan luar negeri.

# TENTANG PENULIS

**Arfiansyah Putra Pradana Hadi** adalah Mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Saat ini tengah menempuh Pendidikan Sarjana, Ia memiliki minat pada dinamika dunia baik internasional maupun nasional.

## TENTANG PENULIS



Bernama lengkap **Rizka Indah Setyohadi**, lahir di Surabaya pada tanggal 20 Februari 2003, yang merupakan lulusan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan program studi Hubungan Internasional. Ketertarikan saya pada interaksi lintas budaya menjadi motivasi utama dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul "Strategi Gastrodiplomasi Indonesia dalam Mempromosikan Kopi Indonesia di Mesir Tahun 2021-2023"

# TENTANG PENULIS



**Rizki Rahmadini Nurika, M.A.** bercita-cita menjadi dosen sejak duduk di bangku Sekolah Dasar. Saat menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama, telah memantapkan hatinya untuk menempuh pendidikan pada program studi Ilmu Hubungan Internasional. Telah

mendapatkan gelar Sarjana Hubungan Internasional (S.Hub.Int.) dari Universitas Airlangga pada 2012, dan Magister Hubungan Internasional (M.A.) dari Universitas Gadjah Mada pada 2015. Saat ini menjadi Kaprodi Hubungan Internasional di UIN Sunan Ampel Surabaya. Minat penelitian: Hubungan Internasional, Diplomasi, Ekonomi Politik Internasional, Konflik dan Perdamaian, serta Resolusi Konflik.

# TENTANG PENULIS



**Wingga Dwi Setia** adalah mahasiswa Program studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, ia memiliki minat pada isu politik luar negeri dan kemanusiaan. Beberapa tulisan yang dibuat oleh penulis selama menempuh pendidikan banyak mengambil isu politik serta kebijakan luar negeri.

# TENTANG PENULIS

Saya adalah seorang mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan minat utama pada diplomasi dan kerja sama internasional. Selama masa studi, saya aktif terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan organisasi mahasiswa, dengan fokus utama pada isu-isu global yang signifikan, seperti perubahan iklim dan keamanan internasional. Keterlibatan ini tidak hanya memperluas wawasan saya tentang tantangan global, tetapi juga memungkinkan saya untuk berkontribusi dalam diskusi serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dunia saat ini. Saya berkomitmen untuk mengembangkan wawasan akademik sekaligus memberikan kontribusi nyata melalui karya ilmiah dan aktivitas lintas budaya. Penelitian dan tulisan saya mencerminkan semangat untuk mendalami teori dan praktik Hubungan Internasional demi mendorong solusi bagi tantangan global.

# TENTANG PENULIS



**Aura Putri Oktasafea**, lahir di Surabaya pada 9 Oktober 2002. Saat ini sedang menempuh studi strata satu di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Sebagai mahasiswa semester 7, sedang aktif dalam penyusunan tugas akhir.

Minat yang kuat dalam bidang kebijakan luar negeri dan kerja sama internasional telah mendorong penulis untuk aktif berkontribusi dalam organisasi kemahasiswaan. Sejak tahun 2022, penulis menjadi anggota aktif SUPERMUN CLUB, sebuah organisasi yang fokus pada simulasi model Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengalaman mengikuti berbagai simulasi MUN telah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika.

# TENTANG PENULIS



Halo! Saya **Dhanisa Putri Maharani** yang akrab disapa Danis, lahir di Sidoarjo pada 30 Juni 2002. Saat ini saya adalah mahasiswa aktif program Sarjana (S1) Hubungan Internasional di UIN Sunan Ampel Surabaya. Ketertarikan saya berfokus pada isu kerja sama regional, diplomasi lingkungan, serta keamanan non-tradisional, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan bencana lintas batas seperti kabut asap. Selama masa studi, saya aktif dalam kegiatan akademik dan organisasi, termasuk terlibat dalam simulasi MUN, seminar nasional tentang lingkungan, dan beberapa forum diplomasi mahasiswa. Pengalaman paling berkesan saya adalah menjadi delegasi dalam simulasi sidang internasional tingkat ASEAN yang membahas isu kerja sama penanganan bencana lintas negara. Saya percaya bahwa diplomasi yang efektif tidak hanya dibangun di meja perundingan, namun juga melalui pemahaman terhadap isu-isu global yang berdampak nyata bagi masyarakat.